Munandar Nugraha

CUMA

Catatan Kaderisasi

Kata Pengantar :
KH. As'ad Said Ali
Abdul Muhaimin Iskandar

CUMA CATATAN KADERISASI PMII

Periode 2014-2016

Munandar Nugraha

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang tidak terhitung, semoga kita terus bisa mensyukurinya, baik dalam keadaan luang ataupun sempit. Shalawat serta Salam kepada Rasulullah SAW (*Allahumma Solli ala Sayyidinna Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad!!!*), semoga dapat terus kita lafalkan dan dapat terus kita dzikirkan dalam keseharian kita. Semoga Allah meridhoi kita, untuk dapat menyempurnakan rukun Islam kita bersama keluarga tercinta, bersama sahabat dan saudara kita sekalian, sehingga kita dapat berhaji dan berziarah ke makam Rasulullah SAW.

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Kaderisasi yang kita jalani hari ini, bukan hanya sekedar menjadi prasyarat untuk menjadi pengurus di PMII yang berjenjang dengan level struktur di organisasi kita, untuk menjadi Pengurus Rayon (PR), menjadi Pengurus Komisariat (PK), menjadi Pengurus Cabang (PC), menjadi Pengurus Koordinator Cabang (PKC) dan untuk menjadi Pengurus Besar (PB). Itu semua hanyalah capaian antara. Kaderisasi PMII bukan hanya untuk jamaah dan jamiyyah NU (mempersiapkan kepemimpinan di GP Ansor, Fatayat, NU, Muslimat dan pos-pos kepemimpinan nasional di negeri ini), tidak hanya itu.

Kaderisasi di PMII tidak juga hanya untuk kepentingan yang sangat strategis, yaitu untuk mempersiapkan kepemimpinan bangsa dan dunia. Tetapi juga untuk hal yang sangat taktis, yaitu untuk memastikan tahun 2026, ketika NU mencapai 100 tahun islam ahlussunnah wal jamaah masih terus eksis di bumi NKRI tercinta ini. Untuk memastikan tahun 2045, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai 100 tahun Pancasila tetap kokoh sebagai perekat negeri ini dari Merauke sampai Sabang. Kesejahteraan rakyat negeri ini mencapai kemakmuran yang merata. Keadilan di tegakan! Seadil-adilnya. Semua rakyat cerdas dengan kemudahan akses terhadap pendidikan. Semua rakyat sehat dengan kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan. Negeri ini menjadi negeri yang *baldatun, toyibatun warobbun ghofur.* Dan juga untuk memastikan tahun 2060, ketika 100 tahun PMII kepemimpinan nasional dan dunia diwarnai dengan kepemimpinan PMII dan kebijakan yang bernapaskan Islam. Islam yang rahmatan lil alamin.

Capaian-capaian taktis dan strategis itu pun akan mengilhami kader-kader kita selanjutnya, untuk terus menggelorakan kaderisasi PMII hingga 3060 dan hingga akhir zaman, dan hingga kita terkumpul di hari akhir dalam kelompok orang-orang yang beriman yang di naungi oleh para alim ulama, para wali, para imam, para tabi'in-tabi'in, para tabi'in, para sahabat yang di ridhoi Allah SWT, dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Bulu kuduk saya merinding dan rasa haru mendesak dada saya ketika menulis paragraf ini, terdiam sejenak dan saya membacakan Al-fatiha, semoga Allah meridhoi perjuangan kita, para pendahulu kita dan para kader kita di masa depan dalam menegakan dan terus mensyiarkan ahlussunnah wal jamaah di dunia ini, Al-fatiha... Amiiinnn...

Akhirnya tulisan ini, yang ada ditangan sahabat bisa terselesaikan. Ini CUMA CATATAN KADERISASI PMII 2014-2016. Bukan karya intelektual, apalagi karya ilmiah, bukan! Cuma sekedar catatan. Dalam penyusunan tulisan ini, saya teringat dengan dinamika "politik kampus" dahulu. Ketika semester 7, saya terpilih menjadi Ketua Umum Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM FISIP UNAS), di UNAS tidak ada BEM Universitas. Awalnya, BPM dianggap sebelah mata. Ya, sebelumnya BPM hanya menyiapkan Musyawarah Mahasiswa (Musma) untuk memilih Ketua Umum BPM dan SEMA FISIP UNAS dari tahun ke tahun. Setelah Musma, Ketua Umum BPM terpilih hanya ikut mengawal agenda SEMA dan menyiapkan Musma di tahun selanjutnya. Begitu seterusnya.

Saya pun tidak terpikir untuk menjadi ketua umum BPM, karena orientasi kebanyakan adalah aktif di Senat Mahasiswa (SEMA) – eksekutif, hingga saya menyadari ada "masalah" yang harus disikapi (biasa, semangat idealism – seolah paling bener dan mau berjuang memperjuangkan idealisme tsb). Masalah yang biasa terjadi dalam setiap momentum pemilihan sebelumnya, melulu berorientasi pada suksesi SEMA adalah, banyak "politisi klaim" yang "muter" kesetiap kandidat untuk "bargaining sekum". Saya sangat merasakan dinamika tersebut.

Singkat cerita, ketika saya menjadi ketum BPM, baru kali pertama BPM membuat agenda kegiatan (selama ini tidak pernah ada kegiatan). Substansi kegiatan itu cukup "ditakuti" dekanat bahkan rektorat. Kami membuat Forum Aspirasi Mahasiswa - FAM (serap aspirasi dan sebar angket) karena asumsi kami ketika itu, BPM adalah "badan legislatif". Sehingga menyerap aspirasi mahasiswa adalah hal yang substansial bagi BPM. Kebutuhan mahasiswa adalah mendapatkan pengajaran yang mencerdaskan, akses referensi yang mudah didapat di perpustakaan sendiri, terfasilitasi dalam keorganisasian kampus, dst. Tetapi mahasiswa kebanyakan tidak berani menuntut kebutuhannya sendirian, sehingga organisasi intra kampus dibutuhkan keberadaannya untuk memperjuangkan hal itu. Kenapa intra kampus? Karena jika ekstra kampus yang bergerak, akan dipandang sangat politis. Terlebih kampus kami adalah "kampus hijau".

Hasil FAM (serap aspirasi dan sebar angket) yang kemudian kami rekap memunculkan nama-nama dosen (termasuk pejabat dekanat dan rektorat) dalam beberapa kategori, yaitu (1) dosen yang suka telat masuk kelas (2) dosen yang jarang masuk kelas (3) dosen yang metode pengajarannya tidak andragogi (4) dosen yang "genit" kepada mahasiswi. Semua dosen yang tercatat namanya "*belingsatan*", kumpul di ruang dekan dan dekan memanggil saya untuk mempertanyakan bagaimana data itu bisa menjadi "hasil". Alhamdulillah hal itu bisa menjadi *shock therapy* bagi dosen-dosen yang "bermasalah" untuk "bertaubat".

Kemudian, baru pertama (ketika itu), BPM membuat UU yang terkait dengan Pengawasan kinerja SEMA dan Budgeting. Juga UU politik, terinspirasi dengan UU Pilpres (2004) ketika itu, bahwa dalam Musma selanjutnya, kandidat SEMA adalah pasangan ketua/wakil ketua SEMA. Selama ini hanya dipilih tunggal (pemilihan ketua SEMA), sehingga koalisi abu-abu

sering terjadi. Pada periode selanjutnya, dengan UU Politik tersebut, mahasiswa memilih pasangan calon Ketua/wakil ketua SEMA.

Latar belakang saya Ilmu Administrasi Negara yang konsentrasinya pada kebijakan publik, mungkin ini juga yang mempengaruhi sepak terjang saya ketika itu dan ketika di PB sebagai salah satu Badan Pengurus Harian (BPH) diperiode 2014-2016 ini. Bahwa, untuk mengatasi "masalah" harus dengan membangun sistem dan menetapkan "kebijakan". Ya, kebijakan! Sehingga itu bisa mengikat, mengatur dan memaksa – menjadi legalitas dan rujukan sistem. Tentu kesadaran bersama seluruh BPH PB pun menjadi kekuatan bagi PB Periode ini untuk menetapkan kebijakan solutif (Tap Pleno) dalam menjawab berbagai permasalahan yang selama ini ada.

Dalam buku ini, sahabat-sahabat akan saya ajak memahami permasalahan PMII yang sudah kita pahami bersama, masalah yang ada di PMII sejak lama. Bahkan, mungkin sebelum saya dan anda ber PMII. Memang tidak ada inovasi dalam buku ini, semua hanya gambaran lama. Kebijakan yang coba diterapkan PB PMII untuk menjawab masalah tersebut pun biasa saja. Malah secara substansi sudah berlaku, dahulu. Tapi goal dari buku ini adalah, saya ingin mengajak sahabat-sahabat memiliki mimpi yang sama, bagaimana merangkai tahapan-tahapan kaderisasi, guna **mencapai Tujuan PMII** dimasa depan dengan langkah-langkah yang kita siapkan sejak dini, sekarang! InsyaAllah, dengan Tap Pleno PB periode 2014-2016 dan konsistensi kita bersama dalam melakukan pengawalan kaderisasi disetiap daerah, cita-cita PMII akan terwujud lebih cepat.

Pada 25 – 30 Agustus 2015 (dua minggu setelah saya menikah), saya mendapat tugas mengawal PKL dan Konkorcab PKC Kalsel. Pada ruang PKL itu, saya mendapati pertanyaan yang luar biasa menginspirasi saya menyusun tulisan ini. Penanya adalah ketua Komisariat STAI Darussalam, Martapura, sahabat Ramli. Banyak saya temui kader yang pandai bicara dan orasi, tapi tanpa referensi, yang menjadi menarik dari pertanyaan sahabat Ramli adalah karena pertanyaannya mengutip buku yang di bacanya, buku yang diterbitkan oleh Bidang Kaderisasi PKC PMII Jawa Tengah tahun 2010 (periode ketua PKC Sahabat Kusdianto), yang berjudul Menjadi Anggota Mu'takid: Percaya Diri Menghadapi Tantangan Zaman. Kenapa saya apresiasi? Karena banyak kader PMII yang malas membaca, apalagi menulis. Sama seperti saya.

Pertanyaannya adalah, "PMII mengalami ketidak jelasan ideologi, transaksional, program kerja fluktuatif dan hanya mengikuti momentum, tidak membumi, hanya berputar di wacana. Itu adalah masalah-masalah yang sudah di tulis dibuku ini (sambil menunjukan buku yang dipegangnya), sejak tahun 2010. Hari ini masalah yang sama masih terjadi. Apakah selama 2010-2015 sistem yang digunakan PMII untuk mengatasi hal tersebut tidak berhasil?" kira-kira seperti itu pertanyaannya. Mungkin ini adalah pertanyaan sederhana dari seorang kader, ketua komisariat. Sudah biasa kita menjawab pertanyaan dengan "jawaban wacana", setelah terjawab dan penanya merasa puas, selesai. Kita yang

menjawab, pun merasa hebat dan dan merasas lebih pintar dari si penanya. Lalu, apakah permasalahan yang kita hadapi selesai dengan sekedar “jawaban wacana” itu? Tidak!

Sejak awal setelah pengukuhan PB periode 2014-2016, kemudian Rakernas, kami sudah *mapping* berbagai permasalahan PMII. Setelahnya, kami klasifikasi berbagai permasalahan itu, lalu memastikan solusinya, bagaimana menjawab permasalahan itu dengan kebijakan Pengurus Besar. Hampir semua masalah adalah 70 % masalah kaderisasi dan 30% nya masalah keorganisasian. Muncul perdebatan terkait rumusan solusi yang coba didorong. Pertama, membuat kebijakan langsung dengan Ketetapan Pleno PB (artinya kebijakan itu langsung kita eksekusi setelah ditetapkan). Kedua, menunggu Muspimnas untuk mendorong Ketetapan Peraturan Organisasi – PO (artinya, kebijakan itu akan efektif setelah Muspimnas). Ketiga, menunggu Kongres dengan menawarkan draf kebijakan (artinya, rancangan solusi yang sudah dibuat, keputusan nya akan dieksekusi pada PB periode selanjutnya)?! Dengan berbagai pertimbangan, dari dimamika tersebut, pilihan kami adalah, yang pertama. Menggunakan Ketetapan Pleno (Tap Pleno) PB PMII. Tetapkan! Eksekusi!

Dituduh tangan besi. Dituduh ekstrim. Bahkan kami dituduh melanggar konstitusi oleh banyak kader dan senior menengah yang “kepentingannya” terhambat karena Tap Pleno tersebut. Tidak jarang kemudian kami harus meng-karateker Cabang dan Koorcab yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada (yang sudah kami tetapkan), dan harus bersitegang dengan sahabat sendiri. Bahkan ada yang sampai mengancam memutuskan persahabatan karena hal ini. Itu semua dinamika “konsekuensi” yang kami hadapi langsung, karena tanggung jawab institusi dan konstitusi yang melekat pada diri kami sebagai PB. Tidak masalah.

Tulisan ini akan mencoba menjelaskan, apa, kenapa dan bagaimana kebijakan PB mencoba menyelesaikan permasalahan yang selama ini menjangkit PMII, yang sejak lama seolah tidak bisa diselesaikan. Melalui tulisan ini juga, saya ingin memastikan bahwa permasalahan yang terekam dalam buku Bidang Kaderisasi Jawa Tengah pada 2010 silam sudah terjawab dan teratasi secara system yang telah kami bangun melalui Tap Pleno, bukan hanya jawaban wacana (tetapi, mungkin belum 100%).

Semoga tulisan ini bisa menginspirasi munculnya tulisan lain sebagai “antitesa”. Ada alasan yang sangat strategis. Selama ini Kaderisasi PMII kekurangan buku bacaan sebagai referensi internal. Kita butuh buku-buku untuk menunjang kebutuhan kaderisasi, baik yang ditulis oleh pengurus yang masih aktif, senior menengah yang selama ini cukup produktif berkomentar layaknya komentator sepak bola yang menghebohkan (jebrettt!!!). Tidak jarang kita temui senior yang “seolah paling hebat”. Padahal ketika ybs menjadi pengurus pun tidak ada sumbangsihnya, apalagi punya karya. Bahkan alumni yang juga selama ini hanya mengeluhkan, menyayangkan, dan “ngomel” atas banyak hal yang terjadi pada PMII, karena tidak sesuai dengan harapannya (dengan pergeseran yang terjadi), dan membandingkan hal itu pada masanya. Tentu, kami butuh referensi pembanding (cerita-

cerita) apa saja yang pernah terjadi dahulu, bagaimana sahabat menjawab dinamika organisasi ini, dan bagaimana relevansi jawaban itu dimasa sekarang atau masa depan?!

Mimpi saya, ketika kebutuhan bahan bacaan untuk kaderisasi internal ini sudah terpenuhi, maka screening kaderisasi PMII (untuk PKD, PKL dan mungkin juga PKN) dimasa depan akan mempertanyakan pemahaman kader dengan bahan bacaan. Tetapi memang harus di klasifikasi dahulu bahan bacaan wajib untuk setiap jenjang kederisasi. Misal, hari ini kita punya buku "PMII dalam Simpul-Simpul Sejarah" yang di tulis oleh Sahabat Fauzan Al-fash, kita sepakati ini buku wajib untuk alumni PKD. Maka pertanyaan pada saat screning PKL bisa saja, "apa yang anda pahami dalam bab 9 buku tersebut?" Misal! Ini juga akan mengkondisikan pemahaman kader dengan system kaderisasi yang ada, bahwa menjadi kader PMII berarti harus rajin membaca. Semakin tinggi jenjang kaderisasi yang di tempuh, semakin paham tentang PMII. Jangan sampai peserta PKL tidak paham sejarah PMII.

Tulisan ini adalah persembahan saya untuk "jabang bayi" kami yang masih dalam kandungan isteri tercinta. Besar harapan kami, anak kami nanti bisa menjadi kader biologis yang ideologis. Kita semua yakin PMII adalah organisasi terbaik, maka kader biologis kita harus jadi penerus perjuangan ideologis kita di PMII. Banyak alumni yang menjadi orang besar dan sadar, bahwa semua itu bermula dari ber PMII. Sayangnya, ternyata beliau-beliau, tidak memiliki kader biologis yang ideologis (yang meneruskan perjuangannya di PMII). Ini penting untuk kita niatkan sejak awal dan kita ikhtiarkan. Sekalipun nanti anak-anak kita kuliah di luar negeri, pastikan anak-anak kita nanti yang akan menjadi pioneer, pendiri dan pengembang cabang istimewa PMII di sana. Menjadi diplomat ahlussunnah wal jamaah di seluruh dunia, hingga dunia ini tercerahkan. Bahwa Islam bukan agama teroris.

Tentu, ucapan terima kasih tak terhingga kepada isteri tercinta, Ai Rahma dan jabang bayi yang tidak rewel. Alhamdulillah sejak terdeteksi hamil Oktober 2015 lalu, tidak membuat kami "ngidam berlebihan", semoga kelak anak kami bisa menjadi anak yang bertaqwa dan berbakti kepada orangtua, menjadi kader PMII yang militan dan progresif, yang bermanfaat bagi masyarakat, agama dan bangsa serta umat manusia di dunia, aminnn...

Tidak lupa saya ucapan terimakasih kepada Ketua Umum Sahabat Aminuddin Ma'ruf, Sahabat Sekjen Abdul Haris Wally, Sahabat Bendum Ridwan Hasibuan, Sahabat Erfandi, Sahabat Zulkarnain, dan sahabat-sahabat PB yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, atas supportnya yang luar biasa dalam suksesi agenda-agenda kaderisasi.

Juga kepada Sahabat Addin Jauharudin, Sahabat Jabidi Ritonga dan Sahabat Dwi Winarno yang tidak pernah lelah memberikan masukannya. Kepada para sahabat dan senior yang sangat saya kagumi, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semua sepak terjang anda (baik atau buruk) menjadi inspirasi saya dalam penyusunan tulisan ini. Khususon Tim PKP NU – PBNU 2010-2015, terima kasih telah membawa kami kembali ke khittoh.

Selanjutnya, kepada seluruh Pengurus Besar yang telah sama-sama berjuang menetapkan Tap Pleno dan mengeksekusinya langsung pada periode ini, tentu kebijakan ini tidak akan mencapai hasil maksimal tanpa pengawalan seluruh PB, terutama para BPH. BPH-BPH yang dengan sukarela menjadi tim karateker, menjadi eksekutor PC dan PKC yang lalai dengan kebijakan PB. BPH-BPH yang dengan sukarela menjadi instruktur PKL, sekalipun bukan dari Bidang Kaderisasi. Tentu ini support yang luar biasa, karena keterbatasan kami, tidak semua PKL dapat kami kawal dengan tim kaderisasi secara langsung.

Pastinya, terimakasih kepada Tim Kaderisasi Nasional yang sudah berjibaku bersama, baik dalam mengawal kaderisasi di daerah maupun dalam pelaksanaan Pelatihan Kader Nasional (PKN). Kepada Sahabat Herman Saputra, Sahabat Sabolah Sumarjaye, Sahabat Aidil Aulia, Sahabat Sony Setiono, Sahabat Irvan Nahdliyin, Sahabat Ulung Trenggana, Sahabat Azwardi, terkhusus Sahabat Iqbal Alam Islami, Wasekjen Bidang Kaderisasi. Terima kasih atas keikhlasannya selama ini. Mohon maaf saya belum bisa memberikan tambahan kontribusi ketika sahabat-sahabat harus mengawal kaderisasi di bawah, cuma ada fasilitas tiket PP kelas ekonomi, tanpa yang lainnya. Terimakasih.

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! PKN adalah sistem kaderisasi yang pertama kami lakukan pada periode ini pasca PKL, sebagai jenjang kaderisasi yang coba konsisten kami laksanakan pada periode ini, tentu penting untuk di evaluasi dikemudian hari untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Karena PKN sudah ditetapkan di Muspim dan menjadi PO, tentu kita paham bagaimana mekanisme evaluasi tersebut. Dalam proses penggodokan materi-materi, tidak lepas dari sumbangsih sahabat-sahabat BPH juga konsultasi kepada beberapa senior. Dalam konteks ini, secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada Sahabat Endin Soefihara (Ketua Kaderisasi Nasional periode Ketua Umum Sahabat SDA dan Sahabat Iqbal Assegaf) yang sudah memfasilitasi diskusi-diskusi kami dalam perumusan materi-materi PKN ini. Sahabat Rahmat Hidayat, Sahabat Adung, Sahabat Hakam, yang juga membantu memfasilitasi dalam proses pelaksanaannya.

Ini adalah catatan panjang pertama yang saya tulis (bukan skripsi dan bukan tesis, jadi tanpa referensi buku bacaan). Sangat subjektif, karena lebih banyak paparan atas nama pribadi. Jika ada dari Pengurus Besar lainnya yang mau menulis dengan perspektifnya atas dinamika yang sudah kita jalani pada periode ini, tentu hal itu akan memperkaya khasanah bahan bacaan kita. Pasti saya akan mengapresiasinya, sebagaimana saya pun berharap catatan ini mendapat apresiasi. Sebagai catatan yang sangat subjektif, pasti banyak salah, mohon kritik, saran dan masukannya. Semoga pada penulisan yang selanjutnya akan lebih baik lagi. Terimakasiih, *wallahul muwafieq ila aqwamitharieq, wassalamualaikum, wr wb...*

Jakarta, 29 Februari 2016

Munandar Nugraha

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi vii

BAB I

INOVASI DAN TEROBOSAN 1

1. EKSEKUSI REKOMENDASI KONGRES DENGAN KETETAPAN PLENO PB PMII 2
2. MENGGUGAT LEGALITAS TAP PLENO PB PMII 9

BAB II

KADERISASI PMII MENJAWAB TANTANGAN ZAMAN 12

PEMETAAN MASALAH DAN LANGKAH SOLUSI PB PMII 13

1. MASALAH UMUM KADERISASI 13
   - A. MEMBANGUN MITOS PMII 38
     - 1) Satu-Satunya Organisasi Mahasiswa Islam Ahlussunah Wal Jamaah 39
     - 2) Nasionalisme PMII: Konsisten Mengawal NKRI dan Pancasila 57
     - 3) Organisasi Intelektual yang Progresif 62
   - B. MASALAH LAIN 71
     - 1) Mitos Lokal Institusional 71
     - 2) Mitos Kesukuan 74

2. MASALAH DI HULU KADERISASI 78
3. MASALAH DI PROSES KADERISASI 83
   - A. DOKTRINASI 83
   - B. PENGUASAAN MATERI 90
   - C. KEDISIPLINAN DAN PERUBAHAN SIKAP 93
4. MASALAH DI FOLLOW UP KADERISASI 94

BAB III

MEMBANGUN SISTEM KADERISASI 95

1. MENGATUR SCREENING MINIMUN 95
   - A. Screening berkas 98
   - B. Screening perlengkapan 101
   - C. Screening Pemahaman Keorganisasian 103
2. MENGATUR PELAKSANAAN KADERISASI 104
   - A. MENSISTEMATISIR POLA KADERISASI 105
     - 1) Pembatasan Cakupan Wilayah dan Pembatasan Pelaksanaan PKD dan PKL 106

2) Konseling dan penugasan pribadi 113
3) RTL Bersama – Pengembangan PMII 114
4) Pembaiatan 115
B. MEMBAKUKAN MATERI KADERISASI 118
C. MEMBANGUN KEMANDIRIAN 119
D. SERTIFIKASI 121
3. MENGATUR FOLLOW UP KADERISASI FORMAL 121

BAB IV
MEMBANGUN MASA DEPAN KADERISASI 128
1. MEMPERTEGAS TANGGUNG JAWAB INSTITUSIONAL TERHADAP KADERISASI 128
2. MERUMUSKAN BAB KADERISASI DI ADRT 136

BAB V
REVOLUSI ORGANISASI 140
1. MEMBANGUN SISTEM KADERISASI TERTUTUP DAN TERPIMPIN 141
2. MEMBANGUN MODEL KADERISASI TAWASSUTH 146
3. MEMBANGUN SISTEM REKRUITMEN KEPEMIMPINAN PMII 158

PENUTUP 163

BAB I
INOVASI DAN TEROBOSAN

Salah satu hasil kongres Jambi adalah menetapkan rekomendasi kongres. Rekomendasi kongres tersebut adalah agar PB merumuskan sistem kaderisasi nasional dan merumuskan Paradigma PMII. Sejak kepengurusan PB masa khidmad 2014-2016 terbentuk pada September 2014, dalam pembahasan-pembahasan di rakernas dan di pleno-pleno BPH PB, kami menetapkan system kaderisasi untuk segera dijalankan pada desember 2014. Secara legal formal, system itu kami rangkai dengan Ketetapan Pleno (Tap Pleno) PB PMII. Ada 10 Tap Pleno PB PMII yang telah kami tetapkan sebagai bagian dari turunan AD/ART dan PO.

Tetapi terkait dengan kaderisasi, setidaknya ada 5 Tap Pleno, diantaranya yaitu (1) Tap Pleno tentang Screening; (2) Tap Pleno tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kaderisasi Formal; (3) Tap Pleno tentang Kaderisasi Non Formal; (4) Tap Pleno tentang Sertifikasi (empat Tap Pleno ini kami rangkum dalam draf Rancangan PO Pedoman Pelaksanaan Kaderisasi Formal Dan Non FormalPergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang ditawarkan dalam forum Muspimnas); dan (5) Tap Pleno tentang Strategi Rekruitmen Kepemimpinan pun kami dorong menjadi Rancangan PO di Muspimnas Ambon, tentunya setelah sebelumnya dibahas di SC Muspimnas dan disepakati untuk ditawarkan sebagai Rancangan PO. Alhamdulillah, muspimnas Ambon kita menghasilkan beberapa produk hukum baru sebagai pelengkap dan penyempurna landasan operasional kita dalam ber PMII.

Atas dasar apa Tap Pleno ini ditetapkan?! Nanti akan saya ulas lebih jauh pada bahasan selanjutnya. Intinya, kami ingin mendorong inovasi dan terobosan yang konstitusional. Kami pastikan semua Tap Pleno itu berdasarkan pada ADRT dan PO. Karena setiap Tap Pleno selalu kami carikan dimana “cantelan” hukum yang ada di ADRT dan PO (cek Tap Pleno PB).

Mengapa Tap Pleno menjadi Inovasi dan terobosan? Untuk meningkatkan efektifitas kerja dan maksimalisasi capaian organisasi dengan waktu yang singkat. Selama ini, logika hukum berorganisasi kita di PMII hanya mengacu pada dua hal, yaitu hasil kongres (Menetapkan AD/ART) dan Muspimnas (Menghasilkan PO). Dan parahnya lagi, selama ini pula, hasil rekomendasi kongres hanya akan menjadi bahan-bahan pembahasan di Muspimnas dan hasil-hasil rekomendasi Muspimnas selain PO akan di rumuskan dan di tawarkan dalam draf yang akan dibahas di kongres. Dalam tempo waktu yang terus berjalan, kapan eksekusi kebijakan dilakukan?! Kapan akan ada perubahan?! Kapan PB menjalankan amanah kongresnya?! Jadi, menurut kami, selesai pengukuhan PB, maka rekomendasi-rekomendasi kongres harus segera di eksekusi dengan kebijakan yang operasional, Tap Pleno PB adalah jawabannya. Inovasi dan terobosan inilah cara kami menjalankan amanah kongres sahabat!!!

2. **EKSEKUSI REKOMENDASI KONGRES DENGAN KETETAPAN PLENO PB PMII**

Selama ini, acuan kaderisasi kita adalah buku Membangun Sentrum Gerakan yang dicetak pada tahun 2003, yang dirumuskan oleh Tim Kaderisasi Nasional, yang di ketuai oleh Sahabat Hery Haryanto Azzumi, lalu buku Multi Level Strategi (MLS) yang di cetak pada tahun 2005, yang dirumuskan oleh Tim Kaderisasi Nasional, yang di ketuai oleh Sahabat Hasanuddin Wahid, dan yang terakhir sebagai penyempurnaan dan penyesuaian relevansi isu dan wacana juga rancang bangun pelaksanaan kaderisasi formal (Mapaba, PKD dan PKL) adalah buku Panduan kaderisasi 2014, yang dirumuskan oleh Tim Kaderisasi Nasional, yang di ketuai oleh Sahabat Dwi Winarno.

Bagaimana dengan PB PMII periode 2014-2016? Sepertinya periode ini PB tidak mencetak buku kaderisasi yang berat seperti sebelumnya, kami tidak sanggup. Yang ada di tangan sahabat-sahabat pembaca ini, hanyalah sekedar tulisan. Ya, ini. Yang ada di tangan Sahabat-sahabat sekarang. Apresiasi kami setinggi-tingginya kepada seluruh senior yang pernah membuat buku yang kemudian menjadi panduan kaderisasi kita, sungguh beruntung sekali kita memiliki kader-kader intelektual yang mampu menyusun buku kaderisasi dahulu yang masih sangat layak kita jadikan referensi.

Tulisan ini hanya ingin sedikit menggambarkan, kenapa banyak Tap Pleno PB PMII ditetapkan dan “dipaksakan” pada periode ini. Selain alasan inovasi dan terobosan di atas, nanti kami akan paparkan berbagai perspektif dan berbagai alasan-alasan, kenapa banyak Tap Pleno diputuskan dan dijadikan aturan serta di eksekusi pada awalperiode PB PMII 2014-2016?

Pertama, hal ini terkait dengan kebutuhan mendesak kaderisasi. Kebutuhan legal formal yang menyeluruh, seragam. Mungkin kita masih sedikit resisten terhadap kata-kata atau istilah-istilah “seragam”, “tersentral”, “baku”, dan lain seterusnya. *Uforia* demokrasi pasca gerakan reformasi 1998, otonomi daerah, dan pelaksanaan program yang *buttom up* seolah menjadi barang istimewa yang harus dinikmati, sehingga semua hal yang di seragamkan, tersentral, dan *top down* seolah menjadi “salah” dan bertentangan, dengan kebutuhan dan dinamika hari ini. Pun, kita terjebak dalam uforia itu dan tidak bisa membedakan kontekstualisasi nilai-nilai universalitas yang bersifat umum yang harus didorong dalam ruang publik dan kepentingan konsolidasi organisasi yang bersifat khusus, yang juga harus kita bangun dari dalam.

Pasca pemilu 1999, seluruh partai politik (parpol) sepakat untuk mendorong otonomi daerah. Sebuah sistem pemerintahan yang sangat mustahil terjadi pada era Presiden Soeharto. Tetapi, tahukah anda, sekalipun semua parpol mendorong desentralisasi dalam pemerintahan (ketika itu), parpol tetap menggenggam sistem yang sentralistik (ketika itu dan hingga kini). Dalam musim pilkada serentak kini, tidak ada satupun kandidat pasangan calon gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota dan bupati/wakil bupati yang prosesnya tidak melalui pengesahan sebagai calon oleh DPP. Sekalipun

parpol memiliki struktur yang langsung bersentuhan dengan dinamika pilkada disetiap daerah (DPC atau DPD). Begitu juga dengan penetapan caleg pada pemilu. Satu-satunya parpol yang mencoba mendorong sistem desentralisasi – kepemimpinan kolektif pada era reformasi adalah Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) besutan Laksamana Sukardi, yang sudah tidak bisa ikut pemilu karena tidak lolos verifikasi factual pada pemilu 2014. Jika mau diklasifikasikan, parpol adalah institusi yang paling sentralistik setelah TNI/Polri di negeri ini. Bagaimana dengan PMII dan NU?

Munas Alim Ulama NU di Cirebon pada 15-17 September 2012 silam, menghasilkan rekomendasi agar pilkada langsung dikembalikan kepada pemilihan melalui DPRD. Saya mencoba menganalisa, mengapa PBNU mendorong rekomendasi demikian?! Sebagai kader PMII yang menjadi NU, tentu saya harus ber-husnudzonterlebih dahulu sebelum menganalisa. Pasti ada hal yang sangat strategis untuk kepentingan NU (eksklusifitas NU) terkait dengan rekomendasi tersebut. Bukan hanya sekedar memahami alasan NU yang disampaikan ke public atas rekomendasi itu, "karena maraknya money politik, NU melihat bahwa pemilihan secara langsung lebih banyak mudaratnya ketimbang pemilihan melalui DPRD". Bukan sekedar itu! Lalu? Ya. Tentu jawabannya adalah untuk menjaga soliditas NU. Disetiap ada pilkada, pasti soliditas PCNU/PWNU terganggu bahkan rusak dengan urusan dukung mendukung kandidat. Artinya, rekomendasi tersebut jangan dimaknai bahwa NU anti demokrasi dan ingin kembali mendorong sistem orde baru, bukan.

Pasti, ada kebutuhan internal NU yang harus dijaga. Soliditas jamiyyah! Rekomendasi ini menjadi bagian dari ikhtiar NU untuk menjaga struktur NU agar tidak mudah dirusak oleh kepentingan politik praktis. Karena pada kenyataannya, dalam dinamika pilkada, misalnya: jika ada 3 pasang kandidat, bisa jadi PWNU/PCNU terlibat dalam dukung-mendukung, bahkan pada semua kandidat. Misal, Ketua dukung A, sekretaris dukung B dan bendahara dukung C. Parahnya lagi, ternyata hal itu juga merembes ke PCNU, MWC-MWC NU, bahkan sampai ke Ranting-Ranting NU. Tentu, jika hal ini tidak dibendung akan merusak NU secara keorganisasian. Bahkan tidak sedikit kasus, untuk menjadi kepala daerah, seorang yang tidak jelas ke-NU-an nya, kemudian ikut mencalonkan diri di konferwil/konfercab NU, untuk "merebut" menjadi ketua PWNU/PCNU, dan selanjutnya mencalonkan diri pada pilkada. Akankah hal ini kita biarkan terjadi terus menerus?

Sehingga sangat wajar (masih terkait dengan hal itu), satu tahun kemudian pada pembukaan rapat pleno PBNU 7 September 2013 di Universitas Sains Al-quran, Rais Amm PBNU, Alm KH. Sahal Mahfud menginstruksikan agar NU melaksanakan politik tingkat tinggi. Yaitu dalam arti memperjuangkan nilai kebangsaan, kerakyatan dan etika (berpolitik untuk menciptakan kehidupan politik yang santun dan tidak menghalalkan segala cara). Dan menghindari politik tingkat rendah atau politik praktis. Beliau juga menegaskan, bahwa "Keterlibatan NU dalam politik praktis akan membuat ukhuwah nahdliyah tercabik-cabik".

Bagaimana dengan PMII? Di banyak daerah, PMII pun terganggu karena Musda KNPI. Ya, level PMII masih berkutat di KNPI, maksimal. Kalaupun ada tarik menarik di pilkada, efeknya masih sangat minim. Paling cuma jadi penggembira saja. Lah wong PMII untuk mengkonsolidir anggota baru yang sudah di Mapaba saja masih kesulitan, apalagi mengkonsolidir massa untuk kepentingan pilkada. Bukan? Jadi, terkadang saya suka senyum-senyum bingung jika ada PC PMII "seolah-olah" menjadi tim sukses, bahkan menjadi tim ring satu untuk pemenangan di pilkada. Tapi, ya begitulah dinamikanya. Ada yang serius menjadi pemain bayangan, bukan pemain cadangan loh. Ada juga yang serius seolah-olah menjadi pemain utama.

Kembali pada bahasan kita tentang musda KNPI. Tidak sedikit cabang PMII yang "rusak" konsolidasi keorganisasiannya karena musda KNPI, bukan oleh pengurus langsung, tetapi oleh senior yang memiliki kepentingan suksesi KNPI. Jika di satu cabang ada 5 komisariat, kemudian ada 5 senior dari masing-masing komisariat ingin "ber-KNPI", baik yang mau langsung mencalonkan diri atau hanya untuk memastikan dapat porsi menjadi pengurus KNPI, berarti minimal ada 5 orang pemain yang berpotensi merusak soliditas PMII. Kalau mau jujur, kita bisa pastikan bahwa ketua cabang adalah "milik" senior dari komisariatnya, bahkan dari rayonnya. Sekalipun sebagai ketua cabang, dibawah kepemimpinannya ada 5 Komisariat dan ada banyak senior-senior dari 5 Komisariat tersebut. Intinya, jika ketua cabang berasal dari Komisariat atau Rayon A, maka dia akan lebih cenderung mengikuti arahan dan perintah dari seniornya di komisariat atau Rayon A, ketimbang dari senior lainnya.

Bayangkan, apa yang akan terjadi jika ada konfercab/Konkorcab PMII menjelang musda KNPI?! Pastinya, terima atau tolak LPJ akan ditentukan dengan banyak atau sedikitnya senior yang diuntungkan atau dirugikan dari keputusan ketua PC/PKC dalam dinamika Musda tersebut. Lalu bagaimana kalau Musda itu di awal kepengurusan? Pasti akan ada intervensi dari senior yang di rugikan untuk menarik rekomendasi kadernya dalam kepengurusan, atau dipengaruhi untuk tidak aktif dalam kepengurusan. Belum lagi cerita chaos, ribut, dll. Jika seperti ini jadinya, apakah konsolidasi PMII tidak rusak? Apakah konsolidasi kaderisasi tidak terganggu?

Untuk mencegah kemudoratan musda KNPI bagi PMII, hari ini PB PMII bersepakat, jika ada situasi yang terindikasi PC/PKC akan rusak karena musda KNPI, PB PMII akan menyurati DPD KNPI tersebut, bahwa <u>PB PMII tidak merekomendasikan PC/PKC tersebut untuk mengikuti musda KNPI</u>. Tentu ini adalah pilihan dengan kemudaratan yang paling kecil untuk PMII. Semoga saja senior-senior di daerah dapat memahami hal ini, jangan sampai beliau-beliau yang ingin menjadi KNPI justru mengganggu bahkan merusak konsolidasi keorganisasian dan kaderisasi PMII.

Dari gambaran di atas, tentu kita ingin memastikan PMII dapat menjadi organisasi yang besar, kuat, dan efektif. Salah satu syarat menjadi seperti itu adalah dengan mengkonsolidasikan semua potensi organisasi dari pengurus rayon hingga pengurus

besar menjadi organisasi yang terpimpin baik secara moralitas, spiritualitas maupun intelektualitas. Dan Tap Pleno PB PMII justru menjadi sebuah keniscayaan untuk menuju konsolidasi tersebut.

Kedua, mendorong dan mempercepat regenerasi kepengurusan di PC dan PKC. Desember 2014, kami memulai eksekusi rekomendasi hasil kongres dengan mendorong menetapkan Tap Pleno yang banyak mengatur secara teknis proses kaderisasi. Tidak hanya hal teknis terkait dengan pelaksanaan kaderisasi formal, non formal dan informal, tetapi juga terkait dengan kaderisasi dan regenerasi kepengurusan diberbagai level, mulai dari PR, PK, PC dan PKC. Tap Pleno ini pun langsung kami eksekusi. Seolah terjadi tsunami kaderisasi ketika Tap Pleno kami jadikan aturan untuk langsung dijalankan.

Ya, selama ini, ber PMII seolah tidak sejalan dengan perkuliahan dikampus, apa hubungannya menjadi ketua PMII dengan IPK?! Sudah lulus kuliah atau belum, itu semua urusan pribadi. Urusan keorganisasian yang lebih utama dan jadi barometer utama adalah keaktifan?! Gak usah ungkit-ungkit perkembangan perkuliahan. Kalau sudah saatnya tiba, juga akan lulus dengan sendirinya. Ya kan?! Selama ini, ber PMII seolah tidak sejalan dengan regenerasi, apa urusannya menjadi ketua dengan batasan usia?! Kira-kira itu reaksi dari Tap Pleno PB ditingkat bawah (PR/PK/PC/PKC). Bahkan, ada juga senior yang ketika disampaikan terkait dengan Tap Pleno tersebut kemudian dengan santai merespon, “menurut saya, sudah ada yang mau urus PMII saja sudah bagus. Gak usah dipersulit dengan aturan-aturan yang ribet. Ber PMII kan menyita waktu, tenaga, pikiran, gak dapet duit lagi”.

Lebih parah lagi, di salah satu wilayah PKC (saya tidak perlu sebut PKC mana), ada seorang sahabat karib, ingin mencalonkan diri sebagai ketua PKC. Jauh hari sebelum di gelar Konkorcab beliau telepon, menanyakan aturan yang ada (penekanannya adalah terkait dengan batasan usia). Saya jelaskan sebagaimana mestinya (apa, kenapa dan bagaimana kebijakan itu kami buat, tentunya untuk menjawab perkembangan zaman). Lalu, tersentak saya dengan respon beliau, “Sahabat nandar, kalau seperti itu maunya PB, berarti persahabatan kita selesai sampai disini”. Sahabat, ini adalah kondisi yang paling tidak enak.

Dengan santai saya coba menjelaskan kembali, bahwa ber PMII (memberikan sumbangsih kepada PMII) tidak mesti menjadi ketua. Saya jelaskan juga beberapa hal yang menjadi konsern PB terkait dengan perubahan zaman yang harus disesuaikan dengan aktivitas ber PMII. Intinya, untuk berbuat baik kepada PMII, untuk kebaikan PMII di masa depan, dibutuhkan kader-kader terbaik untuk ikhlas dengan aturan yang ada. Karena PMII adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NU, masih ada ruang luas di Ansor/Fatayat yang bisa di isi oleh kader dan alumni PMII disetiap level kepengurusan.

Tetapi, sepertinya penjelasan itu belum cukup. Dengan penuh percaya diri, beliau menjelaskan bahwa sudah mendapatkan banyak dukungan dari cabang-cabang. Dengan

permohonan maaf, saya katakan. Kalau masih tidak mau ikut aturan PB, laksanakan saja Konkorcabnya dan menangkan kompetisinya. Yang pasti, PB tidak akan mengeluarkan SK kepada PC/PKC yang tidak sesuai Tap Pleno PB. InsyaAllah, aturan ini sudah kami buat, dan akan kami terapkan! Saya juga pertegas, PB hari ini sudah meninggalkan "politicking organisasi". Bukan siapa yang harus menjadi ketua, tetapi yang bagaimana yang harus menjadi ketua PC/PKC.

Ya, beginilah dinamikanya. Pilihannya cuma dua, memulai dan lanjutkan upaya perbaikan sistem di PMII atau biarkan saja kondisi yang ada, yang penting "semua happy?!" Tentunya, kami memilih untuk memastikan perbaikan sistem dimulai saat ini. Sekalipun konsekuensinya adalah akan kehilangan sedikit sahabat, bahkan tumbuh juga sebagian rasa benci dan marah kepada PB oleh banyak kader yang terbentur aturan itu. InsyaAllah, diwaktu yang berbeda, akan ada refleksi dari semua kader yang menentang hari ini, dan kami yakin ada manfaat yang lebih besar dengan langkah PB hari ini untuk PMII dimasa depan.

Ketiga, mencoba menjawab tantangan zaman. Kami menyadari, 2 tahun masa kepengurusan bukanlah waktu yang lama, itu sangat singkat. Tantangan kita semakin hari semakin besar, jika kita hanya terlena dengan "seremoni" keorganisasian (Kongres dan Muspimnas) tanpa ada upaya eksekusi kebijakan untuk mempersiapkan PMII dalam menjawab tantangan zaman, maka kita akan tergilas dan mati! Basis PMII minim di kampus umum, negeri dan favorit. Kedepan kader-kader PMII tidak hanya bersaing dengan lulusan dari kampus umum, negeri dan favorit se Indonesia (yang kebanyakan bukan basis kader PMII), tetapi juga kampus-kampus bonafit se ASEAN, bahkan se dunia. Sebagai Negara yang cukup padat penduduknya dan budaya konsumerism yang cenderung meningkat, Indonesia pasti menjadi pasar. Bahkan peluang investasi asing yang selama ini dibuka oleh pemerintah, pun bisa menjadi boomerang bagi generasi bangsa. Bisa jadi kedepan kita hanya menjadi pekerja kepada tuan-tuan asing.

Perbaikan sistem kaderisasi di PMII memang tidak secara langsung menjawab tantangan dinamika global maupun regional kawasan di ASEAN, tetapi setidaknya mendorong kesadaran bahwa kader PMII tidak boleh larut menjadi "aktivisme". Menjadi senior yang paling disegani di kampus, dengan pangkat mahasiswa abadi. Menjadi paling "sok idealis" dengan terus berpredikat sebagai aktivis kampus yang tidak lulus-lulus, bunuh diri kelas (seolah-olah menjadi bagian dari kelompok mahasiswa yang selalu memperjuangkan kepentingan rakyat). Merasa "paling PMII" karena lebih banyak waktu untuk PMII ketimbang kuliah, IPK kecil justru karena fokus ber PMII. Padahal, kita semua ber PMII justru karena masuk kuliah. Kenapa kuliahnya justru dikesampingkan? Harusnya bisa seiring sejalan toh?! Waktu di pesantren, hafal kitab jurumiyah, irmiti, tetapi hilang hafalannya karena ber PMII. *Disorientasi* ini sudah terjadi dan mengakar dibeberapa tempat, dan tidak boleh menguat. Harus segera diatasi.

Harapan kami, dengan berbagai ketetapan pleno PB PMII yang sudah menjadi PO, kami dapat mendorong kaderisasi yang kembali insaf dan sadar terhadap tujuan PMII, yaitu terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kapada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kesana arah kaderisasi kita! Kesana arah pergerakan kita! Jika PMII tidak bisa mendorong secara sistemik penguatan kualitas kadernya untuk mencapai tujuan PMII, berarti PMII "absen". Dan untuk mendorong pencapaian kaderisasi yang sistemik, tentu dibutuhkan kebijakan PB yang berlaku secara nasional.

Dengan kultur PMII yang berkembang dalam dua dekade terakhir, jika ada kader yang ingin serius dengan perkuliahannya, berarti dia harus keluar dari kultur PMII yang mengacuhkan perkuliahan. Berprestasi dalam perkuliahan, tetapi dianggap cupu. Parahnya, pilihan ini mendorong terciptanya "*gap*". Dia dianggap tidak loyal, sehingga dijauhkan dari pergaulan PMII. Lalu yang bersangkutan lulus dengan predikat terbaik, berprestasi. Harusnya, kader yang seperti ini bisa dijadikan ikon, simbol atau paling tidak dijadikan alat kampanye PMII. Bahwa dengan ber PMII, anda akan berprestasi dikampus, cepat lulus, dan banyak sahabat. Tetapi yang terjadi tidak seperti itu, maka jangan kecewa jika dikemudian hari banyak kader yang seperti ini, sukses di dunia professional merasa bahwa apa yang sudah dicapainya adalah hasil usaha dan keringatnya sendiri, tidak ada kaitannya dengan sejarah kalau yang bersangkutan pernah berproses di PMII. Tentu ini tidak boleh terjadi lagi sahabat!

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Hal baik tidak selamanya disambut dengan baik. Apalagi niat baik yang sejak awal dianggap dilakukan dengan cara yang tidak baik, "sepihak". Ya. Kami sangat menyadari hal itu. Tidak sedikit yang kemudian mempertanyakan, apa itu ketetapan pleno? Dimana status hukumnya dalam sistem legal permusyawaratan di PMII?! Bahkan ada juga sebagian yang langsung menjudgetifikasi bahwa PB PMII telah menyalahi AD/ART, menyalahi PO. Bahkan ada juga tulisan yang beredar via bc *smart phone* yang dengan tegas menyatakan PB PMII Goblok. Kami merespon hal itu dalam diskusi terbatas di PB, dan kesimpulannya kita acuhkan saja. Di dunia tulis menulis, kita mengenal istilah "etika jurnalistik", tulisan dibalas dengan tulisan. Kami simpulkan tulisan itu tidak perlu dibalas.

Kenapa tidak dibalas? Bukan kami tidak bisa menulis, tetapi tidak mau menulis untuk sekedar di *share* yang mengcounter opini tersebut. Kenapa? Karena untuk menjelaskan semua Tap Pleno PB PMII, akan sedikit banyak memaparkan agenda-agenda strategis organisasi. Agenda-agenda strategis organisasi hanya boleh dikonsumsi oleh kader, bukan khalayak ramai. Kita pahami bahwa, "informasi rahasia" apapun yang dapat diakses dalam *link* jaringan internet, sudah bukan rahasia lagi. Jika semua informasi agenda strategis PMII dapat diakses oleh pengguna internet, bisa jadi mereka yang

mengakses adalah lawan-lawan politik kita di kampus, ini bahaya sahabat! Sedangkan kita tidak pernah tahu, seperti apa strategi mereka.

Tentunya kami memaklumi, keinginan sahabat-sahabat di PR/PK/PC/PKC untuk eksis merespon kebijakan PB, baik yang pro maupun kontra dalam dunia tulis menulis (apalagi yang tersentuh emosionalnya, pasti inspirasi menulisnya luar biasa). Semua itu memang menjadi bagian dari dialektika kita dalam ber PMII. Di dalam tulisan ini, saya coba memaparkan semuanya, tulisan ini hanya untuk kalangan terbatas. Tidak ada niat sedikitpun agar tulisan ini diperbanyak dan dapat diakses oleh khalayak, saya niatkan tulisan ini hanya boleh diakses oleh kader-kader dan alulmni PMII saja. Karena, didalamnya banyak membahas urusan internal kita, orang lain tidak boleh tahu, apalagi paham.

Besar harapan kami, jika ada saran dan kritik, bahkan sanggahan dari kader dan alumni terkait tulisan ini, dapat langsung menghubungi saya atau bisa memberikan catatannya via email, ke alamat email, munandar.ns@gmailcom. Pada kata pengantar, telah saya sampaikan, semoga tulisan ini bisa menginspirasi munculnya tulisan lain sebagai “antitesa”, bukan hanya sebatas komentar lisan. Kenapa? Untuk memperkaya dan menambah bahan bacaan bagi para kader, juga untuk membangun kembali dialektika kita dalam khasanah tulis menulis yang sudah lama kita tinggalkan.

Ya. Kami (PB PMII) merasa sangat kesulitan untuk membuat standarisasi bahan bacaan bagi anggota yang ingin ikut PKD dan kader yang ingin ikut PKL. Kira-kira, jika kita ingin mendorong perspektif kolektif dari kader-kader kita, terkait dengan pamahaman keorganisasiannya, pemahaman ahlussunnah wal jamaah nya, dan pemahaman kebangsaannya, mereka harus sudah membaca buku apa?! Kita belum memiliki standart bacaan baku untuk kader-kader kita. Sepertinya hal ini harus di rumuskan. Jadi bayangan saya, kedepan ketika screening kaderisasi sesuai tingkatannya, maka yang menjadi bahan wawancara adalah seputar isi buku. Misal: apa yang sahabat pahami dalam bab 9 buku kaderisasi? Dengan demikian, dapat kita dorong budaya membaca yang sudah luntur. Jadi, semakin tinggi tingkatan kaderisasi, maka semakin banyak buku yang dibaca oleh kader. Tentunya bacaan yang terkait dengan keorganisasian kita, dengan memenuhi unsur Pergerakan, Mahasiswa, Islam dan Indonesia. Bacaan-bacaan ini menjadi wajib, dan membaca buku-buku bacaan yang sesuai dengan jurusan/fakultasnya masing-masing adalah fardu ‘ain. Tidak ada bacaan yang tertinggal diantaranya.

Semoga, ketua kaderisasi nasional PB PMII periode selanjutnya dapat merumuskan hal itu. Tentu, konsekuensi logisnya adalah PB harus membuat *soft copy* bahan bacaan tersebut dan di-*share* ke cabang-cabang untuk di distribusikan kesetiap anggota dan kader. Atau bisa juga di-*upload* di web PB dan bisa di-*download* dengan mudah, tetapi dengan menggunakan *security code*. Agar tidak semua orang yang bisa mengakses internet bisa juga men-*download*, hanya kader PMII saja. Juga penting saya sampaikan, agar kader yang berhasil men-*download* tidak sembarang menyebarluaskan bahan

bacaan internal kita. Jangan sampai ada penyusup yang mudah masuk karena telah paham tentang kita.

3. **"MENGGUGAT" LEGALITAS TAP PLENO PB PMII**

Saya ingin kembali pada pertanyaan diatas, yang menyangsikan Tap Pleno PB sebagai landasan hukum organisasi kita. Sebelumnya, saya ingin sedikit bercerita pengalaman, sepengetahuan saya, pengalaman menjadi PB pada periode sahabat ketua umum Addin Jauharudin, rapat pleno BPH PB pernah dilaksanakan untuk membahas "cabang-cabang bermasalah", yaitu ketika ada Konfercab yang menghasilkan dua versi ketua cabang, dibutuhkan ketetapan hukum untuk memastikan legalitas ketua terpilih yang kemudian diberikan SK oleh PB. Karena sifatnya yang sangat khusus, hanya terkait dengan permasalahan cabang yang dimaksud, maka hasilnya adalah Keputusan Pleno PB. Sedangkan dalam merumuskan sistem yang menyeluruh dan bersifat umum, berlaku secara nasional maka dalam bahasa hukum, Pleno PB yang kami hasilkan adalah Ketetapan Pleno PB. Ketetapan, bukan keputusan (kira-kira itulah point penting dari pakar hukum PB PMII, yang juga sebagai Ketua Aparatur Organisasi PB PMII, Sahabat Erfan, SH, MH).

Kemudian, Di ART Pasal 23, ayat (1) Ketua dan Sekretaris KOPRI masuk dalam anggota Pleno BPH PB PMII. Saya pikir pasal ini cukup jelas, kenapa kami (BPH) tidak melibatkan Sahabat-sahabat PB yang ada di Biro dan Lembaga dalam merumuskan Tap Pleno. Hanya BPH PB dan Ketua dan Sekretaris KOPRI PB. Intinya, istilah rapat pleno BPH PB dalam proses pengambilan keputusan di PMII, bukanlah hal yang asing. Apalagi mengada-ada. Ini hal pertama yang perlu kita pahami bersama.

Yang kedua, dalam salah satu poin di naskah pembaiatan, baik pembaiatan sebagai anggota, kader, maupun sebagai pengurus PMII diberbagai level, kita semua mengucapkan dengan penuh khidmat, "…*senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlussunah wal Jama'ah, Nilai Dasar Pergerakan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Nilai-nilai, Norma-norma, dan produk hukum PMII lainnya, serta cinta tanah air dan bangsa".*

Dalam konteks ini, untuk memperkuat pembenaran kami, bisa saja kami menyatakan bahwa legalitas ketetapan pleno PB adalah bagian dari "produk hukum PMII lainnya". Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah naskah pembaiatan bisa menjadi bagian dalam penguat legal formal organisasi? Apa yang melegalkan naskah pembaiatan? Apa landasan hukumnya, sehingga setiap selesai Mapaba, PKD dan PKL juga pelantikan PR hingga PB harus mengucapkan naskah pembaiatan? Tentu akan semakin dinamis jika pertanyaan ini kita elaborasi. Ya, hal itu belum ada payung hukumnya. Hari ini sudah kami buat, yaitu Tap Pleno tentang pedoman teknis pelaksanaan kaderisasi formal. Ada bagian yang menjelaskan tentang pembaiatan dan naskahnya. Jadi, sejak periode ini, naskah baiat adalah baku. Tidak boleh diubah-ubah, karena sudah dilegalkan dengan

aturan organisasi. Terlebih, sekarang aturan itu sudah menjadi PO pada Muspimnas lalu di Ambon.

Satu hal yang juga harus kita pahami adalah bahwa dalam filsafat hukum, ada aturan yang tidak tertulis tetapi berlaku secara turun-temurun dan berkembang dikomunitas atau masyarakat tertentu, dan itu menjadi bagian dari hukum yang harus dipatuhi. Dalam konteks yang lain, dapat kita katakan bahwa semua hal yang pernah kita lewati bersama dalam berproses di PMII, sekalipun tanpa legalitas (pembaiatan), semua menjadi bagian ke-khas-an PMII. Menjadi kearifan lokal PMII, itulah kebiasaan, norma-norma yang berkembang. Pun demikian, norma-norma harus di pegang teguh.

Pada saat Rakornas di Mataram, ada perwakilan dari sahabat PKC Jawa Barat yang menyatakan ketidak setujuannya terhadap Ketetapan Pleno PB. Ketika itu, Sahabat Sekjen bertanya, “poin mana yang tidak sahabat setujui secara substansi? Karena Tap Pleno kita banyak, yang mana yang tidak di setujui?”. Lalu beliau menjawab, “secara substansi kami setuju. Kami hanya mempertanyakan posisi Pleno dalam pengambilan keputusan, karena harusnya semua keputusan yang bersifat nasional harus dibawah PO, dan itu berarti harus dibahas dan disahkan pada forum Muspimnas”. Karena ketika itu secara substansi tidak ada penolakan, forum dilanjutkan dan selesai.

Semoga saja paparan saya diatas tadi (terkait dengan Pleno PB) bisa menjawab keresahan atau kebingungan sahabat-sahabat PKC Jawa Barat. Karena saya sangat bangga dengan ikhtiar sahabat-sahabat PKC Jawa Barat yang dimotori oleh Sahabat Nasir. Sebelum pelaksanaan Rakornas di NTB, sahabat-sahabat PKC Jawa Barat menggelar Rakorda, tidak ketinggalan juga mereka membawa rumusan hasil-hasil Rakorda dan diberikan kepada kami secara langsung dalam forum Rakornas. Dan saya cukup kagum pada inovasi yang dibuat oleh PKC Jawa Barat, dari hasil Rakordanya dapat disimpulkan, PKC Jawa Barat telah membahas rumusan kaderisasi dan kurikulum kaderisasi dengan merujuk pada buku kaderisasi nasional 2014, dengan judul diatasnya adalah Keputusan Referendum.

Mungkin nanti sahabat-sahabat akan mendapati buku dari PKC Jawa Barat yang akan menjelaskan, apa yang dimaksud dengan Keputusan Referendum itu? Dimana legitimasinya dalam skema permusyawaratan dalam keorganisasian kita? Bisa saja nanti akan berkembang pada pertanyaan, “dalam forum itu, PKC Jawa Barat menggelar Rakorda atau menggelar Referendum? Dimana relevansinya, antara forum Rakorda dengan keputusan referendum yang dihasilkan?” Karena mungkin cakupannya hanya se-wilayah Jawa Barat, minimal untuk sahabat-sahabat PR hingga PC di Jawa Barat akan dapat pencerahan terkait dengan hal itu, sehingga akan banyak referensi bacaan bagi anggota dan kader PMII, khususnya di Jawa Barat.

Sekedar informasi saja, dalam ADRT kita, istilah referendum memang ada. Ada dua klausul yang mengatur terkait dengan hal itu. Pertama, dalam Anggaran Dasar Pasal 11

ayat (1),“Apabila PMII terpaksa harus dibubarkan dengan keputusan kongres atau referendum yang khususnya diadakan untuk itu, maka hak milik dan kekayaan organisasi diserahkan kepada organisasi yang lain yang asas dan tujuannya tidak bertentangan”. Dan kedua, dalam BAB XI PERUBAHAN DAN PERALIHAN Pasal 46 Perubahan ayat (1),“Perubahan ART ini hanya dapat dilakukan oleh Kongres dan referendum yang khusus diadakan untuk itu”.

Artinya, klausul referendum itu memang diatur dalam ADRT kita. Tetapi, hanya untuk Pembubaran organisasi PMII dan perubahan ART PMII referendum itu dapat digelar. Pastinya, ruang lingkupnya pun nasional. Menyeluruh. Tidak dalam ruang lingkup PKC apalagi PC.

Itu kira-kira perdebatan “legalitas Tap Pleno PB”. Kedepan dapat kami pastikan sudah tidak ada lagi perdebatan terkait hal itu. Kenapa? Karena dalam PO yang telah disepakati di Muspimnas Ambon, Pleno PB PMII menjadi bagian dari permusyawaratan yang legal diatur dalam PO. Selama ini tidak ada aturannya, sekalipun putusannya dilegalkan. Jadi, setelah di atur dalam PO, PB kedepan dapat membuat Tap Pleno yang lebih detail untuk mengisi kekosongan aturan atau permasalahan yang muncul, dengan dinamika yang berkembang. Tidak perlu menungu Muspimnas, apalagi Kongres. Dengan waktu yang tidak terlalu banyak, tentu hal itu akan mubazir. Melalui legalitas itu pula, kedepan Tap Pleno PB PMII menjadi perangkat yang efektif dalam menjawab berbagai hal yang belum diatur.

BAB II

KADERISASI PMII MENJAWAB TANTANGAN ZAMAN

Bagaimana PMII menjawab tantangan zaman? Untuk menjawab tantangan zaman, tentunya penting bagi kita memahami bagaimana dinamika, proyeksi dan perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa depan. Pastinya, yang tidak kalah penting lagi adalah memahami kondisi kita hari ini. Refleksi menjadi bagian utama untuk memastikan langkah-langkah pasti dalam menata proyeksi masa depan kita, baik secara personal maupun institusional.

Kita ingin Alumni-alumni PMII memimpin bangsa ini dimasa depan, menuju NKRI yang makmur, mendorong terciptanya NKRI yang *baldatun, toyibatun warobbun ghofur*. Kita ingin dimasa depan kader PMII bisa menjadi pemimpin diberbagai sector. Kita ingin memastikan bahwa ketika bangsa ini dipimpin oleh alumni PMII, tidak ada lagi korupsi. Negeri ini menjadi negeri yang aman dan damai, yang menjadi percontohan dunia, sebagai negeri yang islami, yang menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Yang merubah persepsi

dunia bahwa Islam adalah agama teroris. Untuk mencapai tujuan masa depan tersebut, tentu kaderisasi PMII hari ini menjadi kunci untuk menuju kesana.

Faktanya, hari ini kaderisasi PMII lemah di kampus-kampus umum, negeri, favorit. Padahal basis input kepemimpinan diberbagai sector selalu diisi dari alumni kampus umum, negeri dan favorit. Contoh sederhana saja, di Sumatera Selatan, hampir 80% sekda kabupaten/kota adalah alumni Universitas Sriwijaya, di Kalimantan Selatan, hampir 80% sekda dikabupaten/kota adalah alumni Universitas Lambungmangkurat. Begitu dan seterusnya. Kita ingin kader PMII dimasa depan bisa menjadi kebanggaan bangsa dengan penelitian dan penemuannya di bidang *scientific* yang bermanfaat. Faktanya, hari ini kaderisasi PMII lemah di fakultas dan perguruan tinggi ilmu eksak.

Disisi lain, kaderisasi kita surplus di bidang ilmu agama, PAI, Tarbiyah, dan Syariah. Kita juga memiliki keunggulan kepemimpinan di sektor keagamaan, baik secara struktural maupun secara kultural, banyak berasal dari alumni PMII. Contoh sederhananya adalah kepemimpinan di struktur kementerian agama, mulai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kandepag dan Kanwil hingga pemimpin agama di kampung-kampung, sekolah, masjid-masjid dan kampus agama, jika didaerah itu ada kampus agama favorit, sekalipun bukan kampus negeri, pasti lebih banyak diisi oleh lulusan pesantren yang menjadi basis input kaderisasi PMII yang kemudian menjadi tokoh masyarakat di daerahnya masing-masing.

Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus dimaksimalkan dengan potensi tersebut? Dan apa upaya yang harus di optimalkan dalam meningkatkan kaderisasi kita di kampus umum, negeri/swasta favorit? Sebelum lebih jauh kita membahas hal tersebut, saya ingin mengajak sahabat-sahabat untuk sedikit merefleksi kondisi internal kita.

PEMETAAN MASALAH DAN LANGKAH SOLUSI PB PMII

Kita mahfum, bahwa PMII adalah organisasi kader. Dalam skema kaderisasi kita, kita memiliki 3 pola kaderisasi. Pertama Kaderisasi formal berjenjang (Mapaba, PKD dan PKL), kedua kaderisasi non formal (follow up Mapaba, PKD dan PKL) dan ketiga adalah kaderisasi informal (berbasis hoby, minat dan bakat juga mentoring senior/pengurus kepada anggota/kader). Dari ketiga skema kaderisasi di atas, yang menjadi andalan adalah skema kaderisasi formal. Hampir disetiap struktur PMII fokus pada pengawalan dan pelaksanaan kaderisasi formal yang disesuaikan dengan kemampuannya. Sebelum PB PMII periode 2014-2016 ini dikukuhkan, sudah banyak PC PMII di Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur yang melaksanakan PKL. Begitu juga Komisariat-komisariat yang melaksanakan PKD, karena memiliki Rayon yang melaksanakan Mapaba. Semua berjalan apa adanya, sesuai dengan kebiasaan turun temurun. Dari pembacaan yang komprehensif terkait dengan dinamika kaderisasi PMII, kami membagi 3 klasifikasi permasalahan kaderisasi kita, diantaranya adalah:

2. MASALAH UMUM KADERISASI

Dalam periode kepemimpinan PB PMII masa khidmad 2014-2016 ini, kami mencoba memahami dinamika perkembangan kaderisasi formal yang sudah berjalan selama ini, evaluasi - refleksi. Hingga kami mendapati catatan penting berupa hipotesa, pertama, bahwa ternyata kaderisasi formal yang selama ini berjalan sangat terdesentralisasi bahkan sangat kental muatan seremonialnya. Kedua, tidak terkoneksi dengan skema kaderisasi non formal dan in formal sebagai follow up, akibatnya kaderisasi kita anjlok dari setiap jenjang yang ada (dari mapaba ke PKD, dari PKD ke PKL). Misalnya, jumlah peserta mapaba 200 orang, tetapi yang mengikuti jenjang PKD maksimal hanya 20 orang. Sebagian pengurus bahkan senior, menganggap ini adalah hal biasa. Seleksi alam. Apa yang salah? Dimana salahnya? Memang sudah begitu dari sananya, biasa saja.

Sebagai ketua kaderisasi nasional yang bertanggung jawab atas kuantitas dan kualitas kader, tentu hal ini harus dimaknai sebagai permasalahan kaderisasi, bukan hal biasa. Lalu dimana masalahnya?! **Pertama,** penting bagi kita untuk menyadari “kesalahan” yang selama ini tidak kita sadari. Ya. Selama ini kita terjebak dalam ruang *politiking* yang ngawur. PMII ini organisasi kader, tetapi dalam prakteknya lebih politis dari partai politik. Kaderisasi kita seolah “terdesentralisasi”, tidak ada koordinasi antara pelaksana dengan struktur diatasnya, kebanyakan karena urusan politik organisasi. Rayon/Komisariat tidak mengundang Cabang dalam Mapaba karena ketua cabang dianggap bukan orang yang dikehendaki Rayon/Komisariat tersebut (dianggap musuh politik). Sebaliknya, pengurus cabang pun tidak mau datang mengawal Mapaba karena merasa tidak diundang. Ini adalah dinamika masalah, dan harus dicarikan solusinya. Tidak boleh lama dan berlarut-larut. Lalu, apa kebijakan PB sebagai solusi terkait dengan hal ini?

Kami membuat Ketetapan Pleno PB PMII terkait dengan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kaderisasi Formal dan Sertifikasi Kaderisasi Formal. Melalui Tap Pleno ini, setiap kaderisasi yang dilakukan oleh level kepengurusan dibawah, harus berkoordinasi dengan level kepengurusan diatasnya. Karena legalitas sertifikat kaderisasi formal yang dilaksanakan, harus ditandatangani oleh institusi pelaksana dan “mengetahui” oleh level kepengurusan diatasnya (Mapaba, jika dilaksanakan oleh Pengurus Rayon, maka sertifikat ditandatangani mengetahui Pengurus Komisariat. Jika dilaksanakan oleh Pengurus Komisariat, maka sertifikat ditandatangani mengetahui Pengurus Cabang. PKD, jika dilaksanakan oleh Pengurus Komisariat, maka sertifikat ditandatangani mengetahui Pengurus Cabang. Jika dilaksanakan oleh Pengurus Cabang, maka sertifikat ditandatangani mengetahui Pengurus Koordinator Cabang. PKL, baikyang dilaksanakan oleh PC/PKC ditandatangani mengetahui oleh PB).

Secara teknis, melalui Tap Pleno ini, kami berharap ada kesadaran bersama ditingkat pengurus, bahwa selesai perhelatan politik dalam ruang RTK/Konfercab/Konkorcab bahkan Kongres, maka kaderisasi harus menjadi ajang konsolidasi organisasi. Karena memang PMII adalah organisasi kader. Selama ini kaderisasi justru menjadi gengsi politik struktur, yang kalah melaksanakan kaderisasi formal untuk menyudutkan yang menang.

Misalnya, PKD yang biasa dilaksanakan oleh PC, tiba-tiba mau dilaksanakan oleh PK, padahal PK itu tidak punya Rayon dan belum pernah sebelumnya melaksanakan PKD. Parahnya, PKD yang dilaksanakan tidak mengundang PC setempat. Hal begitu juga terjadi dengan PKL. Dengan kebijakan ini, kami ingin membangun kesadaran legalitas formal kaderisasi oleh para penyelenggara, agar tidak larut dalam ruang *politicking*.

Kedua, kaderisasi kita hanya terfokus pada meningkatan kualitas personal kader tanpa diiringi dengan skema penguatan basis. Satu periode kepemimpinan sahabat Ketum Addin yang lalu, setidaknya ada 30 PKL yang dilaksanakan oleh PC dan PKC. Dengan berhusnudzon, jika masing-masing PKL itu diikuti oleh rata-rata 30 kader, berarti ada 900 kader alumni PKL yang memiliki kualitas lebih, dibanding dengan kader yang belum ikut PKL. Lalu apa efeknya terhadap penguatan basis? Tidak ada.

Hari ini, melalui Tap Pleno PB Sertifikasi Kaderisasi Formal, peserta PKL hanya akan mendapatkan sertifikat PKL setelah melakukan penugasan merekruit langsung 10 calon anggota baru, di jurusan, fakultas dan kampus yang minim PMII nya. Artinya, jika peserta tersebut berasal dari IAIN/UIN yang sudah sangat masif kaderisasinya, maka harus merekruit anggota di luar basisnya. Untuk peserta PKD, tugas rekrutimentnya minimal 2 orang calon anggota baru.

Lalu muncul pertanyaan, jika saya sudah merekruit 10 orang yang siap untuk di Mapaba, bagaimana caranya? Apakah saya yang membuat Mapaba? Mengkader langsung? Tidak! Mapaba dilaksanakan oleh insitusi, bukan perorangan. Jadi alumni PKD/PKL harus mampu menggerakan Rayon/Komisariat/Cabang untuk melaksanakan Mapaba dari calon anggota yang telah berhasil di rekruitnya. Disinilah pentingnya sinergi dan kerjasama antar alumni PKD/PKL yang berasal dari satu Komisariat atau satu Cabang, untuk mendorong pelaksanaan Mapaba oleh Rayon/Komisariat/Cabang di daerahnya.

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Ini adalah kebijakan baru. Banyak cemooh dan cibiran yang langsung kami rasakan, terutama kami di Tim Kaderisasi Nasional. Tetapi tentu hal itu tidak mengurangi niat kami untuk membangun sistem. Ya. Selama ini kaderisasi kita berjalan tanpa legalitas sistem, bahkan terkesan yang penting jalan. Asumsi kami, jika kebijakan ini berjalan dan berkelanjutan, pasti ada efek positif akan kita rasakan dalam 1 periode PB pasca kami demisioner. Sederhananya, coba saja jumlah kader alumni PKL (yang meningkat kualitas personalnya– bersertifikat) di kali kan minimal 10 (anggota baru), ditambah jumlah kader alumni PKD (yang meningkat kualitas personalnya – bersertifikat) di kali kan minimal 2 (anggota baru). Kita akan punya alumni PKD/PKL yang teruji militansinya dalam pengembangan basis, artinya kualitas kader kita meningkat dan jumlah kader kita bertambah. Sederhananya, dengan sistem ini, output kaderisasi kita tidak hanya meningkatkan kualitas kader, tetapi juga membangun penguatan basis.

Semoga sekelumit penjelasan diatas bisa menjawab kritik sahabat-sahabat, “PB kok bikin sistem kaderisasi kayak MLM?!”. Saya katakan, ya! Ini adalah sistem multi level kaderisasi yang tidak hanya berorientasi pada kualitas kader alumni PKD dan PKL dalam penguatan output kaderisasi, tetapi juga berorientasi pada kuantitas anggota (calon kader) penguatan basis kader PMII di kampus-kampus, fakultas-fakultas, dan jurusan-jurusan yang minim PMII nya. Selain itu juga kebijakan ini berorientasi pada konsolidasi kaderisasi, efeknya minimal PC memiliki data anggota pasca Mapaba di wilayah koordinasinya, PKC memiliki data alumni PKD di wilayah koordinasinya dan PB memiliki data alumni PKL se Indonesia (selama ini, kita tidak memiliki data kader). Pastinya, kebijakan ini juga berorientasi pada konsolidasi organisasi, karena setiap level struktur akan kait mengait dan sinergi, dalam mengawal dan melaksanakan kaderisasi yang berjalan disetiap level.

Kok bisa? Bagaimana caranya? Bisa! Karena sertifikat ditandatangani mengetahui oleh level kepengurusan di atasnya (selain sertifikat yang di laporkan untuk di tanda tangani, pelaksana pelatihan juga melampirkan rekapitulasi kader yang sudah menjalankan penugasan). Sebelum kebijakan ini kami buat, ditahun pertama periode kami, ada banyak Komisariat, Cabang yang melaksanakan PKD dan PKL, lalu RTK/Konfercab (sudah biasa PKD/PKL jadi agenda akhir periode kepengurusan). Kemudian saya minta data peserta agar di email, sambil menunggu sertifikat yang katanya mau dikirim. Sahabat tahu? Lama saya menunggu. Padahal, ketika saya minta, dijawab, Siap ketua! Segera dikirim! Dan pada akhirnya, data itu tidak pernah kami terima.

Katanya, karena hilang entah kemana.Komisariat/Cabang mana itu? Tentu tidak perlu saya sebutkan. Semoga saja semua kader yang membaca tulisan ini, difasilitasi sistem yang kami bangun, bisa sama-sama memperbaiki sistem administrasi keorganisasian yang selama ini belum tertata rapih.

Pola penugasan untuk mendapatkan sertifikat PKD/PKL, akan mendorong kesadaran dari masing-masing kader bahwa membangun basis dan mengembangkan PMII adalah kewajiban kita semua, tanggung jawab seluruh kader. Kewajiban kita semua! Selama ini jika dalam satu periode kepengurusan, ada Rayon atau Komisariat yang “mati” kaderisasinya, maka yang disalahkan adalah Pengurus Komisariat/Cabang/Koorcab. Di anggap tidak “becus” mengawal kaderisasi. Akhirnya muncul sentimen *periodik*, “waktu saya jadi ketua/pengurus, jumlah Rayon, jumlah Komisariat, jumlah Cabang, jumlah kader luar biasa. Setelah pengganti saya, karena gak ngurus, berantakan semua”. Inilah sentimen periodik yang tidak boleh lagi terjadi dimasa depan.

Kedepan, tentu tidak akan ada lagi basis kita yang berantakan, karena semua kader dari alumni PKD/PKL memiliki kesadaran untuk mengawal dan membesarkan basis anggota dan kader di setiap kampus tanpa tersekat dalam tempurung kepalanya, yaitu terkait dengan sentimen Rayon/Komisariat asalnya.

Selain beberapa hal yang telah di paparkan di atas, kami juga ingin menegaskan efek positif membangun mental kader dari kebijakan ini – “kader naik kelas!!!”. Pada paparan di atas, saya singgung “*politicking*” yang lebih berkembang di kepala kader dari pada semangat mengkader. Dengan kebijakan ini, tentu semua kader akan mengasah dan memiliki kemampuan membangun basis di luar basis asal Rayon/Komisariatnya, jadi dengan sendirinya sentimen Rayon asal/Komisariat asal akan menjadi lentur. Yang ada adalah, sentimen PMII. Harus di jaga keutuhan organisasi, harus terpilih kader terbaik, harus di kesampingkan sentimen lokal yang dapat merusak soliditas – naik kelas!!! Bahwa kader dari Komisariat yang lain juga kader saya, saya yang mengkader dan yang membangun basis di Komisariat tsb.

Selama ini, “chaos” ribut di internal, kebanyakan karena terlalu lama kita berkutat pada sentimen Rayon asal/Komisariat asal. Jadi, ketika ada ruang politik organisasi baik itu RTK atau Konfercab, pandangan kita sempit. Pokoknya, yang harus menjadi ketua adalah kader kita, dari rayon/komisariat kita! Karena yang lain adalah, bukan kita. Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Apakah hal seperti ini akan terus kita lakukan? Dengan segala kerendahan hati, saya ingin sampaikan disini. Jika ada senior yang masih ribut urusan Konfercab, RTK apalagi RTAR, pasti senior itu tidak pernah membangun basis di luar Rayon/Komisariat asalnya. Bahkan, mohon maaf, bisa jadi beliau itu tidak pernah membangun relasi keluar.

Dalam konteks kebijakan ini, PB PMII akan berfokus pada pengembangan Komisariat dan penguatan struktur cabang. InsyaAllah hal itu akan dapat terwujud dengan sistem yang sudah kita bangun, setiap kader bertanggung jawab membangun basis dan mengembangkan basis kaderisasi di kampus-kampus sekitarnya. Jika di kongres Jambi 2014 yang lalu tercatat ada 228 cabang, dengan perkembangan yang ada hingga tulisan ini saya susun, kemungkinan dalam kongres selanjutnya jumlah cabang yang legal dan dapat mengikuti kongres kedepan maksimal hanya 200 cabang. Karena per Februari 2016, SK kepengurusan PC dan PKC yang di keluarkan PB baru masuk pada nomor 184 (penomoran SK).

Kenapa? Sudah menjadi kesepakatan kami di PB PMII, cabang-cabang yang tidak melaksana-kan kaderisasi dan konfercab akan kami “eksekusi” (turunkan statusnya menjadi cabang persiapan, bahkan kami bekukan). Ini penting untuk menyehatkan organisasi kita, harus ada *reward and punishment* atas cabang yang melakukan kaderisasi, dengan yang tidak. Mohon sahabat-sahabat di PKC dan cabang-cabang tetangga dari cabang yang akan kami “eksekusi”, bisa mendukung kebijakan ini. Mari kita sama-sama membesarkan PMII dengan aktivitas kaderisasi, bukan sekedar urusan dukung mendukung kandidat di Konkorcab atau di Kongres. Mari kita dudukan konsepsi adil dalam doktrin ahlussunnah wal jamaah kita, dalam porsi yang tepat. Adil harus disesuaikan antara kewajiban dengan hak. Bagaimana mungkin sahabat-sahabat yang

serius urus kaderisasi tiba-tiba haknya sama dengan yang tidak pernah urus kaderisasi?! Bisa mendapatkan SK dan memiliki hak suara di Konkorcab/Kongres?!

Dalam konteks ini, kami juga ingin meminta kesadaran sahabat-sahabat di cabang agar sadar kondisi. Insyaf se insyaf-insyafnya. Karena biasanya, kalau terkait dengan hak suara/hak memilih di RTAR-RTK-konfercab-konkoorcab-kongres, semua logika rasional hilang (*reward and punishment* di kesampingkan). Pengurus yang mendapatkan *reward* bisa menggunakan hak organisasi untuk memilih ketua (PR/PK/PC/PKC) dan ketua umum PB, tahu persis tetangganya tidak melakukan kaderisasi dan layak hak pilihnya dihilangkan. Tetapi, atas nama kepentingan politik karena sudah klik untuk suksesi kandidat yang sama, justru menjadi hilang akal. Menuntut hak tetangganya tersebut diberikan, atas nama solidaritas. Solidaritas semu!!! Ini salah. Mohon jangan diulangi, jika selalu kita ributkan hal itu, konsolidasi organisasi ini akan terus terganggu. Begitu juga dalam konteks Kopri. Kita semua paham, Kopri adalah badan semi otonom PMII. Kongres memilih Ketua Kopri. Fear saja. Jika Cabang/Koorcab tidak memiliki kepengurusan Kopri di level strukturnya, jangan menuntut hak suara/hak pilih. Biarkan saja Kopri berdinamika antar Kopri, agar penguatan personal, penguatan sistem dan institusional Kopri semakin baik meningkat.

Pada awal Januari 2016, saya didatangi 2 orang sahabat dari Kota Tangerang. Mereka membawa SK Komisariat PTNU Tangerang yang di legalisasi oleh PC Ciputat, bertanya kepada saya bagaimana mendorong Tangerang menjadi Cabang persiapan dan definitif. Menurutnya, mereka sudah berkoordinasi dengan PKC Banten. Lalu didepan mereka saya kontak Sahabat Mukhtar Ketua PKC Banten, saya arahkan agar PKC melakukan pendampingan melekat kepada kaderisasi di Tangerang. Tetapi, penekanan saya adalah mendorong agar PK PTNU mengkonsolidasikan kaderisasi di tiga kampus terdekat, lalu jika sudah sesuai dengan aturan yang ada, bisa di SK kan oleh PC Ciputat (cabang terdekat dari Tangerang), baik sebagai Komisariat persiapan maupun definitif. Nanti, jika sudah memiliki 3 Komisariat definitif, maka PKC Banten memfasilitasi Konfercab dengan sebelumnya melaporkan kepada PB. Selesai itu, baru susunan SK hasil Konfercab Tangerang direkomendasi oleh PKC untuk di SK kan sebagai Cabang Persiapan oleh PB. Dengan kaderisasi yang massif dan keorganisasian yang mandiri, kedepan di Kota Tangerang akan ada Cabang PMII yang definitif.

Begitu juga dengan Aceh Tengah. Sejak awal tahun 2015, Sahabat Haidir, dari STAI Gajah Putih menghubungi saya terkait dengan niatnya ingin membentuk PC Takengon/Aceh Tengah. Kita diuntungkan karena banyak alumni PMII Aceh, Medan dan Semarang yang menjadi dosen di sana yang kemudian mendorong kaderisasi PMII. Saya arahkan Sahabat Haidir agar membentuk Komisariat yang di SK kan oleh PC terdekat, PC Lokshomawe. Jika sudah layak, menjadi cabang persiapan, kira-kira prosesnya seperti yang saya jelaskan kepada sahabat-sahabat Tangerang.

Kedepan, tidak akan ada lagi pembentukan Cabang sebelum ada beberapa Komisariat yang terbentuk (yang di SK kan oleh cabang terdekat) dan massif kaderisasinya. Ini bagian dari komitmen kami untuk lebih berorientasi kepada penambahan jumlah Komisariat ketimbang Cabang. Sampai di titik ini, saya sangat berharap PC terdekat yang berkesempatan mendampingi pengembangan Komisariat Persiapan hingga menjadi Komisariat Definitif, dan menuju pembentukan Cabang persiapan, tidak mengedepankan "*politicking*". Keluar, kita selalu berkata bahwa kita adalah organisasi mahasiswa terbesar, dengan jumlah PC terbanyak. Tapi, tahukah anda? Dengan jumlah cabang 228, kita hanya memiliki 525 komisariat. Artinya, jika dirata-rata maksimal jumlah komisariat kita ada 2 per cabang. Besarkah kita? Padahal basis kaderisasi kita ada di kampus – komisariat, bukan cabang.

Pada sepertiga akhir 2015, PB PMII menetapkan PC Kota Tegal dan PC Kabupaten Tegal menjadi satu, menjadi PC Tegal. Ya, karena kaderisasi disana tidak signifikan. Semoga saja dengan menjadi satu kemudian kaderisasi menjadi lebih efektif dengan jumlah Komisariat yang tidak hanya satu Komisariat. Pengembangan dan penguatan komisariat harus menjadi prioritas. Masih banyak Cabang PMII di Jawa yang jumlah Komisariatnya hanya satu, perlahan tapi pasti, hal ini akan coba kita benahi. Jika cabang hanya memiliki 1 komisariat, lalu apa bedanya ketua Cabang dengan ketua Komisariat?!

Lebih lanjut saya ingin mengajak sahabat-sahabat memahami anatomi organisasi ini, PMII bukan seperti IPNU/IPPNU/Ansor/Fatayat apalagi partai politik. Ketika terjadi pemekaran wilayah, maka dengan serta merta wilayah PC/PKC PMII pun melakukan pemekaran. Tidak. Kita berbasis kaderisasi di kampus-kampus. Jika di satu wilayah tidak ada kampus, maka mutlak tidak boleh ada PMII disana. Dari data 228 cabang pada kongres Jambi yang lalu, setelah kami verifikasi dengan data kampus, ada beberapa cabang yang jelas-jelas tidak memiliki kampus diwilayahnya. Ini akan kami tertibkan. Mohon doa dan dukungannya.

Tentu dalam akreditasi cabang yang di nahkodai bidang aparatur organisasi, hal-hal seperti ini akan kita benahi. Bagaimana ini terjadi? Modusnya hampir sama di beberapa daerah. Efek demokrasi dan uforia berorganisasi kader di lingkungan PMII, banyak organisasi daerah (orda) yang dibentuk oleh kader PMII atas dasar persamaan kampung halaman, bahkan persamaan suku. Jadi kader PMII yang kuliah di kota, yang berasal dari suku yang sama dan kampung halaman yang sama, padahal di kampungnya tidak ada kampus, lalu bersama-sama mendirikan PMII yang "berdomisili" di kampungnya. Tentu saja hal ini tidak bisa dibenarkan, bukan?!

Kembali pada Tap Pleno Sertifikasi dengan sistem penugasan untuk mendapatkan sertifikat PKD dan PKL (merekruit anggota diluar basis asal kader). Pada aspek emosional, pasti akan berdampak pada mental kader yang "naik kelas". Ya! Selama ini, sifat "*politicking*" yang melekat pada kader bahkan alumni terkait dengan dinamika RTK/Konfercab dst, selalu persepsi politik yang dibangun adalah, mendorong agenda

“pokoknya”. Pokoknya, yang harus jadi ketua Komisariat/Cabang harus dari Rayon/Komisariat kita! Pokoknya, jika ada hambatan di forum, forum harus kita kuasai. Karena agenda “pokoknya” inilah, sehingga tidak jarang terjadi chaos, ribut-ribut cuma karena “pokoknya”. Saya ingin mempertegas kembali, jika sahabat mendapati kader/alumni yang masih memaksakan asumsi “pokoknya”, pasti kader/alumni itu adalah orang yang tidak pernah membangun basis di luar komunitasnya (Komisariat/Rayon asal), tidak gaul.

Mumpung masih membahas sedikit tentang “*politicking*”, saya ingin *share* kepada sahabat-sahabat, bagaimana kami PB PMII merasa “geregetan” dengan beberapa cabang di Jawa Barat dan Jawa Timur (saya tidak perlu sebut cabang mana), pada pertengahan 2015 lalu, menjelang konfercab di cabang tersebut, tiba-tiba ada Rayon/Komisariat yang dibekukan dan ada yang didefinitifkan. Tujuannya hanya untuk suksesi kandidat di Konfercab. Kaderisasi tidak menjadi barometer, karena unsur politickingnya sangat tinggi. Ya. Memang PC punya kewenangan untuk memberikan SK kepada Rayon dan Komisariat, dan PB tidak punya kemampuan untuk mengontrol langsung, hanya berhak mendapatkan tembusan dari SK yang dikeluarkan PC (itupun jarang PC yang memberikan tembusan, bahkan PKC-nya pun tidak dapat). Tentu hal ini tidak boleh didiamkan, kami putuskan Tap Pleno tentang Mekanisme Pembentukan, Pengesahan, Penaikan Dan Penurunan Status Pengurus Komisariat dan Pengurus Rayon – yang mengatur secara obyektif prosesnya.

Semoga saja kedepan sudah tidak ada lagi PC yang sewenang-wenang dalam menjalankan amanah organisasi dan kaderisasi di setiap daerah. Dalam ketetapan itu, kami mengatur dan menegaskan bahwa ukuran objektif Pembentukan, Pengesahan, Penaikan Dan Penurunan Status Pengurus Komisariat dan Pengurus Rayon terletak pada aktifitas kaderisasi di setiap kampus dan fakultas. Jika pun terjadi “kesewenangan” lagi, Rayon dan Komisariat memiliki payung hukum untuk menggugat. Selama ini hal itu belum diatur.

Ketiga, kaderisasi kita selama ini sangat kental aroma seremonial, tanpa follow up. Saya adalah bagian dari proses kaderisasi yang setelah selesai mengikuti PKD/PKL, pulang langsung bawa sertifikat. Lalu apa kabar skema kaderisasi non formal sebagai follow up? Ya. Selama ini memang skema kaderisasi non formal yang ada, seolah hanya kreasi dari masing-masing pengurus Rayon/Komisariat/Cabang/KoorCab bahkan PB. Untuk mensistematisir hal itu, kami membuat Tap Pleno tentang Kaderisasi Non Formal. Intinya adalah memberikan menu bagi Rayon/Komisariat/Cabang/KoorCab untuk melaksanakan kegiatan follow up yang mendukung pengembangan potensi kader berbasis *soft skill* pasca yang bersangkutan (ybs) lulus kaderisasi formal. Jika berat melaksanakan menu kegiatan yang kami susun semua, minimal melaksanakan pelatihan instruktur. Terkait dengan pelatihan instruktur ini, akan coba saya bahas lebih lanjut nanti.

Pada 29 Januari 2015, PC Jakarta Timur di bawah kepemimpinan Sahabat Zaki melaksanakan PKD, pesertanya 50 orang. Saya sangat ketat mengawal agar sertifikat

yang akan dikeluarkan sesuai dengan sistem. Singkat cerita PC Jaktim berhasil mengawal alumni PKD melakukan rekruitmen. Dua bulan pasca PKD, pada 27-29 Maret 2015 PC Jaktim melaksanakan Mapaba akbar (pesertanya adalah hasil rekruitmen penugasan alumni PKD). Dari total peserta PKD 50 orang, yang mendapatkan sertifikat 46 orang, ada 4 orang yang tidak lulus dan mendapatkan sertifikat PKD. Efek dari PKD ini cukup terasa, karena setelah Mapaba akbar muncul 1 komisariat persiapan di Jakarta Timur, Unkris. Juga penguatan kaderisasi di beberapa fakultas dari masing-masing Komisariat di PC Jakarta Timur, diantaranya penguatan Rayon di Komisariat UIJ.

Lalu Oktober 2015, PC Jaktim Konfercab dan terpilih Sahabat Umar (yang akrab dipanggil Omeng). Awal Februari 2016, Sahabat Omeng menghubungi saya untuk koordinasi terkait dengan pelaksanaan PKL oleh PC Jaktim. Lalu saya katakan, Jaktim tidak boleh melaksanakan PKL sebelum menjalankan follow up PKD. Dengan nada bingung, beliau bilang, “loh kan itu PKD nya Zaki, waktu itukan udah bikin follow up yang Mapaba akbar bang”. Saya katakan itu bukan follow up PKD, tapi follup up penugasan PKD. Ingat, folluw up PKD melekat pada institusi pelaksana PKD. Sekalipun kepengurusan berganti. Akhirnya saya arahkan agar PC Jaktim melaksanakan pelatihan instruktur pasca PKD. Pesertanya adalah alumni PKD bersertifikat, dari pelatihan itu, yang lulus akan di sertifikasi sebagai instruktur yang nantinya berhak mengawal proses Mapaba yang dilaksanakan di wilayah koordinasi PC Jaktim.

Sangat penting hal ini saya pertegas! Folluw up PKD/PKL melekat pada institusi pelaksana PKD/PKL. Karena selama ini kaderisasi kita memang lebih kental aroma seremonialnya, ketimbang sebagai agenda yang menekankan pada output kualitas dan kontinuitas substansi kaderisasi. Hal yang sama pun saya lakukan pada PC Jaksel yang konsultasi ingin melaksanakan PKL. Bahkan Komisariat UNAS yang ingin melaksanakan PKD pun saya larang, karena follow up Mapabanya belum maksimal. Kedepan, saya berharap tidak ada lagi struktur yang melaksanakan kaderisasi formal yang hanya di jadikan agenda akhir periode, apalagi cuma karena gengsi untuk eksistensi kepengurusan/struktur atau hanya sebatas untuk kritik terhadap struktur diatasnya, padahal kualitas kaderisasi yang dilakukan pun tidak bagus-bagus amat.

Akhir Januari 2016 lalu, PC Semarang melaksanakan PKL. Sudah menjadi kebiasaan saya, ketika cabang mau melaksanakan PKL, saya selalu kontak dengan ketua PKC atau bidang kaderisasi PKC untuk koordinasi terkait dengan konsep, pelaksanaan dan pengawalan PKL yang akan berjalan. Saya berkoordinasi dengan Ketua PKC Jawa Tengah, Sahabat Ibnu Ngakil. Urusan PKL Semarang, aman. Lalu koordinasi berlanjut terkait dengan bahasan sertifikat PKL se Jawa Tengah yang belum di setor oleh PKC Jawa Tengah ke PB. Saya minta kepada Sahabat Ibnu untuk mengkoordinir sertifikasi PKL di Jateng, lalu beliau menjelaskan ada beberapa cabang yang “hilang tanpa jejak”.

Ya, PC tersebut pernah melaksanakan PKL, lalu Konfercab. Sertifikat PKL belum dibuat dan disetor ke PKC untuk diserahkan ke PB (padahal bisa juga PC langsung menyerahkan

ke PB). Ada beberapa Cabang yang seperti itu. Saya yakin di wilayah lain bisa saja hal ini terjadi. Lalu saya sampaikan, agar PKC menghubungi kader alumni PKL tsb terkait dengan penugasannya. Jika penugasannya sudah dikerjakan dan laporannya bisa diberikan, tentu hak kader untuk mendapatkan sertifikat PKL harus di fasilitasi. Dalam kondisi yang demikian, saya sarankan agar PKC membuatkan sertifikat dan diberikan keterangan di Cabang mana kader tersebut mengikuti PKLnya.

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Semua hal yang saya elaborasi di atas adalah pekerjaan yang tidak populer, jelimet, ribet! Tidak seperti “politisi organisasi” yang hanya dengan membuat statemen atas dinamika nasional yang sedang menjadi *headline news*, namanya langsung beredar di media-media *online*. *Link* berita online langsung menyebar ke seantero nusantara, seolah ybs adalah aktivis PB PMII yang paling TOP. Hal yang seperti itu harus juga ada yang melakukan, minimal untuk menjaga eksistensi organisasi dalam pendampingan masalah nasional/daerah, setidaknya hal itu bisa menjadi iklan untuk sosialisasi PMII kepada mahasiswa baru. Saya akan mencoba hanya fokus pada urusan internal yang jelimet ini. Kenapa? Supaya sistem kaderisasi kita terbangun dan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Supaya output kaderisasi kita maksimal. Supaya substansi kaderisasi yang selama ini kita jadikan tema-tema diskusi dan tema-tema yang terpampang di spanduk dan di banner tercapai. Tidak hanya sebatas tema. Saya menghimbau kepada para pengurus Komisariat, Cabang, Koorcab, ayo kita sama-sama benahi kaderisasi kita. Jangan biarkan hak-hak kader terbengkalai cuma karena kemalasan dan ketidak rapihan kita mengurus administrasi organisasi ini. Karena sebenarnya, jika hal ini langsung dikerjakan, tidak ditunda-tunda, tidak seribet yang kita pikirkan.

Keempat, jumlah peserta PKD anjlok dari jumlah peserta yang ikut Mapaba. Jumlah peserta PKL pun anjlok dari jumlah peserta PKD. Selama ini memang hal ini sudah biasa. Seperti yang sudah saya singgung diatas, lumrah. Seleksi alam. Hal itu memang tidak sepenuhnya salah, tetapi tentu penting bagi kita untuk menegaskan standar normal jika terjadi fluktuasi. Idealnya, peserta PKD adalah 75-80% dari alumni Mapaba. Jika mencapai 100% tentu itu adalah sebuah prestasi kaderisasi yang patut diberikan apresiasi. Begitu juga peserta PKL, idealnya peserta PKL minimal adalah 75-80% dari alumni PKD. Akan tetapi, yang terjadi selama ini, sangat anjlok. Kasus di STAI/IAIN/UIN yang Mapabanya mencapai ratusan anggota, PKDnya hanya puluhan. Bahkan nyaris hanya 10-20% dari alumni Mapaba yang ikut PKD. Begitu juga pada jenjang PKL, hanya beberapa orang alumni PKD yang kemudian mengikuti PKL. Jika seperti ini, pasti ada yang salah. Lalu, dimana salahnya?

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Selama ini kita mengenal istilah mentoring, tetapi sepertinya banyak Rayon dan Komisariat kurang maksimal melaksanakan mentoring terhadap alumni Mapaba. Banyak hal kenapa mentoring tidak maksimal, karena pengurus sibuk skripsi, sibuk kuliah, sibuk di BEM, dll. Padahal, hakekat mentoring

follow up pasca Mapaba sangat sederhana. Kenapa? Karena kita hanya cukup memenuhi kebutuhan anggota baru, apa saja kebutuhan anggota baru yang notabene adalah mahasiswa baru itu? Jika mereka punya tugas kuliah, bertanya, dapat jawaban dari pengurus yang ditugasi menjadi mentor. Jika mereka mau pinjam buku untuk selesaikan tugas kuliah, dapat pinjeman buku. Sederhana.

Tetapi parahnya, ternyata PR/PK yang di tugasi menjadi mentor tidak mengerti akan tugasnya, anggota baru kita lepas dari bimbingan, akhirnya mereka merasa tidak terfasilitasi kebutuhannya di PMII. Pusing-pusing kerjain tugas, tanya ke senior di PMII tidak ada jawaban yang "menyelesaikan", malah dapat curhatan. "Mata kuliah apasih? Ooo, dosennya Bapak/ibu itu ya?! Memang nyebelin tuh dosen! Banyak ngasih tugas!". Sebagai mahasiswa baru, pasti menyelesaikan tugas adalah bagian yang *mesti* selesai. Dalam kepusingannya mencoba menyelesaikan tugas, tiba-tiba ada yang menghampiri dan membantu. Ternyata yang membantu itu adalah pengurus HMI/KAMMI. Karena merasa nyaman, anggota baru ini selanjutnya ikut kaderisasi di HMI/KAMMI. Padahal kemarin baru selesai Mapaba. Kalau sudah begini, siapa yang salah?!

Dinamika seperti inilah yang memastikan pentingnya kader PMII menguasai perkuliahan, minimal khusus yang dipelajarinya di jurusan. Sehingga ilmunya bisa ditransformasikan kepada anggota baru. Berilmu, cakap dan bertanggungjawab dalam mengamalkan ilmunya. Tentu kesalahan ini tidak boleh terulang. Dalam konteks ini, kami membangun sistem mentoring melekat. Pembagiannya adalah 1 orang mentoring maksimal 5 orang (agar melekat dan maksimal), per jurusan, per jenis kelamin. Apa targetnya?

Supaya sahabat-sahabat mentor bisa nginep waktu bantu mengerjakan tugas anggota baru, baik di kostan atau di rumahnya, atau sebaliknya. Mentoring yang melekat. Makanya harus per jenis kelamin. Laki-laki di mentoring oleh laki-laki, begitu juga sebaliknya. Ini penting. Karena yang selama ini terjadi, ketika pembagian tugas mentoring, laki-laki berebut mau mentoring anggota baru yang perempuan, tentunya yang cantik. Akhirnya lebih dominan aspek emosionalnya ketimbang aspek rasional, ada sedikit "masalah", bubar. Atau sebaliknya, tercapai tujuan mentoring. Tetapi anggota baru itu kemudian menjadi "aset" pribadi dan tidak terarah dalam mendorong upaya pengembangan PMII. Per Jurusan. Tentunya agar memudahkan transformasi keilmuan yang dimiliki, dan memudahkan jika harus belajar bersama atau meminjamkan buku. Jangan paksakan pengurus dari fakultas teknik, mengawal anggota baru dari fakultas tarbiyah.

Konsekuensi dari sistem ini adalah, PR/PK (mentor) harus kembali belajar terkait dengan mata kuliah awal yang pernah dilewatinya. Ya. Kebanyakan dari kader PMII, ketika ditanya berapa IPK nya? Malu untuk menjawab, karena IPK nya kecil. Sekalipun ada yang IPK nya tinggi, ketika ditanya terkait dengan mata kuliah yang pernah dipelajari, jawabnya lupa! Tentu sistem mentoring ini memiliki dampak positif yang sinergi dengan tujuan PMII, yaitu Terbentuknya Pribadi Muslim Indonesia yang Betaqwa Kepada Allah

SWT, Berbudi Luhur, **Berilmu, Cakap dan bertanggungjawab dalam mengamalkan Ilmunya** dan Komitmen Memperjuangkan Cita-cita Kemerdekaan Indonesia.

Jadi kedepan, sudah tidak ada lagi kader PMII yang orientasi belajar di kelasnya hanya untuk absen, apalagi tidak pernah absen tapi "loby-loby ala aktivis receh" untuk dapat nilai bagus. Tidak boleh! Kita akan pastikan, seluruh kader PMII berilmu, cakap dan bertanggungjawab dalam mengamalkan ilmunya. Jika sistem mentoring ini berjalan, tentu anjloknya alumni Mapaba ke PKD akan sedikit teratasi, dst.

Kelima, mengatasi lemahnya sistem rekruitmen kepemimpinan. Di atas, saya sudah bahas masalah kaderisasi yang selama ini di pandang dengan perspektif politik (*politicking*). Sebelum masuk pada poin selanjutnya, saya ingin menutup bagian ini dengan mengelaborasi kebijakan PB yang mendorong substansi kaderisasi dalam ruang politik organisasi. Inilah luar biasanya kita. Semua yang terbolak-balik menjadi dinamika organisasi yang semakin menarik. PMII!

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Kami mengesahkan Tap Pleno PB PMII tentang Strategi Rekruitmen Kepemimpinan, yang mengatur terkait dengan syarat dan prasyarat untuk menjadi Ketua PR/PK/PC/PKC beserta Koprinya dimasing-masing tingkatan dan Ketua Umum PB beserta Ketua Kopri PB. Kenapa aturan ini ada? Apa urgensinya?! Jika aturan dibuat untuk mendorong keteraturan, apakah selama ini tidak ada keteraturan dalam proses rekruitmen kepemimpinan di PMII? Mungkin masih banyak pertanyaan bahkan pernyataan sinis yang menghampiri PB terkait dengan aturan tersebut, yang tidak mungkin saya tuliskan disini. Sinisme terhadap kebijakan ini terutama oleh kader, alumni atau senior yang terhambat dan tidak bisa mendorong kandidatnya untuk menjadi ketua. Terbentur oleh aturan.

Kenapa kebijakan ini di buat? Karena PB menyadari bahwa pola rekruitmen kepemimpinan di berbagai level struktur kita lemah, tanpa sistem. Bagaimana ceritanya? Contoh, ketika terjadi RTAR/RTK/Konfercab/Konkorcab bahkan kongres, semua aturan terkait dengan bakal calon/kandidat akan diatur dalam arena politik (tata tertib pemilihan ketua/ketua umum). Jika syarat untuk menjadi ketua Cabang harus sudah lulus PKL, sementara sebagian besar pendukung atau ada calon yang mau didukung belum lulus PKL, maka aturan itu akan menjadi perhatian utama untuk "dipertarungkan". Tidak sedikit forum yang akhirnya ricuh cuma untuk suksesi. Akhirnya, *chaos*. Pending untuk waktu yang tidak ditentukan, cabang *vakum of power*, dan pastinya hal ini mengganggu proses kaderisasi yang menjadi tugas utama PMII.

Dengan aturan di atas, kami ingin meminimalisir permasalahan tersebut. Dengan aturan itu, calon sudah lolos verifikasi ketika "forum politik" dimulai, sehingga *chaos* dapat diminimalisir. Memasuki tahun kedua periode PB hari ini (2016), permasalahan yang terjadi dalam tahun pertama terkait dengan implementasi aturan tersebut sudah lepas. Padahal, pada awalnya luar biasa gempuran kader bahkan alumni yang merasa belum

siap dengan aturan ini. PC yang tidak melaksanakan aturan ini kami tegaskan tidak mendapatkan SK, bahkan PB membentuk karetaker untuk segera dilakukan konferensi ulang dan memilih ketua yang sesuai dengan aturan. Muncul banyak perlawanan baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik oleh kader maupun oleh alumni.

PB tangan besi! Anti demokrasi! Tidak menghargai hasil konfrensi! PB melanggar ADRT! Dan lain sebagainya, semua kritik ditujukan kepada PB. Tapi inilah konsekuensi dari aturan, pasti ada pro dan kontra. InsyaAllah PB periode kedepan akan menikmati perbaikan sistem yang kami lakukan hari ini. Atau sebaliknya, PB selanjutnya tidak mau menjalankan PO yang sudah ditetapkan. Wallahu 'a lam...

Sebenarnya, jika mau jeli menganalisa dan membangun proyeksi masa depan PMII, kebijakan ini sangat relevan. Apa saja poin dari kebijakan ini? Pertama kami atur kelulusan jenjang kaderisasi sebagai syarat utama (PKD/PKL), batas usia maksimal calon ketua, dan batas IPK minimal. Sudah lulus S1 untuk Ketua dan BPH PKC, dan sedang S2 untuk Ketua Umum dan BPH PB. Aturan-aturan ini sudah sangat pas dan ideal untuk menjawab tantangan zaman dan persaingan kualitas kader PMII dengan OKP lainnya.

Polemik muncul dengan perdebatan yang sebenarnya kurang substansial. Pada level rayon dan komisariat kami tidak terlalu mendapati dinamikanya, karena memang diluar kewenangan dan jangkauan PB (SK rayon dan komisariat diberikan oleh PC). Apa saja perdebatannya? PB dianggap melanggar ADRT karena disana diatur bahwa syarat menjadi PC adalah lulus PKD. Dalam Tap Pleno PB, ketua PC harus lulus PKL. Tentu dengan sedikit beranalogi, kami katakan, jika sahabat-sahabat kuliah dikampus untuk jenjang S1, diajar oleh dosen lulusan S1, logis tidak?! Artinya, pengurus cabang yang lulusan PKD, sangat wajar kalau Ketuanya adalah lulusan PKL. Yang kami atur adalah kandidat Ketua, pada level PR dan PK sudah lulus PKD, sedangkan pada level PC dan PKC sudah lulus PKL.

Pembatasan usia. Kami buat batasan berjenjang, untuk Rayon maksimal 21 tahun. Komisariat 22 tahun, cabang 24 tahun dan PKC 26 tahun (yang kemudian dalam muspimnas di ambon, poin ini disepakati bertambah masing-masing 1 tahun dalam tiap tingkatan kepengurusan), secara pribadi saya sangat menyesali hal ini. Tetapi sudah ditetapkan forum Muspimnas, ya sudah lah. Walaupun target sedikit meleset, tapi setidaknya Tap Pleno berubah menjadi PO, posisinya menjadi lebih tinggi (naik kelas) dalam strata aturan organisasi kita. Pembatasan usia ini menjadi sangat urgen untuk memastikan substansi kaderisasi dan regenerasi struktur. Sangat tidak elok, karena usia PKC lebih tua dari PB, ketika PB mengunjungi PKC (agenda kaderisasi atau konsolidasi organisasi) kemudian PB harus cium tangan PKC, dan seterusnya. Tentu hal ini menjadi tidak sehat jika tidak diatur. Mohon sahabat-sahabat yang "ngebet" mau jadi ketua dan terbentur dengan aturan ini, agar bersabar dan ikhlas. Doakan PMII selalu menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

Pembatasan IPK. Kami klasifikasi untuk eksak 2,75 dan non eksak 3,00. Tetapi di Muspimnas ambon kemudian disepakati eksak 2,50 dan non eksak 3,00. Lucunya, ada gugatan terkait dengan hal ini, "PMII kan organisasi ektra kampus, apa hubungannya dengan IPK?!" Di atas saya sudah sedikit mengelaborasi tujuan PMII, tentu tidak perlu saya ulas kembali, sekalipun sangat terkait. Jika sahabat merasa perlu, silahkan di tengok sedikit ulasan saya tentang tujuan PMII dan orientasi belajar kader PMII. Saya tanya balik kepada kader penggugat IPK, lebih besar mana PMII dengan BEM di kampus? Tentu dinamika dan pergulatan kita di PMII bukan semata-mata karena satu kampus, satu fakultas apalagi cuma satu jurusan. Kita terkumpul di PMII lintas itu semua. Jika BEM yang lebih kecil dari PMII saja untuk menentukan ketuanya minimal IPK 3,25 kenapa PMII sebagai organisasi yang lebih besar, syaratnya lebih rendah dari BEM?!

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Saya ingin sedikit mengulas dinamika BEM dan PMII di kampus. Tidak sedikit kader PMII yang menjadi ketua dan jajaran BEM di kampus, kemudian merasa "jumawa". Bahkan merasa lebih superior dari PMII nya. Padahal mereka adalah kader PMII yang harusnya menggunakan BEM untuk penguatan kaderisasi PMII. Kenapa ini terjadi? Bisa jadi karena memang kader yang di BEM merasa lebih unggul secara personal dengan kader yang di struktur PMII, selain karena memiliki jaringan dan akses keuangan BEM, juga secara personal mereka lebih berprestasi. Tentu ini tidak boleh berlanjut, salah!

Bagaimana solusinya? Harus didorong bahwa PMII lebih bergengsi dari BEM, artinya ketua PMII harus lebih tinggi kriterianya di banding BEM. Sehingga kesadaran bahwa kader yang di dorong menjadi ketua atau pengurus di BEM adalah kepanjangan tangan PMII untuk penguatan kaderisasi di kampus. Kader PMII harus didukung agar berhasil memimpin BEM, sehingga kepemimpinan PMII di BEM terus dipercayakan oleh seluruh mahasiswa di kampus yang tidak semuanya kader PMII. Coba tengok dinamika PDIP dan Presiden Jokowi. Dengan tegas Megawati sebagai ketua umum PDIP mengatakan bahwa Jokowi adalah kader partai yang di tugaskan menjadi Presiden (petugas partai). Kenapa? Karena ketua umum PDIP secara kualitas personal, great nya lebih tinggi, Megawati pernah menjadi Presiden.

Kembali pada Tap Pleno. Syarat Ketua dan BPH PKC sudah lulus S1. Kebijakan ini dinilai lebih mengada-ada. Ya, terutama oleh kader yang terpola dengan kaderisasi "jalanan", kader PMII yang sangat aktif dalam kerja-kerja organisasi tetapi orientasi lulus kuliahnya minim, atau mungkin sudah tidak terpikir untuk mendapatkan gelar sarjana. Apa urgensinya aturan ini?

Setelah kami *mapping*, ada beberapa masalah yang mendasar kenapa banyak PKC tidak aktif kepengurusannya. Kalaupun aktif, kebanyakan aktifitas di isi oleh kader cabang dari ibukota provinsi. Kebanyakan PKC usianya sudah lanjut (antara 27-30 tahun) tentu orientasi untuk "mengabdi" urus organisasi mulai berkurang. Bagi yang "genit politik", posisi ini banyak digunakan untuk "bermain" dengan *stakeholders* setempat, baik dalam

urusan politik daerah maupun dalam urusan “proyek daerah”, atau KNPI. Dan parahnya lagi, kaderisasi tidak berjalan. Hanya memanfaatkan PMII. Dahulu, tidak sedikit BPH PKC yang belum lulus S1, dengan berbagai kriteria: Pertama, aktif di PKC, tinggal di ibukota provinsi, tetapi belum lulus S1. Kedua, lulus S1, sudah menikah dan tinggal di ibukota provinsi. Ketiga, lulus S1, sudah menikah dan tidak bisa tinggal di ibukota provinsi. Keempat, lulus S1, sudah bekerja ditempat tinggalnya (bukan ibukota provinsi), dan lain sebagainya. Padahal ketika selesai konkorcab, semua kader yang “merasa pantas” melakukan manuver yang luar biasa untuk ambil posisi struktur inti di PKC. Biasanya, selesai pelantikan, hilang tanpa jejak.

Kebanyakan PKC yang aktif, atau setidaknya bertahan di ibukota provinsi adalah yang sedang ambil S2 atau mendapat pekerjaan di ibukota, sehingga bisa survive. Pertanyaannya, jenis pekerjaan apa yang bisa diakses oleh PKC yang belum lulus S1? Tentu hal-hal yang seperti ini pun menjadi “gengsi”. Akan banyak lagi turunan dinamika dari poin-poin ini jika kita bahas. Saya sangat mengapresiasi sahabat-sahabat, yang lanjut S2 saat masih menjadi ketua atau pengurus cabang dan PKC. Juga kepada Ketua dan BPH PKC yang tidak dapat saya sebut satu persatu, karena keterbatasan saya mengetahui progres pendidikan sahabat-sahabat. Pastinya, hal ini menjadi poin penting. Terlebih sahabat adalah pengurus inti.

Pada prakteknya, kaderisasi kita di bawah, butuh difasilitasi oleh instruktur dan pemateri yang masih aktif di struktur dengan profil yang unggul, yang membanggakan. Sehingga memotivasi kader untuk yakin ber PMII. Setidaknya anggota dan kader kita memiliki bayangan positif, jika nanti mereka menjadi PC/PKC/PB, mereka akan meraih capaian pendidikan yang tidak mentok cuma lulus S1. Apalagi jika dimunculkan harapannya, kalau nanti aktif di PC/PKC/PB akan mudah mengakses beasiswa (syarat dan ketentuan berlaku: memenuhi kualifikasi yang menjadi prasyarat untuk mendapatkan beasiswa). Pasti hal itu akan mendorong kader untuk terus meng-*upgrade* kompetensinya. Dan aktif ber PMII.

Saya hanya ingin mempertegas kembali, bahwa hari ini kita sedang membangun sistem. Jika periode ini aturan berjalan, kita dapat bayangkan. Kedepan Ketua Rayon/Komisariat kita adalah mahasiswa-mahasiswa berprestasi, yang tidak hanya cerdas tetapi juga ber-ahlaqul karimmah. Ketua dan BPH Cabang lulus tepat waktu, orang tuanya senang karena biaya pendidikan tidak boros, bisa dialihkan untuk biaya pendidikan adik-adiknya, atau untuk investasi yang lain. Jika begitu, PMII tidak hanya menjadi kebanggaan anggota dan kadernya, tetapi juga orang tua kita. Ketua dan BPH PKC bisa aktif mengurus organisasi dan ketika selesai masa khidmad – Konkorcab, sudah selesai pula S2nya. Jika berkesempatan menjadi Pengurus Besar, sambil menempuh S3. Kira-kira kesana arah sistem ini di bangun. Jadi, ketika harus berjajar PMII dengan OKP cipayung lainnya, tentu “harga” PMII menjadi lebih mahal. Karena dinilai memiliki kompetensi yang lebih. Sangat mungkin, kedepan Ketua Umum PB PMII sudah doktor. Atau minimal kandidat doktor, dengan usia dibawah 30 tahun.

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Pada awal periode ini, kami mendata dan menganalisa data dominasi kampus dan penguasaan kampus via BEM universitas. Secara umum, PMII masih unggul dibanding HMI dan KAMMI. Tetapi dalam hal penguasaan kampus umum, KAMMI lebih unggul. Dan dalam konteks penguasaan struktur kampus, HMI yang pasti unggul. Karena hampir disemua birokrasi kampus, dan struktur kekuasaan di kampus, pasti ada unsur alumni HMI. Di kampus umum negeri favorit, hanya Universitas Jember dan Universitas Trunojoyo yang rektornya alumni PMII (sampai catatan ini tertulis – semoga kedepan bertambah terus jumlah rektor yang alumni PMII). itupun, struktur dibawahnya masih dominasi alumni HMI. Padahal, sejak lama PBNU memiliki "kesaktian" untuk merekomendasi calon rektor, dan disahkan menjadi rektor oleh pemerintah.

Mengapa? Karena memang tidak banyak kader PMII yang memiliki orientasi menjadi akademisi. Pilihan untuk menjadi praktisi politik lebih dominan, sekalipun belum banyak juga tercatat yang menjadi Gubernur, bupati, walikota, DPR, apalagi menjadi ketua umum partai. Kita juga belum mendapati ada alumni yang fenomenal didunia politik. Terlepas ada atau tidaknya dukungan media, politisi yang hari ini "dianggap" baik (pro kepentingan rakyat, jujur, amanah, dst) justru bukan alumni OKP dan bukan alumni PMII. Tentu kita punya orientasi pilihan berkarir masing-masing, tapi setidaknya sebagai kader intelektual kita punya orientasi pendidikan, semangat belajar. Cepat lulus S1, lanjut S2, dst.

Pada pertengahan 2015 lalu, ketika saya mengawal PKL yang dilaksanakan oleh PKC DKI Jakarta di Kampus STAINU Kedoya, yang posisinya dekat dengan rumah Sekjen PBNU, Kyai Marsudi Suhud (ketika itu). Beliau bercerita tentang "kesaktian" rekomendasi PBNU mendorong seorang akademisi menjadi rektor. Bahkan, dengan bangga beliau sampaikan Universitas Samratulangi Manado, yang sekarang rektornya orang Katholik, pun jadi rektor dengan rekomendasi PBNU. Dengan sedikit berceloteh beliau sampaikan kepada kami, "beliau itu NU cabang katholik". Langkah ini (meng-NU-kan) orang lain atau bahkan kelompok lain, adalah bukti lemahnya kaderisasi kita di dunia akademik.

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Kita meyakini, siapa yang menguasai kampus hari ini, akan menguasai Indonesia esok hari. Penguasaan kampus hari ini harus menjadi agenda bersama, tidak hanya dalam konteks kaderisasi oleh struktur (PR/PK/PC) tetapi juga menjadi agenda bersama kader dan alumni untuk masuk kampus. Minimal lulus S2, jadi dosen. Lanjutkan S3, jadi profesor, guru besar, rebut kepemimpinan riil di kampus. Bukan sebatas menjadi ketua BEM saja. Ruang ini kosong dari kader - alumni PMII. Banyak yang memilih untuk aktif di politik, itu tidak salah. Itu pilihan hidup, tetapi bukan berarti meninggalkan pendidikan dan kampus. Selama ini kita punya tauladan adri para ulama, bangga kita jika beliau-beliau harus berjajar dengan ketua ormas Islam lain, dengan gelar, Doktor, KH. Tentu, kesadaran kaderisasi PMII untuk bersemi, tumbuh subur dan berkembang dalam penguasaan kampus harus terus digelorakan.

	PMII	HMI	KAMMI	DLL	Tidak Dikethui
Agama Negeri	51%	29%	6%	6%	9%
Agama Swasta	37%	17%	3%	23%	20%
Umum Negeri	11%	20%	34%	20%	16%
Umum Swasta	42%	16%	0%	26%	16%
Institut Negeri	0%	38%	0%	50%	13%
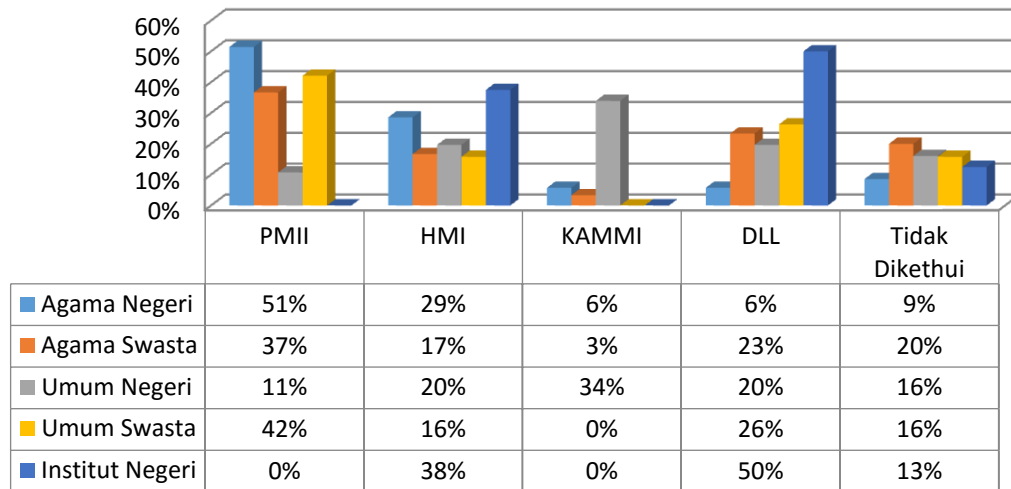
Sumber: Bidang Riset dan Penelitian PB PMII

Dalam konteks ini, saya ingin sekali kita semua menyadari bahwa penguasaan kampus itu menjadi sangat urgent. Tidak hanya dalam upaya pengembangan kaderisasi PMII seperti yang telah saya sampaikan di atas, tetapi juga dalam upaya berjihad mengembangkan doktrin Islam ahlussunnah wal jamaah, Islam yang *rahmatan lil alamin* di kampus. Kampus-kampus STAIN, IAIN dan UIN adalah basis utama PMII, karena input mahasiswanya kebanyakan dari alumni pesantren, tetapi betapa mengejutkannya, ketika ada berita tentang penyebaran faham-faham radikalisme yang menuju pada tindakan teroris, justru banyak berkembang di STAIN, IAIN dan UIN. Sekalipun, kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa di fakultas eksak (bisa jadi mereka bukan alumni pesantren). Parahnya lagi, di mayoritas kampus umum dan fakultas eksak, PMII lemah. Ini agenda jihad kita di kampus. Semoga sistem sertifikasi – penugasan yang kita bangun dapat sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti menjawab tantangan ini.

Saya punya teman alumni Teknik Fisika, ITB. Dalam diskusi ringan terkait dengan kejadian bom Sarinah yang lalu, masuk pada tema yang sedikit serius. Diskusi tentang Bom. Beliau sedikit bercerita tentang pengalamannya belajar teori dan praktek di ITB. Mulai dari mengurai baterai untuk roket kapal selam, sampai ke mengurai rakitan bom dan membuat bom. Mereka mempelajari dan memahami itu. Pastinya, akan menjadi bahaya laten dan ancaman yang sangat serius, jika mereka masuk dalam jeratan, hasutan dan menjadi kader kaum exstrimis di kampus. Maka, untuk mencegah mudorot faham exstrimis di kampus dan masa depan negeri ini, kaderisasi dan penguasaan kampus eksak menjadi *fardu 'ain* bagi kaderisasi PMII.

Jadi, penguatan kualitas dan kompetensi kader PMII diruang akademik yang kami sistematisir dengan prasyarat mengisi struktur PMII bukan hanya untuk sekedar gengsi-gensian dengan OPK yang lain, tetapi lebih dari itu. Ada agenda ideologis yang harus kita

capai. Yaitu mendorong kader muda PMII yang masih distruktur agar bisa masuk kampus menjadi dosen, perlahan tapi pasti dengan peningkatan kompetensi personal dan kekuatan jaringan PMII dan NU, pasti akan terbuka kesempatan bagi kita untuk menduduki struktur strategis di kampus.

Sampai detik ini, PBNU masih gencar mendorong pendirian kampus-kampus UNU diberbagai daerah. Syarat untuk menjadi dosen harus sudah lulus S2, bayangkan kalau kaderisasi kita masih menggunakan pola "aktivisme", lama lulus, IPK kecil, tanpa prestasi. Siapa yang akan menjadi dosen di UNU? Siapa yang akan menjadi rektor, dekan, kaprodi di UNU? Dengan pertarungan kompetensi yang sudah *high quality*, versus kondisi kompetensi kader PMII yang masih *low quality,* bisa jadi semua posisi strategis di UNU itu akan diisi oleh kader yang lain, amit-amit kalau sampai diisi oleh kader KAMMI. Sekedar informasi, rektor UNU Indonesia yang ada di Jakarta adalah alumni HMI yang sekarang menjadi wakil ketua umum PBNU. Kok bisa? Kenapa? Banyak hal yang mungkin dapat kita elaborasi terkait hal itu, yang pasti alumni PMII masih minim yang sudah menjadi profesor dan guru besar. Karena prasyarat untuk mendirikan kampus, harus mendaftarkan ke Dikti dengan ketentuan yang ada. Terkait dengan jumlah guru besar, doktor dan master yang menjadi pimpinan dan dosen. Dalam konteks ini, NU membutuhkan kader-kader PMII muda, kompeten dan militan untuk menjaga aset UNU tetap dalam koridor *ahlussunnah wal jamaah*.

Mumpung masih membahas UNU, saya ingin bercerita sedikit. Dua tahun lalu, sahabat Didip (sahabat saya di PC Jaksel dahulu) mengeluhkan tentang pendidikan anaknya. Saat beliau libur dan ingin sholat Ashar di mushollah komplek rumahnya, sengaja ajak putra sulungnya sholat sunnah dulu di rumah lalu berjamaah ke mushollah. Ketika sholat, biasa anak-anak. Membaca bacaan sholat dengan agak keras, didengarkan dan berbeda dengan yang biasa dibaca. Lalu ditanya ke putranya, dia menjawab memang begitu yang diajarkan bu guru di play group pah. Lalu beliau ceritakan hal tersebut kepada bibinya, lalu disarankan untuk pindah sekolah. Beliau bingung karena sudah masuk uang 7 juta, jumlah yang cukup besar, tetapi takut dengan pengaruh pendidikan bagi anaknya yang berbeda faham. Rumahnya di depok, ketika itu saya mewajarkan. Depok itu sudah 2x walikotanya dari PKS.

Cerita yang lain, setahun yang lalu tepatnya. Kang Budi, eunterpreuner catering kita (yang biasa kami hutangi, semoga bisnisnya berkah dan berkembang) pun mendapati kegelisahan yang sama. Dalam kebingungan, beliau bercerita kepada saya, "aku bingung mau sekolahin Arumi dimana. Aku sudah putar-putar se paseban, cuma ada 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI), itu pun punyanya Persis. Di sekitar paseban ada 3 SD Islam Terpadu (SDIT). Aku mau Arumi bisa ngaji, pinter agamanya, tapi aku gak mau Arumi masuk pondok pesantren, nanti di rumah sepi". Sejak saat itu, ketika saya ke daerah-daerah, saya sempatkan mencari informasi terkait keberadaan jaringan sekolah Islam terpadu itu.

Ternyata keberadaanya sudah menyeluruh, bahkan di Papua pun banyak. Sampai ke pelosok, Pulau Wondama, Wasior, pun ada.

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Universitas dan Rumah Sakit yang hari ini sedang di garap oleh NU, adalah garapan yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah sejak tahun 80an. Hampir semua kyai-kyai NU ingin memiliki pendidikan tinggi dipondoknya, minimal Mahad ‘Ali. Kalau bisa ya, Universitas. Untuk memaksimalkan pelayanan kepada ummat, saat ini NU memang sedang fokus mendirikan kampus dan rumah sakit.

Lalu apa yang dilakukan PKS? Menjamurkan jaringan sekolah Islam terpadu. Bagaimana dengan LP Ma’arif? Secara marketable, sekolah-sekolah Ma’arif kalah. Dianggap murah dan tidak berkualitas. Sedangkan IT, mahal, “seolah” berkualitas, dan banyak muridnya. Sejak awal mereka menyasar anak didik dari kelas menengah keatas. Biasanya kelas menengah keatas, pemahaman agamanya rendah. Di sekolah IT, tidak pernah ada upacara bendera. Nasionalisme generasi muda di negeri sudah mulai di kikis.

Tahun lalu, pegiat pendidikan islam dihebohkan dengan diketemukannya soal di Lembar Kerja Siswa (LKS), soal yang berbau doktrin wahabi (mengharamkan ziarah kubur). Dapat kita bayangkan, mereka tidak menguasai sistem pendidikan saja sudah bisa bermanuver menyusupkan pemahaman wahabi, apalagi sistem pendidikan di IT yang memang 100% dibawah kontrolnya. Jika untuk menyelesaikan SD dibutuhkan waktu 6 tahun, SMP dan SMA juga 6 tahun, maka 12 tahun yang akan datang, adalah tahun 2028. Saat ini, IT sudah berjalan dan berkembang hampir 1 dekade. Pertanyaannya, ketika alumni IT masuk UNU, apakah mereka akan bisa dikondisikan untuk menjadi kader PMII??? Bisa jadi mereka akan menjadi poineer berdirinya KAMMI di kampus-kampus UNU.

Mumpung masih membahas sekolah. Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Di sekolah umum, untuk menyalurkan kreatifitas para murid, dibentuklan OSIS, Pramuka dan Paskibraka (selebihnya sesuai dengan kebutuhan dan minat sekolah dan murid). Di sekolah IT, mereka memiliki organisasi sendiri yang berjejaring dengan sekolah IT yang lainnya, yang mewadahi ekstrakulikuler (ekskul) bagi para murid seperti sekolah umum, tentu dengan nama yang berbeda. Sedangkan di sekolah-sekolah Ma’arif, masih ada yang tidak mau mendorong IPNU/IPPNU sebagai ekskul resmi, maunya pakai nama OSIS, pramuka, paskibraka. Dalam konteks pengembangan pendidikan, mestinya hal ini tidak perlu dipermasalahkan. Akan tetapi, yang kemudian menjadi masalah adalah ruang IPNU/IPPNU terkadang tidak terfasilitasi oleh LP Ma’arif. Jika di internal lembaga pendidikan NU saja IPNU/IPPNU tidak maksimal berkembang, apalagi di luar itu.

Disisi lain, lembaga intra sekolah jejaring wahabi (ROHIS), berkembang di hampir semua sekolah negeri favorit. Jika kita analisa, input mahasiswa yang masuk ke kampus UI adalah kebanyakan dari SMA/SMK favorit se Indonesia. Jika kita sempitkan di daerah-daerah, SMAN 1 Bandung, pasti banyak lulusannya masuk UNPAD atau ITB. Jadi

penguasaan "kader" sejak dini sudah di kuasai kelompok wahabi. IPNU/IPPNU merasa minder untuk masuk dan melakukan aktivitas kaderisasi di SMA negeri favorit, bahkan di MAN saja masih minim.

Dikampus umum negeri dan favorit, juga di kampus-kampus swasta ada Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang bersinergi langsung dengan dosen Agama, dimana setiap mahasiswa baru yang meng-ampu Mata Kuliah (MK) Agama dikondisikan untuk mengikuti mentoring MK tersebut. Dan yang menjadi mentor adalah kader-kader wahabi – PKS – KAMMI. Artinya, kaderisasi wahabi tidak kesulitan merekruit anggota dan kader di kampus, karena terfasilitasi dengan sistem di kampus dan sudah terkoneksi dengan alumni ROHIS, di tambah lagi mendapatkan ruang untuk langsung bersentuhan dengan mahasiswa baru, sekalipun mereka bukan alumni ROHIS disekolah, akses komunikasi dengan mahasiswa baru telah mereka kuasai.

Di tahun lalu, dunia maya dihebohkan dengan selembaran dari DPP PKS yang mengancam bahwa di tahun 2030 NU musti lenyap dari Indonesia. Tentu dengan simulasi data dan informasi di atas, hal itu menjadi ancaman serius yang harus di *counter* dengan gerakan kaderisasi PMII hari ini. Mereka sudah mengukur setiap langkah-langkahnya. Sementara PMII masih berkutat di ruang aktivisme. Idealisme semu. Malas kuliah, IPK rendah, tanpa prestasi, minim kompetensi. Pasti, akan tergilas dalam persaingan yang semakin meng-gila.

Lagi. Di atas, telah saya singgung basis input kaderisasi PMII adalah alumni pesantren yang ketika masuk kuliah kebanyakan ambil program dakwah, tarbiyah, PAI, syariah, dst. Potensi ini tidak bisa kita bendung, lalu bagaimana me-*manage*-nya? Agar bisa menjadi kekuatan kita, khususnya di sektor pendidikan dan dakwah? Di atas juga kita sudah pahami semangat PBNU untuk mendirikan UNU di berbagai daerah. Lalu di sisi lain ada ancaman berdirinya banyak lembaga pendidikan swasta yang tidak menekankan pada semangat nasionalisme pada murid-muridnya. Tahukah anda, bahwa pengelolaan sekolah/lembaga pendidikan di era ini sudah menggunakan sistem "kapitalisasi pendidikan" yang termanivestasi dalam komersialisasi pendidikan dengan "skema *franchise*". Dari mulai *play group* hingga ke pendidikan tinggi.

Saya ingin sedikit mencontohkan, misal. Jika anda memiliki modal, anda bisa menjadi kepala sekolah (SD/SMP/SMA) Al-Azhar atau menjadi kepala yayasan pendidikan itu. Tetapi harus sesuai dengan prasyarat yang ada, membayar royalti dan mengikuti skema (*soft ware*) pendidikan Al-Azhar. Kenapa bukan sekolah (SD/SMP/SMA) Ma'arif? Kenapa bukan UNU? Karena lembaga pendidikan kita belum marketable. Kita masih berpikir tentang pendidikan yang melayani, mengabdi, untuk mencerdaskan rakyat miskin yang sulit mendapatkan akses pendidikan, kita masih berpikir agar pemerintah mau melegalisasi semua aktivitas pengabdian pendidikan yang kita selenggarakan dengan segala keterbatasan dan bantuan pemerintah masuk dalam bentuk bangunan fisik, beasiswa, dll. Tentu sulit lulusan kita bersaing dengan lulusan yang secara kapital kuat.

Semangat pengabdian itu tidak salah. Sangat benar! NU harus berada di garis terdepan dalam menjalankan amanat UUD dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tetapi sepertinya sudah penting untuk kita pikirkan, untuk membuat dua sayap pendidikan NU yang sinergi (yang keuangannya bisa di subsidi silang). Mayoritas rakyat kita beragama Islam, pendidikan yang berbasis pada pendidikan agama adalah prioritas orang tua untuk anaknya, tetapi disisi lain orang tua juga mau anaknya pandai dan menguasai ilmu umum. Nah, sekolah IT itu, menjawab kebutuhan orang tua yang seperti kang Budi. Ingin anaknya sekolah, pandai ilmu umum, juga punya pemahaman agama, tapi tidak mesti masuk pesantren. Jualan sekolah IT itu, "jika anak anda masuk sekolah di sini, dengan sistem pendidikan yang kita miliki, di kelas 1 – 3 SD akan hafal surat-surat pendek juz 'ama dan sudah bisa praktek sholat" (tentunya, sesuai dengan mazhab yang diajarkan).

Bayangkan, biayanya mahal. Padahal di Jakarta dan banyak sekolah lain, Pemda sudah mensubsidi pendidikan dasar, gratis. Tapi sekolah IT menjamur dan muridnya banyak, mengungguli lembaga pendidikan NU yang kita miliki. Padahal, punya kita lebih murah. Waktu sahabat saya, didip yang di Depok itu menyadari pentingnya pendidikan untuk anaknya yang bukan pendidikan dengan sistem wahabi, bersama isterinya mencari alternatif di depok. Dapat. TK yang ada lambang NU nya (saya lupa namanya), ada di daerah depok. Tetapi, secara fisik bangunannya tidak terawat, kotor (mohon maaf). Lalu beliau diskusi dengan isterinya yang bukan alumni PMII dan tidak paham NU, apa komentarnya? "Mereka merawat gedungnya ada gak maksimal, apalagi kasih pendidikan ke anak kita!"

Saya pikir, UNU yang sedang di gelorakan pembangunannya disetiap daerah itu, harus di awali mendorong UNU percontohan. Dan PCNU di manapun, harus di tantang memiliki UNU tetapi dengan standard kualitas yang sudah ditetapkan PBNU, tidak asal berdiri. Jika memungkinkan, UNU bisa menggunakan "skema franchise". Sehingga bisa membuka dan mengajak berpartisipasi semua stakeholders NU (pengusaha, profesional, dan pejabat) dalam mengembangkan faham ahlussunnah wal jamaah, bukan cuma pengurus. UNU harus di dorong menjadi inklusif. Karena agenda besar kita adalah bagaimana berkembang perguruan tinggi yang membangun karakter generasi muda yang intelek, religius, nasionalis, dan menjadi rahmat bagi alam semesta. Bukan sekedar banyak berdiri kampus UNU diberbagai daerah seperti membangun struktur cabang NU. Mohon maaf, jika pada poin ini saya terkesan lancang dan banyak bicara. Ini hanya catatan harapan terhadap UNU.

Lalu apa kaitannya potensi yang kita miliki dengan tantangan yang ada?

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Untuk kader PMII yang memiliki *concern*s di dunia pendidikan, sepertinya tantangan ini harus sahabat jawab. Ini penting. Coba sahabat pahami, bagaimana sistem pendidikan (kurikulum, metode pengajaran dan

pembelajaran, manajemen pendidikan di sekolah, dst) di Al-Azhar, di kampus-kampus bonafit di dunia, di Sekolah IT dan di sekolah-sekolah internasional, bagaimana perbandingannya dengan LP Ma'arif, dengan UNU yang sudah ada, lalu seperti apa kesimpulannya. Goalnya, sahabat membuat kurikulum yang paling bagus dari dialektika studi komparasi tersebut. Untuk apa? Membangun sistem pendidikan yang berbasis pada faham *ahlussunnah wal jamaah*. Untuk pendidikan tinggi NU? Sulit, mahal, dan anda akan dianggap bodoh. Karena anda masih lulusan S1. Secara kelembagaan, yang mengurus itu di NU sudah Profesor doktor. Buat saja skema untuk play group dan TK. Tawarkan kepada kyai-kyai di pondok pesantren, karena biasanya pondok pesantren tidak terlalu konsern dengan play group atau TK. Kelola dengan baik. Jangan buat malu kyai.

Ini ruang kosong bagi anak muda NU, kader PMII. Tetapi, ruang yang sudah didominasi oleh skema IT. Jika kita tidak imbangi, hal ini bisa jadi bahaya laten yang siap menggerus pendidikan kita di masa depan. Hari ini, banyak kaderisasi PMII di kampus-kampus Muhammadiyah dan mendominasi, merebut BEM Kampus, Fakultas dan Jurusan. Dengan "kurang ajarnya", sahabat-sahabat di komisariat (kampus Muhammadiyah) itu membuat acara Haul KH. Ahmad Dahlan di kampus. Sekalipun di kampus itu ada komisariat IMM. Kenapa? Karena banyak lulusan pesantren masuk kampus Muhammadiyah. Dengan dinamika yang seperti ini, bisa jadi di masa depan terjadi hal sebaliknya. Justru di kampus-kampus NU menguat komisariat KAMMI, karena banyak mahasiswanya lulusan sekolah IT. Lalu mereka melakukan hal yang "kurang ajar" seperti contoh di atas, kebalikannya. Atas nama BEM UNU, Mengharamkan Maulid, Ziarah Kubur, Tahlil, dst.

Sudikah kita hal itu terjadi?! Lawan!!! Gerakan ini harus kita bendung segera!!!

Kembali pada pembahasan di atas (kita butuh peningkatan kualitas pendidikan kader dan penguasaan kampus sebagai dosen), selama ini banyak anggota/kader yang mengeluh, kalau mengampu MK yang dosennya alumni HMI, ada saja yang dipersulit. Bahkan ada intimidasi untuk memenangkan kandidat BEM dari HMI, khususnya bagi mahasiswa baru. Tentu menyadari hal ini, kita dapat bersepakat kalau PKC minimal harus sedang S2 dan PB minimal sudah selesai S2nya. "Greget" kader yang masih di struktur ketika menjadi dosen akan sedikit berbeda dengan yang sudah tidak di struktur, sekalipun mungkin beda tipis, dalam hal menggunakan akses kelas untuk mengkonsolidasikan kaderisasi PMII dan pengawalan kaderisasi pasca Mapaba/PKD/PKL.

Melalui tulisan ini, saya ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para alumni dan senior PMII yang tersebar di berbagai daerah, menjadi dosen dan masih mau dan semangat mengembangkan PMII. Saya pernah melantik PC Kutai Timur, Kalimantan Timur karena agendanya beriringan dengan PKL yang dilaksanakan PKC Kaltim yang saya kawal. Itu adalah pelantikan pertama yang saya hadiri untuk melantik pengurus cabang. Sejujurnya, saya kurang suka dengan agenda melantik, sangat seremonial. Biasanya saya selalu menghindar jika di minta Ketua Umum untuk melantik. Yang lain saja. Kalaupun

harus terpaksa, saya sudah punya jurusnya. Rangkaikan pelantikan itu dengan agenda kaderisasi, mungkin saya akan datang.

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Di kutai timur, ada STAI Sangatta hampir seluruh mahasiswanya adalah PMII. Ratusan. Wajar saja, mungkin karena sebagian besar mahasiswanya adalah warga setempat yang jauh dari ibukota, hampir 7 jam kami kesana dari Samarinda. Dan kuliah disana gratis. Tidak di pungut biaya sepeser pun. Mungkin ini bagian dari efek positif yang langsung bisa dirasakan dari otonomi daerah. Hanya ada dua kampus disana, yang satunya adalah STIPER Sangatta, di kampus ini PMII tidak mendominasi. PMII bisa berkembang disana karena di kawal Mas Hari (Wakil Ketua STAI) alumni PMII Malang. Di Aceh Tengah ada STAI Gajah Putih dan Universitas Gajah Putih, baru mau membangun kaderisasi PMII. Dan penggeraknya adalah dosen alumni PMII Medan, Sahabat Ahmad Yunus yang jadi dosen disana. Juga ada Sahabat Ibnu Qodir, alumni PMII Semarang dan Sahabat Husni Fahri, alumni PMII Banda Aceh.

Jadi, buat sahabat-sahabat pengurus yang sudah lebih dari 3 tahun S2 belum selesai, harus segera diselesaikan. Jangan buang-buang umur. Sudah tidak zaman menjual status "mahasiswa" hanya untuk gaya-gayaan, apalagi cuma untuk proposal pribadi mengharap belas kasih senior. Tantangan kedepan semakin berat, persaingan semakin ketat.

Sekali lagi, menjadi dosen adalah pintu masuk yang efektif mendorong kaderisasi PMII. Ini empirik. Jangan sampai, sahabat sebagai pengurus/alumni PMII dan jadi dosen tapi tidak punya orientasi mengkader. Pengalaman saya menggunakan akses kelas untuk mendorong kaderisasi terbukti sangat efektif, dan saya berharap sahabat-sahabat agar segera lulus S2 dan "mengabdi" di kampus (memang gaji dosen tidak seberapa, cuma cukup untuk bayar kost sebulan. Tetapi kan ngajarnya cuma 1 hari dalam seminggu, itupun cuma 3 jam. Masih banyak waktu untuk mengurus organisasi. Hal-hal seperti ini, penting juga di pahami oleh senior yang mudah-mudahan sempat membaca tulisan ini, kalau ada kesempatan bagi kader untuk mengakses pekerjaan, tolong lebih diutamakan kader yang mengurus PMII. Tentunya kita juga sebagai kader harus menyadari, pentingnya kompetensi. Jangan cuma "menuntut akses" dari senior, tetapi tidak "meng-*up grade*" diri). Jika kita lama lulus, dan menunda-nunda menjadi dosen, tentu kesempatan mengkader akan digunakan oleh kelompok lain.

Pada tahun ajaran 2014-2015, saya mengajar matakuliah asas-asas manajemen di Jurusan Admnistrasi Negara, FISIP UNAS untuk mahasiswa semester satu. Sudah biasa tentunya dosen memberikan tugas presentasi kelompok, saya petakan mahasiswa semeter baru yang ketika presentasi memiliki rasa percaya diri (PeDe). Lalu saya agendakan dalam satu waktu memanggil ketua Komisariat UNAS ketika itu, sahabat Rohim dan beberapa pengurus untuk datang kekelas sebelum kelas bubar. Lalu saya kenalkan anak itu ke pengurus. Singkat cerita, anak ini ikut Mapaba. Sahabat tahu, baru terjadi dalam sejarah kaderisasi di UNAS. Pada periode itu 2014-2015, Komisariat UNAS menggelar Mapaba hingga 3 angkatan.

Angkatan pertama anak yang saya rekom itu menjadi peserta, angkatan kedua dia menjadi panitia, dan angkatan ketiga dia menjadi ketua panitia. Hampir semua pesertanya adalah hasil rekruitmen dia, terutama yang se-angkatan dan se jurusan. Jadi hampir 70% mahasiswa jurusan Administrasi Negara FISIP UNAS angkatan 2014 masuk PMII, dan terkadang saya merasa lucu dan ingin tertawa ketika bertemu kembali dengan mereka pada mata kuliah teori organisasi di semester 3 (2015-2016), semua yang bertanya dan presentasi di kelas menggunakan "kode" PMII. Tentu dalam ruang kelas saya harus tetap menjaga profesionalitas. Dan pastinya, penanganan saya terhadap kader akan lebih keras ketimbang yang bukan kader. Karena pusaka yang di tempa dengan serius, pasti berbeda hasilnya dengan pisau dapur. Ini prinsip mengkader. Semoga mereka bisa maksimalkan proses yang berjalan.

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Tantangan dunia kedepan terletak pada pengembangan kualitas sumber daya manusia. Setuju atau tidak, capaian pendidikan pun menjadi ukurannya. Hari ini, Berapa jumlah kader dan alumni PMII yang Profesor? Yang Doktor? Yang Master? Yang mahasiswa abadi? Yang puluhan tahun S1 tidak lulus-lulus berapa?! Kita butuh banyak kader yang memiliki kompetensi yang meningkat dan ditopang dengan pendidikan formal yang juga baik, karena dalam konteks tertentu, restrukturisasi dan rasionalisasi sebagai rumus yang telah mewabah di berbagai lembaga negara tentu harus kita siasati. Banyak ruang strategis yang membutuhkan formalitas izajah. Pastinya, sebagai kader PMII, ijazah yang kita miliki akan dapat kita pertanggung jawabkan kelimuannya.

Benar, bahwa dalam konteks tertentu, pendidikan mungkin saja tidak berlaku sebagai syarat untuk mencapai kesuksesan. Orang bisa sukses walau tidak lulus S1 bahkan di DO dari kampus (fenomena orang terkaya di dunia, Bill Gates) dan bisa menjadi menteri walau cuma lulusan SMP (fenomena menteri KKP, Ibu Susi). Tetapi itu adalah fenomena personalistik, kasuistik. Beliau-beliau sudah menjalani proses yang mungkin tidak kita jalani. Tidak di jalani oleh banyak kader PMII yang di DO dan tidak lulus kuliah. Tidak di jalani oleh banyak rakyat kita yang tidak lanjut SMA. Kita harus mendorong capaian pendidikan yang kolektif menjadi gerakan bersama, yang menjadi kekuatan komunal kita. Menjadi identitas kader PMII.

Laporan indeks pembangunan manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh UNDP pada 2015, IPM Indonesia ada di peringkat 110 dari 187 negara, dengan nilai indeks 0,684. Indikator yang digunakan yaitu angka harapan hidup, harapan tahun bersekolah, rata-rata tahun sekolah yang dijalani orang berusia 25 tahun keatas dan pendapatan nasional bruto. Padahal pada laporan 2014, IPM Indonesia adalah 108 dari 187 negara. Di antara negara tetangga (Asean), peringkat Singapura (9), Brunei (30), Malaysia (62) dan Thailand (89). Dengan Thailand saja, kita sudah tertinggal 19 peringkat.

Terkait dengan Thailand, saya ingin sedikit bercerita. Dalam satu kesempatan di akhir tahun 2014, ada agenda kemenpora untuk kunjungan kebudayaan disana, perwakilan

OKP-OKP diundang, perwakilan PB PMII pun turut hadir. Di Thailand, UU pemudanya mengatur bahwa usia pemuda adalah 16-25 tahun, sedangkan di Indonesia, 16-30 tahun. dalam konteks ini, jika (anggap saja) di Thailand ada organisasi semacam PMII atau OKP-OKP lainnya, maka maksimal mereka berproses pada usia 25 tahun. Selanjutnya mereka masuk dalam ruang-ruang profesional. Artinya, di ruang-ruang profesional itu pemuda kita sudah tertinggal 5 tahun dengan Thailand. 5 tahun mereka berproses di ruang profesional, ketika mereka sudah menduduki posisi di *middle manager*, kita justru baru ingin memulai di usia 30 tahun.

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Sebagai anak bangsa, sebagai generasi penerus negeri ini, tentu sangat wajar jika kita berharap IPM Indonesia dapat terus meningkat dari tahun ke tahun, tetapi akan menjadi sangat luar biasa jika IPM Indonesia yang meningkat merupakan bagian dari sumbangsih kaderisasi PMII. Misalnya, IPM Indonesia meningkat karena jumlah manusia yang terdidik (berpendidikan tinggi), dan sebagian besar profesor, doktor yang terdidik di negeri ini adalah kader PMII. Dengan jumlah yang melimpah ruah, tersebar diberbagai daerah dan memperkuat struktur kampus umum, negeri favorit, kampus swasta, juga di UNU.

Per Oktober 2015, jumlah penduduk Indonesia adalah 252.370.792 jiwa. Data pada tahun 2012, jumlah doktor di Indonesia, 120 berbanding satu juta penduduk. Malaysia dan Singapura antara 250-300 doktor per satu juta penduduk. Dalam peringkat Global Competitive Index (GCI) periode 2013-2014, Swiss menjadi negara terbaik dengan skor 5,67. Dalam daftar 30 besar negara terbaik, hanya ada tiga negara dari kawasan ASEAN, yakni, Singapura di urutan kedua di bawah Swiss. Kemudian, ada Malaysia di urutan ke-24 dan Brunei Darussalam di urutan ke-26. Di mana posisi Indonesia? Negara kita masih berada di urutan ke-38 dari total 74 negara yang berpartisipasi. Jika ini adalah bagian dari masalah negeri ini, berarti ini adalah tantangan kaderisasi PMII.

C. MEMBANGUN MITOS PMII

Para pendiri bangsa ini sadar, bahwa untuk memenangkan perjuangan kemerdekaan diperlukan persatuan seluruh kekuatan nasional. Keutuhan NKRI yang kita jaga sejak proklamasi 1945 menjadi hal yang sangat mustahil bagi semua bangsa asing yang membaca sejarah Indonesia. Bagaimana mungkin Indonesia bisa bersatu dan merdeka, bisa bertahan dari serangan isu SARA yang selama ini terus menjadi bahaya laten dan menghantui negeri ini?! Ya, dunia luar melihat Indonesia adalah negeri yang ajaib.

Lalu bagaimana persatuan itu ada dan bisa bertahan hingga kini? Semua itu dibangun dari mitos. Ya, mitos. Bung karno dan para pendiri negeri ini sukses

membangun mitos bahwa kita sudah di jajah Belanda ratusan tahun lamanya. Persatuan untuk merdeka adalah sebuah keniscayaan. Perasaan senasib dan sepenanggungan menjadi kekuatan utama dalam mendorong persatuan nasional ketika itu, dan hingga kini.

Lalu, bagaimana dalam konteks hari ini? Ketika generasi bangsa yang hidup dan berjuang di masa perjuangan kemerdekaan dahulu sudah wafat, muncul generasi yang sudah jauh dari perasaan senasib sepenanggungan dalam berbangsa dan bernegara (akibat penjajahan), tantangan nasionalisme pun mewabah. Para pemuda di desa-desa tidak pernah merasakan perasaan senasib dan sepenanggungan dengan para pemuda di kota-kota. Pemerintah belum berhasil menurunkan kesenjangan sosial antara desa dan kota, antara ibukota dan daerah, antara Jawa dan luar Jawa, sekalipun desentralisasi dan otonomi daerah sudah diterapkan. Disisi lain, lembaga pendidikan yang ada tidak lagi menekankan doktrin cinta tanah air, seiring dihapusnya penataran P4 pasca orde baru runtuh. Jika demikian perkembangannya, tantangan kita adalah bagaimana tetap menjaga persatuan dan kesatuan NKRI ini!

Kenapa? Karena tantangan ini diperparah dengan kebijakan pemerintah yang terkesan "ngasal" memberikan izin kepada swasta untuk membuka lembaga pendidikan yang tidak kental membangun basis kesadaran nasionalisme kepada para murid, seolah agenda upacara bendera yang dahulu wajib (zaman saya sekolah) setiap senin pagi dan sabtu sore, kini tidak menjadi kewajiban bagi sekolah-sekolah swasta. Terlebih swasta yang mengidentifikasi dirinya sebagai "sekolah internasional". Pemerintah lengah. Atau memang pura-pura lengah?! Wallahu alam...

Sepertinya harus dibangun evaluasi secara komprehensif kepada sekolah-sekolah swasta, terkait dengan sistem pendidikan dan penyampaian mata pelajaran Pancasila sebagai ideologi bangsa, agar dapat meminimalisir berkembangnya faham anti negara sejak dini. Pendidikan kita harus kembali ke khittoh. Pendidikan untuk membangun karakter bangsa, bukan sekedar mengajarkan pengetahuan sebagai asupan otak.

Dalam konteks ini, kaderisasi PMII hadir untuk menjawab tantangan zaman itu. Tentu, kaderisasi PMII akan dan selalu memperkuat semangat nasionalisme anggota dan kader-kadernya. Selain sistem kaderisasi yang sudah coba kami dorong untuk menjawab beberapa permasalahan internal di atas, penting sedikit saya elaborasi beberapa permasalahan, yang umumnya terjadi di beberapa daerah, sekalipun tidak terkait langsung dengan kaderisasi, tetapi cukup berpengaruh terhadap dinamika kaderisasi. Apa itu? Mitos PMII. Baik mitos "positif" maupun mitos yang "negatif".

Para senior kita selalu menegaskan mitos-mitos organisasi dalam setiap momen, terutama dalam ruang kaderisasi. Baik mitos secara institusional (menyeluruh),

maupun secara lokalistik. Mitos sebagai Rayon Besar, Mitos sebagai Komisariat Besar dan Mitos sebagai Cabang Besar. Untungnya tidak ada mitos tentang Koorcab Besar, karena sudah kongkrit. Koorcab terbesar PMII adalah Jawa Timur, yang memiliki cabang paling banyak. Basis NU, basis PMII. Sekalipun luas wilayahnya masih kalah dengan Papua. Padahal, dalam struktur PMII, hanya ada satu yang besar, yaitu Pengurus Besar. Mitos lokal ini masih saja di propagandakan oleh alumni dan senior yang mungkin sudah tidak paham terkait kondisi obyektif PMII di basisnya hari ini, disini masalahnya. Pada bagian selanjutnya, saya akan coba elaborasi lebih jauh masalah “mitos lokal” yang terkadang tidak seiring dengan sistem kaderisasi yang kami bangun.

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Mitos yang membangun semangat dan kecintaan kepada PMII penting untuk kita bangun kepada seluruh anggota dan kader. Anggota baru dan kader harus merasa yakin, bahwa PMII adalah pilihan yang tepat dalam mengembangkan kemampuan berorganisasi, belajar, berjuang dan berjihad di jalan Allah SWT (bukan jihad dengan menjadi “pengantin” – pembawa bom bunuh diri). Dan sebagai kader kita juga bertanggung jawab memastikan mitos tersebut terealisasi. Minimal, realitas yang kita bangun mendekati wacana mitos yang sudah terbangun sejak lama. Apa saja mitos-mitos itu?

Mitos-mitos positif PMII yang harus terus digelorakan dan dicontohkan (kader dan senior harus menjadi tauladan), mitos tersebut diantaranya adalah, bahwa PMII adalah organisasi yang paling islami, satu-satunya organisasi mahasiswa Islam dengan faham ahlussunah wal jamaah. PMII adalah organisasi yang paling nasionalis, paling konsisten mengawal NKRI dan Pancasila. PMII adalah organisasi Intelektual yang paling progresif. Seperti apa penjelasannya?

4) Satu-Satunya Organisasi Mahasiswa Islam Ahlussunah Wal Jamaah

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Sebelum mengelaborasi poin ini, mari kita sama-sama berkontemplasi, merefleksi diri. Mitos ini bukan sembarang mitos yang coba di bangun oleh para pendiri PMII dan ulama kita, bukan sebatas agitasi dan propaganda untuk pengembangan PMII di kampus. Tapi inilah tujuan PMII didirikan sebenar-benarnya! Untuk melapis (mengisi ruang kosong) dakwah NU di kampus-kampus, untuk menghasilkan kader-kader intelektual yang berfaham *ahlussunnah wal jamaah*, kader yang sholeh dan sholeha, apapun kompetensi dan keahlian akademiknya. Yang tidak hanya menjalankan ibadah wajib, tetapi juga beserta sunnah-sunnah yang telah di contohkan Rasul SAW – ahlussunnah, dan menjadi tauladan untuk mengajak dan mendidik anggota dan kader lainnya menjalankan ibadah bersama-sama – berjamaah **(syariat dan ma’rifat yang tidak “terputus”).**

Hari ini PMII telah kehilangan “otoritas moral” nya di kampus-kampus. Tidak sedikit kader PMII yang dengan sengaja meninggalkan sholat, bahkan bangga

tidak puasa di bulan Ramadhan, cuma karena “gagal paham” dengan bacaan dan diskusi-diskusi filsafatnya. Padahal, para Sahabat Rasul yang sudah jelas mendapatkan jaminan rahmat Allah SWT, selalu menjalankan sholat dan amalan ibadah lainnya yang diperintahkan Rasul SAW. Kok bisa “kader” PMII yang baru sedikit baca buku filsafat, sudah “menggugat” Tuhan, sudah mengkritik wacana agama. Seolah sudah mencapai titik ma’rifat! Sahabat yang menjalankan sholat dan puasa secara zohir dianggap masih berkutat diwilayah syariat, dst. Dampak dari kehilangan otoritas moral ini, PMII sulit berkembang bahkan “mati” dikampus-kampus umum dan fakultas eksak.

Kok bisa?! Apa hubungannya?! Ya. Mahasiswa di kampus umum/fakultas eksak adalah mahasiswa yang dahaga religiusitasnya tinggi, karena mayoritas berasal dari sekolah umum dan tidak mengeyam pendidikan di pesantren, maksimal cuma ikut pesantren kilat. Selain itu, waktu untuk aktif di organisasi sedikit, karena sudah pusing dengan jadwal kuliah, praktek dan tugas-tugas kuliah. Artinya, jika ada kader dari kampus umum/fakultas eksak, maka kebutuhannya sangat sederhana, masuk PMII cuma mau belajar ngaji. Ingat, kultur kampus umum/eksak berbeda dengan kampus agama. Mahasiswa di kampus umum/eksak, jika mendapati organisasi Islam tetapi tidak islami, akan ditinggalkan.

Secara pribadi pun saya tidak habis pikir, mengapa gejala ini (kaderisasi PMII menjauh dari nilai-nilai islami) mewabah di PMII. Jika kita menggunakan perspektif konspiratif, tentu dengan mudah kita katakan bahwa selama ini tanpa kita sadari telah terjadi **infiltrasi** wacana di PMII – yang mempengaruhi pola gerak PMII. Jika kita sepakat dengan rumusan spektrum ideologi, bahwa Kiri Mentok adalah komunisme, kiri tengah adalah sosdem lalu Pancasila ada ditengah, kanan tengah adalah demokrasi/liberalism dan kanan mentok adalah ekstrimis kapitalisme/Nazi/Islam fundamentalis. Maka, Wacana gerakan kiri dan kanan telah merangsek ke tubuh PMII yang mencapai puncaknya pada era 90an, bahkan hingga kini masih terasa. Perlahan sedang kami kikis sedikit demi sedikit.

Era ini di PMII dikenal dengan sebutan regim LSM, terjadi degradasi pola kaderisasi yang luar biasa. Pola instruktif dalam ruang kaderisasi menjadi pola partisipatoris. Orientasi kader sukses adalah kader yang “kritis”, kader yang berani “melawan”. Kritis dan berani melawan siapa saja (penguasa, senior bahkan ulama) yang dianggap tidak aspiratif. Hanyut dalam wacana demokratisasi, dan menghalalkan kritik terhadap penguasa yang “dianggap”dzalim, bahkan ulama NU yang dianggap “kolot” dan primordialistik.

Saya tidak bisa membuktikan dengan data empirik terkait dengan *infiltrasi* ini, tetapi gejalanya bisa saja kita identifikasi, misalnya ketika itu (era 90an – awal tahun 2000) marak kaderisasi PMII yang mengundang pembicara dari kalangan

“ideologis lain”. Sedikit banyak pasti meraka punya agenda “mempengaruhi”. Bahkan ada kaderisasi yang langsung di kawal oleh “Romo” (kaderisasi tertutup yang pesertanya lintas agama dan mayoritas anak muda NU – Kasebul).

Jika kita tidak sepakat ada infiltrasi di PMII, tentu pandangan lain yang menyebabkan perilaku kader dan senior PMII seolah “kehilangan arah”, adalah derasnya arus **liberasi pemikiran**. Saya menjadi bagian dari proses kaderisasi PMII yang sangat kental dengan liberasi pemikiran ini. Sampai-sampai saya tidak bisa membedakan PMII dengan organisasi lokal di UNAS.

Di kampus saya, menjamur organisasi lokal yang jaringannya lebih taktis dan praktis dengan organisasi aksi yang berdiri di era 90an, afiliasinya lebih sering dengan Forum Kota (Forkot – organisasi yang terlihat sangat heroik dalam film gerakan mahasiswa yang setiap tahun ajaran baru kami putarkan kepada mahasiswa baru – memukul mundur ABRI dan menduduki DPR, bahkan memaksa Soeharto mundur dari Presiden – itulah titik puncak keberhasilan gerakan mahasiswa 1998 dan seolah dapat terulang ketika penguasa kembali mengulang pola diktator regim orde baru). Isu aksi-aksi dalam setiap demonstrasi (ketika itu, 2003an) masih seputar adili Soeharto, adili dan hukum akbar tanjung, bubarkan Golkar, dst. Di UNAS ada Kelompok Studi Mahasiswa (KSM UNAS), Front Nasional (FN), Himpunan Aktivis Mahasiswa Unas (Hamas), Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi (Somasi), dll. Karena semua aktivisnya kebanyakan dari mahasiswa FISIP, maka kajian-kajian ideologinya lebih kental dengan referensi pemikiran politik barat. Kajian-kajian ideologi kiri menjadi idola.

Ketika kami masuk PMII, materi ahlussunnah wal jamaah yang kami dapat tidak jauh berbeda dengan diskusi pemikiran politik barat. Misalnya, dalam penekanan dan elaborasi tentang konsep Keadilan (al `adalah), Toleransi (tasamuh), Moderat (tawasuth) dan Seimbang (tawajun), semuanya merujuk pada referensi pemikiran politik barat. Elaborasi terkait dengan konsep Keadilan, lebih memaknai teori kritis karl marx, “bahwa keadilan tidak akan terwujud selama kelas pemilik modal masih menguasai alat produksi dan kelas pekerja hanya sebagai objek. Sehingga untuk mewujudkan keadilan maka, revolusi!” Bicara terkait dengan konsep seimbang, loncat pada teori struktural fungsionalnya Talcott Parsons, dst. Lalu dimana relevansinya teori-teori tersebut dengan *ahlussunnah wal jamaah* sebagai doktrin PMII? Ini masalah kaderisasi kita. Dulu. Hari ini akan coba kita benahi bersama.

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Pada PKL di Kaltim (akhir Desember 2014), panitia PKL kontak saya dan minta pengawalan PKL oleh PB. Kami kawal pelaksanaannya hingga selesai pembaiatan. Saya tidak tahu bagaimana sejarah kaderisasi disana, yang pasti PKC Kaltim baru pertama kali melaksanakan PKL. Sebelumnya hanya mengutus, merekomendasi kader untuk ikut PKL di Jawa, padahal Kaltim punya sejarah sebagai tuan rumah Kongres. Sejak awal kami

berikan rumusan materi PKL yang sedikit berubah dengan materi PKL sebelumnya. Ya, kami hapus materi kritik wacana agama. Tetapi ternyata panitia tidak teliti membuka file yang kami kirim. H-3, ketika saya kontak untuk menanyakan persiapan, panitia melaporkan bahwa pemateri untuk kritik wacana agama fix, mas Ahmad Baso. Selain itu, untuk Community Organizing, adalah mas Eman Hermawan.

Awalnya, kami sedikit bingung. Rencana awal gagal. Sahabat Ahmad Baso adalah kader hebat, senior yang saya kagumi, beliau memiliki poin tersendiri terkait dengan dinamika pergulatan wacana di era 90an. Ketika beliau memberikan materi (saya sengaja ikut mendengarkan dari luar ruangan), kegelisahan saya hilang. Dengan jelas beliau memaparkan, dengan sedikit emosi, "materi ini (kritik wacana agama) sudah tidak boleh lagi ada dalam kaderisasi PMII. Coba kalian pahami lirik mars PMII. PMII itu; pembela bangsa, penegak agama! (sambil mengajak peserta menyanyikan mars PMII). Kita ini penegak agama, semua perintah agama, *sami'na wa a to' na*. Kenapa kalian mengkritik wacana agama?! Mulai saat ini, tidak boleh lagi. Di PKL ini saya ganti materinya dengan "agama NU". Ini buku saya yang terbaru (sambil mengangkat buku dan "promosi"). Mendengar paparan itu, tentu saya sedikit lega.

Kehadiran mas Eman pun memberikan pandangan yang selaras dengan kegelisahan kami, terkait dengan paradigma kritis transformatif (PKT). Kami tanyakan ketika itu, "bagaimana pandangan jenengan terkait PKT hari ini?" beliau menjelaskan, "PKT itu tepat pada zamannya. Zaman itu, otoritarianisme regim orde baru sudah sampai pada puncaknya, harus dilawan. Doktrin *ahlussunnah wal jamaah* PMII secara langsung tidak mampu meradikalisasi gerakan PMII, sehingga kita ciptakan PKT sebagai perangkat untuk itu. Hari ini, tantangan zamannya sudah berubah. Kalau kalian masih pakai PKT, kalian salah!"

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Di atas sudah sedikit saya singgung terkait dengan liberasi pemikiran. Sedikit cerita bersama mas Eman di atas, juga memberikan gambaran bahwa liberasi pemikiran yang terjadi dahulu, untuk membangun perangkat operasional ideologis guna melawan kediktatoran orde baru. Hal itu dengan sadar memang di konstruksi. Tetapi, ketika zaman berubah belum ada upaya rekonstruksi paradigma yang sesuai dengan tuntutan zaman. Amanah rekomendasi kongres Jambi, salah satunya adalah merumuskan paradigma PMII. Karena keterbatasan kami (PB PMII periode 2014-2016), hal ini kami konsultasikan kepada IKA PMII untuk dapat membantu. Alhamdulillah, IKA sudah membentuk tim perumus Paradigma PMII yang di ketuai oleh Sahabat Mustafid (Mantan Ketua Cabang PC Sleman). InsyaAllah pada kongres nanti kita akan bahas, jika kongres menyetujui, maka pada PB periode 2016-2018 nanti,

PMII akan memiliki paradigma yang insyaAllah bermanfaat untuk menjawab tantangan zaman.

Khusus terkait dengan liberasi yang hari ini masih terasa dampaknya, kami (saya, Ketua Umum, Sekjen, Bendum, Ketua Kopri dan Sekretaris Kopri) berdiskusi langsung dengan Kyai Hasyim Muzadi, ketika itu disela-sela acara Munas Alim Ulama di kantor PBNU (2015), kami sedikit mengulas tentang dinamika liberasi dikalangan generasi muda NU, khususnya di PMII. Ada poin yang menarik yang beliau sampaikan, "liberasi pemikiran itu ndak apa-apa, asalkan jangan liberasi perilaku". Pernyataan ini terkesan sederhana, tetapi cukup dalam jika diresapi dan dimaknai. Banyak kader PMII sekarang sudah malas membaca, termasuk saya. Membaca hanya untuk menulis skripsi dan tesis saja. Beruntung saya masih ada aktivitas mengajar, jadi masih menyempatkan waktu untuk membaca sebelum masuk kelas. Banyak kader PMII hari ini, baru baca selembar tentang Das Kapital nya Karl Mark, itupun baru kata pengantar, sudah sok-sok komunis dari pada kader komunis.

Terkait dengan hal itu semua, untuk membendung infiltrasi dan liberasi perilaku dikalangan kader, PB membuat kebijakan dengan mendorong kaderisasi tertutup dan terpimpin. Lebih detailnya akan saya paparkan pada bagian selanjutnya. Tetapi sedikit yang ingin saya sampaikan pada bagian ini adalah, hari ini PKD kami batasi hanya boleh diikuti oleh anggota di wilayah Cabang dan PKL hanya boleh diikuti oleh kader di wilayah Koordinator Cabang dan pelaksanaan kaderisasi harus menekankan pada aspek keislaman. Kenapa? Dengan demikian, akan memudahkan mengenali peserta dan menutup peluang infiltrasi dari luar. Karena pengalaman saya mengawal PKL di Jakarta, ternyata ada peserta dari luar pulau jawa yang tidak hafal mars PMII dan kami tidak punya akses untuk mengkonfirmasi kebenaran ybs adalah kader atau bukan. Tentu dengan pembatasan itu, infiltrasi akan dapat diminimalisir.

Sahabat-sahabat sekalian, hampir 99% kader PMII laki-laki adalah perokok. Saya mungkin masuk bagian dari yang 1%, bukan perokok. Untuk sahabat-sahabat kader yang tidak merokok, tidak usah memaksakan diri untuk merokok cuma untuk dianggap "gaul" atau "menghormati". Untuk yang satu ini, *be your self!* Sahabat-sahabat perokok, penting saya ingatkan. Sudah menjadi kebiasaan perokok membuang puntung rokok sembarang. Bahkan ada yang sambil berlagak seperti *spiderman*, membuang puntung sambil di sentil untuk mengenai sesuatu. Ketika mengenai sasaran yang di maksud, seolah-olah jadi *spiderman* beneran. Itu hal biasa! Bukan masalah! Kalau sudah begini, ini bisa jadi karakter. Bahkan, jika kumpul merokok dan ada asbak, pun abu rokok dan puntung masih berantakan kemana-mana. Tentu ini tidak baik. Jika yang tidak baik dianggap wajar, maka "kewajaran" itulah sumber masalahnya.

Sebelum masuk pada intinya, saya ingin sedikit lagi mengurai “kewajaran” yang melekat dalam keseharian kita. Minum dengan tangan kiri. Sepele! Pernah sambil bercanda kami mengingatkan salah seorang sahabat, agar minum dengan tangan kanan, jawabannya pun luar biasa. “Itu kan cuma sunnah bro. Slow lahh”. Lagi, ini biasanya kader perempuan. Biasanya kader perempuan di kampus, kalau mau ke toilet rombongan. Saking kebeletnya, atau buru-buru, atau mungkin juga karena lalai (bahkan bisa juga sadar dan mengacuhkan sunnah), keluar masuk toilet tidak kontrol dengan kaki apa. Sunnahnya, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan.

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Beberapa dinamika keseharian yang saya singgung di atas mungkin untuk sebagian besar “kader” itu adalah urusan sepele. Gak penting! Yang penting itu adalah bagaimana PMII hadir dalam pendampingan advokasi kepentingan rakyat! Bagaimana PMII hadir dalam urusan-urusan masyarakat kecil yang di dzolimi! Bagaimana PMII bisa menjadi problem solver atas permasalahan yang berkembang di masyarakat! Dst... Ya, itu semua juga penting, tetapi bukan berarti sahabat yang sudah merasa “pahlawan” dengan melakukan kebaikan untuk banyak orang (yang biasa disebut keshalehan sosial), kemudian melupakan amalan keseharian.

Suatu hari, ketika masih kuliah S1, saya sedang berkumpul dengan teman-teman, nongkrong. Ngobrol ngalor-ngidiul, sambil menunggu jam kuliah. Lalu datang kepada kami seorang teman (kader LKD), menawarkan permen. Langsung saja ludes, semua yang nongkrong ambil satu-satu. Biasa, buka bungkusnya, lumat permennya, dan buang bungkusnya. Ketika diantara kami membuang sampahnya sembarang, teman yang LDK ini mengeluarkan kantong kresek dari dalam tasnya. Lalu berkata, “eh,, sampahnya taro kesini”. Setelah semua sampah terkumpul, di masukan lagi kresek itu kedalam tas. Singkat cerita, kami pun bubar dan masuk kelas masing-masing. Pada waktu yang lain, dari kejauhan saya tidak sengaja melihat teman LDK itu berjalan dan berhenti di depan tong sampah, mengeluarkan kresek sampahnya, membuang sampah yang ada didalamnya, dan kembali memasukan kresek itu kedalam tas.

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Saya ingin mengingatkan, bahwa keberadaan kita di kampus tidak sendirian. Kaderisasi PMII bukan tanpa kompetisi. Perilaku keseharian kader sangat berpengaruh membangun *image*, membangun *mindset* dan membangun citra organisasi kepada publik. Ingat! Dalam kompetisi kaderisasi ideologis, agitasi dan propaganda adalah alat untuk memenangkan persaingan.

Artinya, kita selalu berbuat baik saja, masih di propaganda tidak baik, oleh lawan-lawan ideologis kita (apa yang salah dengan tahlil? Maulid? Dts,. Pun kita masih di bid’ah-bid’ah kan, dianggap sesat, ahli neraka, dts). Apalagi, ketika kita jelas-jelas mempertahankan “kewajaran” yang selama ini melekat seperti saya ungkap di

atas. Kita tidak sadar, bahwa ketika minum pakai tangan kiri, di seberang meja kantin ada yang ngintrik kita, sambil mendampingi anggota barunya, mereka menjelaskan, "tuh lihat anak PMII, katanya ahlussunnah, tapi perilakunya gak sesuai sunnah. Kamu ingetkan waktu ngaji kemaren, sunnah makan minum itu pakai tangan kanan. Ya kan?!" Begitu juga dalam hal keluar masuk toilet, buang puntung rokok, dst.

Terkait dengan puntung rokok, saya ingin sedikit lagi bercerita. Saya memiliki seorang teman perokok (kader Gemsos – dia adalah bagian dari aktivis kampus yang "meng-imani" bahwa gak bisa mikir kalau gak ngerokok), satu waktu kami bertemu dan berbincang, dia sambil merokok. Karena disekitar kami tidak ada tempat sampah dan asbak, tiba-tiba dia mengeluarkan "kotak ajaib". Bekas bingkisan permen yang terbuat dari kaleng, digunakannya untuk mengumpulkan abu rokok dan puntung rokok yang dia hisap. Sambil berceloteh menyela pembicaraan yang berlangsung, dia bilang. "asbak *portable* bro. Hehee..."

Paparan di atas baru "kewajaran" perilaku personal, belum lagi "kewajaran" dalam ruang kaderisasi. Hal ini terkait dengan "keisengan" pengurus dan panitia Mapaba, PKD, PKL (bahkan "ngajak" main peserta), karena pemateri belum hadir, tidak ada yang bisa mengawal forum, sambil menunggu pemateri, diselingi dengan main gaplek, main gitar, dst (temanya positif: membangun semangat egalilter antara pengurus, panitia dan peserta). Waktunya ishoma, yang sholat, sholat. Ada yang ngopi, ngobrol, main gitar, main PS, dll, asyik dengan aktivitasnya masing-masing. Saya menjadi bagian dari dinamika kaderisasi macam begini. Apa yang saya alami dahulu, belum tentu di alami oleh sahabat-sahabat yang lain, namun bisa juga ternyata apa yang sahabat alami ternyata sama, bahkan lebih parah. Saya ingin pertegas, ini pola yang salah! Kaderisasi yang "menjauh" dari semangat membentuk kader *Ahlussunnah wal jamaah* di kampus-kampus harus dihentikan. Segera!!!

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Apakah mungkin "kewajaran" yang sudah melekat, bahkan "membudaya" bisa kita ubah?! Bisa! Tentu dengan membangun kesadaran bersama. Apakabar kesadaran bersama hari ini? Dengan jujur saya sampaikan, kesadaran bersama hari ini belum terkonsolidasikan. Melalui tulisan ini saya ingin kita semua menyadari tantangan kompetisi kaderisasi kita. Pastinya, pola lama seperti di atas tidak bisa dibiarkan terjadi terus menerus. Setelah memahami masalah, kami pastikan solusinya. Menyikapi hal ini, PB PMII memutuskan Tap Pleno tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kaderisasi Formal. Mohon sahabat-sahabat yang sudah sadar, berperan aktif dalam mengkonsolidasikan kesadarannya dengan perilaku personalnya. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi yang belum sadar (atau mungkin anda malah di cemooh, nikmati saja).

Dalam Tap Pleno tentang pedoman teknis kaderisasi formal kami atur, bahwa setiap masuk waktu sholat, harus berjamaah. Jika pelaksanaan Mapaba/PKD/PKL menginap, sessi pagi dalam agenda kaderisasi dimulai jam 08.00 pagi dan selesai paling lambat pada 22.30, selanjutnya istirahat dan bangun di sepertiga malam (paling lambat 03.30 atau jam 04.00 – disesuaikan dengan jadwal sholat subuh) untuk mujahadah, tahajud dan dzikir hingga subuh berjamaah. Pada pukul 06.00-07.00 olahraga, beres-beres, sarapan, sholat dhuha dan persiapan materi pukul 08.00. Begitu seterusnya, hingga pembaiatan dan penutupan (terkait dengan sessi pembaiatan, akan saya elaborasi pada bagian selanjutnya).

Lalu bagaimana jika pelaksanaan Mapaba peserta tidak bisa menginap? (biasanya Mapaba pada fakultas eksak dan di beberapa kampus umum, peserta tidak bisa ikuti acara ekstrakampus yang menginap). Pelaksanaannya bisa diatur sesuai jadwal kuliah calon peserta. Biasanya di *week end*, bisa dilaksanakan pada sabtu/minggu dari pagi hingga sore. Dengan ketentuan selalu sholat berjamaah disetiap waktu sholat, selama proses Mapaba berlangsung. Untuk jenjang PKD dan PKL, saya yakin sahabat-sahabat di fakultas eksak pun sudah bisa menyesuaikan jadwal untuk bisa menginap dalam acara kaderisasi, karena sudah menjadi kader. Pasti militan!

Mungkin sahabat-sahabat akan menilai bahwa aturan diatas terlalu berlebihan. Lebay. “yang kayak gini gak usah diatur kali, memang sudah seharusnya! Sholat, puasa, dan amalan-amalan lainnya itu urusan pribadi-pribadi, gak usah di formalkan! ”Deskripsi aturan metode kaderisasi formal seperti diatas, sebenarnya sudah dipaparkan dengan jelas di Buku Panduan Kaderisasi 2014. Tetapi memang dalam pelaksanaannya masih belum menjadi acuan bagi seluruh struktur penanggungjawab kaderisasi. Inspirasi untuk “melegalkan” panduan tersebut, pun berangkat dari beberapa Mabinas yang kami temui pasca Rakernas. Secara tidak langsung, beliau-beliau menyarankan agar penekanan nilai-nilai keislaman lebih diperdalam dalam pelaksanaan kaderisasi.

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! PB PMII tidak punya kemampuan untuk mengontrol kaderisasi hingga ke komisariat dan rayon se Indonesia. Tetapi, disisi lain, PB PMII pun bertanggung jawab atas kualitas kader PMII se Indonesia. Yang tidak hanya berwawasan Islam *ahlussunnah wal jamaah* (banyak sekali kader PMII yang ketika bicara tentang Ayat, Hadist dan kitab pemahamannya luar biasa), tetapi juga dalam bersikap dan berperilaku.[1]

[1] Ketika saya bersilaturahim ke kediaman bang Endin Soefihara (ketua kaderisasi PB PMII periode sahabat Surya Dharma Ali dan Sahabat Iqbal Assegaf), beliau dengan prihatin berkata, “saya mendengar cerita terkait dengan kondisi kongres PMII di Jambi kemarin, juga kongres-kongres sebelumnya. Melalui cerita itu, terbayang oleh saya. Jika disetiap sudut arena kongres itu tidak ada lambang, logo dan istilah “Islam” – PMII. Maka orang akan bertanya, ini acara kongres apa? Apa iya, preman punya agenda kongres?!” Satir! Lalu beliau

Dalam roadshow konsolidasi PB kepada para Mabinas yang kami temui satu persatu pasca Rakernas, dengan jadwal yang disesuaikan, karena kesibukan para Mabinas. Alhamdulillah, cukup baik respon beliau-beliau terkait dengan program-program yang akan kami jalankan kedepan, terutama dalam program kaderisasi. Semua menyadari, hari ini sangat penting menyiapkan kader-kader pemimpin di masa depan. Jika tidak disiapkan hari ini, kita akan tergilas dalam persaingan dengan berbagai kelompok lain, yang juga mengatasnamakan Islam dan ahlussunnah wal jamaah.

Satu waktu kami diterima Bunda Khofifah, setelah banyak presentasi tentang beragam program kerja, satu diantara kami bertanya, "apa arahan dan nasehat untuk kami jalankan bunda?". Dengan tegas beliau menjawab dalam penutup perjumpaan kami, "Pesan saya, PMII jangan tinggalkan sholat!" Terpana sejenak saya mendapati nasehat itu. Seketika perasaan saya tak menentu, ada rasa galau yang menyerang. Takut. Terlintas dalam pikiran saya, "berarti, selama saya menjadi ketua kaderisasi nasional PB PMII, selama itu banyak anggota dan kader yang tidak sholat, apalagi dalam kegiatan kaderisasi, berarti saya bertanggungjawab atas "dosa" mereka, karena mereka meninggalkan sholat dalam kegiatan kaderisasi PMII. Astagfirulloh...

Ternyata, hal yang seperti ini yang menyebabkan Beliau, tidak menyarankan anaknya untuk masuk PMII. Karena dalam perkembangannya (ketika itu), PMII dianggap tidak islami. Tentu, ini menjadi tugas dan tangung jawab kita bersama agar PMII tidak kehilangan arah. Dan kembali merebut otoritas dan kepemimpinan moral dalam ruang kaderisasi dan keorganisasian mahasiswa Islam di negeri ini. Jika alasan yang sama menjadi alasan bagi seluruh alumni, apalagi seluruh mantan ketua umum PB PMII/Ketua Kopri PB PMII, tentu ini adalah bencana kaderisasi. Ya, data yang kami miliki hingga hari ini, tidak banyak anak biologis dari alumni PMII yang hebat-hebat itu masuk PMII.

Jadi intinya, kami melegalkan metode kaderisasi yang sudah diatur dalam buku panduan kaderisasi, itu adalah bagian dari cara kami, PB PMII mendorong realisasi amaliyah *ahlussunnah wal jamaah* dalam kegiatan kaderisasi formal. Dan jika Rayon, Komisariat, Cabang dan Koorcab tidak melaksanakannya, setidaknya PB PMII sudah membuat kebijakan, sudah membangun system. Sehingga, jika ada "dosa" yang harus "dipertanggung jawabkan", PB PMII sudah mendistribusikan dosa itu kepada penyelenggara. Kok bisa? Karena sudah kami instruksikan sistem ini untuk dijalankan. Kewenangan kontrol atas sistem pun sudah kami

---

melanjutkan, "sepertinya ada yang salah dalam pola kaderisasi PMII. Benar tidak?" Saya tidak merespon secara langsung pertanyaan itu. Lalu saya bertanya balik, menurut abang gimana? Apa yang harus kami lakukan, supaya kongres selanjutnya hal itu tidak terulang? Jawabnya, "perkuat ideologisasi ahlussunah wa jamaah dalam kaderisasi!" pasti kita semua sepakat!

desentralisasikan, sudah kami distribusikan kepada setiap pelaksana kaderisasi formal tersebut, dengan ketentuan didampingi oleh struktur di atasnya.

Jika aturan sudah ditetapkan, maka harus dipatuhi. Bahwa ketidak-taatan adalah sebuah pengkhianatan, dan akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Sama seperti Nabi Nuh AS, yang terbebas dari "tanggungjawab dosa" atas sikap anaknya yang tidak mau taat kepada Allah SWT, karena beliau sudah berikhtiar menyampaikan perintah Allah dan mengajak anaknya untuk beriman, sekalipun akhirnya sang anak tidak bergeming. Ingat, azab Allah amatlah pedih.

Dibeberapa kampus agama, mungkin metode ini dianggap basi. Karena memang kebanyakan dari mereka adalah alumni pesantren yang sudah "kenyang" dengan metode itu. Bahkan bosan. Karenanya menjadi tidak heran bagi saya jika ternyata keseharian kader PMII di kampus umum justru lebih islami ketimbang di kampus agama (mohon maaf, ini subjektifitas saya memang, mungkin juga anggapan ini salah dilain tempat, tetapi saya mengalami fakta empirik ini).

Saya menjadi bagian dari sahabat-sahabat di Komisariat Universitas Nasional (UNAS) yang memulai, merintis dan mengembangkan PMII setelah sebelumnya vakum. Dua tahun lebih kami mengurus legalitas sebagai Komisariat persiapan hingga akhirnya definitif, padahal ketika itu persyaratan sesuai AD/ART sudah terpenuhi. Saat itu, di PC Jakarta Selatan ada tiga Komisariat yang sudah definitive, Komisariat Kebal (PTIQ-IIQ), Komisariat Univ. At-tahiriyah dan Komisariat STAI Al-hikmah, semuanya kampus agama. Ketika ada acara Cabang, kami berkumpul. Sungguh kaget saya, ketika kami (anak-anak UNAS yang masih culun dan baru mulai berjejaring di Cabang) sedang sholat zuhur jamaah, ada sahabat dari salah satu kampus agama tadi, dengan *gesture* yang sepertinya "alami", kaget melihat kami. Dan spontan berkata, "wuih,, PMII masih sholat ta?!" Astagfirulloh… Semoga cerita diatas adalah cerita terakhir dan tidak pernah lagi terjadi.

Sahabat-sahabat, khususnya yang dari kampus agama/alumni pesantren. Perlu kami sampaikan disini, lagi. Kami dari kampus umum (yang tumbuh, besar dan berkembang di wilayah perkotaan), ber PMII sama dengan berikhtiar mencari pelepas dahaga *religiusitas*. Kebanyakan kami di kampus umum, bukanlah alumni pesantren. Saya dan mungkin kebanyakan kader dari kampus umum lainnya, belajar mengaji hanya sampai kelas 3 SMP pada guru ngaji/ustadz disekitar rumah. Biasanya kami mengaji selepas sholat magrib. Kenapa cuma sampai 3 SMP? Karena (ketika itu) masuk kelas 1 SMA, jadwal sekolah menjadi siang, pulang sekolah sudah lewat magrib. Mengubah jadwal mengaji menjadi pagi-siang pun tidak mungkin, karena biasanya ustadz kamipun bekerja pada siang harinya.

Sejak SMA kami meninggalkan kebiasaan mengaji, kalau pun menyempatkan diri, maksimal pas malam jumat, hanya yasinan. Pun,biasanya bablas. Karena kita pahami, masa-masa SMA itu masa-masa pencarian jati diri, masa-masa memulai pergaulan dengan teman yang tidak hanya dari sekitar rumah, pergaulan baru dengan beragam hobby yang diciptakan, atau memaksakan untuk memiliki hobby baru, baik untuk gaya-gayaan, atau memang menemukan rasa enjoy terhadap sesuatu yang baru, biasanya hal ini dipengaruhi dengan *life style* yang berkembang di media dan pergaulan yang berkembang di sekolah.

Tetapi, disisi lain, “rasa kangen” terhadap kebiasaan mengaji pun ada. Sehingga pesantren kilat (sanlat) di SMA cukup ramai diminati. Siapa yang mendampingi sebagai instruktur sanlat di sekolah? Biasanya bapak/ibu guru agama hanya memantau saja, dan yang lebih dominan adalah kakak-kakak dari Rohani Islam (Rohis) di sekolah. Siapa mereka? Kemana mereka berafiliasi? Kemana rekan/rekanita IPNU/IPPNU? Tentunya tidak perlu saya ulas disini. Saya hanya ingin menegaskan, kenapa PMII lemah di kampus-kampus umum? Karena sejak dini, di sekolah, mereka sudah dikenalkan dengan faham lain, bukan ahlussunnah wal jamaah. Rata-rata, alumni SMA itu (kalau lanjut kuliah) masuk kampus umum. Disana sudah menanti KAMMI untuk melanjutkan kaderisasi sanlat – rohis sewaktu di SMA.

Selama ini, di kampus umum pendekatan kaderisasi PMII tidak kental dengan nilai-nilai islami, bahkan seperti telah saya singgung di atas, tidak ada bedanya dengan GMNI, SAPMA PP, GEMSOS, dst. Wajar, karena memang minim kader yang lulusan pesantren. Tetapi harus dibangun desain kaderisasi yang bisa menutup celah ini. Karena memang hal itu menjadi kebutuhan kampus umum. Secara lokal, mungkin hal ini bisa di fasilitasi PC. Jika di wilayah koordinasinya ada kampus umum dan kampus agama, maka dibuat pengajian yang langsung dikawal oleh PC yang berasal dari kampus agama.

Ada sahabat yang pernah bercerita kepada saya, “dulu bang, saya hafal Jurmiyah, Irmiti (nama-nama kitab kuning yang dipelajari di pesantren), setelah masuk PMII, hilang semua hafalan saya”. Ini PMII yang salah, atau alumni pesantren yang masuk PMII yang salah?! Yang kami pahami, pendidikan pesantren sangat disiplin mendidik santri-santrinya. Tidak hanya ibadah wajib, tahajud dan dhuha pun di wajibkan. Setiap hari harus “setor” hafalan ayat, hadist atau kitab. Keluar pondok harus lapor, dan jika terlambat kembali akan dapat hukuman. Harusnya kedisiplinan ini bisa di bawa ke PMII, dan ditularkan kepada anggota dan kader yang bukan alumni pesantren, bukan malah sebaliknya. Bukan?!

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Mitos di atas (PMII adalah satu-satunya organisasi mahasiswa Islami dengan faham ahlussunah wal jamaah), perlahan mulai terkikis. Bukan karena agitasi dan propaganda pihak luar yang

bertentangan dengan ideologi PMII, tetapi justru terkikis dari dalam. Jika dahulu, sahabat pernah mendengar istilah “InsyaAllah Islam” yang selalu menjadi bahan olokan dan bercanda. Pastikan istilah ini hilang dan tidak ada lagi dalam kamus bercanda kita. Saya sengaja menulis ahlussunah wal jamaah sejak paparan diawal, tidak saya singkat. Kenapa? Selama ini, “kesakralan” ahlussunah wal jamaah yang di singkat itu, diplesetkan dengan istilah “asal wajar-wajar aja”, hilang kesakralannya. Siapa yang menghilangkannya? Semoga bukan kita yang sempat membaca tulisan ini.

Saya tidak mengerti, banyak poin positif, poin penting yang bersifat doktrinasi dan di sakralkan dalam ruang kaderisasi kita, tetapi justru yang melekat justru yang “negatif”. Bisa jadi mungkin karena menjadi bahan candaan dan berulang-ulang. Sama seperti ketika kita masuk pertama ke suatu daerah, lalu kita diajarkan beberapa kosa kata dalam bahasa daerah tersebut, ketika diberikan kosa kata yang negatif dan dianggap “lucu” maka yang negatif itu yang lebih lama diingat dan melekat, ketimbang yang positif. Ada apa ini? Sepertinya kita memiliki masalah psikologi ingatan. Mungkin sahabat-sahabat di jurusan psikologi perlu melakukan penelitian tersendiri terkait hal ini (ingatan negatif lebih melekat ketimbang ingatan positif).

Fakta inilah yang mendorong PB PMII untuk membatasi beberapa materi kaderisasi dan pola kaderisasi yang kami anggap akan berdampak kurang positif bahkan cenderung negatif. Dengan segala dinamika di atas, hari ini yang harus kita lakukan adalah mendorong sinergi antara potensi kader di kampus umum dan kampus agama. Artinya, jika kader dari alumni pesantren mau menyisihkan waktunya untuk melakukan pendampingan kaderisasi non formal dengan mengajar mengaji di kampus umum, tentunya penguatan kaderisasi di kampus umum akan semakin baik dan berkualitas. Apalagi jika ada alumni pesantren yang kuliah di kampus umum, maka ia harus menjadi suri tauladan dalam merebut kembali kepemimpinan moral dan spiritual PMII dalam masyarakat kampus.

Sudah seharusnya kaderisasi PMII memang islami dan mencapai tujuannya didirikan, yaitu “Terbentuknya Pribadi Muslim Indonesia yang Bertaqwa Kepada Allah SWT, Berbudi Luhur, Berilmu, Cakap dan Bertanggungjawab dalam Mengamalkan Ilmunya serta Komitmen Memperjuangkan Cita-cita Kemerdekaan Indonesia”. Kira-kira, mimpi kami dengan “melegalkan” metode kaderisasi ini adalah, semakin tinggi jenjang kaderisasi yang sudah diikuti kader, semakin bertaqwa dan berbudi luhur kader tersebut. Seperti yang tergambar dalam kurva belajar (*learning kurve*) yang biasa saya sampaikan dalam kaderisasi.

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Mari kita pahami lebih dalam tujuan PMII. Coba resapi, renungi. "Terbentuknya Pribadi Muslim Indonesia yang Bertaqwa Kepada Allah SWT, Berbudi Luhur…" jelas, bahwa tujuan PMII bukan hanya untuk Kader PMII, tetapi untuk umat. Apakah kader PMII adalah Muslim di Indonesia? Ya! Apakah muslim Indonesia adalah kader PMII? Belum tentu! Jadi, sejak PMII didirikan, PMII sudah memiliki tanggung jawab sejarah. Tanggung jawab meneruskan Agenda Rasulullah SAW, berdakwah menyempurnakan ahlaq manusia. Juga memiliki tanggung jawab sejarah mensyiarkan faham ahlussunah wal jamaah di kampus-kampus. Apakah bisa? Tentu akan sulit jika kader PMII masih jauh dari ketaqwaan. Tetapi, dengan kesadaran yang terus tumbuh, insyaAllah kita pasti bisa!

Ingat! Rasul tidak pernah memberikan perintah ibadah sebelum beliau yang langsung mencontohkannya. Ya, memberikan ketauladanan! Tentu sebagai kader *ahlussunnah wal jamaah*, kita akan menggunakan pola dakwah Rasul. Terlebih di negeri ini kita mendapatkan banyak pelajaran dakwah yang sangat membumi dari para wali dan alim ulama kita. Islam berkembang di negeri ini bukan dengan penaklukan, tetapi dengan persahabatan dan persaudaraan. Karenanya wajah Islam di negeri ini tidak membangun dikotomi antara agama dan budaya yang telah berkembang sebelumnya bahkan antara islam dengan ajaran Hindu dan Budha yang lebih dulu ada. PMII hadir untuk menguatkan itu.

Kita sadari persaingan kaderisasi mahasiswa islam hari ini yang sangat ideologis adalah PMII vs KAMMI. Dalam konteks yang sangat substansial, ada pertentangan yang fundamental. Dalam perkembangannya kemudian, tantangan kaderisasi kita di level dasar pun menjadi lebih besar. Mapaba (Masa Penerimaan Anggota Baru) kita tentu harus lebih berbobot orientasinya, bukan sekedar pengenalan organisasi, tetapi sudah masuk pada pemahaman, kenapa kita harus ber-*ahlussunnah wal jamaah*, berPancasila dan berNKRI. Sejak Mapaba harus sudah tertanam pemahaman ini. Kenapa? Karena doktrinasi kaderisasi awal mereka sudah masuk pada Islam yang benar adalah Islam yang langsung merujuk pada Al-quran dan hadits, ber pancasila adalah murtad, pancasila adalah thogut. Dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus mendorong berdirinya negara

islam – khilafah. Bukan dengan ber NKRI. NKRI adalah Haram. Ini tantangan kaderisasi kita dibawah. Sangat fundamental.

Lalu apa yang harus dilakukan?

Pertama, kita punya "PR" bagaimana menguatkan pemahaman pengurus komisariat dan cabang terkait dengan doktrin ahlussunnah wal jamaah, bukan hanya rumusan bermazhab, tetapi rasionalisasinya. Seperti apa itu? Kita menyakini, bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang sudah sempurna tidak akan ada lagi ayat yang akan turun sebagai wahyu. Pastinya, kita juga yakin bahwa Rasulullah SAW adalah nabi terakhir dan penutup. Sementara dinamika kita beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sudah jauh dari zaman Rasul, zaman kesempurnaan ummat. Lalu bagaimana kita bisa berislam dengan sempurna, dengan kaffah? Apakah ber-ahlussunnah wal jamaah adalah cara tepat untuk bisa berislam dengan sempurna? Dengan tegas kita katakan, Ya!!!

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Keyakinan kita terhadap *ahlussunnah wal jamaah* sebagai satu-satunya cara yang tepat dalam berislam dengan kaffah harus dapat ditransformasikan kepada anggota baru kita, terlebih kepada kader. Mereka yang merasa benar untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Hadist tanpa mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat Rasul, para Tabi'in, para Tabi'in-tabi'in dan para ulama, tanpa menggunakan ijma dan qiyas, bahkan membid'ahkan, bahkan "mengharamkan", adalah kelompok yang justru menjalankan "bid'ah" dalam praktek amaliyahnya sendiri.

Contoh, jika mereka merasa benar membaca Al-Qur'an adalah sunnah yang dilakukan oleh Rasul, kemudian mereka membacanya dengan membuka mussaf, maka sesungguhnya mereka telah berbid'ah. Karena Rasul sungguh menghafal apa yang telah diwahyukan kepadanya, dan Rasul adalah seorang yang buta huruf, tidak bisa membaca (harfiah). Terlebih lagi, Al-Qur'an yang hari ini beredar dan kita nikmati kemudahannya untuk bisa di baca adalah hasil pengumpulan yang ditulis kembali dan disatukan oleh Sahabat Usman ibn Affan. Jika kita telisik lebih jauh, huruf-huruf dan tanda baca yang dapat memudahkan kita membaca Al-Qur'an hari ini, justru hasil ikhtiar dan penemuan para alim ulama di zaman Tabi'in-tabi'in. Khusus ilmu tajwid yang kita pelajari untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil, setidaknya dimulai penulisan kitabnya oleh Al-Imam al-'Adhim Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam pada abad ke-3 Hijriyah didalam kitabnya "Kitabul Qiraa-at (disarikan dari bahan bacaan bersumber: http://dakwahsyariah.blogspot.com/2014/01/sejarah-dan-perkembangan-ilmu-tajwid.html#ixzz47s3TTgTH).

Jika mereka menganggap dan meyakini, bahwa "semua perkara yang baru adalah bid'ah, dan seluruh bid'ah adalah kesesatan dan seluruh kesesatan di neraka",

kira-kira bagaimana dengan contoh diatas?! Mungkinkah mereka bisa mengaji Al-Qur'an dengan tartil tanpa mempelajari ilmu tajwid yang dibukukan oleh ulama setelah wafatnya Rasulullah SAW?! Mungkinkah mereka bisa membaca Al-Qur'an jika tidak ada mushaf yang diikhtiarkan pembukuannya oleh Sahabat Ustman ibn Affan?! Mungkinkah mereka dapat memahami Al-Qur'an hari ini, jika tidak ada para alim ulama yang menghafal dan menjaga keaslian Al-Qur'an, membukukannya dan menyebarkannya?! Bersyukur kita kepada Allah yang telah mengirimkan para ulama setelah jauh sepeninggal Rasulullah, sehingga kita bisa menikmati indahnya ber islam.

Islam yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan syiar para ulama, baik yang belajar langsung dengan ulama penyebar islam yang datang ke tanah air kita, atau hasil belajar ulama kita yang hijrah menimba ilmu ke pusat peradaban islam dahulu, Mekkah. Apa yang beliau-beliau ajarkan kepada kita? Tentu ajaran islam yang damai, islam yang *rahmatan lil alamin*. Ajaran islam yang fokus pada tanggung jawab sejarah, tanggung jawab meneruskan agenda utama Rasulullah SAW di utus ke muka bumi ini. Apa itu? Menyempurnakan ahlaq manusia dan mengabarkan kepada dunia, bahwa islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! PMII berdiri karena restu alim ulama (PBNU), 17 April 1960 adalah kondisi yang sangat tidak stabil. Benturan ideologi dalam negeri yang juga dipengaruhi dengan perang dingin, tarik menarik pengaruh ideologi komunism dan kapitalism yang sedang berperang ketika itu, pun menjadi dinamika tersendiri bagi NU. Tetapi, tahukah anda. Justru ketika merestui berdirinya PMII, pada 24 Maret 1960 Tiga orang perwakilan dari Tim Perumus/Pendiri PMII, yaitu **Said Budairy (Jakarta), M. Makmun Syukri BA (Bandung) dan Hisbullah Huda (Surabaya)** Bertemu dengan KH. Idham Khalid, mendapat nasehat "agar organisasi yang akan dibentuk dapat diandakan sebagai kader partai NU, menjadi mahasiswa yang berprinsip, mengamalkan ilmu. Yang penting lagi menjadi manusia yang cakap serta bertaqwa kepada Allah SWT" (PMII dalam simpul-simpul sejarah, Fauzan Al Fash).

Nasehat itulah yang menjadi ruh PMII hingga kini, yang kemudian dirumuskan oleh pada pendiri PMII kedalam ADRT (Pasal 4), tujuan PMII yaitu Terbentuknya Pribadi Muslim Indonesia yang Bertaqwa Kepada Allah SWT, Berbudi Luhur, Berilmu, Cakap dan Bertangung jawab dalam Mengamalkan Ilmunya Serta Komitment Memperjuangkan Cita-cita Kemerdekaan Indonesia. Diatas telah saya singgung, bagaimana ketersambungan agenda para ulama sebagai pewaris nabi melanjutkan agenda Rasul dimuka bumi ini, tentu kita sebagai generasi para ulama pun memiliki tugas sejarah dan tanggung jawab ideologis untuk meneruskan dan menyiapkan kader-kader penerus, hingga hari kiamat.

Kader-kader pejuang *ahlussunnah wal jamaah*, penerus agenda para ulama, agenda Rasulullah SAW. Menyebarkan islam untuk menyempurnakan ahlaq manusia, dengan terlebih dahulu memiliki ikhtiar maksimal untuk bisa ber-ahlaqul karimah, menjadi tauladan bagi kader dan menyebarkan islam kepada dunia, Islam yang rahmatan lil alamin. Hari ini, Indonesia menjadi negara Islam dan menjadi negara demokrasi terbesar di dunia, bahkan demokratisasi di negeri ini dari pilpres hingga pilkades. Indonesia juga memiliki macam ragam budaya, etnis, agama dan adat istiadat, tetapi perbedaan semua itu menyatu dalam ideologi Pancasila, ideologi negara yang Islami.

Di belahan dunia lain, dimana islam berasal dan bermula berkembang (timur tengah), justru perpecahan tidak terelakan, peperangan menjadi dendam kesumat yang tidak kunjung usai. Ragam budaya, etnis, agama dan adat istiadat nya pun tidak banyak. Bahkan cenderung homogen, mayoritas islam. Bersyukur kita kepada Allah SWT yang telah mengirimkan para wali, para ulama setelah jauh sepeninggal Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in-tabi'in, sehingga kita bisa menikmati indahnya ber islam dengan damai di negeri ini. Padahal disisi yang lain, pun islam di citrakan sebagai agama teroris.

Sejak lama Islam sudah menyebar kepenjuru dunia, bahkan peluang pemeluk agama Islam untuk menjadi pemimpin di negara yang mayoritas non muslim pun sudah terbuka, ditengah derasnya sentimen anti islam. Tentu dengan sendirinya, ketika Islam mendunia, nilai-nilai Islam yang secara tidak langsung mengandung tradisi Arab (sunnah Rasul - karena Rasul hidup dalam budaya yang sudah berkembang) pun akan mengalami proses akulturasi, asimilasi (membeda antara sunnah dengan budaya). Sehingga wajah Islam menjadi beragam corak, menyatu dengan budaya setempat, dimana Islam itu tumbuh dan berkembang. Dinegeri ini, Islam menjadi sangat lentur, masuk ke setiap sudut budaya nenek moyang, dimana budaya itu tidak mungkin dapat diketemukan di wilayah asal, dimana Islam itu diturunkan (Arab Saudi).

Lalu pertanyaannya, apakah kita akan membenturkan Islam dengan budaya nenek moyang kita? Padahal dengan budaya itu justru Islam di negeri ini bisa berkembang beriringan. Sebagaimana istilah yang selama ini berkembang dimasyarakat kita, "Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah". Yang artinya, Hukum adat berdasarkan hukum agama, hukum agama berdasarkan Al-qur'an. Jadi, segala perbuatan atau pekerjaan hendaknya selalu mengingat aturan adat dan agama, jangan hendaknya bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Dengan memahami sejarah bagaimana Islam berkembang di negeri ini, pasti kita bisa menjadi kaffah dengan berislam. Tentu rasa takjim kita terhadap para ulama menjadi bagian dari rasa syukur yang harus diwariskan ke anak cucu kita,

mensyukuri keislaman yang dapat kita nikmati, hingga akhirat kelak. Jadi, karena rasa syukur kita itulah, kemudian kita mendoakan para ulama penyebar Islam dengan berziarah. Mendoakannya, sebagai bagian dari mengingat kematian, juga sebagai bagian untuk menyerap energi pen-syiar. Semoga kita bisa menjadi penerus beliau.

Tentu, sebagai generasi muda Islam, perjuangan para alim ulama dalam menegakkan ajaran islam di negeri ini harus kita lanjutkan. Pastinya, perjuangan ini bukan tanpa tantangan, ada tantangan internal dan eksternal dan semua tantangan akan kita selesaikan. Pertama, tentu kita akan fokus pada penyelesaian masalah internal kita yang sudah panjang lebar saya elaborasi di atas. Dengan konsolidasi ideologi yang terus kita lakukan, kompetensi kaderisasi kita akan meningkat, menghasilkan kader-kader yang bertaqwa dan berbudi luhur. InsyaAllah...

Kompetensi yang saya maksud bukan hanya terkait dengan kualitas intelektual, bukan hanya terkait dengan kualitas kedisiplinan dalam keseharian, tetapi juga terkait dengan kualitas keimanan kita. Jika sebelum ber PMII sholat masih bolong-bolong, setelah Mapaba sudah mulai teratur sholatnya. Kemudian lulus PKD Sholat wajib plus dengan sholat-sholat sunah. Lulus PKL, tidak hanya menjalankan ibadah wajib, tetapi juga teratur menjalankan ibadah-ibadah sunah lainnya. Dan lulus PKN menjadi tauladan bagi seluruh kader, tidak hanya terkait dengan ibadah, tetapi juga dibidang lainnya, termasuk keilmuan dan jenjang perkuliahan. Tentu ini bukan tahapan baku, untuk mencapai titik keimanan tertinggi, kader PMII sudah dapat memulai sejak awal. Pastinya, PMII secara institusional akan memfasilitasi hal itu.

Kelemahan kita ada pada ketauladanan, terutama dilevel struktur. Kita akan pastikan, kedepan tidak ada lagi anggota baru yang kecewa dengan seniornya di PR/PK/PC/PKC bahkan PB, yang perilakunya jauh dari amaliyah *ahlussunnah wal jamaah*. Banyak “bahan” yang bisa dijadikan untuk bercanda, jangan kurangi kesakralan ideologi kita dengan canda-tawa yang justru “mencemooh diri sendiri” dan berdampak negatif secara institusional. Semoga kita selalu berupaya konkrit, semaksimal mungkin untuk bisa menjadi tauladan bagi anggota dan kader-kader kita.

Langkah teknis untuk kembali merebut otoritas moral dan kepemimpinan spiritual dalam kaderisasi kita adalah, jangan tinggalkan masjid kampus. Pusatkan kegiatan-kegiatan PMII di masjid. Buat pengajian tafsir hadist/quran, shalawatan, maulidan, yasinan, membaca Al qur’an, diskusi, mengerjakan tugas, dll, di masjid kampus. Coba pastikan, ketika masuk waktu sholat, maka yang mengumandangkan adzan adalah kader PMII, syukur-syukur bisa memimpin

sholat menjadi imam di masjid. Pastikan setiap tindak-tanduk, sikap dan perilaku kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan ajaran para alim ulama.

Rumusan kebijakan PB terkait hal ini, yang bisa langsung sahabat-sahabat lakukan sebagai agenda follow up Mapaba/PKD/PKL adalah menu kaderisasi non formal, yaitu kursus agama I, kursus agama II dan pelatihan Dakwah yang kurikulumnya sudah di buat oleh Bidang Agama PB PMII.

Bahkan, dalam Tap Pleno tentang Akreditasi Cabang, klasifikasi Cabang A harus memiliki Lembaga Dakwah Mahasiswa (LDM – namanya bisa di sesuaikan) dan menjalankan program-program LDM tersebut. Agenda strategisnya adalah, menghidupkan masjid-masjid kampus dengan amaliyah *ahlussunnah wal jamaah*. Jika aktivitas keagamaan PMII dan perilaku kader-kader PMII di kampus dapat dinikmati oleh banyak mahasiswa lainnya sebagai aktualisasi Islam yang *rahmatan lil alamin*, meneruskan agenda Rasulullah SAW yang paling utama, yaitu menyempurna-kan ahlaq dan menjadi rahmat bagi seluruh alam, sempurna kita merealisasikan mitos, bahwa PMII adalah satu-satunya organisasi mahasiswa yang paling islami, yang berfaham Ahlussunnah waljamaah. Semoga Allah meridhoi kita, alfatiha! Aminnn…

Terkait dengan kurva belajar di atas, harusnya kader PMII, semakin tinggi jenjang kaderisasi yang telah diikuti, secara personal semakin meningkat amalannya, baik amalan yang bersifat *habblumminallah*, maupun *habblumminannas*. Tentu secara institusional sistem kearah itu harus sudah dijalankan, sekarang dan seterusnya.

5) Nasionalisme PMII: Konsisten Mengawal NKRI dan Pancasila

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Dalam setiap ruang kaderisasi, sudah sangat tidak asing lagi kita meneriakan yel-yel penyemangat. Salah satunya adalah, Siapa Kita? PMII!!! NKRI? Harga Mati!!! Panca Sila? Jaya!!!

Tentu sejak awal berdirinya, nasionalisme PMII sudah tidak perlu diragukan lagi, sudah jelas! Dan terbukti! Dalam sejarah dan perkembangan gerakan kebangsaan di negeri ini, PMII hadir dengan semangat nasionalisme religius. Nasionalisme Islam. Bahkan “Indonesia”, sudah menjadi prioritas dalam perumusan nama berdirinya PMII sebagai organisasi pada tahun 1960 silam. Hingga akhirnya, berdiri organisasi ini dengan nama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (baca: sejarah PMII). Tahukah anda, dalam bukti institusionalitas yang termaktub dalam konstitusi organisasi, PMII lebih nasionalis dari GMNI. Yang sejak berdirinya digadang-gadang sebagai underbow PNI (baca: Golongan Nasionalis), yang dalam kampanye dan *brand image*-nya disebut-sebut sebagai golongan mahasiswa nasionalis.

Mau bukti? Ini buktinya. Dalam pembukaan ADRT GMNI,

PEMBUKAAN

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyadari sepenuhnya tugas dan tanggungjawab kami sebagai mahasiswa yang berada ditengah-tengah rakyat.

Oleh karena itu, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, kami bertekad untuk tetap **mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu terciptanya suatu tatanan masyarakat yang didalamnya segalanya menyelamatkan Kaum Marhaen.**

Sebagai mahasiswa indonesia yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berjiwa marhaen, kami bertekad untuk mempertahankan NKRI, yang didalamnya terselenggara masyarakat indonesia yang berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi, dan berkepribadian dibidang kebudayaan, maka dengan ini kami menyusun suatu organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu organisasi sebagai alat pendidikan kader bangsa dan alat perjuangan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sesuai dengan tujuan revolusi berdasarkan cita-cita proklamasi, maka dibentuklah susunan organisasi yang berkedaulatan dan berkeadilan agar didalamnya terselenggara suatu tatanan organisasi yang progresif revolusioner serta berkemampuan dalam menjalankan tugas-tugas kemasyarakatan.

Untuk itu disusunlah Anggaran Dasar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia sbg berikut:

Kemudian pada **Pasal 2: GMNI berasaskan marhaenisme, yaitu sosio nasionalisme, sosio demokrasi, dan ketuhanan YME. Marhaenisme yg dimaksud pasal ini sebagai asas perjuangan GMNI.**

Bagaimana dengan Pembukaan ADRT PMII?

MUKADDIMAH

Insyaf dan sadar bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang di Pimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia merupakan

ideologi negara dan falsafah bangsa. Sadar dan yakin, bahwa Islam merupakan panduan bagi umat manusia yang kehadirannya memberikan rahmat sekalian alam. Suatu keharusan bagi umatnya mengejawantahkan nilai Islam dalam pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dalam kehidupan masyarakat dunia.

Bahwa keutuhan komitmen keislaman dan keindonesiaan merupakan perwujudan kesadaran beragama dan berbangsa bagi setiap insan muslim Indonesia, dan atas dasar itulah menjadi keharusan untuk mempertahankan bangsa dan negara dengan segala tekad dan kemampuan, baik secara perseorangan maupun bersama-sama.

Mahasiswa Islam Indonesia sebagai salah satu eksponen pembaharu bangsa dan **pengemban misi intelektual berkewajiban dan bertangungjawab mengemban komitmen keislaman dan keindonesiaan demi meningkatkan harkat dan martabat umat manusia dan membebaskan bangsa indonesia dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan baik spiritual maupun material dalam segala bentuk.**

Maka atas berkat rahmat Allah SWT, dibentuklah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang **berhaluan Ahlussunah Wal-jamaah** dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai Berikut:

Kemudian pada **Pasal 2: PMII berasaskan Pancasila.**

Pahami! Sejak PMII berdiri, Pancasila bukan hanya sebagai asas organisasi, tetapi dengan nyata disebutkan sila per sila nya dalam alenia pertama pembukaan ADRT kita. Masih meragukan nasionalisme PMII? Di era 1980an, ketika Orde baru mendorong asas tunggal Pancasila, masih ada perdebatan antar ormas Islam (untuk menerima atau tidak), hal serupa juga terjadi di organisasi kemahasiswaan, bahkan terjadi perpecahan di kubu HMI, hingga terbentuk HMI DIPO (penerima Pancasila pada 10 April 1985) sebagai reaksi dari deklarasi HMI MPO yang berdiri pada 15 Maret 1986 di Jakarta (menolak Pancasila sebagai asas tunggal).

Ketika yang lain memperdebatkan asas tunggal, justru sejak PMII didirikan, PMII sudah berasaskan Pancasila. Itu catatan sejarah dan perkembangan PMII. Lalu bagaimana dengan hari ini? Di atas saya sudah singgung bahwa ada ancaman nasionalisme dikalangan generasi muda Indonesia, dan kaderisasi PMII menjawab ancaman tersebut!

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Tahun 2016 ini sudah fix Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) berlaku, *borderless*. Sudah tidak ada lagi batas-batas bagi

warga negara di ASEAN untuk berkompetisi, semua memiliki kesempatan yang sama. Mungkinkah kita akan menang dalam kompetisi itu? Pada bagian yang lain, saya akan coba membahas bagaimana kaderisasi PMII menjawab tantangan nasionalisme zaman (MEA) ini. Saya ingin sedikit bercerita, cerita yang saya pikir terkait dengan bagaimana tantangan nasionalisme yang mungkin akan kita hadapi dalam era MEA.

Ketika saya semester 7 atau 8 (sebagai ketua BPM FISIP UNAS), saya bersama dengan teman-teman SEMA dan BPM se UNAS mendapatkan tugas menemani mahasiswa tamu dari Malaysia. UNAS memiliki program kerjasama pertukaran mahasiswa dengan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Universiti Malaya (UM). Kami terbagi dalam beberapa tim. Pada akhir pekan, kami menuju kebun raya bogor dan lanjut ke Puncak, tiga mobil. Tim yang lain menuju destinasinya masing-masing. Dalam perjalanan (di mobil kami), teman saya Farid (Ketua BPM ABA) dan Bom-bom (Ketua SEMA FE) terlibat perbincangan dengan Nizam (Mahasiswa UKM). Saya duduk di belakang bersama Farid, Nizam duduk di tengah bersama Bom-bom dan Liza (Mahasiswi UM). Di depan, yang menyetir Syarif (Ketua BPM Hukum) ditemani Eka (Sekretaris SEMA SASTRA). Warga Malaysia tidak sulit memahami bahasa kita, karena banyak lagu dan film kita yang beredar disana. Sekalipun sebaliknya, kita agak sedikit bingung dengan beberapa istilah Malaysia. Ya, tim kami pusing-pusing (jalan-jalan) ke daerah puncak.

Ketika itu, Farid memulai perbincangan, “Zam, lagu kebangsaan Malaysia kayak gimana sih?” Bom-bom langsung menyambut dengan pertanyaan lagi, “iya. Kayak gimana Zam?” sambil menoleh kearah Farid dan Bom-bom, dengan sedikit mengernyitkan dahi, Nizam menjawab singkat, “nanti!” Tidak puas dengan jawaban Nizam, Farid sambil duduk bersandar dan menaikan dengkul dengan menempel-kannya ke bangku tengah, menyanyikan sedikit bait lagu Indonesia Raya. “kalo lagu kebangsaan Indonesia begini, Indonesia tanah air ku, tanah tumpah darah ku...” kalo Malaysia gimana Zam?” Pun Nizam kembali menjawab singkat, “iya, nanti yaa.” Bom-bom kembali menyambut, “iya, gimana Zam? Nadanya aja dah!” (sedikit memaksa). Lalu langsung menekankan ke Liza, “gimana Za?” Pun Nizam tak bergeming dan Liza hanya tersenyum tipis. Merasa terdesak, lalu Nizam coba menjelaskan, “kami, kalau mau menyanyikan lagu kebangsaan, harus dengan posisi berdiri sempurna”.

Saya yang sedari tadi hanya mendengarkan perbincangan mereka, mendengar penjelasan Nizam ketika itu, seperti tersambar petir di siang bolong. Dengan cepat saya alihkan pembicaraan dengan mengomentari mobil yang mendahului mobil kami ketika itu (mobil jeep tua yang sudah di modif), “wuihhh, keren banget tuh mobil”. Akhirnya pembicaraan pun beralih. Walaupun pada akhirnya saya tetap “*sebel*” karena setibanya di kebun raya Bogor, Nizam sambil berdiri bicara kepada

Farid dan Bom-bom, "masih mau dengar lagu kebangsaan Malaysia?". Mengetahui itu, sambil memegang kamera poket, saya sok sibuk mencari objek yang layak untuk di *jepret*, perlahan bergerak dan menjauh dari mereka.

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Dalam setiap agenda formal PMII, menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjut dengan mars PMII, itu sudah biasa. Bahkan seolah wajib, seperti sholat 5 waktu. Tetapi, coba anda perhatikan posisi anda. Apakah sudah tegap sempurna posisi kita?! Jika belum, setelah membaca tulisan ini, mari kita perbaiki. Bicara nasionalisme, mungkin hal ini "hanya formallitas".

Tetapi, kita bisa pastikan bahwa di Malaysia tidak ada organisasi kemahasiswaan seperti PMII yang jelas gelora nasionalismenya. Indonesia merdeka dengan berjuang melawan penjajah. Revolusi! Tidak hanya keringat, air mata, darah, harta, bahkan nyawa telah dikorbankan para pahlawan untuk memerdekakan negeri ini. Malaysia, merdeka karena "hadiah" – menjadi negara persemakmuran Inggris, tetapi sistem pendidikannya berhasil mengkondisikan Nizam dan Liza "seolah" mahasiswa Malaysia sangat nasionalis, berkarakter menjaga marwah negara. Bagaimana dengan kita?

Coba anda bayangkan, jika diantara kita (Kader PMII) datang ke Malaysia atau ke negera lainnya, dan mereka (teman di luar negeri) menanyakan hal yang sama, apakah kita akan bersikap seperti Nizam dan Liza?! Kira-kira, tantangan nasionalisme kita di era MEA adalah, bagaimana kita bisa menjaga marwah negeri ini. Jangan mudah membeberkan keburukan negeri ini kepada asing, sekalipun itu fakta. Sama seperti tantangan kaderisasi dikampus, bagaimana kita menjaga marwah PMII, kita harus lebih unggul dari kader HMI, GMNI, IMM, KAMMI, dst. Segala yang tidak baik di PMII, hanya kita yang tahu dan perlahan kita benahi. Tidak untuk di umbar-umbar, bahkan menjadikannya bahan curhat. Jangan!

Kira-kira perbincangan di atas memberikan sedikit gambaran, bagaimana pergaulan di era MEA akan kita hadapi kedepan. Pada peringatan kemerdekaan 17 agustus 2015 yang lalu, ramai pemberitaan atas provokasi media sosial terkait dengan sikap Wapres JK yang tidak mengangkat tangan untuk hormat bendera ketika sang saka merah putih dikibarkan. Sehingga perlu penjelasan Juru Bicara JK, Husain Abdullah. Menurutnya, "JK tidak salah, karena cara menghormati pengibaran bendera sudah diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1958. Dalam PP tersebut, pada waktu upacara menaikkan atau menurunkan bendera pusaka, semua orang yang hadir memberi hormat dengan berdiri tegak, berdiam diri, sambil menghadapkan muka ke arah bendera sampai upacara selesai. Jadi, sikap sempurna yang dilakukan oleh Pak JK adalah sikap hormat, persis dengan sikap hormat Bung Hatta saat mendampingi Bung Karno dalam upacara bendera dahulu".

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Kaderisasi PMII bukan hanya untuk prasyarat naik level kepengurusan di PMII semata, bukan hanya untuk membentengi anggota dan kader dari faham Islam yang sering "gagal paham", juga bukan hanya untuk menumbuhkan semangat nasionalisme anggota dan kader, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menyiapkan kepemimpinan nasional. Kedepan, kita (kader PMII) yang akan menggantikan para anggota DPRD, DPR RI, Bupati, Walikota, Gubernur, Menteri-menteri bahkan Presiden. Sehingga memaknai rasa cinta tanah air sejak dini menjadi hal yang multak sebagai kader bangsa.

Hal-hal lain yang juga tidak kalah penting adalah, bagaimana mendorong kader-kader PMII bisa menghasilkan produk-produk nasional yang membanggakan dan akan kita pakai dengan bangga. Karena dengan jumlah penduduk terbesar di ASEAN, Indonesia akan menjadi pasar. Jangan takut membuat terobosan dan menciptakan produk sendiri, karena banyak produk yang dibuat oleh asing atau produk lokal yang sahamnya sudah dikuasai asing, tetapi diberikan label *made in Indonesia*. Hanya untuk menjaring konsumen nasionalis.

6) Organisasi Intelektual yang Progresif

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Di atas saya sudah singgung bahwa kita telah kehilangan otoritas moral, dalam konteks keilmuan pun kita telah kehilangan otoritas intelektualitas. Dalam setiap PKL yang saya dampingi, saya selalu bertanya kepada para peserta. Siapa saja yang IPK nya diatas 3.00? Bisa 30% dari total peserta yang "ngacung". Yang IPK nya diatas 3.25? Menurun, bisa 20% dari total peserta yang "ngacung". Yang IPK nya diatas 3.50? Berkurang lagi, maksimal hanya 10% dari total peserta yang "ngacung". Ini masalah kaderisasi kita. Minim kader berprestasi dalam bidang akademik. Jika ditambahkan lagi pertanyaannya terkait dengan masa perkuliahan, masih banyak peserta PKL diatas semester 8 dan belum lulus. Parahnya lagi, menulis proposal skripsi pun masih bingung. Bisa dipastikan yang seperti ini akan lulus diatas semester 8.

Kenapa hal itu terjadi? Banyak hal yang menjadi penyebab, baik masalah pribadi (terkait dengan biaya – kemudian harus cuti, bekerja untuk biaya hidup, dll. Parahnya, masih ada yang beralasan – fokus ngurus PMII, seolah-olah) maupun masalah "institusional" (terkait dengan pola kaderisasi "lama"). Ya, saat ini masih banyak kader PMII yang masih terjebak dengan pola kaderisasi "lama", aktivisme. Bangga menjadi aktivis, hingga lupa selesaikan kuliah dan jadi mahasiswa abadi – membolak-balik persoalan, "saya itu kuliahnya di PMII bang, perkuliahan di kelas/di kampus itu cuma aktivitas ekstra, intranya ya di PMII). Nilainya anjlok, lulus lambat, IPK rendah, masa depan monolitik (politik dan sosial - Buku kaderisasi nasional 2014, hal 30). Semakin lama lulus, semakin merasa menjadi kader yang paling idealis. "Rela bunuh diri kelas" untuk PMII. Padahal, teman

seangkatannya sudah lulus, bekerja, berumahtangga, menjadi profesional didunia kerja, dst.

Tentunya hal ini menjadi permasalahan sistemik yang harus dijawab oleh skema kaderisasi. Ya, semua permasalahan kader dan berpengaruh terhadap institusi di PMII, adalah permasalahan kaderisasi. Secara umum, di forum PKD/PKL yang sempat saya datangi, saya selalu menanyakan peserta satu persatu tentang, sudah semester berapa kuliahnya? Berapa IPKnya? Apa rencana judul skripsi yang mau diambil? Jika sudah sidang proposal, bagaimana perkembangan proposal skripsi/tesisnya? Dan seterusnya. Kenapa? Hanya untuk mempertegas, bahwa ketika anda menjadi kader PMII, anda wajib mencapai tujuan organisasi (baca: Anggaran Dasar, Pasal 4 Tujuan PMII). "...Berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya..." tentu ukuran yang paling sederhana terkait hal itu adalah, kader PMII adalah mahasiswa yang berprestasi.

Selain mempertegas kewajiban kader, saya coba memberikan tips, bagaimana cara belajar efektif seorang kader PMII. Bagaimana caranya? Kita harus insyaf dan sadar, bahwa menjadi kader PMII adalah suatu keberkahan yang tidak semua mahasiswa memilikinya. Untuk mensyukuri keberkahan itu, kita harus "belajar lebih" dibanding mahasiswa lainnya, apalagi dibanding dengan kader dari organisasi lain. Setiap awal semester, semua mahasiswa mendapatkan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) atau Rencana Pembelajaran (RPL) atau Sillabus masing-masing mata kuliah, bukan? Disana kita bisa ketahui, apa saja yang akan dibahas dari setiap pertemuan hingga UAS. Artinya, jika kita ingin menjadikan kelas sebagai ruang aktualisasi, mudah. Pelajari materi yang akan dibahas, cari lebih banyak referensi, di era digital hari ini, cukup mudah mencari referensi bahan bacaan. Permasalahannya, mau atau tidak. Itu saja!

Ada juga hal kecil yang penting untuk disiasati. Saya tidak tahu bagaimana metode mengajar dosen di kampus sahabat. Dulu, ketika saya menempuh jenjang S1, biasanya dosen menerangkan materi panjang lebar, dan diakhir waktu baru beliau memberi kesempatan mahasiswa untuk bertanya. Biasanya, jika tidak ada pertanyaan, kelas dibubarkan. Dalam kondisi seperti itu, sahabat harus pandai memainkan psikologi kelas. Bersiasat. Karena, biasanya juga, ketika kita merespon untuk mengajuan pertanyaan, banyak teman-teman yang *gesture* nya *complain*. Sambil bergumam dan menghela napas, "emmm,,, pake nanya lagi! Bikin lama aja!!!" Jika sudah begitu, sahabat bisa saja menjadi orang yang "dibenci" dikelas. Bukan???

Cara saya dahulu, sambil bertanya saya *mapping* siapa saja dikelas yang "berpotensi" *complain*. Ketika keluar kelas saya datangi, sambil nongkrong kita sedikit bahas pertanyaan tadi dan mempertanyakan pendapatnya. Ternyata hal ini efektif untuk menambah teman diskusi dan mengurangi *complain* dikelas pada

pertemuan selanjutnya. Kita harus pastikan, bahwa keluar kelas dengan kebingungan, apalagi gak ngerti apa yang tadi di bahas di kelas adalah dosa! Dosa kepada orang tua. Bisa jadi beliau-beliau berhutang ke tetangga hanya untuk memberikan ongkos kita berangkat kuliah, apalagi untuk biaya semesteran yang hari ini cukup mahal, sedangkan pendapatannya harus dibagi-bagi dengan urusan yang lain. Juga dosa kepada PMII. Karena tujuan PMII adalah membentuk anggotanya berilmu, cakap dan bertanggung jawab mengamalkan ilmunya! Sadari hal ini sahabat!

Kader PMII dilarang mencontek! Lebih baik asal jawab dalam ujian, ketimbang mencontek. Jika seluruh civitas kampus tau anda adalah kader PMII, IPK kecil, prestasi nol, lama lulusnya dan sering mencontek. Kira-kira rusak tidak citra PMII? Kita harus sadar, bahwa semua perilaku kita "yang baik saja", selalu di intrik oleh "lawan politik" kita di kampus, apalagi perilaku yang tidak baik.

Saat semester 5-6 saya menjadi ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara, FISIP UNAS secara aklamasi. Ya, karena ketika tahu saya mendaftar diakhir waktu (pendaftaran bakal calon ketua terakhir pada hari jum'at jam 4 sore), teman-teman balon yang lain mencabut berkas pendaftaran calon ketua. Mungkin ini manfaat dari aktif di kelas (dengan tips seperti di atas). Semester 7-8 saya jadi ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FISIP UNAS dan lulus dengan IPK diatas 3,00. Tepat 4 tahun saya selesaikan S1, lulus. Dengan aktivitas kuliah maksimal dan mengawal organisasi intra dan ekstra kampus. LPJ saya pun diterima dengan ikhlas.

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Saya lulus kuliah sebelum 2010, IPK diatas 3,00 itu kecil, tetapi masih cukup. Tetapi bagi anda yang lulus setelah 2016, IPK cuma 3,50 itu sangat minim. Kenapa? Karena tantangannya berbeda. Hari ini anda akan bersaing tidak hanya dengan lulusan dari kampus umum, negeri, favorit di Indonesia, tetapi juga lulusan kampus-kampus bonafit se ASEAN bahkan dunia. Anda bisa bayangkan, jika hari ini kompetensi anda lemah, penguasaan ilmu rendah, bahkan berasal dari kampus yang "ecek-ecek", mau memenangkan kompetisi yang mana?! Jangan-jangan sudah gagal syarat sebelum masuk ruang kompetisi, karena tidak lulus prasyarat untuk berkompetisi.

S2 saya tempuh dengan waktu 2 tahun tepat (2011-2013), walaupun IPK cuma 3,65 dengan aktivitas di PB PMII dan kerja serabutan untuk biaya kuliah. Jika dalam konteks ini saya di bilang riya', masa bodo! Saya hanya ingin mempertegas, jika saya bisa lulus tepat waktu, artinya sahabat juga bisa! Bahkan sudah banyak kader PMII di Jakarta, yang saya ketahui, yang lulus S1 di semester 7. Dengan IPK di atas 3.50. Saya yakin ditempat lain pun sudah banyak. Tidak boleh lagi ada dikotomi antara kuliah vs PMII. Kuliah penting, PMII pun penting. Dan yang paling penting adalah mengatur waktu keduanya. Saya teringat dengan istilah yang

pernah disampaikan bang endin, "seraya anda kuliah, seraya itu pula anda berorganisasi. Begitu juga sebaliknya". Semoga kita bisa menjadi bagian yang mempercantik citra PMII, kader PMII adalah mahasiswa berprestasi dimanapun kampusnya. Aminn…

Selanjutnya, tips untuk sahabat-sahabat yang lulus di semester 7. Pada saat sidang proposal dan sidang skripsi, jangan bilang-bilang ke orang tua. Nikmati saja kelulusan itu sendiri. Saat masuk semester 8, anda masih bisa minta uang kuliah dan uang jajan selama 1 semester. Buat apa?! Foya-foya? Leha-leha? Menikmati hidup? Bukan! Ini adalah fase transisi. Sahabat harus me-*manage* fase ini dengan baik. Sebelum jauh saya jelaskan, saya ingin mempertegas. Ini hanya untuk anda yang lulus di semester 7. Anggap saja ini bonus buat anda. Lalu apa alasannya?

Pertama, ketika anda kuliah, kebanyakan mahasiswa tidak peduli dengan penampilan formal. Penampilannya fix hanya untuk kuliah, trendi, santai. Tidak banyak mahasiswa yang memiliki celana bahan, sepatu fantopel, jas, dasi, batik lengan panjang, kemeja, dst. Padahal, dalam ruang formal kerja, "perkakas" itu dibutuhkan. Anda sudah lulus dan belum kerja, dari mana anda bisa membeli itu? Bisa! Minta uang sama orang tua. Gak malu?! Sahabat, selesai wisuda mungkin kita masih menikmati uforia kelulusan, traktir teman, buat syukuran di rumah, dst. Seminggu setelah itu, anda benar-benar masuk dunia nyata. Mau keluar rumah, bawa motor dan butuh bensin, malu minta uang. Takut mogok di jalan, akhirnya tidak jadi keluar rumah. Berdiam di rumah setelah lulus? Malu. Bosan. Jadi bahan obrolan tetangga.

Karenanya, bagi yang lulus 7 semester, manfaatkan tips ini sebagai bonus. Menjadi peserta magang di setiap institusi/perusahaan, biasanya lebih mudah mendapatkan akses ketimbang pelamar kerja. Di "semester 8" anda bisa memanfaatkan waktu untuk magang dan membuka jaringan kerja profesional. Sehingga bayangan positifnya adalah, selesai wisuda nanti, anda sudah memiliki ruang aktualisasi untuk belajar, bekerja dan mengasah kemampuan profesional anda. Dalam waktu transisi yang berjalan itu, anda tidak terbebani dengan pertanyaan, masih nganggur? Anda juga terhindar dari perasaan malu minta uang sama orang tua. Pastinya, belum ada tuntutan "traktiran gaji pertama", yang ketika di kalkulasi, ternyata mengganggu sirkulasi kebutuhan satu bulan selanjutnya setelah men-traktir dan pulang kerumah.

Pada konteks ini, dalam forum PKD, saya sarankan sahabat-sahabat instruktur PKD untuk mendampingi calon kader (peserta PKD) agar sudah focus pada rencana penulisan skripsi. Terutama yang sudah semester 5. Kaderisasi PMII harus masuk dalam ruang inti mahasiswa, setiap mahasiswa butuh menyelesaikan tugas, setiap mahasiswa butuh referensi buku, ingin berprestasi, ingin cepat lulus. Nah skema kaderisasi PMII, baik formal, non formal dan informal harus sudah

(kembali) mengarah kesana. Sehingga manfaat berPMII sangat dirasakan oleh para kader. Jangan sampai mereka merasa di PMII, urusan kuliah urusan nafsi-nafsi. Cuma urusan kaderisasi dan kerja-kerja organisasi saja kita menikmati kebersamaan, jangan!

Ada hal menarik yang ingin saya *share* disini, saya ambil S2 tidak langsung setelah lulus S1. Ada jeda beberapa tahun. Artinya, ada “ruang kosong akademik”. Pada pertemuan pertama di mata kuliah analisis kebijakan publik, yang diampu oleh Kepala program studi (prodi) Bapak DR. Sigit Rochadi. Beliau membuka kelas dengan perkenalan secara personal dan kemudian masuk pada perkenalan perkuliahan secara institusi prodi, termasuk metode perkuliahan dan apa saja mata kuliah yang harus diselesaikan dalam program tersebut.

Setelah perkenalan, sebelum masuk lebih jauh pada materi perkuliahan, beliau bertanya kepada kami satu persatu, “tesis apa yang akan anda tulis nanti?” Masing-masing mahasiswa menjawab dengan memaparkan rencana-rencananya, saya sejenak terpaku, bingung. Terbius ruang kosong akademik. Sampai tiba saatnya saya untuk menjawab, saya teringat dengan beberapa masalah yang pernah saya kritisi ketika menjadi ketua umum PC Jaksel dan Sekum PKC DKI Jakarta. Saya jelaskan ketika itu, kira-kira saya akan meneliti di Jakarta sebagai locus penelitian dan meneliti salah satu permasalahan di Jakarta sebagai fokusnya. Permasalahan di Jakarta secara garis besar ada tiga, yaitu Banjir tiap tahun, Macet setiap hari, dan tata kota yang amburadul. Ketika itu saya merasa sudah terjawab, ya sudah.

Pada minggu selanjutnya, diluar kelas saya bertemu dengan Kaprodi tersebut, beliau bertanya kembali, “jadi permasalahan yang mana yang akan di tulis, mas nandar? Ketiganya kah? Atau hanya dua atau satu saja?” Kaget saya. Ternyata pertanyaan dikelas kemarin bukan basa-basi. Ada “pengawalan”. Saya katakan ketika itu, “mungkin cuma satu masalah pak. Yang mana yang akan saya tulis, nanti tergantung dari kemudahan saya mencari data. Karena salah satu faktor penghambat penelitian dan penulisan tesis adalah pihak ketiga yang sulit untuk diminta keterangan dan data”. Sambil senyum dan menepuk pundak saya, beliau bilang, “bagus. Saya tunggu proposal tesisnya ya”.

Sejak saat itu saya sudah mulai mengoleksi data-data untuk tesis, awalnya saya bingung. Baru masuk semester awal, kok sudah bicara tesis. Tapi kemudian hal itu memotivasi saya untuk segera siapkan tesis. Dalam proses mengerjakan tugas kuliah (mata kuliah yang berbeda, analisa teori yang berbeda), saya siasati untuk membahas fokus permasalahan yang akan saya tulis menjadi tesis – dalam kajian ilmu sosial, hal ini sangat di mungkinkan. Saat masuk semester 3, saya ajukan proposal tesis, temanya tentang implementasi kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan, disidangkan, dan di acc dengan beberapa revisi.

Sambil kuliah semester 3 saya mulai penelitian tesis, semester 4 sidang tesis dan lulus.

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Kebanyakan kader PMII S1 masuk semester 7 masih bingung mau nulis apa. Harusnya sudah mengajukan proposal skripsi. Kebingungan itu harus dituntaskan pada semester 5, semester 6 sudah memastikan apa yang mau ditulis, dan harusnya, pada semester 7 sudah siap sidang proposal skripsi. Pada fase ini (semester 5-7) biasanya sahabat-sahabat ikut PKD. Saat yang tepat untuk melakukan mentoring khusus penulisan skripsi (kaderisasi informal) oleh PC. Idealnya!

Nah jika begini, manfaat ber PMII akan terasa oleh kader, jadi jelas tanggung jawab senior dikampus-kampus. Menjadi senior bukan hanya karena lebih awal ngampus dan ber PMII, tetapi juga lebih banyak baca bukunya, ilmu yang dimiliki lebih manfaat dan dapat di trasformasikan, minimal terkait menulis skripsi dan metode penelitian skripsi bagi junior-junior di jurusannya. Jika kebutuhan ini bisa difasilitasi, insyaAllah kaderisasi akan massif dan loyalitas kader pun tinggi terhadap korps. Bahkan jika sudah tersistematisir, kebaikan ini akan menjadi kebaikan yang turun temurun. Jadi amal jariyah PMII kepada kader-kader.

Tapi, gambaran ini tidak akan tercapai jika PC nya sudah semester belasan, belum lulus dan belum selesai proposal skripsinya. Karena itulah PB membuat kebijakan batasan jenjang kaderisasi, usia, IPK untuk mengisi struktur di PMII. Seperti yang telah dijelaskan di depan (Tap Pleno PB tentang Strategi Rekruitmen Kepemimpinan). Untuk menjawab hal ini.

Terkait dengan citra intelektual PMII, sejak 2010-2011 saya pernah melarang PC Jaksel yang berasal dari komisariat UNAS, yang sudah lebih dari semester 8 dan belum lulus, untuk mengisi materi di acara Mapaba UNAS. Lebih baik mencari pemateri lain, baik lintas PC, PKC atau langsung dari PB. Inilah enaknya Jakarta, untuk pemateri Mapaba, bisa saja mengundang dan menghadirkan PB. Larangan tersebut bukan tanpa alasan, saya memahami bahwa Mapaba adalah awal rekruitmen yang mengesankan "rasa". Rasa tertarik, rasa ingin menjadi seperti, rasa bangga dan rasa memiliki, anggota baru kepada PMII berawal dari Mapaba. Perasaan nyaman, perasaan positif harus didapati oleh anggota baru, agar mereka yakin. Ber PMII itu pilihan yang tepat. Pematerinya harus yang hebat-hebat, sehingga mereka terbayang, minimal akan menjadi seperti pemateri itu. Cakep, pinter, gak sombong, berprestasi, dst.

Minimal, tergambar pada mereka bahwa senior PMII itu islami, pintar, IPK tinggi, cepat lulus, berprestasi. Dan yang biasa menjadi pemateri di Mapaba adalah PC. Selama ini kita cenderung menyepelekan proses Mapaba, bisa jadi mengapa alumni Mapaba tidak banyak bertahan sebagai anggota apalagi menjadi pengurus

di rayon atau komisariat, ini salah satu penyebabnya. Mereka tidak yakin dan tidak di yakinkan kebaikan berPMII. Dengan tap Pleno yang sudah kami buat, akan mengeliminasi kader-kader yang berproses dengan "pola lama" sehingga bisa menyehatkan kepengurusan. Logika sederhananya, jika orang sakit dikumpulkan dengan orang sehat, apa yang akan terjadi? Apakah yang sehat tertular sakit, atau yang sakit menjadi sehat? Keduanya mungkin, tetapi yang paling besar peluangnya adalah, yang sehat menjadi sakit. Mari sama-sama kita sehatkan PMII.

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! PMII adalah organisasi besar yang diridhoi oleh para ulama. Saya ingin mengutip dan men-sitir kalimatnya KH. Idham Khalid, menurutnya, "NU itu organisasi besar, dengan bergabung bersama NU anda akan menjadi besar. Tetapi, dalam catatan sejarah NU, hanya yang membesarkan NU, yang akan menjadi orang besar". Mari kita sama-sama membesarkan PMII. Anda besar karena PMII, PMII besar karena anda. Bagaimana caranya? Dalam konteks ini, sederhana! Mari kita rebut kembali otoritas intelektual mahasiswa Islam. Bahwa hanya kader PMII yang paling cerdas. Berilmu, cakap dan bertanggung jawab mengamalkan ilmunya! Anda boleh teriak dengan keras dan tegas, "Saya tidak mengerti tentang elektro, tentang politik, tentang ekonomi. Tetapi, jika anda tanya tentang syariah, saya jagonya! Jika anda tanya tentang tarbiyah, saya yang paling unggul! Kenapa? Karena itu adalah jurusan saya, spesifikasi keilmuan saya!".

Bagaimana langkah teknis menuju kesana? Buat agenda diskusi mingguan. Biasanya agenda diskusi mingguan di rayon/komisariat tidak berjalan lancar, kenapa? Karena agenda ini dianggap sebagai kewajiban yang membosankan. Harusnya agenda ini dijadikan sebagai kebutuhan. Bagaimana mendorong hal ini menjadi kebutuhan kader? Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Perlu ada provokasi dan gambaran tantangan serta kompetisi yang masif untuk membuka kesadaran anggota dan membangun militansi kader.

Pertama, harus di bangun *image*, bahwa PMII bisa memfasilitasi anggota dan kader menjadi presenter tugas kuliah yang handal. Menjadi singa podium dan menjadi orator ulung. Setiap anggota baru perlu diingatkan, bahwa diujung perkuliahan anda akan diminta pertanggung jawaban menulis skripsi, anda akan di sidang oleh para penguji. Jika tidak dapat "mempertanggung jawabkan" skripsi yang sudah di tulis, konsekuensinya tidak lulus. Tentu semua mahasiswa ingin lulus. Dengan kesadaran ini, mereka akan paham bahwa diskusi mingguan adalah kebutuhan, sebagai wahana untuk melatih bicara didepan publik secara sistematis dan bisa memberikan pemahaman atas apa yang di pahami kepada orang lain.

Ada dua cara memastikan agenda diskusi mingguan ini bisa berjalan masif. Pertama diakhir semester diumumkan kapan jadwal agenda diskusi mingguan dilaksanakan, sehingga anggota dan kader harus menyesuaikan pengisian KRS

dengan jadwal itu (jadi tidak ada angggota yang di rugikan, karena jadwal bentrok) atau yang kedua, karena sudah masuk perkuliahan, maka sesuaikan agenda diskusi mingguan dengan jadwal kuliah anggota sesuai KRS yang ada. Harus sudah dimulai untuk membuat notulensi diskusi yang hasilnya dijadikan tulisan. Kenapa?

Salah satu ukuran intelektualitas adalah menulis. Itulah kenapa syarat lulus S1 adalah menulis, baik menulis skripsi atau tugas akhir. Hari ini, sudah banyak juga kader PMII yang memiliki blog pribadi dan banyak menulis. Saya ingin sedikit menyarankan, jika mau menulis di blog pribadi, pastikan yang di tulis adalah yang terkait langsung dengan keilmuan/jurusan yang sahabat ambil di kampus, sehingga blog sahabat bisa menjadi referensi keilmuan. Jika terkait dengan PMII dan sifatnya umum, tulis. Ada baiknya sahabat tidak menulis yang terkait dengan berbagai permasalahan PMII. Yang saya tulis ini mengurai banyak masalah dan langkah-langkah solusi PB, tetapi dalam buku cetak. Sehingga distribusinya bisa di kontrol. Minimal yang bisa mengakses hanya kader.

Saya hanya ingin sedikit mengingatkan, apapun informasi yang sudah ada di link internet, maka informasi itu sudah bukan rahasia lagi. Hal-hal sensitif organisasi tidak sepatutnya di share di dunia maya. Pada awal periode ini, ketika kami melakukan konsolidasi terkait dengan hasil-hasil Tap Pleno, ada beberapa kreatifitas kader yang mengkritisi melalui tulisan yang di share di jejaring sosial. Kami bahas di PB, apakah perlu di jawab kritik itu dengan tulisan, kami sepakati tidak. Kenapa? Jika kami jawab, berarti kami harus mengungkapkan hal-hal strategis kenapa kebijakan itu kami ambil. Pilihan kami adalah terus mengkonsolidasikan kebijakan itu ke bawah, melalui forum-forum kaderisasi. Dan diakhir periode ini, kami tuliskan dengan detail, apa, kenapa, dan bagaimana kabijakan-kebijakan PB menjawab tantangan zaman.

Tulisan yang ada ditangan sahabat ini semoga bisa menjawab kegelisahan yang selama ini menjangkit. Tulisan ini bukan karya intelektual, apalagi karya ilmiah. Ini hanya catatan perjalanan PB PMII periode 2014-2016 dalam mendorong sistem kaderisasi yang selama ini berjalan apa adanya. Juga sebagai penjelasan kepada seluruh kader, karena keterbatasan kami, mungkin hanya di PKL yang kami datangi yang dapat penjelasan langsung (setelah konsolidasi nasional yang telah kami lakukan sebelumnya). Semoga buku ini bisa mewakili kami dalam menjelaskan mimpi-mimpi kaderisasi PMII di masa depan kepada seluruh kader yang masih mau membaca.

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Diatas telah saya singgung terkait dengan tujuan PMII, yang bukan hanya untuk kadernya, tetapi juga bagi sekitarnya, utamanya pribadi muslim Indonesia. Sehingga, menjadi kader PMII tidak cukup hanya berilmu, cakap dan bertanggung jawab mengamalkan ilmunya, tetapi juga ilmunya mampu mencerdaskan orang lain (sekalipun orang itu bukan

dan belum menjadi kader PMII, adik kita, keponakan kita, tetangga kita, dst). Kader PMII wajib mentransformasikan ilmunya, menjadi transformer! Sehingga ilmunya bermanfaat bagi seluruh umat.

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Itulah beberapa catatan mitos PMII yang penting kita pahami dan realisasikan. Tidak sulit, karena kondisinya dahulu pernah tercapai. PMII pernah dipercaya memiliki otoritas moral yang tinggi, otoritas intelektual yang mumpuni dengan di jiwai semangat nasionalisme.

Hari ini kita hanya akan mengulang kembali. Karenanya, untuk merealisasikan hal itu, slogan pentingnya adalah “mari rebut kembali!!!”. Rebut kembali otoritas moral dan spiritual, terus pertahankan otoritas nasionalisme kebangsaan dan Rebut kembali otoritas intelektual!!! Dengan istiqomah usaha itu kita lakukan, tentu kepemimpinan moral, kepemimpinan nasionalisme dan kepemimpinan intelektual ada pada PMII. Dan akan tiba waktunya nanti PMII memimpin negeri ini dengan menegakan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin.

D. MASALAH LAIN

Selain masalah diatas, ada juga masalah-masalah lain yang seolah biasa saja, parahnya kemudian “membudaya”. Mitos-mitos negatif yang sengaja atau tidak sengaja telah terbangun dalam keseharian kita berPMII, telah mewabah seperti yang telah saya singgung di atas. Tentu hal ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kita untuk dipahami dan dihilangkan. Selain beberapa permasalahan tersebut, ada beberapa masalah lain, yang tidak langsung terkait, tetapi berdampak pada kaderisasi dan regenerasi kepengurusan. Bahkan, dampaknya sangat terasa diberbagai level. Apa itu? Mitos lokal! Apa saja mitos lokal yang mewabah di PMII? Ada beberapa hal, pertama mitos institusional dan kedua mitos “kesukuan”.

3) **Mitos Lokal Institusional**

Apa itu mitos lokal institusional? Mitos sebagai Rayon Besar, Mitos sebagai Komisariat Besar dan Mitos sebagai Cabang Besar. Padahal, “besar” dalam PMII hanya tepat dialamatkan pada pucuk pimpinan nasional, yaitu Pengurus Besar. Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Sekali lagi, membangun mitos untuk membuat kader PeDe dan membangun *sense of belonging* serta militansi kader itu penting, tetapi jangan menjorok pada ruang fanatisme sempit. Sayangnya, mitos lokal ini sudah menjorok pada fanatisme sempit. Ini yang kemudian menurut saya, penting untuk sedikit saya bahas disini.

Pertama. Biasanya, dampak dari hal ini sangat terasa dalam dinamika “politik organisasi”, yaitu agenda pemilihan ketua (RTAR, RTK dan Konfercab). “Pokoknya, kapanpun dan dimanapun forumnya, yang harus jadi ketua harus dari rayon kita!”.

Kalau sudah "pokoknya", tentu apapun akan dilabas. Akhirnya, jika ada "perlawanan" akan menghasilkan benturan, chaos (*sebegininya* kah kita ber PMII?!). Ini yang saya katakan dampak. Banyak hal kenapa ini bisa terjadi dan turun temurun "diwariskan". Apakah ini alami? Pasti tidak! Dengan mudah kita bisa katakan ini karena masih ada "senior yang bermain". Jika begini, tentu obyektifitas pengurus Rayon/Komisariat akan hilang. Semua sesuai dengan arahan "sang senior". Tentunya hal seperti ini membuat organisasi tidak sehat, harus di minimalisir.

Kedua, dalam dinamika kaderisasi. Poin ini yang urgent bagi kami. Kita sepakat, bahwa PMII adalah organisasi kader, dan kaderisasi menjadi aktivitas utama yang harusnya tersistematisir. Hari ini kita memiliki tiga level kaderisasi, Mapaba, PKD dan PKL. Prosesi kaderisasi di setiap level di tutup dengan pembaiatan, sebagai tahapan yang sakral untuk memastikan peserta sah menjadi anggota dan kader PMII. Tetapi, masih ada fakta kaderisasi di "rayon besar", setiap penerimaan anggota baru (kaderisasi mapaba biasanya dibarengi dengan penerimaan mahasiswa baru di kampus (dahulu di sebut opsek). Sayangnya, proses kaderisasi (Mapaba) tidak di lakukan tersendiri, tetapi di gabung dengan kegiatan "ospek" dan tidak ada pembaiatan khusus sebagai anggota baru PMII diakhir acara.

Setelah acara selesai, dengan PeDe nya, rayon tersebut mengklaim, bahwa semua peserta ospek adalah anggota baru PMII. Dan rasa PeDe itu hancur berkeping ketika ada pemilihan ketua BEM Jurusan/Fakultas/Universitas ternyata yang terpilih dan menang adalah mahasiswa yang diakui sebagai anggota atau kader PMII, tapi yang bersangkutan tidak mengakui dirinya sebagai anggota atau kader PMII. Sekalipun dia harus mengaku sebagai anggota atau kader, biasanya hanya untuk mendapatkan dukungan politik kampus di BEM.

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Tentu ini iklim organisasi yang tidak sehat. Efeknya, PMII terlalu longgar, dan mudah disusupi. Dalam level kaderisasi selanjutnya, biasanya Komisariat besar menjalankan PKD dengan mengacuhkan struktur diatasnya. Terlebih jika ketua cabangnya tidak berasal dari komisariat tersebut. Bagaimana Pembaiatan PKD nya? Bisa diatur. Anehnya, pun "senior" mendukung "kebodohan" itu. Bahkan dalam sesi pelantikan sesuatu yang "tidak lazim" bisa saja terjadi pada komisariat besar ini, tidak mau dilantik oleh pengurus cabang (karena ketua cabangnya beda "faksi politik"). Parahnya lagi, "senior besar" atas nama Mabinkom *mau-maunya* melantik (mengacuhkan struktur).

Kemudian pada level selanjutnya, biasanya cabang besar menjalankan PKL pun tidak berkoordinasi dengan struktur di atasnya. PKC atau PB yang datang untuk mengawal, pun bisa saja di acuhkan atau di jauhkan dari forum kaderisasi dengan modus di ajak jalan-jalan/silaturahim. Mereka merasa bisa menyelesaikan semua urusan kaderisasi tanpa struktur di atasnya. Jika pun PKC/PB diundang, hanya untuk

legitimasi, membuka acara. Sekalipun demikian, terjadi juga pasang surut. Tidak selamanya seperti itu. Misal, ketika kepemimpinan Cabang di pegang oleh kader yang paham sistem, hal-hal yang saya sebut diatas bisa saja tidak terjadi. Sekalipun mungkin saja beliau "dihakimi" oleh senior yang tidak setuju. Atau ketika ada delegasi dari cabang tersebut dalam struktur inti di PKC/PB. Pertanyaanya, sampai kapan hal ini terus terjadi? Kapan permasalahan ini dapat di atasi secara institusional – sistem?!

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! PB hari ini memang belum menjangkau berbagai permasalahan, dengan berbagai kebijakan yang sudah di buat khususnya untuk mengatasi permasalahan "politik organisasi". Tetapi untuk urusan kaderisasi, insyaAllah sudah bisa dikondisikan. Sekalipun tidak diatur secara detail. Misal, Mapaba yang dilaksanakan oleh rayon, maka sertifikatnya di tandatangani mengetahui Ketua Komisariat (sudah diatur). Lalu, jika Mapaba (juga PKD) dilaksanakan oleh Komisariat, maka sertifikatnya ditandatangani mengetahui Ketua Cabang.

Apakah kemudian yang membaiat peserta Mapaba yang dilaksanakan oleh Rayon adalah Komisariat/Cabang? (belum diatur). Lalu, apakah Mabinkom bisa melantik Komisariat? Saya ingin memberikan informasi, bahwa struktur Majelis Pembina dalam ADRT kita hanya sampai pada 3 level, yaitu Mabinas, Mabinda dan Mabincab. Logikanya, jika SK Rayon dan SK Komisariat ditetapkan oleh Cabang, maka secara institusional yang melantik Rayon dan Komisariat adalah Cabang. Begitu juga pembaiatan kaderisasi yang dilakukan oleh Rayon/Komisariat. Mohon ini bisa di pahami "senior Rayon besar dan senior Komisariat besar". Mohon maaf jika kurang berkenan. Ini sistem, kita sedang bicara sistem.

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! PB sudah membuat aturan membatasi kaderisasi dalam ruang lingkup kewilayahan (PKD – hanya untuk 1 wilayah PC dan PKL – hanya untuk 1 wilayah PKC. Efeknya, setiap PKC wajib melaksanakan PKL), target utamanya adalah mendorong follow up terlaksana dari setiap jenjang kaderisasi. Karena kita pahami banyak agenda kaderisasi yang hanya berorientasi sebagai kegiatan seremonial. Selesai pelaksanaan, bubar. Bahkan parahnya, data peserta pun hilang entah kemana. Padahal, baru saja selesai pelaksanaan (PKD/PKL) nya.

Sahabat-sahabat pengurus Komisariat/Cabang besar, jangan merasa dikerdilkan dengan aturan ini. Kami memberikan menu Kaderisasi Non Formal pasca Mapaba, PKD dan PKL. Jika sahabat marasa besar, pastikan semua agenda follow up tersebut berjalan. Pastikan kualitas kader disana "lebih hebat" dari Komisariat/Cabang yang dianggap kecil. Jangan terhanyut dengan mitos. Tetapi ketika sadar, ternyata tidak ada yang bisa dibanggakan, selain hanya sejarah masa lalu. Tentu saya tidak perlu

menjelaskan bahwa organisasi ini dibangun dengan pola yang instruktif, dimana kepatuhan struktur di bawah terhadap struktur di atas menjadi mutlak.

Saya sangat yakin, hari ini sudah banyak senior dari Rayon/Komisariat/Cabang besar yang tersadar dari pola lama, yang mungkin dalam satu dekade belakang mereka juga terlibat dalam dinamika terkini di basisnya. Hari ini, kaderisasi kita mendapati tantangan yang luar biasa. Jika dahulu IAIN adalah basis utama dan dominan PMII (biasanya dominan alumni pesantren), ketika berubah menjadi UIN, dan ada fakultas umum, pintu masuk bagi organisasi lain terbuka. Parahnya, dalam waktu singkat justru di fakultas umum apalagi eksak, justru basis PMII lemah.

Mereka hadir sebagai organisasi mahasiswa Islam yang lebih islami dimata mahasiswa baru, ketimbang PMII. Tidak hanya *image* semata yang di bangun, tetapi juga kultur organisasi pun terbangun dalam perilaku. Mereka memiliki skema dan sistem tersendiri dalam menjalankan kaderisasi di fakultas umum/eksak, sementara PMII masih menggunakan metode "menggugat Tuhan", liberasi pemikiran.

Dengan segala kerendahan hati, secara pribadi atau institusi mewakilli PB, saya sangat mengharapkan bantuan para senior untuk menertibkan barisan adik-adiknya. Holipus Kuntul Baris!!! Dengan dukungan semua elemen, tentu dapat kita pastikan, kedepan PMII akan semakin solid. Kaderisasi sebagai instrumen konsolidasi organisasi tidak lagi tercemari dengan "ego sektoral". Mari sama-sama kita jalankan sistem kaderisasi yang sudah PB PMII (2014-2016) bangun. Kami sadari, kami tidak akan memetik hasil dari sistem tersebut hingga periode ini berakhir, perlahan tapi pasti, hasil itu akan kita tuai nanti. Bisa jadi, hasil itu bisa dirasakan oleh periode PB selanjutnya. Tertib kaderisasi.

4) **Mitos Kesukuan**

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Di atas telah jelas bahwa nasionalisme PMII tidak dapat diragukan. Tetapi, faktanya dibeberapa daerah masih banyak "keributan" tentang suku, dalam ruang kaderisasi kepemimpinan organisasi. Kita sudah selesai dengan pemahaman dan pengamalan nasionalisme, tentu PB tidak akan membuat aturan yang berbau "SARA". Bagaimana solusinya untuk meminimalisir keributan tersebut? Hanya senior dari komisariat/cabang terkait yang bisa memberikan solusi atas dinamika ini. Yang pasti, dinamika ini tidak luput dari perhatian PB. Jika pun tidak dapat diurai, semoga tidak selalu ada cerita "bentrok" dalam ruang politik organisasi kita. Mari sama-sama kita jaga persatuan dan kesatuan PMII.

Melalui kebijakan strategi rekruitmen kepemimpinan yang bersifat universal, kami berharap dapat memfasilitasi lahirnya kepemimpinan di berbagai level

kepengurusan PMII dengan baik, terlepas dari suku apapun kader kita itu. Dalam konteks ini, saya ingin sedikit berwacana. Tentu yang namanya wacana bisa saja salah dan layak untuk tidak disetujui. Begini, sahabat-sahabat, kita sedang menikmati era demokratisasi yang luar biasa. Dari Pilpres hingga Pilkades. Kebijakan otonomi daerah dengan pilkada secara langsung, jika kita maknai dengan proses kaderisasi kepemimpinan di PMII, sepertinya kita sudah harus mempersiapkan kader terbaik di Cabang kita masing-masing yang berasal dari putera/i daerah untuk menjadi tokoh di daerah tersebut. Loh, kok wacananya mulai rasis? Nanti saya coba urai wacana ini.

Basis kaderisasi PMII adalah mahasiswa yang kebanyakan "rantauan". Bahkan ada juga kader yang lahir dan besar di daerah Cabang PMII, tetapi ybs bukan suku asli daerah itu karena program transmigrasi pemerintah dahulu. Ya, kita sulit menemukan ketua PC di Papua yang orang asli Papua. Padahal, untuk menjadi kepala daerah di satu wilayah tertentu, hari ini, terlepas akan terus menjadi "trend kampanye" pada pilkada selanjutnya atau tidak, selalu mendorong wacana putera daerah. Dalam konteks ini, saya ingin membangun kesadaran bersama kita sebagai korps PMII, bahwa kaderisasi PMII yang berjenjang, bukan hanya untuk mengisi setiap level struktur PMII semata, tetapi juga bagian dari kaderisasi kepemimpinan di NU, dan untuk mengisi struktur kepemimpinan di setiap daerah dan kepemimpinan di tingkat nasional.

Lagi-lagi, kesadaran ini perlu dukungan senior di berbagai daerah. Bukan kemudian memberikan "keistimewaan" bagi kader putera/i daerah untuk bisa jadi pemimpin tetapi tidak memenuhi prasyarat sesuai ketentuan. Justru kader putera/i daerah harus lebih semangat dengan wacana ini. Maksimal mengembangkan kompetensi diri. Pastikan 10 – 20 tahun kedepan, sahabat lah Anggota/Ketua DPRD, Bupati, Walikota, Gubernur di tempat sahabat lahir, besar dan berproses bersama PMII.

Hari ini, kebanyakan kepengurusan PMII di Cabang ketika berjejaring dengan stakeholders eksternal untuk menjalankan agenda-agenda keluar, sangat sempit (hanya terpaku pada jaringan OKP Cipayung atau KNPI). Jika yang menjadi ketua Cabang adalah putera daerah, bisa saja PMII bekerjasama dengan Karang Taruna, Pengurus Desa, Ibu-ibu PKK, dst. Kenapa? Karena hal ini tidak hanya bisa menjadi bagian untuk memperkenalkan PMII kepada masyarakat dimana PMII ada, tetapi juga bisa menjadi cara untuk membangun investasi jaringan basis ke masyarakat.

Harapan kader PMII bisa menjadi pemimpin di wilayahnya masing-masing, tentu bukan sekedar impian kosong. Kita bisa lihat trend kepemimpinan yang terus mengalami pergeseran sejak era reformasi. Mengawali reformasi terpilih presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur), karena dianggap sebagai jalan tengah dari kekuatan nasionalis, religius, dan mengantisipasi munculnya seorang militer. Karena trauma regim orde baru. Sekalipun ditengah jalan dilengserkan, dan digantikan oleh

Megawati yang sebelumnya sebagai walik presiden, kemudian pengganti wapres nya adalah Hamzah Haz, pun untuk menjaga soliditas kekuatan nasionalis-religius.

Mengawali pilpres pertama diera reformasi, terpilih SBY sebagai presiden. Militer. Hanya 5 tahun trauma rakyat atas pemimpin militer hilang tak terbekas. Bahkan SBY terpilih hingga 2 periode. Perspektif Megawati salah tentang trend pilihan rakyat di 2004. Beliau masih berpikir kekuatan nasionalis-religius (sipil) dengan mengggandeng KH. Hasyim Muzadi sebagai calon wakil presiden. Banyak pemilih perempuan yang menilai SBY itu gagah, tampan, cerdas. Pada pemilu 2009, Megawati kembali berkompetisi dengan mengggandeng Prabowo (sipil-militer) tetapi tetap kalah dengan SBY. Ketika itu, 2004-2014 wacana kepemimpinan nasional kembali dibumbui dengan wacana kombinasi sipil dan militer. Jika begitu kombinasinya, minimal ada harapan masuk putaran kedua.

Pada 2014, Pasca itu (2014-kini), kepemimpinan militer sudah tidak lagi menjadi trend pilihan rakyat. Perkembangan media sosial dan peranan Media massa dalam membangun opini publik pun menggiring perubahan trend pilihan rakyat atas pemimpin dan kepemimpinan di negeri ini, mulai dari bupati, walikota, gubernur, menteri-menteri dan presiden. Tengok saja terpilihnya Presiden Jokowi pada 2014 kemarin. Sangat bertolak belakang dengan SBY. Kurang gagah, kurang ganteng, non militer, tetapi terpilih. Kenapa? Karena dinilai berhasil membangun "*track record*" jujur – merakyat, ketika menjadi walikota di Solo hingga dua periode. Masih menjabat Walikota pada periode kedua, seketika memenangkan pilgub DKI Jakarta (2012). 2 tahun menjadi Gubernur, kemudian secara pararel (2014) bersama JK (sipil-sipil) pun memenangkan pilpres dengan mengalahkan kandidat Prabowo-Hatta (militer-sipil).

Pertanyaan yang mendasar adalah, siapa sih Jokowi? Kader dari OKP mana? Dari Organisasi kemahasiswaan mana? Apakah beliau pernah mengikuti jenjang kaderisasi seperti yang kita lalui di PMII, dari Mapaba hingga PKL dan PKN (yang hari ini sedang PB ikhtiarkan)? Pernahkah beliau mengikuti jenjang kaderisasi yang banyak membahas teori, pemahaman dan praktek memimpin organisasi dari level rayon hingga level tertinggi, PB? Pernahkah beliau mengikuti jenjang kaderisasi yang selalu dikuatkan semangat nasionalismenya? Yang selalu memekik-kan yel-yel: Siapa kita? PMII! Pancasila? Jaya! NKRI? Harga Mati!!! Pertanyaan yang sama, bisa saja kita tujukan kepada pemimpin lain yang hari ini ramai menjadi sorotan media massa, yang dianggap "berhasil", berdedikasi sebagai pemimpin. Walikota Surabaya, bu Risma. Walikota Bandung, Kang Ridwan Kamil. Bahkan Gubernur DKI Jakarta yang hari ini (jelang Pilgub 2017) menjadi fenomenal, Ahok.

Pertanyaan selanjutnya adalah, kemana kader – alumni PMII yang tersebar diberbagai daerah, yang hari ini juga tidak sedikit yang menjadi pejabat publik (anggota DPRD kota/kabupaten dan provinsi, bupati, walikota dan gubernur)? Apa

prestasinya? Bagaimana *track record* nya? Bagaimana dedikasinya sebagai pemimpin?

Sebelum jauh kita mengelaborasi hal itu, pun kita masih tersekat dengan alumni PMII yang sukses di satu daerah, karena bukan kader/alumni dari daerah tersebut kemudian dianggap orang lain. Bahkan dengan sengaja membangun “peta konflik”. Sementara organisasi lain, ketika ada pejabat publik yang dianggap penting dan “bermanfaat”, langsung diberikan penghargaan, diangkat menjadi anggota luar biasa, penasehat, atau pembina, lalu membangun sinergi yang strategis.

Ada juga cerita lain. Diatas telah saya singgung, bahwa kebanyakan kader PMII di perkotaan adalah mahasiswa yang berasal dari daerah. Biasanya, jika menjadi alumni dan mau menempuh jalur profesional politik, akan memilih dapil daerah asalnya. Kenapa? Agar lebih mudah bersosialisasi dan mencari suara. Tidak sedikit yang kemudian berhasil. Sayangnya, setelah itu beliau akan lebih fokus dengan urusan “membantu” kaderisasi dan memberdayakan kader yang ada didapilnya, ketimbang asal dimana ybs berproses ketika ber PMII. Sehingga, tidak heran jika PMII dikebanyakan kota-kota, belum punya sekretariat permanen, tidak terkecuali Jakarta (curcol, hehee....).

Pada bagian ini, point utamanya adalah, kita harus sudah mulai melakukan “rekayasa sosial” untuk menjadikan kader asli dari setiap daerah menjadi pemimpin di daerahnya, membangun *track record* kepemimpinan yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar, tentu mulai dari hal-hal yang kecil. Jika ada Risma dimasa depan adalah kader putri PMII, dst.

Sebelum saya tutup pembahasan ini, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf jika ada “kader/senior” yang kurang berkenan. Tulisan ini tidak boleh menjadi populer karena “gugatan” dari kader, senior dan alumni yang merasa tersinggung. Ya, saya memang tidak bermaksud menyinggung, hanya ingin sedikit mengelaborasi “masalah mitos” ini, agar dapat disikapi dengan baik. Jika kita sadari bahwa ini adalah “masalah”, maka kita tidak akan salah langkah untuk mengantisipasinya dan mencari solusinya.

Hari ini, STAIN/IAIN/UIN yang dahulu menjadi basis kita pun terancam dari dominasi HMI. Kenapa? Banyak hal, bisa jadi karena perkuliahan kader PMII mandeg, lama lulus, tidak berprestasi, sedikit yang lanjut S2, apalagi S3. Perlahan tapi pasti, fakultas-fakultas eksak di UIN sudah direbut KAMMI. Tentu jika kita masih berkutat pada mitos-mitos negatif yang justru mengecilkan kita, kita akan terasing dibasis utama kita.

Pastinya, target penguasaan kampus kita kedepan adalah tidak hanya merebut kepemimpinan BEM jurusan, fakultas dan universitas, tetapi juga merebut

kepemimpinan kampus, menjadi Kajur, Dekan, Rektor, guru besar, dst. Jangan merasa puas hanya dengan gelar S1 yang diraih dengan belasan bahkan puluhan semester atasnama pembenaran aktif sebagai aktivis kampus, apalagi sebagai aktivis PMII. Justru karena ber PMII kita bisa menjadi mahasiswa yang bertaqwa, berahlaqulkarimah. Justru karena ber PMII kita berprestasi dikampus. Justru karena ber PMII kita cepat lulus. Pastinya, apapun pilihan jalur profesional kita, orientasi terhadap pendidikan harus tinggi. Kader PMII minimal master (lulusan S2).

2. MASALAH DI HULU KADERISASI

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Masalah di hulu kaderisasi kita adalah minimnya instruktur yang siap secara sistem. Selama ini, ketika kita melaksanakan Mapaba, PKD bahkan PKL, siapa saja pematerinya, selalu tergantung seperti apa jaringan yang dimiliki penyelenggara. Selain itu, terpaku pada jajaran struktur. Padahal (jika kita mau jujur) struktur adalah "hasil politik", bisa saja yang berkompeten mengawal kaderisasi dibawah (Mapaba-PKL) justru bukan wakil ketua bidang internal/ketua kaderisasi nasional). Lalu bagaimana kita mensiasati permasalahan di hulu kaderisasi ini? Nanti kita akan elaborasi lebih dalam pada pembahasan ini.

Biasanya, list pemateri Mapaba/PKD/PKL adalah jaringan alumni internal atau senior. Tidak ada yang salah. Memang sudah begitu selama ini. Tetapi permasalahannya adalah, ketika hari H, ternyata pemateri yang kemarin sudah fix, tidak bisa hadir karena berbagai kendala. Ada yang tiba-tiba rapat dadakan di kantor, dirinya/anaknya/isterinya sakit, ada agenda arisan keluarga yang belum selesai, ada urusan kondangan, dsb. Jika sudah seperti itu, lagi-lagi sasaran pengganti pemateri utama adalah ketua Komisariat/Cabang yang ada di tempat. Bahkan dengan "sombong" nya, mereka (ketua Komisariat/Cabang) mencetak rekor. Karena banyak pemateri gagal hadir, lalu menjadi pemateri dadakan dan borongan. Semua materi dilahap!

Kira-kira begitulah gambaran realitas kaderisasi kita dibawah. Biasanya, lebih banyak terjadi pada forum-forum Mapaba. Karena pemateri senior merasa sudah bukan levelnya lagi menjadi pemateri Mapaba, harusnya menjadi pemateri di PKL. Ya, minimal pemateri di PKD.

Pada pembahasan sebelumnya, saya sudah sedikit singgung terkait dengan kaderisasi non formal, salah satu menunya adalah pelatihan instruktur. Pelatihan ini lah yang menjadi prioritas dari banyaknya menu yang kami tawarkan. Karena dalam pelatihan ini, koneksi antar pelatihan terjadi. Kira-kira gambarannya begini. PB melaksanakan PKN. Alumni yang lulus PKN dan mendapatkan sertifikat PKN, akan berkesempatan mengikuti Pelatihan Instruktur Nasional. Dan yang lulus Pelatihan Instruktur Nasional akan di sertifikasi untuk bisa mengawal PKL-PKL, terutama di wilayahnya masing-masing dalam batasan 1 wilayah PKC.

Kemudian, PKC mengkoordinir alumni-alumni PKL yang lulus bersertifikat dalam 1 wilayah dibawah koordinasinya (baik lulusan PKL yang dilaksanakan oleh PC/PKC setempat), kemudian menyelenggarakan pelatihan instruktur wilayah. Dan yang lulus dalam pelatihan itu akan di sertifikasi untuk bisa mengawal PKD-PKD, terutama di wilayahnya masing-masing dalam batasan 1 wilayah PC. Jika PC ingin menyelenggarakan pelatihan instruktur wilayah, maka pesertanya hanya yang ikut PKL di cabang yang bersangkutan.

Selanjutnya, PC mengkoordinir alumni-alumni PKD yang lulus bersertifikat dalam 1 wilayah koordinasi cabang (baik lulusan PKD yang dilaksanakan oleh PK/PC), kemudian menyelenggarakan pelatihan instruktur cabang. Dan yang lulus dalam pelatihan itu akan di sertifikasi untuk bisa mengawal Mapaba-Mapaba, terutama di wilayahnya masing-masing dalam batasan 1 wilayah PC. Dalam pelaksanaan pengawalan Mapaba ini, baiknya di *swicth*. Misalnya, instruktur yang berasal dari komisariat A, mengawal Mapaba di komisariat B. Karena nanti pelaksana dan peserta Mapaba akan diberikan formulir evaluasi (lembar kendali), yang hasilnya akan digunakan untuk mengukur, mengevaluasi instruktur tersebut. Hal itu adalah bagian dari sistem kontrol dan peningkatan kompetensi instruktur kedepan.

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Saya membayangkan, jika skema ini berjalan, nanti ketua kaderisasi nasional PB PMII, tidak lagi kewalahan mengawal PKL-PKL di setiap daerah. Sederhananya, kami tidak merangkap lagi sebagai instruktur dan pemateri. Dan penjadwalan PKL tidak perlu lagi di sesuaikan dengan SDM PB untuk mengawal. Ya, selama ini saya harus melakukan penjadwalan bagi pelaksanaan PKL, karena jika pelaksanaan berbarengan lebih dari 2 titik saja, tentu konsekuensi pengaju jadwal PKL yang terakhir, harus di undur atau di majukan (disesuaikan jadwalnya). Apalagi, jika “cabang besar” ingin melaksanakan PKL, H-3 baru sampai undangan dan pemberitahuannya ke PB. Banyak hal kenapa mereka bertingkah seperti itu, wajar lah. cabang besar! Jika pada saat yang bersamaan sudah terjadwal PKL ditempat lain, tentu kami (PB PMII) tidak bisa datang. Tapi tolong, hal itu jangan terus terulang.

Tentunya, dengan skema yang ada sistem ini akan menurun ke bawah. Begitu juga PKC dalam mengawal PKD-PKD dan PC dalam mengawal Mapaba-Mapaba. InsyaAllah akan dimudahkan dengan sistem yang terbangun. Kedepan, kaderisasi kita akan berjalan dengan sistem, insyaAllah tidak akan lagi bertumpu pada figur wakil ketua bidang internal atau ketua kaderisasi nasional.

Yang paling merasakan ribetnya pengawalan kaderisasi dengan sistem yang belum terbangun selama ini adalah sahabat-sahabat PC. Ya, karena biasanya pelaksanaan Mapaba selalu beriringan bahkan berbarengan. Apalagi dalam konteks Jakarta (pengalaman pribadi), yang kebiasaan melaksanakan Mapaba di puncak bogor. Sekalipun berbarengan dan sama-sama di daerah puncak bogor, tetapi berbeda tempat yang jaraknya lumayan jauh.

Dengan sangat optimis, saya ingin sampaikan. Sistem ini akan kita bangun dan sudah teruji pada periode PB PMII 2014-2016. Sehingga pada periode-periode selanjutnya, sistem ini bisa dilanjutkan dan diperbaiki hal-hal yang di rasakan kurang dan tidak relevan dengan dinamika perubahan yang terjadi. Tentu untuk menuju kesana, saya sangat mengharapkan partisipasi aktif sahabat-sahabat PC/PKC untuk memastikan menu-menu follow up kaderisasi kita berjalan, puncaknya melaksanakan pelatihan instruktur pada setiap jenjang.

InsyaAllah pertengahan Februari 2016 ini diawali oleh PKC Jawa Tengah, melaksanakan pelatihan instruktur wilayah. Secara pribadi melalui tulisan ini saya ingin menyampaikan apresiasi saya kepada Sahabat Ibnu Ngakil (Ketua PKC Jawa Tengah) yang dengan jeli melihat masalah dan potensi kader di Jawa Tengah. Pertengahan Januari 2016 lalu, saya kontak beliau untuk cek persiapan dan pelaksanaan PKL yang dilaksanakan oleh PC Semarang. Sekalian saya tanyakan perkembangan penugasan dan sertifikasi alumni-alumni PKL di Jawa Tengah, lalu sedikit menyinggung pelatihan instruktur, lalu beliau menyampaikan gagasannya, "kami mau membuat pelatihan instruktur yang pesertanya adalah mantan-mantan ketua dan pengurus cabang, tetapi mereka alumni PKL periode Sahabat Ketum Addin (sertifikat PKL nya belum "mengetahui PB PMII"). Bagaimana? Saya katakan, tidak mengapa. Bagus itu. InsyaAllah PB akan kawal pelaksanaan pelatihan instruktur tersebut.

Karena pelatihan instruktur pasca PKL ini perdana, maka segera saya sampaikan prasyarat peserta yang berhak untuk ikut (sebagai rangkaian kaderisasi yang tidak terputus), bukan sekedar seremoni. Pertama, peserta adalah alumni PKL (sudah pasti, dibuktikan dengan sertifikat). Kedua, peserta wajib membuat makalah, minimal 3 materi wajib PKD beserta powerpoint nya. Ketiga, peserta wajib mengirim CV, makalah dan powerpoint paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan pelatihan. Jadi, H-7 sudah clear siapa saja peserta yang akan mengikuti pelatihan. Penguasaan makalah dan presentasi powerpoint akan menjadi penilaian utama kelulusan calon peserta pelatihan, karena memang goal pelatihan ini adalah mencetak instruktur PKD. Tentunya, penjelasan saya diatas dapat di sesuaikan, bagaimana harusnya pelatihan instruktur cabang oleh PC dilaksanakan (goal-nya mencetak instruktur Mapaba).

Jadi gambarannya dalam konteks ini, koneksi kaderisasi yang kami bangun adalah, alumni Mapaba dapat mengikuti pelatihan pengembangan soft skill, goal minimal alumni Mapaba kita adalah mampu menjadi presenter dalam mempresentasikan tugas-tugas kuliah di kelas, bisa menjadi moderator dalam diskusi-diskusi internal maupun diskusi publik. Alumni PKD bersertifikat dapat mengikuti pelatihan instruktur, goal minimalnya menguasai materi-materi wajib di Mapaba dan dapat menjadi instruktur di level Mapaba, tidak hanya menjadi moderator diskusi. Alumni PKL bersertifikat dapat mengikuti pelatihan instruktur wilayah, goal minimalnya menguasai materi-materi wajib di PKD dan dapat menjadi instruktur di level PKD. Alumni PKN bersertifikat, dapat mengikuti

pelatihan instruktur nasional, goal minimalnya menguasai materi-materi wajib di PKL dan dapat menjadi instruktur di level PKL.

Dengan gambaran di atas, kedepan, hanya instruktur bersertifikat yang berhak menjadi instruktur disetiap level kaderisasi. Tentu dengan sistem ini kita akan terus meningkatkan kualitas output kaderisasi kita dari waktu kewaktu. Kaderisasi yang bukan hanya sebatas seremoni tiap periode kepengurusan, selesai pelaksanaan, bubar.

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Di atas saya sedikit singgung PB berkoordinasi dengan PKC/PC untuk penjadwalan PKL yang akan dilaksanakan. Saya cukup aktif mendorong PKC (terutama) yang belum melaksanakan PKL untuk memastikan output PKL nya maksimal. Minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan sudah tertata tahapan perencanaan dan pelaksanaan-nya. Di awal periode kami, saya bersama ketua umum dan sekjen secara khusus mengawal langsung PKL yang dilaksanakan PKC Papua. Papua patut mendapatkan perhatian khusus, selain geografis nya yang luas dan infrastruktur yang minim, akses transportasi juga terbatas, sekalipun antar daerah di papua. Ditambah lagi, secara umum pemeluk agama Islam minim di Papua, tentunya keberadaan PMII di Papua menjadi sangat strategis untuk didorong agar tumbuh dan berkembang. Dalam konteks pendidikan pun, tidak banyak kampus di Papua.

Saya berkoordinasi dengan Sahabat Sechan (Ketua PKC Papua) 1 bulan sebelum PKL. Saya sudah sampaikan hal-hal penting untuk dikondisikan, mulai dari konsep, skema kaderisasi, capaian output, dan tahapan yang harus dilakukan *via phone*, sampai pada hal-hal teknis kepanitiaan. Karena memang target kami, PKL ini sukses. Pasalnya, ini adalah PKL pertama di Papua. Sejak dulu, mereka hanya merekomendasikan kadernya untuk ikut PKL ke Sulawesi, bahkan hingga ke Jawa. Fix, PKL di Papua berlangsung pada akhir Februari 2015.

Singkat cerita, kami kawal pelaksanaan PKL itu. Dan ternyata dengan segala keterbatasan yang ada, target yang ingin dicapai meleset. Lalu dengan segala hormat dan dengan segala kerendahan hati, kami bicarakan dengan Sahabat Sechan bahwa PKL tersebut dianggap gagal. Kita akan *reschedule* pelaksanaan PKL selanjutnya. Alhamdulillah, Sahabat Sechan bisa menerima putusan kami dan mau me-reschedule PKL. Terkait dengan hal ini, pun saya ingin sampaikan apresiasi saya secara pribadi dan PB PMII kepada Sahabat Sechan yang bisa menerima putusan tersebut. Alhamdulillah, komunikasi efektif kami dapat menyamakan persepsi dan pandangan, bahwa penting untuk menjaga capaian standard kualitas alumni PKL. Kami tidak ingin ada alumni PKL, yang belum tepat menyanding gelar kader Mujtahid.

Cerita diatas, adalah cerita Papua. Yang dalam segala perspektif mestinya ada “pengecualian”. Dan dalam konteks itu, sebenarnya Sahabat Sechan berhak. Ya, pengecualian. Tetapi beliau menerima, ini yang penting saya pertegas mengapa kami sangat mengapresiasi beliau. Dalam kondisi sesulit apapun, menjaga marwah kualitas

“kader Mujtahid” menjadi penting. Artinya, bagi sahabat-sahabat lain di luar papua, apalagi di Jawa. Tidak semestinya sahabat PC/PKC di Jawa melaksanakan PKL hanya sebatas seremonial dan yang penting terlaksana, menggugurkan amanah program kerja kaderisasi. Karena sesulit apapun hambatan geografis dan akses transportasi di Jawa, pasti lebih baik jika dibanding yang di luar Jawa. Jangan bandingkan dengan Papua.

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Sejak periode kami, hingga per Februari 2016 pelaksanaan PKL se indonesia sudah 31 kali, baik yang dilaksanakan oleh PKC maupun PC yang tersebar di berbagai daerah. Evaluasi kami, bersama Ketum dan Sekjen, terkait dengan pelaksanaan PKL tersebut mendorong satu kesimpulan. Bahwa pelaksanaan PKL oleh PC harus di batasi dan diatur. Sampai pada kalimat ini, tentu bisa langsung banyak reaksi. Mohon dibaca dulu tulisan ini sampai tuntas. Jangan langsung bilang, PB melanggar ADRT! Sebelum memahami kenapa PB membuat kebijakan pembatasan PKL oleh PC. Sepintas ini memang baru wacana. Tetapi saya sudah siapkan draf “Ketetapan Pleno” terkait dengan Pelaksanaan PKL oleh Cabang.

Muncul juga wacana terkait dengan mendorong kriteria jumlah Komisariat di Cabang dan jumlah Rayon di Komisariat yang berhak melaksanakan PKD dan PKL. Misal, minimal PC memiliki 5 komisariat di bawah koordinasinya atau memiliki jumlah anggota baru minimal 500 orang dalam setiap tahunnya. Komisariat memiliki 100% rayon yang ada di setiap fakultas atau memiliki jumlah anggota minimal 200 anggota baru. Kenapa dibatasi? Agar output kaderisasi terjaga. PK dan PC tidak “ngasal” melaksanakan PKD/PKL. Cuma untuk gaya-gayaan, menutup agenda sebelum RTK atau Konfercab, dan tidak pernah berpikir untuk melaksanakan follow up kaderisasi. Kira-kira kesana semangat aturan ini.

Lalu bagaimana bunyi aturan itu? Jika PC ingin melaksanakan PKL, maka harus memenuhi syarat sbb; (a) Secara institusional PC memiliki anggota minimal 300 anggota alumni Mapaba dan minimal 75 kader alumni PKD setiap tahunnya. (b) PC sudah melaksanakan agenda-agenda follow up PKD, baik PKD yang dilaksanakan oleh Komisariat/Cabang (minimal pelatihan instruktur alumni PKD). (c) Di dalam kepanitiaan PKL, minimal ada 10 kader alumni PKL. (d) Memiliki calon peserta PKL yang berasal dari Cabang penyelenggara (sudah mengikuti follow up PKD) minimal 10 orang. Dua bulan sebelum pelaksanaan PKL, Cabang wajib melaporkan ke PB PMII dengan melampirkan data base jumlah anggota dan kader, serta kepanitiaan dan daftar calon peserta PKL dari cabang pelaksana PKL.

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Jika dalam konteks “inovasi peraturan”, PB mendorong dan menetapkan aturan-aturan kaderisasi dikatakan melanggar ADRT, dengan tegas saya katakan tidak akan pernah ada pelanggaran! Kenapa? Karena memang ADRT kita tidak sedikit pun menyinggung kaderisasi apalagi secara detail. Saya pun merasa miris. Kita ini organisasi kader tetapi tidak ada aturan (Bab/Pasal) di ADRT yang menjelaskan secara detail bagaimana skema kaderisasi PMII. Istilah Mapaba, PKD dan PKL yang disinggung dalam ADRT kita, hanya dalam konteks keanggotaan, syarat menjadi

pengurus Pengurus Cabang dan syarat menjadi pengurus Pengurus Koordinator Cabang. Jenjang kaderisasi Mapaba dan PKD hanya disinggung sebagai pembeda antara anggota dan kader PMII.

Secara pribadi saya memohon doa dari sahabat-sahabat agar sebelum kongres nanti kami (tim kaderisasi nasional) dapat menyelenggarakan workshop kaderisasi nasional, yang salah satu agendanya adalah mendorong pemahaman bersama dan membangun komitmen bersama untuk sama-sama memperjuangkan rekomendasi redaksional "Bab Kaderisasi" untuk di masukkan ke ADRT pada kongres mendatang. Semoga ide ini dapat sama-sama kita kawal untuk menjadi bagian utuh dalam ADRT kita. Bagaimana isinya? Pada pembahasan selanjutnya, saya akan coba berikan tawaran redaksionalnya.

4. MASALAH DI PROSES KADERISASI

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Sebelum saya masuk pada pembahasan proses kaderisasi, saya ingin mengajak kita semua memahami esensi kaderisasi kita. Apa saja indikator kaderisasi dianggap berhasil? Ada tiga hal mendasar yang harus ada dalam setiap kegiatan kaderisasi kita, yaitu doktrinasi, penguasaan materi, kedisiplinan dan perubahan sikap. Pertengahan Februari 2016 lalu, kami (PB PMII) kedatangan kawan-kawan dari PP Gema Pembebasan. Dari pengantar sekedar ingin silaturahim, perkenalan, hingga akhirnya terjadi diskusi yang cukup hangat. Inti diskusi tersebut mereka menolak Pancasila dan kita tidak sepakat dengan sistem khilafah konsep mereka. Selesai mereka pulang, ada seorang sahabat yang berkomentar, "mereka itu militan ya. Doktrinnya luar biasa, sampai berani melawan Pancasila. Itukan sama dengan melawan negara, makar".

Ya, catatan sejarah kita, gerakan PMII sejak 66 hingga puncak sejarah gerakan mahasiswa di era 98 keterlibatan PMII hanya melawan regim dan kebijakan pemerintah yang salah. Kenapa? Karena Pancasila harga mati bagi kita. Para alim ulama kita yang merumuskan Pancasila, kita punya tanggung jawab sejarah untuk menjaga dan terus berjuang mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa ini. Kita yakini Pancasila bukanlah agama seperti yang dianggap mereka (kaum ekstrimis), apalagi berhala yang harus kita sembah.

A. DOKTRINASI

Di atas telah saya elaborasi permasalahan mitos-mitos PMII dan permasalahan-permasalahan yang lainnya, semua itu memang kait-mengait dan tidak berdiri sendiri. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana doktrinasi kaderisasi kita? Doktrinasi kita hari ini memang perlu penanganan khusus. Karena doktrinasi gerakan PMII pasca gerakan reformasi 98 sudah tidak lagi menemukan titik relevansinya (PKT). Hari ini regim sudah tidak lagi otoriter, sudah tidak lagi represif seperti zaman orde baru, dan kesempatan kader-kader PMII untuk merebut kepemimpinan

nasional di berbagai sektor pun terbuka lebar. Demokratisasi, telah membuka peluang dan tantangan baru bagi kaderisasi PMII.

Penekanan doktrin ahlussunnah wal jamaah harus terimplementasi dalam praktek keseharian kita, tidak hanya dalam wacana. Pengurus dan senior juga harus menjadi tauladan. Jika pilihannya tidak bisa menjadi tauladan, lebih baik kurangi intensitas bertemu dengan kader. Agar kader tidak terkontaminasi. Ini tantangan kaderisasi kita.

Dalam pemahaman kader-kader, ternyata masih banyak yang belum clear tentang ideologi PMII. Setiap PKL, saya selalu tanyakan, Apa ideology PMII? Masih ada yang menjawab *Ahlussunnah wal jamaah*, Pancasila, bahkan ada juga yang menjawab *socialist religious*. Lagi-lagi, tentu hal ini bukan tanpa sebab, karena memang banyak dinamika lokal (forum-forum kajian pemikiran, kelompok-kelompok diskusi filsafat, dll) di masing-masing komisariat atau cabang yang mempengaruhi perkembangan pemikiran sahabat-sahabat terkait dengan ideologi kita. Bahkan, pemahaman kader tentang paradigm yang menjadi kerangka operasional PMII pun menjadi referensi tersendiri untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Dalam pembukaan ADRT kita disebutkan dengan jelas;

> Insyaf dan sadar bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang diPimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia merupakan ideologi negara dan falsafah bangsa. Sadar dan yakin, bahwa Islam merupakan panduan bagi umat manusia yang kehadirannya memberikan rahmat sekalian alam. Suatu keharusan bagi umatnya meng-ejawantahkan nilai Islam dalam pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dalam kehidupan masyarakat dunia.
>
> Bahwa keutuhan komitmen keislaman dan keindonesiaan merupakan perwujudan kesadaran beragama dan berbangsa bagi setiap insan Muslim Indonesia, dan atas dasar itulah menjadi keharusan untuk mempertahankan bangsa dan negara dengan segala tekad dan kemampuan, baik secara perseorangan maupun bersama-sama.
>
> Mahasiswa Islam Indonesia sebagai salah satu eksponen pembaharu bangsa dan pengemban misi intelektual berkewajiban dan bertangungjawab mengemban komitmen keislaman dan keindonesiaan demi meningkatkan harkat dan martabat umat manusia dan membebaskan bangsa Indonesia dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan baik spiritual maupun material dalam segala bentuk.
>
> Maka atas berkat rahmat Allah SWT, dibentuklah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang berhaluan Ahlussunah Wal-jamaah dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai Berikut;

kemudian diperjelas lagi dalam Pasal 2, PMII berasaskan Pancasila.

Saya sengaja mengutip seluruh pembukaan ADRT lagi, agar kita dapat memahami peta sistematika kalimat per kalimat Mukaddimah ADRT yang mungkin selama ini kurang kita dalami. Ya, selama ini ADRT seolah hanya bahan bacaan disetiap kongres untuk dikaji, dipertahankan atau dirubah struktur redaksional kalimatnya. Dan sayangnya, yang mengkaji dan "berwenang" untuk melakukan perubahan itu adalah PC/PKC yang menjadi peserta kongres, yang secara jenjang perkuliahan, mungkin antara semester 7 – semester 10, atau sedang S2 disemester 4. Artinya, mereka baru ber-PMII mungkin maksimal antara 5 – 7 tahun. Parahnya, ketika kongres pengurus inti PC/PKC asyik "wara-wiri politik", yang masuk ke forum adalah PK bahkan PR, dengan dalih memberi mereka peluang untuk belajar diforum nasional. Kacau! Bisa jadi pemahamannya tentang keorganisasian masih kurang matang. Bahan bacaannya masih minim. Tapi apa mau di kata, sudah begitu aturannya, hanya kongres yang berwenang merubah ADRT. Semoga saja dari kongres ke kongres, pembukaan dan pasal-pasal yang terkait dengan substansi PMII tidak dirubah oleh anggota PMII.

Diawal kepengurusan periode ini berjalan, kami merumuskan visi "Revitalisasi PMII sebagai basis kaderisasi Islam *ahlussunnah wal jamaah*", tentu visi ini bukan inovasi kami, memang sudah begitu seharusnya. Tetapi karena dinamika organisasi yang terus berkembang, ada lika-liku, visi ini menjadi ikhtiar bagi kami untuk menegaskan tentang arah dan orientasi penekanan kaderisasi kita hari ini dan insyaAllah akan terus berlanjut.

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Kita harus sadar, bahwa sanat keilmuan dan sanat ideologi kita sampai ke Rasulullah SAW. Ini jelas! Kita adalah bagian inti dari kaderisasi *Ahlussunnah wal jamaah* di negeri ini! PMII didirikan dengan restu alim ulama, dengan tugas utama mengembangkan syiar Islam ahlussunnah wal jamaah di kampus-kampus. Alim ulama kita, yang menjadi panutan kita belajar ilmu agama langsung dari ulama terdahulu, ulama terdahulu belajar langsung dari tabiin-tabiin, dan tabiin-tabiin belajar langsung dari tabiin, tabiin pun belajar langsung dari para sahabat, tentunya sahabat pun belajar langsung dari Rasulullah SAW.

Dari Muawiyah bin Abi Sufyan *Radhiyallâhu 'anhu* bahwa Rasulullah *Shallallâhu 'alaihi wasallam* bersabda, "Sesungguhnya orang sebelum kamu dari pengikut Ahli Kitab terpecah belah menjadi 72 golongan. Dan umat Islam ini akan terpecah-belah menjadi 73 golongan, 72 golongan akan masuk ke neraka, dan satu golongan yang akan masuk surga, golongan ini adalah al-Jamâ'ah." (HR. Abu Daud dan Ahmad).

Imam Abdul Qâhir al-Baghdâdî mengatakan, bahwa golongan yang terakhir (yang nomor tujuh puluh tiga) ialah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa hanya golongan inilah yang memperhatikan keabsahan dan keoutentikan Hadist dan tidak menyelewengkannya. Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Disinilah kekuatan kita. Para ulama kita telah memberikan tauladan bagaimana menjawab berbagai permasalahan dengan sangat memperhatikan ayat dan hadist apa yang

tepat untuk dijadikan rujukan. Tidak hanya teksnya, tetapi juga konteksnya. Bagaimana dinamika yang terjadi di tengah masyarakat ketika itu sehingga ayat Al-Qur'an diturunkan Allah SWT melalui Malaikat Jibril, bagaimana situasi dan kondisi sebuah hadist diucapkan oleh Rasulullah SAW. Yang hari ini kita kenal dengan ilmu Asbabun Nuzul dan Asbabul Wurud. Nanti saya akan sedikit singgung sikap Gusdur, salah satu ulama kita sebagai contoh bagaimana memahami masalah ummat dan kebangsaan di negeri ini dengan mengedepankan konteks masalah – intisari cara berpikir dan bersikap paham ahlussunnah wal jamaah.

Dalam satu hadist ditegaskan, "Sesungguhnya, ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mengambilnya, berarti telah mengambil bagian yang banyak lagi sempurna" (HR. Abu dawud dan Tirmidzi). Di Al-Qur'an ada perintah, Athi'ullahu wa athi'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Hari ini, Rasulullah SAW sudah tiada, lalu siapa yang harus kita taati? Ulama! Kenapa? Karena sabda Rasul di atas jelas, ulama adalah pewaris nabi.

Siapakah ulama itu? *Ibnu Jarir Ath-Thabari* mengungkapkan dalam kitab tafsirnya, *Jami'ul Bayan* bahwa yang dimaksud dengan ulama adalah seorang yang Allah jadikan sebagai pemimpin atas umat manusia dalam perkara fiqih, ilmu agama, dan dunia. Sementara itu, *Ibnul Qayyim* dalam *I'lamul Muwaqqin'in* nya membatasi bahwa ulama adalah orang yang pakar dalam hukum Islam, yang berhak berfatwa di tengah-tengah manusia, yang menyibukan diri dengan mempelajari hukum-hukum Islam kemudian menyimpulkannya, dan yang menyimpulkan kaidah halal dan haram.

Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negeri ini, umat islam bergerak dan berjuang hingga memerdekaan negeri ini tidak lepas dari peran kepemimpinan ulama. Sekalipun selama ini hal itu terkesan tertutup, tidak dipelajari dalam buku-buku sejarah, tidak di ajarkan kepada para siswa dan generasi muda negeri ini. Sebagai generasi ahlussunnah wal jamah, kita patut bersyukur atas kebijakan Presiden Jokowi dengan menetapkan 22 Oktober sebagai hari santri nasional, sehingga seluruh elemen di negeri ini mulai kembali memahami sejarah, bagaimana perjuangan kemerdekaan negeri ini juga lahir dan didorong oleh kepemimpinan para ulama. Hal itu dikukuhkan dalam lembaran negara, Keppres Nomor 22 tahun 2015 yang di tandatangani Presiden Jokowi 15 oktober 2015 lalu. Kenapa tanggal 22 Oktober? Karena pada tanggal itulah di tahun 1945 yang lalu di cetuskan resolusi jihad NU oleh Hadoratussyekh KH. Hasyim Asy'ary, agar seluruh umat Islam bersatu padu mempertahankan kemerdekaan Indonesia, meneguhkan kebulatan tekad dan semangat juang umat Islam, sehingga hari ini kita merdeka.

Lalu siapakah jamaah itu? Para ulama menjelaskan, Al-qurthubi misalnya, bahwa yang dimaksud dengan jamaah itu ada dua macam. Pertama, sekumpulan kaum muslimin yang bersatu dibawah komando seorang pemimpin yang dipilih secara

syar'i. Kedua, ia adalah ungkapan dari metodologi dan tata cara beragama seseorang. Maksudnya? Yakni, siapapun yang berada di atas petunjuk Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya dan shalafus saleh maka ia telah bergabung dengan jamaah.

Al-Ajurri dalam kitabnya, Asy-Syari'ah menjelaskan, "Tanda seseorang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah SWT adalah ia berada di jalan itu. Yakni Al Quran, sunnah, petunjuk para sahabat, petunjuk para tabiin, dan pemimpin kaum muslimin di setiap negeri yang terdiri dari para ulama, seperti Auza'i, Sufyan ats-Tsauri, Malik bin Anas, Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Qasim bin Salam, dan siapa saja yang menempuh jalan mereka. Di samping itu, ia juga meninggalkan setiap petunjuk yang tidak ada tuntunan dari para ulama itu".

Tentu, posisi kita sebagai bagian terbesar dari jamaah yang mengikuti ajaran dan tuntunan Al Quran, sunnah, petunjuk para sahabat dan shalafus saleh, petunjuk para tabiin, tabiin-tabiin hingga para ulama, memastikan bahwa kita adalah bagian inti dari jamaah yang jelas kebenaran ajaran dan pegangan dalam beragama.

Sahabat-sahabat, hari ini berkembang gerakan atasnama Islam yang tidak memiliki sanat tetapi memiliki banyak pengikut. Bahkan dengan bangga atas kebodohannya, mereka menyeru, amalkanlah Al – Qur'an dan hadist sebagai kebenaran yang mutlak. Jangan ikuti ulama, sebab itu adalah taqlid. Padahal, Allah berfirman, "...Bertanyalah kepada ahli dzikir (Ulama) jika kamu tidak mengetahui" (An Nahl 43). Kemudian golongan ini melancarkan gerakan mem-bid'ahkan, menyesatkan, bahkan mengharamkan amaliyah golongan yang lain. Termasuk amaliyah kita, ahlussunnah wal jamaah (tahlil, ziarah kubur, maulid, dll). Sayangnya, dalam praktek keseharian, seolah mereka menjadi umat yang paling benar menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Dan terkadang kita lalai.

Ini tantangan ideologis kita. Jangan sampai kebenaran posisi kita dalam sanat ideologi, dalam sanat keilmuan, dan dalam sanat kesejarahan, justru tidak berbekas dalam praktek keseharian kita. Jika ada pembagi waktu dalam aktivitas sehari, yaitu sepertiga waktu untuk bekerja, sepertiga waktu untuk beribadah dan sepertiga lagi untuk istirahat. Beruntunglah kita menjadi bagian dari ahlusssunnah wal jamaah, karena sepanjang waktu kita bisa menjadi bagian ibadah yang tak terpisahkan dalam setiap aktivitas. Bagaimana caranya? Mengikuti keseharian Rasul SAW, sebagaimana yang di ajarkan oleh para ulama kita. Bagaimana Rasul menjelang tidur, ketika bangun tidur, ketika mandi, ketika berwudhu, ketika sholat, setelah sholat, ketika bekerja, berniaga, ketika makan/minum, ketika buang air, ketika bermasyarakat, dst. Apakah kita masih mau lalai?

Kita pahami, bahwa Rasul SAW adalah nabi terakhir dan sudah tidak ada secara fisik di tengah-tengah kita. Bahwa Al-Qur'an adalah wahyu terakhir yang tidak akan lagi

turun ayat. Dunia semakin kompleks dengan berbagai macam permasalahan, disinilah peran ulama menjawab permasalahan itu dengan tafsir Al-Qur'an dan hadist, yang kita kenal dengan ijma' dan qiyas para ulama.

Imam Ahmad berkata, untuk menjadi Imam Mazhab/Mujtahid, minimal hafal Al Qur'an dan hafal 1 juta hadist. Imam Malik bukan sekedar hafal hadist, tapi melihat langsung praktek ibadah anak-anak, cucu-cucu sahabat nabi, sementara sahabat langsung menerima Islam dari nabi. Bahkan ahli hadist terkemuka pun seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim yang lahir sekitar 100 tahun setelah wafatnya Imam Malik, dengan rendah hati mengikuti Mazhab Imam Syafi'ie. Mereka tidak berani berpegang langsung kepad Al Qur'an dan Hadist, sebab ilmu yang mereka miliki tidak cukup untuk menjadi Imam Mazhab, mereka sekedar jadi Imam Hadist.

Dengan pespektif yang lain, klaim kebenaran mereka (kaum ekstrimis) menjadi kacau karena Al-Qur'an yang mereka baca (dikumpulkan oleh Sahabat Ustman menjadi mushaf yang menjadi satu – sebelumnya terpencar dalam tulisan di daun-daun qurma, di tulang-tulang hewan, di kulit-kulit hewan, dst). Al-Quran dan Hadist yang mereka pelajari dan dapat di baca, justru hasil buah karya tabiin-tabiin (yang menemukan cara mengenal huruf hijaiyyah, dan ilmu tajwid cara baca Al Qur'an), yang kemudian di bukukan oleh para Imam dan ulama. Semua itu bukan karya Rasullullah SAW. Bagaimana mungkin mereka bisa ber islam secara kaffah, jika menafikan ilmu dan karya para sahabat, tabiin, tabiin-tabiin hingga para ulama yang menyebarkan Islam di negeri ini. Bagaimana mugkin mereka bisa merasa beriman dan berislam dengan menafikan keberadaan ulama?! Semoga kita terhindar dari kesesatan dalam beriman. Al-fatihaa,,, Aminnn...

Sebelum mengakhiri bahasan ini, saya ingin sedikit bercerita tentang "kegalauan" saya dalam bersikap dengan mengikuti pemberitaan dari sikap Gusdur (santri tulen – ahlussunnah wal jamaah) terkait dengan masalah keumatan dan kebangsaan di negeri ini, khususnya terkait dengan isu ahmadiyah pada 2007/2008 silam. Saat itu, ketika ramai pemberitaan tentang ahmadiyah yang dianggap "aliran sesat", Gusdur diminta untuk berkomentar oleh salah satu media berita. Kemudian beliau menyampaikan pandangannya, bahwa ahmadiyah itu bukan Islam. Kenapa? Karena dalam konsep ketauhidan Islam (dua kalimat syahadat), Islam tidak mengakui Rasul selain Nabi Muhammad SAW dan tidak ada rasul lagi setelah di utusnya Nabi Muhammad SAW. Tidak lama dari pernyataan Gusdur itu, tiba-tiba ada sekelompok Islam yang lainnya melakukan penyerangan kepada komunitas ahmadiyah, merusak rumahnya, bahkan ada yang membakar rumah hingga "masjid" tempat mereka beribadah. Ketika hal itu terjadi, lalu Gusdur maju kedepan dan dengan lantang berkata, "siapa saja yang mengganggu dan mengancam ahmadiyah, berhadapan dengan saya, dan harus di hukum". Tentu saja polemik tidak berhenti disitu. Perdebatan semakin memanas antara Gusdur dan kelompok Islam lain yang merasa

bahwa penyelewengan agama harus ditindak, halal darahnya. Bahkan tidak sedikit caci maki kepada Gusdur dengan menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan Hadist, Gusdur dianggap kyai plin-plan, kyai sesat.

Sampai dititik ini, ketika itu saya menjadi kader PMII yang masih berproses di Cabang kebingungan. Kenapa? Karena tidak semua sikap yang diambil oleh Gusdur, disertai dengan penjelasan oleh Gusdur sendiri. Sehingga yang muncul adalah tafsir-tafsir liar, jika didorong oleh analis yang salah, akan menjadi sangat salah dan menyalahkan sikap Gusdur tersebut. Disisi lain, persinggungan dengan anggota baru di kampus yang mempertanyakan posisi ahlussunnah wal jamaah/NU terkait dengan hal itu pun sulit untuk saya jawab. Karena memang Gusdur menjadi simbol yang mempermudah kampanye PMII di kampus.

Lama kemudian saya mendapatkan jawaban kenapa Gusdur bersikap demikian. Dalam agenda diskusi mingguan cabang yang mengundang Sahabat Kamal Fathoni (senior yang biasa kami minta waktunya untuk menjelaskan dengan “cara mudah” rumusan *ahlussunnah wal jamaah*, mengingat anggota baru kami dari kampus umum dan bukan alumni pesantren). Parahnya, jawaban singkatnya justru membingungkan juga. Ketika saya tanya kenapa gusdur seperti itu, beliau menjawab, “justru itulah *ahlussunnah wal jamaah*”. Loh kok bisa begitu?! “Ya! Dalam *ajaran ahlussunnah wal jamaah*, memahami masalah dan bersikap atas masalah harus sesuai dengan konteksnya. Sekalipun harus merujuk pada ayat atau hadist, harus dipahami juga konteks ayat dan hadist itu turun seperti apa. Jika konteksnya tidak sesuai, maka rujukan itu tidak bisa dikatakan tepat. Ketika Gusdur menyatakan ahmadiyah bukan Islam, posisi beliau sebagai kyai yang menilai polemik ajaran ahmadiyah dalam perspektif tauhid. Dan ketika beliau membela ahmadiyah dari kesewenangan kelompok Islam lain, posisi beliau adalah sebagai tokoh bangsa, mantan presiden, warga negara yang taat hukum dan berkewajiban melindungi warga negara lain, siapapun dia agar mendapat perlindungan hukum. Tidak boleh, ada kelompok atas nama apapun bertindak mendahului hukum, apalagi mengeksekusi orang lain yang dianggap salah. Jikapun telah diputuskan bersalah atas nama hukum, biarkan aparat berwenang yang mengeksekusinya”.

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Semoga cerita ini bisa menjadi masukan bagi kita semua, kader PMII agar lebih cerdas memahami permasalahan dan lebih bijak mengambil keputusan untuk bersikap dan bertindak. Poin pentingnya adalah, jika ada ulama kita bersikap kemudian kita bingung, jangan langsung ikut-ikutan menyalahkan, ber*husnudzon*lah. Karena bisa jadi ilmu kita yang belum cukup untuk memahami hal tersebut dalam waktu singkat.

B. PENGUASAAN MATERI

Selain penguasaan doktrin ahlussunnah wal jamaah, tantangan kaderisasi kita juga terkait dengan penguasaan materi. Pasalnya, kita tidak mungkin bisa memastikan, bahwa selesai Mapaba anggota-anggota kita sudah khatam dan menguasai materi doktrin ahlussunnah wal jamaah. Tidak mungkin. Apalagi anggota PMII yang dari kampus umum dan bukan alumni pesantren, sulit. Apalagi, masih banyak juga kader/alumni yang memiliki persepsi bahwa Mapaba adalah masa pengenalan saja, yang umum-umum saja, belum masuk dalam ruang doktrinasi. Disisi lain, kita dihadapkan pada realitas kaderisasi yang beragam corak, biasanya hal ini terkondisikan dengan realitas kampus umum dan kampus agama, cabang besar dan cabang kecil, banyak alumni atau minim alumni dari rayon/komisariat penyelenggara Mapaba. Bahkan bisa dipengaruhi juga oleh siapa dan dari rayon atau komisariat mana ketua cabangnya.

Terlepas dari dinamika tersebut, secara sistem tentu penting PB PMII membuat skema kaderisasi terkait dengan target atau output kaderisasi, mulai dari Mapaba, PKD, PKL dan PKN. Kira-kira seperti apa rumusannya? Memahami dinamika kaderisasi hari ini, dengan kondisi yang ada, kami mengambil sample di kampus agama, yang biasanya dalam setiap tahun ajaran baru perkuliahan, dapat menyelenggarakan Mapaba dengan peserta hingga ratusan mahasiswa baru. Parahnya, setelah pelaksanaan Mapaba seolah kaderisasi selesai. Tidak jarang kemudian yang sudah di Mapaba tidak aktif, bahkan ada yang kemudian mengikuti jenjang kaderisasi di organisasi ekstra kampus lainnya.

Kenapa hal ini bisa terjadi? Banyak hal yang perlu di evaluasi dari proses pelaksanaan Mapaba kita, bahkan perlu refleksi mendalam. Lalu skema Mapaba yang seperti apa untuk mengatasi hal ini? Target minimum. Ya, rumusan target minimum Mapaba kita adalah, hafal mars PMII dan paham mengapa Pancasila menjadi harga mati bagi PMII. Dalam menguatkan pemahaman para anggota baru, MINIMAL dua point ini *clear*!

Kenapa? Karena anggota baru kita di kampus akan bersinggungan langsung dengan anggota baru dari kelompok-kelompok ekstrimis yang sejak awal, dalam kaderisasinya sudah mendoktrin, menggugat NKRI dan Pancasila dalam perspektif Islam yang mereka yakini. Bahkan mereka menegaskan bahwa kelompok Islam yang sepakat dengan Pancasila adalah kelompok-keompok yang tersesat.

Bagaimana caranya? Tentu sahabat-sahabat pengkader sudah bisa mencari rumusan sederhana, untuk mencapai target minimum tersebut. Misal, disetiap sessi pembuka dan penutup harus menyanyikan mars PMII, sekalipun setiap sessi materi-materi berjalan pararel. Sebelumnya di berikan soft copy dan hard copy catatan lirik mars PMII untuk bisa didengarkan melalui *handphone* masing-masing dengan membaca catatan yang ada. Pada sessi orientasi hal ini bisa di pertegas.

Lalu bagaimana menanamkan pemahaman sederhana mengapa kita ber Pancasila kepada seluruh kader?

Penjelasan awal bisa dengan mengelaborasi bagaimana Rasul SAW mencontohkan membangun negara madinah dengan UUD nya adalah Piagam Madinah. Di Piagam Madinah tidak ada satu pun ayat Al-Qur'an yang di kutip. Semua isinya adalah nilai-nilai universal. Perjanjian-perjanjian yang mengikat banyak suku yang hidup di madinah, bahkan juga mengikat Yahudi yang semuanya terlindungi dengan ikatan itu dan wajib saling tolong menolong dan bantu membantu ketika ada yang mengancam keselamatan diantaranya, baik ancaman yang datang dari internal maupun eksternal. Rasul telah memberikan contoh ketauladanan bagaimana menciptakan tatanan komunitas, masyarakat yang lintas suku, lintas agama dalam satu ikatan kebersamaan, kesatuan dan persatuan – konsep yang hari ini kita kenal dengan istilah, ukhuwah wathoniyah, ukhuwah basyariyah – nasionalisme.

Lalu bagaimana dengan target minimum PKD?

Dalam skema kaderisasi yang PB dorong hari ini, target output minimum alumni PKD adalah memiliki komitmen mencapai tujuan organisasi. Banyak kader bahkan alumni yang selama ini merasa banyak berkorban untuk PMII, berkorban waktu, tenaga, pikiran, uang, keringat bahkan air mata dan darah. Ketika di refleksi, dalam pengorbanan yang banyak itu, sudah sampai dititik mana kemajuan untuk PMII tercapai? Di Rayon, Komisariat, Cabang bahkan di Koordinator Cabang? Seberapa banyak penambahan kuantitas kader kita? Seberapa banyak peningkatan kualitas kader kita? Seperti apa persebaran kaderisasi dan penguasaan kampus-kampus yang telah berjalan selama ini? Apa yang sudah kita lakukan untuk tercapainya tujuan organisasi secara personal maupun kolektif?

Bisa jadi, semua yang kita anggap pengorbanan itu, ternyata hanya "ilusi". Bahkan ternyata, bahasa "bunuh diri kelas" untuk PMII adalah bagian dari kondisi kader yang tidak bisa cepat lulus, terkendala IPK minim, skripsi gak kelar-kelar. Atau sudah lulus, gak bisa bersaing di dunia kerja profesional, lalu sok sibuk di PMII. Dst. Lama berkutat di PMII (meminjam istilah Gusdur; buang-buang umur), ternyata tidak berpengaruh terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas kader dan pengembangan kaderisasi di kampus-kampus. Kenapa hal ini terjadi? Bahkan berkelanjutan? Karena pemahaman tujuan PMII hanya sebatas di hafal untuk disampaikan dalam forum kaderisasi, tidak di internalisasi, sehingga tidak teraktualisasi dalam keseharian kita.

Padahal, jika tujuan PMII teraktualisasi dalam setiap individu kader, sungguh tidak akan ada kader PMII yang malas beribadah, yang tidak berakhlaq, yang tidak berprestasi dan lama lulus, serta tidak akan ada kader PMII yang lemah komitmentnya terhadap cita-cita kemerdekaan negeri ini.

Lalu bagaimana teknisnya? Tentu sahabat-sahabat pengkader sudah bisa mencari rumusan sederhana, untuk mencapai target minimum tersebut. Misal, disetiap sessi pembuka dan penutup, peserta harus memekikkan tujuan PMII, sekalipun setiap sessi materi-materi berjalan pararel. Pengalaman saya mengisi materi pengembangan PMII di PKD, selalu memastikan setiap peserta hafal tujuan PMII sesuai dengan yang tertera di ADRT. Jika kedapatan ada peserta yang belum hafal, mereka harus keluar forum dengan membawa catatan, dalam waktu tertentu masuk kembali dengan hafalan yang sudah sempurna. Jika masih belum hafal, bisa mengikuti PKD pada kesempatan selanjutnya.

Setelah itu, saya berikan waktu semua peserta untuk menghayati kalimat tersebut dan menginternalisasinya. Kemudian memberikan waktu dan kesempatan mereka bersikap, dengan tawaran logis. Jika menurut anda tujuan PMII tidak sesuai dengan tujuan anda secara pribadi, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mahasiswa dan sebagai generasi bangsa ini, silahkan keluar dari forum ini. Ini bagian dari cara kita membentuk karakter kader, sehingga mereka paham konsekuensi ketika memilih untuk terus ikut pelatihan kader dan menjadi kader. Orientasi berorganisasi seorang kader harus mencapai tujuan organisasi, jangan sampai mengaku kader, tapi tidak tahu tujuan organisasi.

Selanjutnya, Lalu bagaimana dengan target output minimum PKL dan PKN? Saya tidak akan melanjutkan pembahasan output minimum PKL dan PKN, karena tentu secara hierarki kaderisasi, capaian dari PKL dan PKN lebih tinggi dengan kualifikasi dan spesifikasi alumni-alumninya.

Dalam penutup pembahasan ini, saya ingin sekali lagi menekankan, seperti yang telah saya singgung dalam pembahasan pelatihan instruktur di atas. Poinnya adalah, penguasaan materi kaderisasi mutlak harus di dorong secara sistemik, agar kedepan kita punya stok pengkader (instruktur dan pemateri). Saya ingat ketika memulai proses penguatan komisariat UNAS dulu, setelah Mapaba (karena kami tidak punya senior diatas yang langsung mendampingi) saya bersama Sahabat Maulana, Sahabat Didip dan Sahabat Novia, berbagi tugas untuk memahami materi Mapaba. Jika nanti Mapaba selanjutnya, kami siap menjadi moderator bahkan siap menjadi pemateri dalam diskusi internal. Saya memahami materi Ke-PMII-an, Maulana tentang *Ahlussunnah wal Jamaah*, Didip tentang Mahasiswa dan tanggung jawab sosial, Novia tentang NDP.

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Mulai detik ini, apapun materi yang sahabat dapat dalam setiap sessi, baik diskusi mingguan maupun dalam ruang kaderisasi, pastikan sahabat sudah mulai memahami dengan berpikir bahwa; jika hari ini saya hanya mendengarkan, besok saya yang akan menjadi pemateri. Jangan sia-siakan waktu berproses untuk menjadi transformer.

C. KEDISIPLINAN DAN PERUBAHAN SIKAP

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Saya ingin mengutip KREDO PERJUANGAN yang disampaikan oleh KH A. Wahab Hasbullah di Jakarta pada tahun 1950, yang saya dapat dari Tim Kaderisasi PBNU dalam Pendidikan Kader Penggerak NU:

> “Banyak Pemimpin NU di daerah-daerah dan juga di pusat yang tidak yakin akan kekuatan NU, mereka lebih meyakini kekuatan golongan lain. Orang-orang ini terpengaruh oleh bisikan orang yang menghembus-kan propaganda agar tidak yakin akan kekuatan yang dimilikinya. Kekuatan NU itu ibarat senjata adalah meriam, betul-betul meriam. Tetapi digoncangkan hati mereka oleh propaganda luar, yang menghasut seolah-olah senjata itu bukan meriam, tetapi hanya gelugu alias pohon kelapa sebagai meriam tiruan. Pemimpin NU yang tolol itu tidak akan sadar siasat lawan dalam menjatuhkan NU melalui cara membuat pemimpin NU ragu-ragu akan kekuatan sendiri”.

Tentu rujukan di atas layak untuk saya sitir dalam kontek PMII hari ini. Periode 2014-2016 ini, PB PMII sedang berikhtiar menjalankan PKN, pasca PKL. InsyaAllah kami akan coba jalankan minimal 5 angkatan, semoga bisa lebih. Dalam pelaksanaan PKN, kami sangat menekankan kedisiplinan peserta. Ya, kedisiplinan. Kita sadari memang, sikap disiplin masih jauh dari keseharian kita dalam berorganisasi. Seperti yang telah saya katakan di atas, bahwa salah satu keberhasilan kaderisasi kita adalah meningkatkan kedisiplinan kader, tidak hanya pada saat pelatihan kader tetapi juga teraktualisasi dalam perilakunya sehari-hari. Pada saat PKN angkatan II, ada seorang sahabat yang berceloteh, “jangan terlalu ketat bro, kita ini bukan milliter”. Dengan pola mujahadah dan sholat berjamaah yang di kondisikan, pun masih ada yang berceloteh, “slow lah, kita ini PMII, bukan LDK”.

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Apa hubungannya kredo perjuangan Mbah Wahab dengan celoteh tersebut? Saya ingin tegas kan, jika kita tidak segera insaf dan sadar, maka kehancuran PMII sudah tidak perlu operasi propaganda dari pihak luar, justru diri kita sendiri yang menjadi bagian dari perusak dan penghancur PMII. Ya, jika dahulu untuk menghancurkan NU diperlukan propaganda, sekarang “bisa jadi” dengan “KETOLOLAN” kita, PMII secara nilai akan lemah dan mati dengan sendirinya.

Alhamdulillah hari ini kedisiplinan dalam ruang kaderisasi telah tercapai. Entah karena terpaksa atau di paksa, tetapi kedepan, kita harus pastikan bahwa secara institusi PMII adalah organisasi yang paling disiplin. Melebihi tentara! Tercermin dalam kedisiplinan kadernya. PMII adalah organisasi yang paling islami, tidak

sebanding dengan LDK! Semoga tidak akan ada lagi kader/pemimpin PMII yang TOLOL dimasa mendatang.

5. **MASALAH DI FOLLOW UP KADERISASI**

Selama ini, follow up yang terkadang disebut dengan istilah Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang biasanya dibahas pada sessi terakhir dalam ruang kaderisasi kita, dalam realitasnya kemudian menjadi Rencana Tidak Lanjut (RTL), stop. Berhenti. Rumusan yang sudah dibahas, dirumuskan bahkan diperdebatkan, kemudian hanya menjadi berkas dan catatan-catatan belaka. Pun demikian, catatan itu tidak tersimpan rapih. Jangankan menjadi arsip organisasi, pasca pelatihan pun lupa entah disimpan dimana. Lupa, siapa yang bertanggungjawab menyimpannya. Ya, manajemen arsip kita masih lemah.

Di atas telah saya singgung bahwa *follow up* kaderisasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam skema sistem kaderisasi kita. Dari pembahasan sebelumnya, kita dapat pahami bahwa kelemahan kaderisasi kita karena agenda *follow up* masih minim dilaksanakan. Jikapun terlaksana, hanya menjadi kreasi dan sangat bergantung pada situasi dan kondisi kepengurusan di berbagai level. Bahkan tidak sedikit struktur kita yang tidak melakukan *follow up* kaderisasi.

Parahnya lagi, agenda utama kaderisasi formal pun masih terseok-seok dibeberapa cabang. Dalam konteks ini, PB pun membuat aturan yang kemudian memberikan *punishment* bagi Rayon dan Komisariat yang sudah menjadi PO, dan Tap pleno PB PMII terkait dengan penurunan status Cabang bagi cabang yang tidak bisa melakukan proses kaderisasi secara berkelanjutan.

Tentu kita pahami bahwa agenda *follow up* harus berjalan dan dijalankan oleh setiap struktur dengan maksimal, baik yang bersifat non formal (pelatihan pasca kaderisasi formal) maupun yang bersifat informal (mentoring personal). Pada pembahasan selanjutnya, saya akan coba paparkan bagaimana agenda follow up berjalan pada setiap tingkatan jenjang kaderisasi kita. Semua itu sesuai dengan PO yang sudah kita sepakati bersama pada Muspimnas di Ambon.

Semoga dengan PO yang sudah ada, agenda follow up kaderisasi kita akan semakin massif baik secara kuantitas maupun kuantitas, baik dikampus umum maupun dikampus agama, baik di cabang besar maupun cabang kecil, baik dikomisariat besar maupun komisariat kecil, baik dirayon besar maupun rayon kecil.

BAB III

MEMBANGUN SISTEM KADERISASI

Baik, kita masuk pada pembahasan membangun sistem kaderisasi. Secara garis besar, proses pelaksanaan kaderisasi formal dan non formal terbagi dalam tiga tahap. Pertama, tahapan screening. Kedua, tahapan pelaksanaan dan ketiga, tahapan follow up. Dalam buku kaderisasi 2014, kita dapat menemukan bahwa secara konsep, ketiga tahapan ini menjadi satu bagian yang utuh. Kait mengait dan tidak terpisahkan. Sangat rinci dijelaskan, tetapi belum dilegalisasi sebagai aturan kaderisasi yang baku. Sehingga pelaksanaannya sangat bervariasi, bukan hanya disesuaikan dengan kebutuhan, malah kadang (bahkan sering) disesuaikan dengan kemampuan pelaksana. Ini yang menyebabkan terjadinya "gap" output kaderisasi, antara jawa dan luar jawa, bahkan di Jawa sendiri antara kampus/cabang besar dengan kampus/cabang kecil.

Ya. Karena tidak baku dalam legalitas keorganisasian maka dianggap bukan aturan yang harus di patuhi, hanya panduan. Kebanyakan justru kepengurusan di bawah menjalankan kebiasaan yang turun temurun, maka output kaderisasi kita tidak memiliki standar. Bisa jadi di satu daerah capaiannya sangat tinggi dan di daerah lain sangat rendah. Atau di daerah yang sama, capaian pengurus yang lalu lebih tinggi dan pengurus setelahnya lebih rendah, karena ketergantungan dengan figur ketua. Saat ini, kami mencoba mendorong standar

minimum capaian dalam kaderisasi formal dan non formal, syarat dan prasyarat anggota/kader dapat mengikuti PKD/PKL/PKN serta *follow up* nya secara sistemik.

Secara legal formal, ketiga tahapan dalam proses pelaksanaan kaderisasi tersebut, kami atur dalam Tap Pleno tentang screening, Tap Pleno tentang Pedoman Teknik Pelaksanaan Kaderisasi Formal, Tap Pleno tentang Kaderisasi Non Formal dan Tap Pleno tentang Sertifikasi. Alhamdulillah beberapa point penting dari berbagai Tap Pleno tersebut dan "sedikit umum" sudah ditetapkan dalam Muspimnas di Ambon menjadi Peraturan Organisasi (PO). Akan tetapi, yang terkait dengan aturan khusus, masih tetap mengacu pada Tap Pleno tersebut. Misal, terkait dengan penugasan peserta PKD dan penugasan peserta PKL untuk mendapatkan sertifikat di PO tidak dimasukan dalam PO, tetapi tetap mengacu pada Tap Pleno. Bukan berarti dihilangkan. Berikut akan saya coba paparkan penjelasannya tahapan-tahapan dalam sistem kaderisasi kita, yaitu:

4. **MENGATUR SCREENING MINIMUN**

   Dalam pelaksanaan kaderisasi, kita mengenal proses screening. Penerapannya, biasanya lebih ditekankan pada pelaksanaan PKD dan PKL sekalipun dalam Mapaba juga penting ada screening, tetapi tidak seketat PKD dan PKL. Pelaksanaan screening ini, setiap Korcab, Cabang, bahkan di Komisariat sudah melaksanakannya, tetapi tidak ada standar baku minimum. Nah, PB PMII hari ini setidaknya memberikan standar baku untuk proses screening tersebut. Jika standar yang dibuatkan oleh PB ternyata masih belum maksimal dibeberapa tempat, silahkan saja ditambahkan. Karena standar baku itu mengacu pada kebanyakan daerah dan kami anggap logis dapat terlaksana secara nasional, dengan mempertimbangkan dinamika kaderisasi yang sudah berjalan, tetapi juga tetap memperhatikan arah tujuan dan peningkatan kualitas output dari jenjang kaderisasi yang akan dilaksanakan.

   Ada pengalaman yang menarik bagi saya secara pribadi terkait dengan screening, pastinya diperkuat dengan pandangan sahabat-sahabat lainnya dengan pengalaman masing-masing ketika mengawal kaderisasi diberbagai daerah, sehingga hasil pembahasan dari diskusi-diskusi kami, mendorong kami PB PMII 2014-2016 untuk memastikan perlu adanya aturan baku tentang screening.

   Pada tahun 2013 lalu, saya diminta Ketua Umum PB PMII, Sahabat Addin Jauharudin untuk mengawal PKL yang dilaksanakan oleh PKC DKI Jakarta. Posisi saya waktu itu hanya sebagai anggota biro di PB, pun bukan biro kaderisasi. Tetapi saya alumni PKP NU angkatan VI. Ketika itu belum ada pembatasan ruang lingkup kaderisasi, sehingga peserta (kader dari daerah manapun) dapat mengikuti PKL di wilayah manapun. Pada PKL ketika itu, peserta selain dari Jakarta juga ada yang berasal dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Lampung, NTB, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

   Sebenarnya sudah hal yang lumrah, peserta PKD dan PKL dikenakan biaya. Ya, pada PKL kali itu, peserta diwajibkan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 100 ribu. Jika dikonversi dengan fasilitas pelatihan, sebenarnya itu cukup murah, karena selain fasilitas

pelatihan (penginapan, makan tiga kali sehari selama empat hari pelatihan dan seminar kit), peserta juga mendapatkan kaos, untuk yang laki-laki mendapatkan peci hitam, belum lagi ditambah dengan ilmu PKL dari berbagai narasumber yang tidak bisa dikonversi dengan uang, tetapi tanpa sertifikat. Ya, PKL DKI Jakarta waktu itu mungkin PKL pertama (pada masa ketum Addin Jauharudin) yang tidak memberikan sertifikat kepada peserta setelah selesai pelatihan, karena kebiasaan ketika itu, selesai pelatihan peserta pulang dengan sertifikat ditangan dan bisa jadi bekal untuk mencalonkan diri sebagai ketua Cabang/Koorcab.

Memang, tidak sedikit orientasi peserta ikut PKL hanya untuk mendapatkan sertifikat. Pada PB PMII periode 2014-2016 ini, orientasi kader untuk ikut PKL dan mendapatkan sertifikat itu, kami *manage* untuk konek dengan agenda penguatan basis PMII disetiap kampus dan setiap daerah, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya (baca: sertifikasi kaderisasi).

Lucunya, pelaksanaan PKL ketika itu sempat terhambat karena ada beberapa peserta yang keberatan untuk membayar, tidak mau bayar tapi tetap ingin mengikuti PKL. Parahnya lagi, sudah tidak mau bayar, sebagian besar dari mereka pun belum membuat makalah, sebagai prasyarat mengikuti PKL. Jika ketika itu sahabat sebagai Panitia, Institusi Pelaksana atau sebagai PB yang mengawal proses PKL tersebut, pasti sahabat akan sepakat kalau peserta yang demikian ini tidak boleh mengikuti PKL. Peserta bermasalah, silahkan pulang.

Tetapi, yang lebih lucunya lagi, peserta yang sudah membayar dan sudah membuat makalah pun ikut bersama peserta yang “bermasalah” itu melakukan “aksi solidaritas”, menuntut panitia memperbolehkan “peserta bermasalah” itu agar dapat ikut PKL bersama. Solidaritas semu! Singkatnya, PKL itu diboikot peserta, sampai kemudian ada proses lobby dengan panitia, dan akhirnya PKL berjalan. Dengan ketentuan, bayar setengah harga dan peserta yang belum membuat makalah agar menulis dengan tulisan tangan makalahnya, minimal 5 lembar di kertas A4.

Ya, beginilah realitas kaderisasi kita (dulu). Satu sisi, pelaksana Pelatihan Kader hanya berpikir untuk mensukseskan “program seremoni”, melaksanakan “kewajiban” dari rekomendasi RTK/Konfercab/Konkorcab dan keputusan raker. Biasanya pelaksanaan PKD dan PKL dilakukan menjelang akhir kepengurusan, setelah itu RTK/Konfercab/Konkorcab. Lalu pengurus merasa percaya diri (PeDe) LPJ akan diterima. Disisi lain, peserta seolah menjadi elemen pendukung yang dapat memastikan acara sukses atau tidak. Ketika itu, menjadi *prestige* tersendiri bagi pelaksana Pelatihan Kader, jika banyak peserta yang hadir dari berbagai daerah, terlebih lagi jika mereka berasal dari luar pulau. Seolah dengan Pelatihan Kader itu, penyelenggara sukses melakukan konsolidasi kaderisasi. Lalu bagaimana *follow up* nya? Dapat dipastikan tidak ada! Tidak hanya Jakarta, bahkan di “cabang besar” sekalipun, tidak pernah ada *follow up* PKL. Terlebih untuk peserta dari luar pulau.

Kembali pada screening PKL, dari dinamika di atas, saya melihat bahwa sahabat-sahabat secara umum masih belum mengerti tentang sistem *reward and punishment* untuk mendorong kedisiplinan peserta dan output kaderisasi yang ingin di capai (masih terkait dengan aksi solidaritas tadi). Padahal, kita semua punya tanggung jawab untuk mendorong kedisiplinan kaderisasi, kedisiplinan peserta, wibawa institusi yang merekomendasikan peserta dan wibawa institusi penyelenggara Pelatihan Kader menjadi lebih baik. Tentu bagi Komisariat/Cabang yang mau merekomendasikan kadernya untuk ikut Pelatihan Kader di luar cabangnya, harus sedikit selektif. Kalau begini jadinya, pasti nama baik perekomendasi Komisariat/Cabang dipertaruhkan.

Muncul banyak pertanyaan dalam pikiran saya ketika itu, bagaimana mungkin, ada gerakan "solidaritas semu" dari peserta yang baik – yang menjalankan kewajiban, sudah membayar biaya administrasi dan sudah membuat makalah, kepada peserta bermasalah (peserta yang belum menunaikan kewajiban – belum bayar dan belum membuat makalah)?! Saya sedikit merefleksi kejadian tersebut, dengan serta merta waktu itu saya mendapatkan hipotesa – jawaban sementara.

Kira-kira begini jawabannya, solidaritas semu itu mencuat karena peserta sama-sama datang dari jauh, dari luar kota, bahkan dari luar pulau. Mereka datang karena mendapat undangan PKL dari penyelenggara, dan sebagian besar dari mereka pun membawa surat rekomendasi dari cabang asal untuk mengikuti PKL tersebut. Sudah banyak ongkos yang keluar, masa harus dibebani dengan biaya registrasi peserta? Sudah jauh jarak yang ditempuh, dengan persiapan seadanya, masa harus juga dibebani lagi dengan pembuatan makalah? Ya, mungkin seperti itu jawabannya.

Saat proses pelaksanaan PKL berjalan, sebelum masuk materi saya sedikit melakukan pengkondisian forum dengan menyanyikan mars PMII dan memperhatikan para peserta. Kaget bukan kepalang saya! Masih ada peserta PKL yang tidak hafal mars PMII. Saya tidak akan menyebut peserta itu dari daerah mana, tetapi itu fakta yang ada. Kira-kira dinamika yang seperti ini sering di dapati di banyak PKL (dahulu), dengan pemetaan yang kami lakukan saat rakernas dan pembahasan mendetail saat rapat-rapat pleno PB PMII. Sahabat-sahabat yang militant dan progressif! Kita harus bersama-sama memastikan, kedepan, sudah tidak ada lagi cerita demikian dalam proses kaderisasi kita!

Poin penting dari screening ini adalah, menjaga kualitas dari input dan output kaderisasi disetiap jenjang khususnya di PKD, PKL dan PKN. Dengan menekankan ketentuan-ketentuan sebagai syarat dan prasyarat. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memiliki aturan untuk meminimalisir kondisi yang kurang baik di masa lalu seperti yang sudah saya contohkan di atas. Secara garis besar, di Tap Pleno dijelaskan, terkait dengan screening terbagi menjadi tiga bagian, yaitu screening berkas, screening perlengkapan dan screening pemahaman keorganisasian (presentasi makalah dan wawancara).

D. Screening berkas

Sebelum saya menjabarkan hal itu, saya ingin sedikit menyinggung sinergi Aturan screening ini dengan PO tentang syarat-syarat pengajuan SK oleh PC. Di periode ini, untuk mendapatkan SK kepengurusan Cabang, PB meminta agar PC melampirkan data base kader. Diawal kebijakan ini kami terapkan, tidak sedikit PC yang tertunda SK nya karena belum melampirkan data base kader. Ya, selama ini memang administrasi keorganisasian kita sangat lemah, setiap Rayon/Komisariat/Cabang bahkan Koorcab tidak memiliki data dan menata dokumentasinya dengan apik. Begitu juga PB, setiap awal kepengurusan, seolah menjadi awal dari segalanya. Tidak memiliki arsip, apalagi memiliki kas organisasi. Untuk PKC hingga PR, tidak sedikit yang juga harus mencari kost-kostan atau kontrakan untuk sekretariat bagi pengurus baru. Juga tidak jarang pengurus yang sudah setengah periode bahkan sudah mau selesai, baru memiliki sekretariat. Alhamdulillah, lebih baik telat daripada tidak sama sekali toh. Bisa semakin melebar jika kita bahas kelemahan kepengurusan baru di PMII. Kembali pada screening.

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Saya ingin lebih dalam mengelaborasi tahapan screening berkas ini. Jika pemberkasan dimaksimalkan pada saat kaderisasi dan di *file-ing*, tentu akan sangat memudahkan PC selanjutnya untuk segera mendapatkan SK pasca pengajuan. Selama ini, Form Mapaba yang dibuat oleh PR/PK untuk mendata peserta Mapaba, tidak semuanya di rekap dalam file kaderisasi, selesai acara, maka berkas pun hilang, lupa entah dimana di taronya. Begitu juga dengan form peserta PKD yang dilaksanakan oleh PK/PC, juga form PKL yang dilaksanakan oleh PC/PKC. Sehingga ketika PB meminta data, tidak ada. Dulu, bahkan hinga sekarang, jika PB ingin tahu berapa jumlah anggota Mapaba, alumni PKD dan Alumni PKL, cukup sulit bahkan sangat sulit untuk mendapatkan datanya.

Dengan sistem yang hari ini kita terapkan, insyaAllah PB periode selanjutnya (dimulai perlahan pada periode ini) akan memiliki data kaderisasi yang lebih valid. PC dan PKC pun tidak akan sulit mendapatkan *update* data tersebut, karena kaderisasi pada periode ini sudah mulai terdata dengan baik. Bagaimana jaminan itu ada? Karena dengan mewajibkan lampiran data base anggota/kader bagi PC yang mengajukan SK, mereka akan "terdesak". SK tidak akan diberikan jika syarat-syarat berkas belum dilampirkan.

Dalam konteks ini pun diperlukan kedewasaan berorganisasi. Lagi-lagi mesti saya mohon kepada senior yang masih fokus mengawal Rayon/Komisariat, jangan terlalu politis mendampingi PMII. Ini kisah nyata. Pada periode ini, ada PC dari Kalimantan yang terlambat mendapatkan SK dari PB karena belum memberikan data base, setelah kami telisik ternyata ada salah satu rayon yang menahan untuk memberikan databasenya. Setelah rayon itu RTAR dan kepengurusan baru mengajukan SK kepada PC, PC meminta database jika mau di SK kan. Setelah itulah PC tersebut dapat melengkapi databasenya dan akhirnya SK dari PB turun. Ini loh, dinamika yang konyol

yang tidak boleh terjadi terus menerus. Saya yakin, PR tidak mungkin se politis itu, sekalipun ada gap politik ketika Konfercab. Ini pasti arahan dari senior yang kurang sehat.

Intinya, dengan kebijakan ini data base kaderisasi pasti dimiliki dan dijaga oleh setiap pengurus, mulai terdokumentasi dengan baik dan pengurus selanjutnya dapat mudah meng-update. Kira-kira, kedepan data base kita akan terakumulasi perjenjang kepengurusan. Komisariat memiliki data anggota baru Mapaba. PC memiliki data anggota baru Mapaba dan alumni PKD di wilayahnya. PKC juga memiliki data anggota baru Mapaba, alumni PKD dan alumni PKL di wilayahnya. Pastinya, PB memiliki data kader secara menyeluruh, yang terus bergerak. Selalu *update* dengan aktifitas kaderisasi yang berjalan. Selama ini informasi kaderisasi kita abstrak,rumus andalannya adalah "katanya" tanpa data. Dengan mewajibkan screening berkas dalam tahapan screening PKD/PKL, tentu perlahan tapi pasti kita akan memulai menata arsip kaderisasi kita.

Dalam konteks screening berkas dalam proses kaderisasi kita, secara operasional penyelenggara PKD/PKL meminta format soft file (berkas yang di scan) dan hard file (berkas asli/copy) dari peserta yang mencakup tentang Formulir dan CV, Surat rekomendasi dari Komisariat asal atau dari Cabang asal, Sertifikat kaderisasi formal dan non formal yang pernah diikuti, Catatan pribadi: tentang kondisi objektif di Rayon atau Komisariat asal (identifikasi masalah dan upaya mencari solusi), apa yang sudah calon peserta lakukan selama ber PMII di Rayon/Komisariat/cabang dan lampiran Makalah.

Dengan demikian, tidak akan ada lagi peserta yang mengikuti kaderisasi tanpa melalui proses screening berkas. Artinya, satu hari sebelum pelaksanaan kaderisasi, sudah jelas siapa dan dari mana peserta yang bisa mengikuti pelatihan kaderisasi tersebut. Jika berkas belum masuk dengan tempo waktu yang sudah di tentukan, maka panitia tidak akan lagi menerima peserta. Perlahan tapi pasti, kedisiplinan dalam pemberkasan ini akan menjadi efek bola salju yang semakin berefek membesar hingga pada level kaderisasi paling dasar.

Dengan teknologi yang semakin canggih dan akses internet yang sudah mudah di banyak daerah di Indonesia, tentu tidak akan menjadi sulit kalau kedepan, setiap PR/PK/PC/PKC memiliki web. Dan data itu bisa di *upload*. Tentu harus diantisipasi agar tidak semua pengguna internet dapat mengakses data tersebut. Untuk berkas Mapaba tentu sahabat-sahabat di rayon dan komisariat harus lebih ekstra keras untuk merekap. Karena tidak mungkin kita bebankan anggota baru untuk melakukan hal yang seperti calon peserta PKD/PKL. Sebenarnya ini pekerjaan yang tidak terlalu sulit jika dikerjakan segera ketika kaderisasi berjalan, tetapi jika ditunda-tunda sampai akhir kepengurusan dan lupa dimana berkas *hard file* ditaro, tentu akan menjadi pekerjaan yang sulit.

Lebih lanjut, jika penataaan data kaderisasi ini sudah baik, bukan tidak mungkin ketika penyampaian LPJ pada saat RTAR/RTK/Konfercab/Konkorcab/Kongres data update jumlah anggota dan kader dapat disampaikan. Kita akan tahu dengan jelas, berapa jumlah peningkatan anggota dan kader kita setiap periode kepengurusan. Dengan data tersebut, kita akan mengetahui di wilayah mana titik lemah kaderisasi kita, berapa jumlah kampus disana (umum negeri, umum swasta, agama negeri, agama swasta, politeknik, sekolah tinggi, akademi, dll), apa yang bisa disinergikan dengan jaringan di pusat untuk mendorong proses kaderisasi di setiap kampus tersebut.

Kita memiliki PBNU yang sangat sakti dalam merekomendasi seorang akademisi menjadi rektor di beberapa kampus umum negeri, tentu jaringan ini harus dapat disinergikan dengan pengurus PMII dimana kampus itu berada. Jika ditarik kebawah, PKC/PC/PK pun bisa memanfaatkan data kaderisasi itu untuk mengevaluasi dan menguatkan kaderisasi di titik-titik lemah dalam wilayah kerjanya.

E. Screening Perlengkapan

Dalam undangan PKD/PKL kepada Komisariat/Cabang, panitia tidak hanya memberikan informasi terkait dengan prasyarat dan syarat untuk calon peserta yang akan mengikuti pelatihan tetapi juga informasi tetang apa saja yang harus dibawa oleh calon peserta. Peserta wajib membawa perlengkapan, Atribut PMII/jas almamater, peci, kemeja, baju koko, sepatu, perlengkapan olahraga dan Perlengkapan Sholat.

Selama ini, hal-hal seperti ini memang cenderung di sepelekan. Padahal kita semua sadar, bahwa PKD/PKL adalah kaderisasi formal. Mestinya, kesan formal harus ada. Bahkan bukan hanya kesan! Tidak boleh lagi ada peserta yang hanya menggunakan kaos dalam ruang kaderisasi formal, harus menggunakan kemeja. Kecuali untuk olahraga, kaos dan celana training.

Peserta wajib menggunakan peci (peci PMII/peci hitam). Tentu kita ketahui bahwa peci hitam adalah symbol kita, dan kita harus bangga, karena peci (khususnya peci hitam) sudah tercatat resmi dalam protokoler kenegaraan, menjadi atribut resmi kepresidenan dan menteri-menteri ketika di lantik dan berfoto resmi Presiden bersama kabinet. Hari ini, banyak “kelompok Islam baru” yang sudah menggunakan peci. Jika kita tidak terbiasa menggunakannya, apalagi malu untuk menggunakannya, tentu kita terancam akan kehilangan symbol kita. Dalam politik symbol, tentu ini menjadi penting untuk kita sosialisasikan dan biasakan dalam keseharian kaderisasi kita.

Kita punya pengalaman buruk ketika beberapa kali budaya asli Indonesia coba di klaim dan dipatenkan oleh Malaysia. Bahkan, pulau Sipadan dan Ligitan yang luput dari perawatan kita sudah raib, dimenangkan Malaysia dalam mahkamah internasional. Kenapa? Karena kesalahan kita tidak merawat apa yang kita punya. Jangan sampai

symbol kita juga hilang diambil orang. Di atas saya sudah sedikit singgung, saya adalah kader PMII yang menjadi kader NU. Ngerti NU karena ber PMII. Ya, mungkin juga bagi kebanyakan kita ber-NU hanya dengan mengikuti tahlilan, maulidan, istighosahan, qunutan, pada saat ramadhan sholat tarawih 23 rakaat, dst.

Sebelumnya, saya tidak mengenal Hadurrotussyekh KH. Hasyim Asy'ari. Kemudian mencoba mengenal beliau, ketika jam'iyyah NU heboh ada iklan politik PKS (jelang pemilu 2009 lalu) dengan mencatut ketokohan Hadurrotussyekh KH. Hasyim Asy'ari. Kehebohan yang sama juga terjadi di Muhmmadiyah, karena merasa tokohnya juga di catut, KH. Ahmad Dahlan. Point pentingnya adalah, apakah kita akan diam dan acuh saja terhadap simbol kita, aset sejarah kita?! Tidak merawatnya, tetapi lalu marah ketika symbol dan tokoh yang kita miliki ternyata coba di catut apalagi sudah di patenkan oleh pihak lain, yang secara ideologis mereka bertentangan dengan kita?! Tentu tidak! Mari kita ber peci.

Sebagaimana kita ketahui, peci mula-mula dipopulerkan oleh bung Karno. Di hadapan rapat Jong Java, di Surabaya, Juni 1921. Setiap orang ternganga melihatnya tanpa bicara. Mereka, kaum intelegensia (ketika itu), membenci pemakaian blangkon, sarung, dan peci karena dianggap cara berpakaian kaum lebih rendah. Bung Karno memecah kesunyian, dengan berkata, "…Kita memerlukan sebuah simbol dari kepribadian Indonesia. Peci yang memiliki sifat khas ini, mirip yang dipakai oleh para buruh bangsa Melayu, adalah asli milik rakyat kita. Menurutku, marilah kita tegakkan kepala kita dengan memakai peci ini sebagai lambang Indonesia Merdeka" (*Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia,* Cindy Adams: 1966: 51-52).

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Sudah menjadi kebiasaan dibanyak Cabang dan Koorcab, setiap pelaksanaan PKD/PKL panitia memberikan kaos kepada peserta. Tentunya di kaos itu terdapat symbol PMII dan logo PKD/PKL, tidak ketinggalan nama institusi penyelenggara. Selain menjadi oleh-oleh, kaos itu juga menjadi kebanggaan bagi alumni PKD/PKL yang memakainya, terlebih jika anggota/kader di komisariat asal/cabang asalnya belum banyak yang mengikuti PKD/PKL. Artinya, kaos yang dibagikan itu secara tidak langsung menjadi atribut organisasi.

Ada pengalaman menarik yang ingin sedikit saya *share* terkait hal ini. Pada akhir November menjelang awal Desember 2015, PC Kota Bandung menyelenggarakan PKL. Sebagai ketua Kaderisasi Nasional, saya kesana untuk mendampingi, memberikan materi dan membaiat. Pada saat acara, saya melihat beberapa panitia dan peserta menggunakan kaos PKL. Kebetulan ketika bincang-bincang santai sambil menunggu ishoma, saya sempat berdiskusi ringan dengan pembuat kaos. Disainer sekaligus *owner* cetak kaos. Sahabat Epul. Alhamdulillah, sudah cukup banyak kader PMII yang berwirausaha, dan kaos itupun bagian dari CSR usahanya. Gratis. Diskusi saya mungkin bagi kebanyakan kader menjadi hal yang norak. Lebay. Tapi menurut saya ini penting

untuk saya elaborasi sedikit. Ya, kami mendiskusikan kutipan kata dibelakang kaos PKL itu. “Didiklah rakyat dengan organisasi dan didiklah penguasa dengan perlawanan”, Pramoedya Ananta Toer.

Buat kebanyakan orang, yang suka membaca roman dan novel Pram, tentu akan sangat senang. Tidak hanya cerita yang disampaikan, tetapi juga kritik social yang sangat egelan beliau sampaikan. Satir. Tidak sedikit orang yang mengaguminya. Tetapi, dalam konteks kaderisasi formal PMII, apakah kita sudah kehabisan tokoh internal yang lebih progressif untuk kita kutip kata-katanya? Ada Mahbub Junaidi, ketua umum pertama PB PMII. Ada M. Zamroni, ketua umum kedua, yang pada masanya cukup fenomenal mewarnai hiruk pikuk dinamika nasional dengan bendera PMII, baik dengan pergulatan wacana maupun pergerakan mahasiswa. Untuk memastikan hal ini tentu akan banyak ulasan dan alasan. Tapikan,,, tapikan… Bisa jadi karena kita tidak tahu dan kurang mengenal beliau-beliau.

Bisa jadi, dalam berproses di PMII ini kita mengalami masa-masa “mati obor” (Istilah orang betawi buat orang yang kagak kenal sodaranya, kagak ngerti silsilah ame kagak kenal sejarah dan budaya aslinye). Sahabat Mahbub Junaidi dengan tegas mengatakan bahwa, “Setolol-tololnya orang adalah yang tak tahu apa itu sejarah, dan sehina-hinanya orang ialah yang memalsukan sejarah”. Saya pun menjadi bagian dari itu semua, “kader mati obor”. Baru mencoba memahami NU ketika menjadi PB PMII, jangan juga disalahkan. Karena memang kaderisasi kita selama ini mendoktrin PMII independen dari NU. Sekalipun dalam dinamika perjalanan sejarah PMII, ketika Sahabat Ali Maskur Musa menjadi Ketua Umum PB PMII di hasilkan Penegasan hubungan interdependensi PMII – NU, bukan lagi independensi.

Bisa jadi, faktor “mati obor” ini juga terkait dengan ketersediaan buku-buku bacaan atau tulisan yang sulit diakses kader PMII tentang tokoh-tokoh PMII dan tokoh-tokoh NU. Atau juga karena kemalasan kita mencari referensi tersebut dan membacanya. Terlebih lagi, ada upaya terstruktur, sistemik dan massif dari orde baru sejak 1966 melakukan de-NU-isasi, bahkan kita juga tidak sadar bagaimana gerakan infiltrasi merasuk ketubuh kita yang menjauhkan kita dari tradisi organisasi.

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Singkatnya, melalui tulisan ini saya berharap kedepan tidak ada lagi kutipan-kutipan kata di atribut PMII dengan mengutip tokoh di luar PMII dan NU, sehebat apapun dia. Kalau bukan kita yang mau membanggakan organisasi ini, dengan membesarkan tokoh-tokoh kita, siapa lagi? Kalau bukan beliau-beliau, tokoh kunci dari kalangan internal kita yang kita pelajari, kita pahami, kita gemari, siapa lagi?! Kenapa tidak sekalian kita kutip pernyataannya Sahabat, Tabi’in, Tabi’in tabi’in, Imam ahlussunnah wal jamaah, para wali, ulama dan kyai NU. Dalam hal pribadi, memiliki kegemaran atau mengagumi tokoh dunia siapapun dia, tidak ada masalah. Karena dalam konteks ini, ini terkait dengan kaderisasi.

F. Screening Pemahaman Keorganisasian

Pada tahap ini, tim instruktur yang terdiri dari PB dan PKC (khususnya bidang kaderisasi) melakukan Screening pemahaman keorganisasian calon peserta satu persatu, menguji makalah dan wawancara, test lisan tentang materi kaderisasi yang pernah diikuti dalam setiap level, test hafalan Mars PMII dan test hafalan Tujuan PMII. Test pemahaman terkait dengan Kemahasiswaan, Keislaman dan Keindonesiaan dan terakhir, wawancara terkait Motivasi calon peserta mengikuti PKD/PKL. Jika dinyatakan lulus pada tahap ini, maka calon peserta pelatihan kader dapat mengikuti Pelatihan Kader. Tetapi jika tidak, dapat mengulang pada pelatihan selanjutnya.

Bagaimana teknisnya? Tim instruktur PB dan PKC membentuk 3 – 5 tim screening (disesuaikan dengan jumlah peserta yang mendaftar dan ketersediaan waktu), memanggil peserta satu persatu dari tiap tim itu. Sehingga tidak memakan waktu yang lama. Pada tahap ini, peserta diminta untuk presentasi makalah yang sudah dibuatnya. Tidak hanya itu, test pemahaman keorganisasian juga dilakukan. Menyangkut hafalan mars PMII, Tujuan PMII sesuai dengan kalimat di Pasal 4 Anggaran Dasar, kemampuan membaca al-quran dan hafalan surat al-quran, kemampuan memimpin tahlil, dst.

Menggali informasi terkait dengan kapan terakhir mengawal proses kaderisasi di bawah juga penting, selanjutnya memetakan pemahaman materi kaderisasi calon peserta, misal pada kaderisasi terakhir yang di kawal, mereka memberikan materi apa? Atau menjadi moderator materi apa? Bagaimana pemahamannya terkait dengna materi tersebut bisa dinilai dan secara keseluruhan, keunggulan masing-masing pemahaman keorganisasian peserta bisa dipetakan. Pemetaan ini dapat menjadi database untuk melakukan follow up menjalankan kaderisasi non formal setelahnya. Point penting dari proses ini adalah, memastikan bahwa semua tahapan yang berlangsung dalam proses kaderisasi tidak hanya untuk tahapan itu semata, tetapi menjadi basis informasi bagi pelatihan selanjutnya.

InsyaAllah, dengan kebijakan ini tidak akan ada lagi cerita seperti yang saya paparkan di atas, peserta PKL tidak hafal mars PMII, tidak paham tujuan PMII. Tidak ada!!! Tidak boleh ada lagi! Yang ada adalah kader-kader militan dan progresif. Di PKD, PKL, apalagi di PKN!!!

5. MENGATUR PELAKSANAAN KADERISASI

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Selama ini, dalam mengawal PKL yang akan dilaksanakan oleh PKC dan PC, kami tim kaderisasi selalu meng-update perkembangan persiapan pelaksanaan. Kira-kira arahan dari PB untuk pelaksana PKL adalah memastikan pelaksanaan PKL berjalan sesuai dengan skema kaderisasi yang sudah di bangun.

Diawal telah saya jelaskan bahwa sistem kaderisasi yang kita terapkan merujuk pada buku kaderisasi nasional 2014, tentunya dengan beberapa perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perspektif PB hari ini. Bisa jadi benar, bisa jadi pula salah perspektif yang kami gunakan untuk merevisi beberapa poin dari panduan kaderisasi sebelumnya. Tentu, ini (kembali saya ungkap) menjadi bagian dari dialektika kami, jika nanti PB selanjutnya merasa perlu ada perbaikan dan revisi, pun tidak menjadi masalah. Di buku ini, setidaknya saya akan berupaya menjelaskan kenapa dan bagaimana perubahan-perubahan itu dilakukan. Terjadi sedikit perubahan pada kurikulum di Mapaba, PKD dan PKL. Lebih detailnya, nanti akan saya elaborasi lebih dalam di poin selanjutnya.

Di buku kaderisasi 2014, sudah disinggung metode pelaksanaan kaderisasi formal, yaitu dengan menegaskan pembagian waktu. Waktu pemberian materi, pada sessi pagi hari dalam agenda kaderisasi dimulai jam 08.00 pagi dan selesai paling lambat pada 22.30, selanjutnya istirahat dan bangun di sepertiga malam, paling lambat 03.30 untuk mujahadah (disesuaikan dengan waktu sholat subuh), lalu tahajud dan dzikir hingga subuh berjamaah. Pada pukul 06.00-07.00 olahraga, beres-beres, sarapan, sholat dhuha dan persiapan materi pukul 08.00, begitu seterusnya.

Jadi, dengan skema yang ada, kami menegaskan agar tidak hanya pemateri yang harus di pastikan dapat berpartisipasi dalam suksesi kegiatan (mengatur waktu), tetapi juga ustadz (instruktur mujahadah) dan pelatih olahraga (instruktur olahraga). Disinilah pentingnya berbagi tugas antar panitia dan memaksimalkan tanggungjawabnya masing-masing. Selain itu, perlu dipastikan screening dilaksanakan paling lambat H-1. Jadi setelah pembukaan, sudah tidak ada lagi screening. Peserta yang berhak ikut screening pun dibatasi waktu, paling lambat H-3 sudah mengirim berkas. Dalam pelaksanaan Mapaba, PKD dan PKL juga kami arahkan agar dilaksanakan konseling untuk mensistematisir penugasan pasca pelatihan, RTL bersama, dan Pembaiatan.

A. MENSISTEMATISIR POLA KADERISASI

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Perlu saya tegaskan sekali lagi, bahwa bangunan sistem kaderisasi oleh PB PMII periode 2014-2016 ini bukan lah sebuah inovasi. Hanya mensistematisir pola yang ada dalam buku kaderisasi 2014 kedalam legalitas Tap Pleno. Dalam hal ini, penting saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Sahabat Dwi Winarno yang sudah menyusun dengan baik pedoman kaderisasi 2014. Alhamdulillah kebijakan ini dapat disepakati sahabat-sahabat semua dalam forum Muspimnas sehingga aturan-aturan legal kaderisasi kita menjadi solid. Tap Pleno Menjadi Peraturan Organisasi (PO). InsyaAllah dengan peraturan ini kaderisasi kita akan semakin baik.

Dengan paparan *time schedule* kaderisasi di atas, kami coba memastikan bahwa skema pelatihan kader kita hari ini, berjalan dengan penerapan metodologi kaderisasi yang menekankan pada “tri tunggal penempaan”. Yaitu, Penempaan Spiritualitas, Olah Batin – memperkuat spiritualitas dengan penempaan rohani di sepertiga malam (mujahadah yang di lanjut dengan shalat subuh berjamaah), Penempaan Intelektualitas, Olah Pikir – memperkuat intelektualitas dengan ceramah dan diskusi (materi-materi wajib dan pilihan), dan penempaan fisik, Olahraga – menyehatkan jasmani dengan penempaan fisik (olahraga tiap pagi sebelum sarapan).
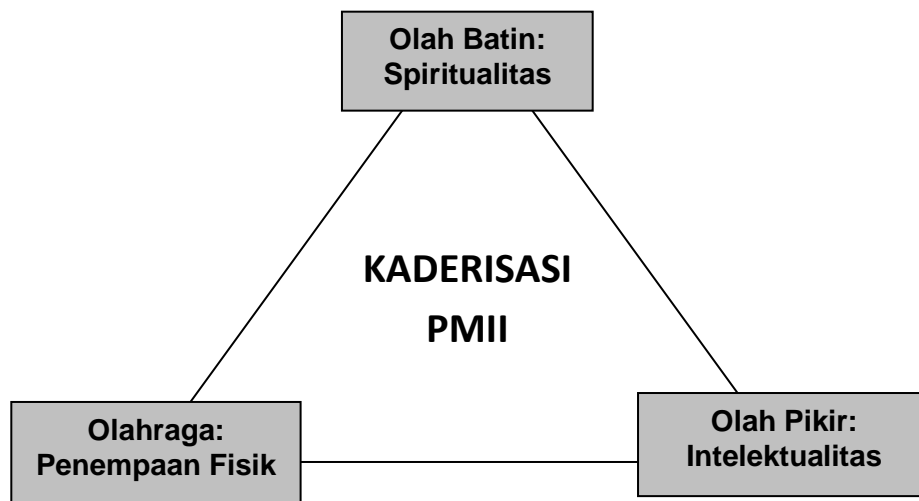
skema pelatihan kader PMII

5) **Pembatasan Cakupan Wilayah dan Pembatasan Pelaksanaan PKD dan PKL**

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Selain mensistematisir pola kaderisasi menjadi “aturan” yang mengikat, PB juga membuat Peraturan (Tap Pleno PB PMII) terkait dengan cakupan wilayah pelaksanaan kaderisasi. Pelaksanaan kaderisasi (termasuk pelantikan) hanya boleh dilaksanakan di tiga tempat, yaitu Kampus, Pesantren dan Kantor NU juga Masjid (alternatif terakhir). Sebelum saya lanjut bicara kaderisasi, saya ingin sedikit bercerita tentang konsistensi kami mengawal pelantikan di tiga tempat tersebut. Pada awal Februari 2015 lalu, PKC Sumut melaksanakan PKL + Konsolnas PB PMII, di waktu yang beriringan, salah satu PC di Aceh ingin melaksanakan pelantikan. Ketua Umum PB ada di Sumut, dan siap untuk melantik. Dalam perjalanan dari Medan menuju Aceh, ada panitia yang menelpon, menanyakan posisi. Lalu ditanya balik, dimana tempat pelantikannya. Baru dikabari kalau agenda pelantikan PC tersebut di Aula Walikota. Akhirnya, Ketum balik arah untuk mengawal PKL, dan yang melantik adalah pengurus yang lain.

Tidak hanya itu, pada akhir tahun 2015 yang lalu juga, ada agenda pelantikan di salah satu PC di Jawa Timur dan sudah teragendakan, Sahabat Sekjen yang akan melantik. Ketika itu, Sahabat Sekjen sudah dalam perjalanan dari Surabaya - menuju tempat pelantikan, dalam perjalanan pun baru dikabari kalau pelantikannya dilaksanakan di salah satu hotel, mendapati informasi tersebut, lalu sahabat Sekjen pun putar balik. Akhirnya prosesi pelantikan dilaksanakan oleh PKC Jawa Timur.

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Saya yakin sahabat PC di sana kecewa, pasti! Sudah banyak persiapan dilakukan, sudah banyak senior dan tamu yang hadir, tetapi yang ditunggu dan diharapkan untuk melantik tidak jadi hadir (padahal sudah fix teragendakan untuk melantik). Mohon maaf. Setelah sahabat membaca tulisan ini, saya berharap sahabat bisa mengerti. Karena kami ingin konsisten mengawal dan melaksanakan kebijakan yang telah kami buat. Sekali lagi, kami mohon maaf.

Melalui tulisan ini, kembali saya ingin mengajak sahabat-sahabat, mari kita kuatkan eksistensi kita di kampus, di pesantren, di kantor NU dan di masjid. Karena di situlah ruang pertarungan kaderisasi kita, menguasai kampus, bersinergi dengan pesantren, para ulama dan pengurus NU, juga memakmurkan masjid dengan amaliyah ahlussunnah wal jamaah. Jangan tinggalkan itu semua. Ingat! Dalam logika bertarung dan berkompetisi, hanya pecundang yang meninggalkan ruang pertarungan. Hari ini kita sadari, ketika eksistensi kita melemah di ruang pertarungan itu, ada kelompok lain yang muncul, mengambil alih dan membangun eksistensi. Sistematis, terstruktur, dan massif.

Apa yang mungkin dan pasti akan terjadi jika kita meninggalkan ruang aktualisasi, ruang pertarungan dan ruang kompetisi tersebut? Berdasarkan Refleksi kami sejak dulu banyak sekali agenda pelantikan PC, terutama PKC, selalu menjauh dari tempat-tempat yang saya sebut di atas. Seolah menjadi PC/PKC yang hebat, yang keren, yang elegan, kalau pelantikannya di Hotel, di caffe, di kantor walikota, di kantor gubernur, di kantor DPRD, dst. Pengukuhan PB PMII periode 2014-2016 kami laksanakan di Perpusnas, Salemba. Alternatif terakhir setelah ada kendala teknis untuk menggunakan aula UI - Salemba dan Aula UNJ - Rawamangun. Lalu disambung agenda orientasi di PBNU. Kenapa pengukuhan tidak di PBNU? Karena secara teknis ruangan di PBNU tidak bisa menampung para undangan (kader dan alumni) yang sangat antusias ingin hadir. Perpusnas kami pilih sebagai alternatif untuk tetap menjaga klaim bahwa PMII adalah organisasi kaum intelektual yang tidak bisa dipisahkan dengan bacaan dan referensi.

Kenapa kebijakan itu kami tekankan? Untuk memastikan setiap agenda PMII di kampus bisa menjadi sarana “iklan” kepada mahasiswa baru, sebagai sarana konsolidasi dan membangun citra organisasi kemahasiswaan. Juga untuk

memastikan bahwa orientasi PC dan PKC adalah membantu, menguatkan dan mendorong peningkatan kaderisasi disetiap komisariat (kampus). PMII bukan "komite" yang dinamikanya hanya berkutat di kantor DPRD, kantor Bupati/walikota/Gubernur. PMII bukan "komite" yang konsolidasinya hanya dari dinas satu ke dinas yang lain, dari SKPD satu ke SKPD lain, bukan! PMII adalah organisasi pergerakan yang dinamikanya selalu terkonsolidasi dengan agenda-agenda strategis penguatan kaderisasi dari kampus ke kampus, dari pesantren ke pesantren, dari ulama ke ulama, dan dari masjid ke masjid. Ya! Memang karena agenda strategis itulah PMII dilahirkan. Kita punya tanggung jawab sejarah untuk melahirkan kader-kader intelektual (multi disiplin ilmu pengetahuan) yang berahlaqul karimah.

Kembali pada bahasan kaderisasi. Jika tidak mungkin kita bisa melaksanakan PKD/PKL di kampus. Ya, siasati untuk buat seminar dan pembukaan PKD/PKL nya di kampus. Selanjutnya cari tempat yang representatif. Kalau bisa hindari pengunaan hotel. Kenapa? Agar kaderisasi kita efektif meningkatkan militansi kader. Selama ini kita asyik dalam ruang advokasi di luar kampus, sehingga kampus sepi dari aktifitas PMII, akhirnya kampus di kuasai kelompok lain.

Tidak mungkin juga kita bisa melaksanakan PKD/PKL di pesantren. Kenapa? Misal, sulit mendapatkan pesantren di Jakarta yang representatif untuk PKD/PKL (jika di luar Jakarta hal ini memungkinkan, laksanakan). Ya, siasati untuk buat Pengajian (istigosah, peringatan hari besar Islam) dan pembukaan PKD/PKL saja di pesantren. Selain ngalap berkah ulama, sekaligus memperkenalkan sejak dini PMII kepada para santri. Selama ini kaderisasi PMII sudah menjauh dari pesantren, sehingga banyak kyai tidak kenal PMII, akhirnya tidak terjalin silaturahim dan sinergi PMII dengan pimpinan pondok pesantren. Sehingga (mendesak) perlu dikonsolidasikan berbagai aktifitas PMII untuk kembali ke pesantren.

Lalu, tidak mungkin juga kita bisa melaksanakan PKD/PKL di kantor NU. Kenapa? Pengurus NU sudah "tidak mau di repotin" PMII, pengurus NU tidak mau kenal PMII karena selama ini PMII terlalu liberal dan "mbandel". Sulit juga mendapatkan kantor NU yang representatif untuk PKD/PKL. Ya, siasati untuk buat Pengajian (istigosah, peringatan hari besar Islam), misal: silaturahim dan konsolidasi KBNU sekaligus pembukaan PKD/PKL di kantor NU. Selama ini kaderisasi PMII sudah menjauh dari NU, sehingga banyak pengurus NU tidak kenal PMII, akhirnya tidak terjalin silaturahim dan sinergi PMII dengan pengurus NU. Sehingga (mendesak) perlu dikonsolidasikan aktifitas PMII sinergi dengan agenda strategis NU. Saya yakin pengurus NU akan tetap menerima anaknya, yang pernah "mbandel" sekalipun.

Poin ini sebenarnya untuk menjawab permasalahan yang pernah terjadi di beberapa tempat, karena dinamika "politik lokal" dan provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab, pernah ada PC PMII yang mendemo PCNU. Bahkan

merasa “hebat” ketika demontrasi dan tidak ada orang di kantor PCNU tersebut, kemudian mereka “menduduki” PCNU. Seolah seperti gerakan reformasi yang “menduduki kantor DPR RI” dan melengserkan Presiden Soeharto. Lalu melakukan konfrensi pers, dan tambah bangga namanya masuk media massa, link berita pun di share melalui berbagai jejaring media sosial. Tidak sadar, atau memang benar-benar bodoh, ketika hal itu terjadi, justru lawan-lawan politik dan lawan-lawan ideologis kita tertawa mencibir.

Jika di suatu daerah sudah tidak ada Kampus yang bisa digunakan karena dominasi kompetitor dan larangan kebijakan rektorat, tidak ada pesantren, tidak ada kantor NU, minimal menggunakan Masjid untuk pelaksanaan pelantikan dan kaderisasi. Kenapa? Banyak masjid-masjid yang di wakafkan oleh ulama NU, hari ini dikuasai oleh amaliyah wahabi. Karena banyak kader PMII, generasi ahlussunnah wal jamaah telah meninggalkan masjid. Sholat hanya di kamar kost, sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Apa bisa selenggarakan pelatihan kader di masjid? Hari ini desain masjid tidak hanya untuk sholat dan pengajian, tetapi sudah mendorong fungsi lain, tidak hanya TPA, PAUD, TK, tapi juga sudah di desain memiliki aula pertemuan, yang biasanya disewakan untuk acara resepsi pernikahan, dll. Jika PMII bisa menjalin kerjasama dengan remaja masjid setempat, apalagi menjadi pengurus masjid, tentu akan memudahkan membuat pengajian sekaligus pelantikan atau pembukaan acara kaderisasi. Kegiatan tersebut juga bisa menjadi ajang sosialisasi PMII kepada remaja masjid.

Tempat-tempat yang menjadi representasi simbol keislaman yang ada disekitar kita, harus didekati kembali. Silaturahim yang selama ini tidak terjalin, harus coba dieratkan lagi. Dalam konteks ini, dapat kita pastikan bahwa kaderisasi kita menjadi bagian dari konsolidasi elemen-elemen penyanggah kekuatan ahlussunnah wal jamaah di setiap daerah. Kami menyadari ini mungkin sulit, tetapi semangat dari kebijakan tersebut tentu sudah sahabat pahami. Intinya perlu tempat yang representatif untuk pelatihan kader, cari. Tetapi jangan lagi tinggalkan tempat-tempat tsb. Hindari pelatihan kader di hotel atau tempat-tempat yang sulit membangun militansi kader.

Selain itu, hal yang lebih mendasar dari sistem kaderisasi kita hari ini adalah pembatasan zona kaderisasi. Diatas telah saya singgung sedikit, saya akan coba paparkan lebih jauh lagi, beserta penguatan dasar pemikirannya. Kenapa?! Secara umum, pembatasan zona kaderisasi bertujuan untuk menekankan follow up (kaderisasi non formal) pasca pelaksanaan kaderisasi formal (Mapaba, PKD dan PKL).

Mapaba, hanya boleh dilaksanakan maksimal di dalam zona Cabang, di wilayah koordinasi PC, baik yang dilaksanakan oleh Rayon/Komisariat. Kecuali, Mapaba untuk membuka komisariat baru atau pendampingan komisariat persiapan yang

belum ada PC nya. Misal, tiba-tiba dibangun kampus kelautan dan perikanan di Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu, Jakarta. Lalu ada rekruitmen dan kaderisasi di sana, karena belum ada PC di Kepulauan Seribu, maka untuk pendampingan, bisa dilakukan oleh PC terdekat, yaitu PC Jakarta Utara. Jika ada upaya pembukaan komisariat baru di kampus yang ada di wilayah Jakut, bisa didorong calon anggota baru itu mengikuti Mapaba yang dilaksanakan oleh komisariat yang ada di Jakut, dan untuk pendampingan mereka membentuk komisariat persiapan hingga menjadi komisariat definitif, bisa dilakukan bersama PK terdekat dan PC Jakut.

Sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, saya ingin menyampaikan apresisasi yang luar biasa kepada Sahabat Hadi (Ketua PC Jakut) yang dengan ikhlas menerima putusan saya. Apa itu? Pada pelantikan PC Jakut di bulan Ramadhan 2015 lahun lalu, saya melantik PC Jakpus. Sahabat Hadi sudah mengikuti PKL yang diselenggarakan oleh PKC DKI, tetapi belum lulus bersertifikat. Syarat Ketua PC adalah sudah lulus PKL dan bersertifikat. Karena kebijakan ini baru kami laksanakan, kira-kira seperti ini langkah “kebijaksanaan” PB PMII. Saya lantik PC Jakut, setelah saya lantik, lalu saya panggil Sahabat Mulyadin (ketua PKC DKI) dan langsung diskusi bersama sahabat Hadi, saya katakan bahwa SK Kepengurusan di pegang PKC dan hanya bisa diambil kalau Sahabat Hadi sudah menjalankan penugasan PKL dan mendapatkan sertifikat. Dengan “penuh kepatuhan” ketika itu sahabat Hadi mengiyakan. Terimakasih sahabat!

Lanjut pada pembahasan sebelumnya, pembatasan cakupan wilayah pelaksanaan PKD dan PKL. Kita awali dengan PKD. PKD, Hanya bisa dilaksanakan maksimal di wilayah koordinasi PC, baik yang dilaksanakan oleh Komisariat/Cabang. Artinya, peserta PKD berasal dari Rayon dan Komisariat dalam satu wilayah Cabang. Tentunya, calon peserta PKD harus sudah mengikuti agenda-agenda follow up Mapaba, baik yang dilaksanakan oleh PR, PK dan PC. Untuk PKD, saya pikir clear. Sebelum masuk pada bahasan tentang PKL, saya ingini sedikit bercerita bagaimana dinamika kebijakan ini ketika kami terapkan di Jakarta, sebagai *pilot project.*

Seperti yang telah saya singgung di atas, pada januari 2015 lalu, PC Jaktim melaksanakan PKD. Sudah terbiasa, selama ini jika ada PKD di Jakarta (juga di wilayah lain), pasti ada peserta yang berasal dari utusan cabang lain. Ketika itu, banyak PK (di luar PC Jaktim) yang menghubungi panitia dan PC lain yang langsung menghubungi PC Jaktim ingin merekomendasikan anggotanya untuk mengikuti PKD. Ketika itu Sahabat Zaki (ketua PC Jaktim) menghubungi saya terkait pelaksanaan PKD tersebut, saya katakan dengan tegas, tidak boleh ada peserta PKD dari PC lain. Cukup banyak keberatan dan protes terkait dengan kebijakan kami ketika itu. Apa alasan kebijakan itu? Kenapa kaderisasi kok di batasi, harusnya kan di dorong?!

Saya ingin jelaskan alasan kami dalam tulisan ini, semoga sahabat-sahabat yang tidak pernah bertemu dan mendengar langsung dari saya dapat memahaminya. Pertama, pembatasan ini untuk memastikan semua PC di seluruh Indonesia minimal dapat melaksanakan PKD berserta *follow up* nya. Karena sudah tidak sedikit PC yang bisa melaksanakan jenjang kaderisasi PKL. Kedua, setiap alumni PKD harus mengikuti follow up dengan maksimal tanpa terbebani dengan jarak dan ongkos. Ketiga, untuk menutup ruang "infiltrasi". Kalau cakupan wilayahnya dibatasi, pasti masing-masing pengurus dan panitia dapat mengenali setiap peserta. Siapa dan dari utusan mana. Hal ini juga bagian teknis dari turunan sistem kaderisasi tertutup yang kami terapkan dalam sistem kaderisasi kita. Kira-kira, alasan yang sama pun menjadi landasan kenapa PKL juga kami batasi.

Ketika banyak anggota, PK dan PC yang tidak bisa mengikuti PKD, mereka langsung menghubungi saya. Dari yang meminta penjelasan, hingga melobby. Luar biasa. Berbagai macam alasan mereka ingin mengikuti PKD, alhamdulillah kami dapat gambaran positif, antusiasme mereka tinggi. Ada dari salah satunya yang kemudian berkata, "kalau kami harus menunggu PC kami melaksanakan PKD, bisa-bisa kami gak pernah mengikuti PKD bang, PC nya aja pada gak aktif, gak jelas agenda kaderisasinya. Gimana dong?" Jawaban dari pertanyaan ini kemudian menjadi alasan yang keempat, memaksa. Ya, dengan pembatasan tersebut akan memaksa PC yang tidak aktif untuk melaksanakan PKD. PC akan dipaksa tidak hanya oleh struktur di atas (PKC dan PB), juga dipaksa oleh anggota dari bawa. Jika sudah begini, tentu kedepan tidak akan ada lagi kader yang menjadi PC kemudian tidak memiliki komitmen tinggi terhadap kaderisasi. Bukan?

Selanjutnya, pembatasan cakupan wilayah pelaksanaan PKL. Di atas telah saya singgung terkait dengan evaluasi kami terhadap pelaksanaan PKL oleh PC. Ya, tulisan ini memang akan sulit dipahami jika tidak dibaca secara menyeluruh. Karena dalam penyusunannya seiring sejalan dengan berjalannya proses dialektika kami di PB. Hasil evaluasi kami yang kemudian kami plenokan, menghasilkan aturan baru untuk PC yang ingin melaksanakan PKL. Awalnya saya tawarkan juga membuat aturan PKD yang boleh dilaksanakan oleh Komisariat, tetapi forum menyepakati hal itu di tangguhkan dulu. Bagus, tapi jangan dipaksakan sekarang.

Pleno PB yang kami laksanakan pada tanggal 28 Februari 2016, setelah kami (Saya, sahabat Ridwan – bendum, sahabat Erfan – ketua aparatur, dan sahabat Arif – wabendum) tiba di Jakarta sepulang dari Ciloto, seusai diskusi dengan "tim kaderisasi IKA PMII" menyepakati beberapa hal aturan pembatasan pelaksanaan PKL oleh PC, selain aturan yang sebelumnya sudah kita atur (PKL Hanya bisa dilaksanakan maksimal disatu wilayah koordinasi PKC, baik yang dilaksanakan oleh Cabang/Koorcab. PKL dilaksanakan oleh PKC, minimal 2 kali dalam satu periode kepengurusan – karena periode PKC adalah 2 tahun).

Tambahan aturannya adalah: Jika Cabang ingin melaksanakan PKL, maka harus memenuhi syarat sbb; pertama, sudah melaksanakan agenda-agenda *follow up* PKD, baik PKD yang dilaksanakan oleh Komisariat/Cabang (minimal pelatihan instruktur alumni PKD). Kedua, di dalam kepanitiaan PKL, minimal ada 10 alumni PKL. Ketiga, ada calon peserta PKL yang berasal dari Cabang tersebut (sudah mengikuti *follow up* PKD) minimal 10 orang kader. Itu yang terkait dengan teknis, kemudian secara institusional PC memiliki anggota minimal 300 orang dan alumni PKD minimal 75 orang dalam setiap tahunnya. Kemudian, 2 bulan sebelum pelaksanaan PKL tersebut, Cabang wajib melaporkan rencana PKL ke PB PMII dan tembusan ke PKC.

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Sudah saya singgung di atas, selama ini PKD yang dilaksanakan oleh Komisariat dan PKL yang dilaksanakan oleh Cabang kebanyakan adalah program penutup akhir kepengurusan dan parahnya, kemudian hanya menjadi acara seremonial saja. Tidak lebih. Selama ini pula, Komisariat/Cabang "memaksakan" melaksanakan PKD/PKL dengan berbagai alasan. Pertama, bahwa itu adalah amanah RTK/Konfercab dan amanah raker. Tapi PK/PC tidak melakukan upaya untuk memaksimalkan amanah tersebut, dengan melakukan *follow up* kaderisasi sebelumnya (Mapaba/PKD), hanya terfokus pada "seremoni" pelaksanaan PKD/PKL, padahal input pesertanya adalah alumni Mapaba/PKD yang sudah mengikuti *follow up*. Sayangnnya, mereka tidak pernah atau mungkin belum serius melaksanakan *follow up* dan agenda kaderisasi non formal pasca Mapaba dan PKD.

Kedua, alasan selanjutnya adalah, karena tuntutan kaderisasi dari anggota dan kader di bawah koordinasinya. Banyak anggota/kader yang ingin PKD/PKL, "katanya". Ternyata, ketika pelaksanaan, peserta dari Komisariat/Cabang ybs, tidak lebih dari 5 – 7 orang. Jadi ketentuan yang saya paparkan di atas adalah bagian dari membangun kesadaran mengawal kaderisasi tidak hanya dalam program seremonial semata. Kaderisasi di hulu nya harus juga dikondisikan dan terkondisikan dengan baik, karena ini terkait dengan input dan output – sistem.

Kenapa panitia dan peserta dari internal Komisariat/Cabang perlu diatur? Agar pelaksanaan PKD/PKL bisa mencapai output maksimal. Bagaimana mungkin bisa mengkondisikan PKD/PKL dengan maksimal, kalau penyelenggaranya saja tidak memiliki SDM sebagai alumni PKD/PKL yang bisa menopang pelaksanaan PKD/PKL tersebut. Bagaimana mungkin menjawab tuntutan kaderisasi, kalau peserta dari internal saja masih minim, bahkan tidak lulus screening. Ini masalahnya. Jadi jika PC ingin melaksanakan PKL harus melaksanakan screening peserta dari internalnya dahulu, jika sudah lulus screening minimal 10 orang, baru laporan ke PB untuk mendapatkan izin melaksanakan PKL dalam waktu paling lambat 2 bulan sebelum pelaksanaan. Dengan memberikan surat dan susunan panitia yang didalamnya

terdapat alumni PKD/PKL minimal 10 orang, juga 10 orang calon peserta dari internal cabang yang sudah lolos screening. Nanti akan ada surat balasan dari PB terkait hal itu, untuk kemudian menyesuaikan waktu pelaksanaan dengan jadwal PKL di tempat lain (di PC/PKC yang lebih awal melapor untuk melaksanakan PKL).

Sekali lagi, institusi pelaksana pelatihan kader, bertanggung jawab atas *follow up* dari pelatihan yang sudah dilakukan. Jadi, ketika kepengurusan baru terbentuk (hasil RTK/Konfercab/Konkorcab), maka harus melanjutkan follow up PKD/PKL yang telah dilaksanakan pengurus sebelumnya. Selama ini, kaderisasi kita "terputus". Tidak ada kesinambungan. Pengurus baru merasa bahwa itu bukan tanggung jawab saya, kan itu program pengurus sebelumnya. Seolah-olah, menjadi pengurus baru, semuanya berawal dari nol. Itu, dulu. Dengan sistem yang kami bangun hari ini, InsyaAllah kedepan hal seperti ini tidak ada lagi. Karena kesadaran kita mengawal kaderisasi yang substansial, akan terus terbangun dari waktu ke waktu.

6) **Konseling dan penugasan pribadi**

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Konseling dan penugasan pribadi ini terkait dengan sertifikasi. Ya, karena untuk mendapatkan sertifikat, khususnya PKD dan PKL, harus menjalankan penugasan. Penugasan peserta PKD adalah merekruit 2 calon anggota baru dan penugasan peserta PKL adalah merekruit 10 calon anggota baru, seperti yang telah saya jelaskan diawal terkait dengan Tap Pleno Sertifikasi.

Konseling ini, dapat dilaksanakan pada saat pelatihan berjalan. Baiknya menggunakan waktu Ishoma, dengan membentuk tim instruktur yang difasilitasi oleh PB/PKC/PC. Ada beberapa target konseling, diantaranya adalah, pertama, mendapatkan informasi lebih dalam dari peserta pelatihan terkait dengan kondisi riil PMII di basisnya (bagaimana kaderisasi disana, bagaimana geliat keorganisasiannya, apa yang sudah dilakukan oleh peserta di basisnya, dll). Dalam hal ini, instruktur harus mampu memotivasi semangat kader untuk melakukan pengembangan-pengembangan PMII di basisnya.

Kedua, membangun komitmen terkait penugasan (siapa, melakukan rekruitmen di mana. Dengan batas waktu maksimal paling lama 6 bulan – dengan asumsi jadwal perkuliahan, semester ganjil/genap). Jadi pasca konseling, instruktur memiliki database rekap terkait dengan penugasan pribadi peserta pelatihan. Dengan demikian, dapat melakukan pemetaan pengembangan PMII di setiap daerah. Misal, peserta pelatihan berasal dari cabang A, di sana ada 5 komisariat. Peserta ini berasal dari komisariat 1. Gali informasi, ada berapa kampus disana, ada berapa fakultas di kampusnya. Jika ada 20 kampus, berarti masih ada 15 kampus "garapan" yang belum ada PMIInya.

Jika secara keseluruhan di 5 komisariat itu ada 50 fakultas (masing-masing kampus memiliki 10 fakultas), tanyakan berapa fakultas yang belum ada PMIInya. Jika PMII hanya ada di 3 fakultas (rata-rata /komisariat, berarti baru ada 15 rayon), maka penugasan bagi peserta (yang berasal dari cabang ini) adalah melakukan rekruitmen anggota baru di 35 fakultas lain yang belum ada PMIInya, bisa dipilih satu fakultas saja atau lebih dari satu untuk penugasan tersebut.

Jika Rayon PMII sudah ada di semua fakultas, dan asal komisariat peserta tersebut memang menjadi basis PMII (seperti STAIN/IAIN/UIN/kampus agama lainnya), berarti penugasannya (untuk peserta tersebut) adalah rekruitmen calon anggota baru di luar kampus terdekat dari asal kampusnya (masih dalam satu wilayah PC atau kampus di kabupaten/kota yang terdekat yang minim PMII nya).

7) **RTL Bersama – Pengembangan PMII**

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Dengan pola pelatihan yang baik, yang mampu membangun kebersamaan antar peserta dan antar anggota kelompok, akan mendorong ikatan angkatan peserta pelatihan yang solid. Tentu RTL bersama ini menjadi pengikat antar peserta untuk sama-sama mengawal kaderisasi dengan penugasan yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. RTL ini penting untuk di fasillitasi oleh SC pelaksana, dikawal oleh struktur di atasnya, yang nantinya akan mendorong keberlanjutan langkah-langkah strategis kaderisasi di wilayahnya pasca pelatihan. Bisa juga dipilih ketua angkatan yang nantinya akan menjadi koordinator pelaksanaan RTL bersama yang menjadi kesepakatan. Yang pasti, apapun ide yang berkembang sebagai usulan-usulan RTL bersama dari peserta, harus didorong untuk sinergi mencapai tujuan PMII.

Ide-ide kreatif menjadi sangat penting dalam RTL untuk pengembangan PMII. Akan menjadi sangat produktif jika ide-ide tersebut diarahkan pada penugasan pribadi yang dilaksanakan secara serentak dan kolektif. Misal, PC memfasilitasi alumni PKD dalam kepanitiaan kegiatan. Kegiatan apa? Disinilah kreatifitas itu dibutuhkan. Tidak melulu terkait dengan kegiatan serius, bisa saja misalnya membuat turnamen futsal. Mengundang BEM kampus ("target operasi"), dengan prasyarat tertentu untuk membatasi peserta. Jika dilaksanakan pada semester ganjil, maka peserta adalah mahasiswa semester 1, jika pada semester genap, maka peserta adalah mahasiswa semester 2 (dibuktikan dengan KRS). Pembatasan ini penting, karena pengalaman saya membuka komisariat persiapan (Univ. Paramadina, Univ. Al-Azhar dan Univ. Pancasila), diawal sangat progres, ketika masuk semester selanjutnya semua mundur tanpa berita, kenapa? karena sebagian besar dari mereka ketika itu sudah semester 7. Sudah sibuk dengan urusan skripsi dan ingin segera lulus.

Kreasi kegiatan lainnya, bisa disesuaikan (pelatihan jurnalistik, pelatihan IT, pelatihan public speaking, hikking, tour sejarah, dll). Yang pasti, harus diperhatikan

goalnya. Ingat, kegiatan tersebut bukan sekedar "*event*", tetapi "operasi" untuk konsolidasi kaderisasi dan konsolidasi organisasi.

8) **Pembaiatan**

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Pembaiatan menjadi satu bagian yang utuh dalam skema kaderisasi kita. Sehingga, peserta belum sah dan harus mengulang Mapaba, PKD atau PKL yang sudah diikuti, karena tidak mengikuti pembaiatan. Evaluasi kami terkait dengan hal ini, cukup mencengangkan. Ya, selama ini memang sudah dan selalu dipraktekan prosesi pembaiatan dalam setiap level kaderisasi. Bahkan juga dalam prosesi pelantikan di setiap level kepengurusan. Tetapi, selama ini pembaiatan itu tidak membekas pasca pelatihan/pelantikan. Semakin tinggi jenjang kaderisasi yang diikuti dan semakin tinggi jenjang struktur organisasi yang ditempuh, justru semakin jauh kita dari semangat berorganisasi yang terstruktur dan terpimpin.

Contoh paling sederhana, tidak ada kepatuhan anggota/kader terhadap kepemimpinan dan struktur kepengurusan diatasnya. Padahal, dalam naskah pembaiatan, sudah disebutkan "patuh dan ta'at kepada pimpinan organisasi, bahwa ketidak ta'atan adalah sebuah pengkhianatan kepada organisasi". Kenapa hal ini terjadi? Bisa jadi karena banyak hal ("politik lokal"), tetapi bisa juga karena dalam prosesnya, pembaiatan kita selama ini kurang khidmat. Bagaimana mendorongnya agar menjadi khidmad? PB mendorong agar dalam prosesi ini semua peserta juga panitia yang terlibat didalam pembaiat, harus dalam kondisi berwudhu. Bagaimana teknisnya?

Secara teknis, peserta berbaris seperti upacara bendera (shof barisan disesuaikan dengan jumlah peserta), ada sedikit pemisah antara barisan laki-laki dan perempuan. Barisan menghadap pembaiat, bendera merah putih dan bendera PMII. Upacara pembaiatan dibuka pembawa acara dengan membacakan Ummul kitab (Alfatiha), lalu pembacaan ayat suci alquran oleh qori/qoriah, menyanyikan Indonesia Raya, dan Mars PMII. Kemudian, sambutan oleh ketua institusi pelaksana pelatihan dan pembaiatan oleh pengurus di atas penyelenggara. Selesai pembacaan naskah baiat, peserta maju satu persatu lalu menandatangani absensi pembaiatan, memberikan hormat kepada bendera dan menciumnya, dan kembali ke barisan semula. Sebaiknya, posisi barisan kader perempuan diutamakan untuk menjalani prosesnya. Selanjutnya, membacakan doa oleh petugas doa, dan penutupan dengan membacakan Ummul kitab (Alfatiha). Kira-kira seperti itu gambarannya, terkait dengan prosesi pembaitan.

Selama ini memang tidak ada ketetapan aturan yang mengatur secara detail bagaimana prosesi pembaiatan dilaksanakan, sehingga dalam pelaksanaannya, kita

menemui beraneka ragam prosesi pelaksanaannya. Jika aturan itu dirasakan penting, nanti kita atur. Atau biar PB periode selanjutnya saja yang mengatur. Biar tidak di habiskan semua urusan oleh PB hari ini. Bagaimana?

Sebelum masuk pada pembahasan selanjutnya, saya ingin sedikit bercerita. Satu waktu, di minggu kedua februari 2016, karena ada sedikit urusan dengan senior di PBNU, tidak sengaja saya masuk dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh suriah dan tanfidziah. Ketika itu dibahas tentang program kartanu yang kemudian menyinggung potensi ekonomi warga NU dengan kartanu. Ada 90 juta lebih warga NU. Dalam presentasinya ketika itu, menurut sekjen PBNU, dengan kerjasama yang sudah dijalin bersama *stakeholders finance,* membeli pulsa dengan kartanu, warga NU (jamaah) mendapat subsidi harga seribu hingga dua ribu rupiah dan PBNU (jamiyyah) mendapat selisih harga, sebagai “agen”. Misal, harga pulsa 100 ribu, jika dipasaran adalah 101 ribu atau 102 ribu, maka dengan kartanu kita bisa membelinya dengan harga 99 ribu. Padahal, PBNU mendapatkan harga 98 ribu dari provider. Artinya, dalam satu transaksi pulsa saja dengan kartanu, maka PBNU mendapatkan keuntungan seribu rupiah. Dari 90 juta warga NU, jika dalam sehari saja terjadi transaksi pulsa oleh 10 juta orang, maka 10 juta x seribu = Rp. 10.000.000.000,- potensi keuangan yang masuk kas PBNU.

Tentu ini adalah inovasi dan ikhtiar PBNU yang harus diapresiasi. Kartanu tidak hanya menjadi ID Card yang selama ini dikonsolidasikan, tetapi juga memiliki potensi untuk menggerakan ekonomi umat dan fundraising organisasi.

Lalu apa kaitannya dengan pembaiatan? Ini hal yang menarik dan ingin saya ceritakan pada bagian pembahasan ini. Setelah presentasi usai, ada tanggapan dari KH. Masdar Mas’udi yang membuat saya dan mungkin juga banyak orang tersentak. Kira-kira begini tanggapannya, beberapa waktu terakhir muncul fenomena ISIS di timur tengah yang jauh sebelumnya juga tidak sedikit jaringan teroris yang bergerak dengan mengatasnamakan islam. Mereka adalah ancaman bagi dunia dan islam. Mereka bergerak secara ideologis, militan. Tidak hanya berani berkorban harta, bahkan nyawa. Mengapa? Karena mereka sudah dibaiat, bersumpah. Mungkinkah potensi warga NU yang 90an juta itu bisa dikonsolidasikan dengan pembaiatan yang kemudian mereka sadar ber-NU? Tidak hanya kita “anggap” mereka NU karena menjalankan ibadah dengan amaliyah ahlussunnah wal jamaah (tahlil, kunut, ziarah kubur, dll), sedangkan mereka sama sekali tidak mengenal NU secara jamiyyah. Tentu jika hal itu bisa terjadi, akan menjadi potensi yang sangat luarbiasa. Mungkihkah? Wallahu ‘alam...

Lampiran...

PEDOMAN PEMBAIATAN MAPABA/PKD/PKL

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Apakah Sahabat-sahabat sudah bersuci?
Hadloroh pada Para Nabi, Shahabat, Para Wali, Pendiri NU, Pendiri PMII
Membaca Al-Fatihah 1 kali
Apakah Sahabat-sahabat Siap dibaiat?
Ikuti bacaan berikut ini. Diucapkan dengan lisan diyakini dalam hati

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله
رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا
وَبِالإِسْلاَمِ دِيْنًا
وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُوْلاً
wabil qur'aani imaama

Demi Allah sebagai Anggota Mu'takid/KaderMujahid/MujtahidPMII saya berikrar! Bahwa saya:

1. Menyerahkan diri menjadi Anggota Mu'takid/KaderMujahid/Kader Mujtahid Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
2. Sebagai Anggota Mu'takid/KaderMujahid/Kader Mujtahid Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlussunah wal Jama'ah, Nilai Dasar Pergerakan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Nilai-nilai, Norma-norma, dan produk hukum PMII lainnya, serta cinta tanah air dan bangsa
3. Sebagai Anggota Mu'takid/KaderMujahid/Kader Mujtahid Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewajiban organisasi pantang berputus asa, pantang menyerah, dan pantang meninggalkan PMII dalam situasi dan kondisi apapun
4. Sebagai Anggota Mu'takid/KaderMujahid/Kader Mujtahid Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa patuh dan taat kepada pimpinan organisasi; bahwa ketidaksetiaan kepada pimpinan organisasi, adalah suatu bentuk pengkhianatan kepada organisasi dan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT

Astaghfirullaah al adhiim, Astaghfirullah al adhiim, Astaghfirullaah al adhiim
Khasbunallah wa ni'mal wakiil, ni'mal maulaa wa ni'man nashiir
Laa haula walaa quwwata illa billah….

Ini sumpah siapa ? (*Sumpah Saya*)
Bagaimana kalau anda berkhianat? (*Allah akan menghukum saya*)

Demikian pembaiatan ini dilaksanakan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan pertolongan kepada kita semua, amien ya robbal alamien.

والله الموفق إلى أقوم الطريق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Jadi, secara umum dari pembahasan di atas, ringkasnya skema kaderisasi kita, seperti yang tergambar dengan skema di bawah ini.
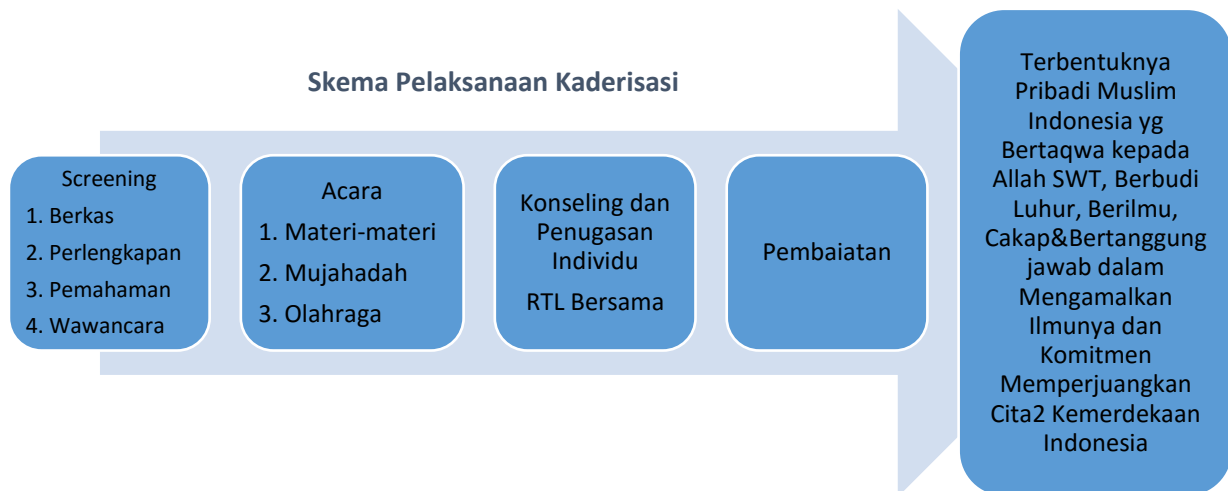
B. MEMBAKUKAN MATERI KADERISASI

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Di atas telah saya singgung sedikit, bahwa selama ini telah terjadi *"gap"* pemahaman materi antara alumni dalam pelatihan kader yang dilaksanakan di Jawa dan luar jawa, di "cabang besar" dan "cabang kecil". Kenapa? Banyak hal kenapa ini bisa terjadi. Pertama karena akses mengundang pemateri di Jawa lebih mudah, biasanya banyak pakar tinggal di Jawa, sekalipun kampung halamannya ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, atau Papua. Kualitas pemateri. Kedua, karena "insiden". Banyak pemateri di daerah yang memiliki kompetensi, sudah fix untuk memberikan materi, tiba saatnya tidak bisa hadir karena ada urusan lain. Minim pemateri alternatif. Ketiga, pemaparan materi tidak sesuai dengan TOR yang diberikan. Terkadang pemateri tidak sempat membuat makalah/power poin. Bahkan tidak menguasai materi. Tetapi tetap hadir, targetnya untuk sosialisasi atau sekedar silaturahim. Disinilah butuh kejelian pelaksana untuk memfilter kualitas pemateri.

Hari ini, PB masih terus berikhtiar membuat powerpoint baku dan narasi tunggal, atas materi-materi wajib Mapaba, PKD dan PKL. Yang bisa mengakses materi itu adalah instruktur disetiap level yang lulus dalam pelatihan instruktur. Kedepan, siapapun pematerinya, jika memberikan materi dan tidak sesuai dengan TOR, maka instruktur dengan powerpoint yang ada dapat meluruskan maksud materi itu kepada kader. InsyaAllah dengan perangkat ini, akan meminimalisir terjadinya *gap* pemahaman antar kader terhadap materi yang diberikan pada saat pelatihan kader. Powerpoint itu menjadi *guide*, jika dirasakan perlu ada tambahan materi/contoh, dan itu menjadi sangat relevan, ditambah pun tidak apa.

C. MEMBANGUN KEMANDIRIAN

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Selama ini kita sadar, bahwa sumber keuangan organisasi kita yang paling utama dalam ADRT adalah iuran anggota, tetapi sangat jarang sekali pengurus "kolekan" untuk urusan organisasi, terkait dengan bayar kontrakan sekretariat, beli pulsa listrik, untuk kegiatan, dst. Tetapi alhamdulillah rezeki untuk organisasi selalu ada jalan, mungkin ini adalah bagian dari berkah PMII yang direstui oleh alim ulama sejak dulu.

Terlepas dari dinamika tersebut, saya selalu menegaskan kepada pengurus yang mau melaksanakan pelatihan kader, dalam konteks kaderisasi, wajibkan peserta bayar. Sekalipun untuk level Mapaba. Minimal besarannya adalah seharga biaya makan selama pelatihan dan hal-hal yang terkait. Jika pelatihannya 3 hari, makan 3x sehari berarti ada 9x makan. Jika tiap makan 10 ribu, maka untuk biaya makan 90 ribu, ditambah snack berapa, ditambah kaos berapa, dst. Hal ini penting untuk menyokong penguatan militansi kader. Karena target kita adalah mengkader, bukan sekedar buat pelatihan yang ada pesertanya. Jelas kan?!

Mapaba, PKD, PKL dan PKN harus bayar. Coba sahabat cek, jika di Rayon/Komisariat sahabat melakukan proses kaderisasi, anggota/kader yang ketika berproses membayar infak kaderisasi dengan yang tidak, pasti akan berbeda polanya secara pribadi-pribadi dalam berproses di PMII. Berbeda *sense of belonging* dan semangat militansinya.

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Saya ingin sedikit memberikan gambaran stigma yang melekat dan realitas Pengurus Besar (curcol – curhat colongan). Stigma yang melekat selama ini oleh anggota, kader, pengurus di daerah, PB itu seolah-olah. Wahhh!!! Jika ada kader dari daerah menjadi PB, bayangannya kader tersebut menjadi orang hebat, dekat dengan pusat kekuasaan, punya jaringan nasional yang luar biasa, dan ketika turun ke daerah, pasti bawa "oleh-oleh", jika bukan program, minimal traktir jajan. Itu stigma yang melekat selama ini. Sayangnya tidak banyak kader yang berharap mendapatkan ilmu dari pengurus besar yang menyambanginya.

Realitasnya, pun yang terjadi selama ini. Bahwa PB itu bukan apa-apa bagi kader sebagai Pengurus Besar yang tidak mengerti posisinya, bagi Pengurus Besar yang tidak memiliki ide dan gagasan serta militansi untuk berbuat dan merealisasikan prokernya secara maksimal. PB bukan apa-apa. Sehingga, tidak sedikit selama ini kader yang menjadi PB bukan mengurus organisasi, justru menjadi "urusan" organisasi. Lebih parah lagi, tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di Jakarta (*survival*). Akhirnya, banyak PB yang usai pelantikan kembali lagi ke daerahnya. Karena tidak bisa *survive*. Semoga hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Disinilah pentingnya senior memfasilitasi kader yang mau berproses, berkhidmat sebagai Pengurus Besar. Bagaimana caranya? Tentu itu adalah ranah senior, saya tidak punya kompetensi untuk mengarahkan. Apalagi menuntut. Bukan?

Saya ingin sedikit memberikan gambaran ini kepada sahabat-sahabat di daerah, bukan untuk menakut-nakuti agar tidak menjadi Pengurus Besar, tetapi hanya ingin mengingatkan, kurangi sedikit ekspektasi sahabat ketika ada Pengurus Besar yang datang dan mendampingi kaderisasi. Terutama dalam konteks materi, tetapi dalam konteks ilmu harus tinggi ekspektasi sahabat-sahabat kepada Pengurus Besar. Insyaallah tim kaderisasi nasional PB PMII memiliki stok pengetahuan yang lumayan banyak untuk diserap. Minimal, jangan berharap di traktir. Kecuali yang datang adalah Ketua Umum. Hehee.. Kenapa? Kebanyakan dari kami, ketika turun kebawah dan melakukan pendampingan kaderisasi hanya mengandalkan tiket PP dari PB, selebihnya ongkos sendiri. Jadi, tolong jangan ada lagi tuntutan agar PB datang langsung ke lokasi acara, minimal ketika sahabat-sahabat sudah membaca tulisan ini, sebisa mungkin ada panitia yang menjemput, sesuai kedatangan dengan tiket keberangkatan (bandara/stasiun/terminal).

Artinya, Pengurus Besar jangan lagi “dipalak” untuk “urusan” kaderisasi yang belum selesai. Pastikan kebutuhan logistik kaderisasi bisa di tanggulangi dengan kontribusi peserta. Permohonan ini khusus dari saya, untuk PB hari ini, semoga permohonan ini juga bisa bermanfaat untuk Pengurus Besar selanjutnya. Tetapi, jika ada pemateri dari senior daerah yang sudah memiliki posisi dan jabatan tertentu, tentu itu bagian dari zakat organisasi yang boleh untuk ditagih. Ya. jika mau jujur, beliau-beliau bisa mencapai posisi dan karirnya hari ini, karena dulu pernah belajar dan berproses di PMII. Kita harus membantu beliau untuk membersihkan hartanya. Iya gak??? Iya kan?I Iya dong...

Kembali ke tema. Masalah kemandirian memang menjadi permasalahan yang harus segera kita atasi bersama. Ada beberapa jalur untuk mendorong hal ini, pertama melalui konsolidasi fundraising anggota dan kader (baik melalui iuran anggota, patungan untuk kebutuhan kegiatan, dll). Kedua, melalui konsolidasi fundraising alumni. Hari ini kita diuntungkan dengan maraknya semangat para alumni untuk memperkuat barisan melalui IKA PMII, tentu sinergi harus didorong untuk bisa meraih capaian target maksimal dari setiap agenda kader dan alumni. Ketiga, memanfaatkan potensi ekonomi politik lokal dengan mendorong gerakan *enterprenuer* dan nalar politik kader. Untuk yang ketiga ini, alumni/senior yang memiliki potensi wajib mementoring dan mensinergikan gerakan kultural dengan struktur, jika tidak akan berpotensi terjadi gesekan. Potensi APBD lokal silahkan diakses, tetapi pastikan hal itu bukan yang utama. Jangan bergantung, nanti bisa candu. Ketergantungan. Jika sudah diakses, pastikan sahabat membuat laporan yang baik dan sesuai dengan aturan, jangan sampai hal itu malah merusak nama baik PMII.

D. SERTIFIKASI

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Di atas telah panjang lebar saya paparkan terkait dengan sertifikasi. Selain untuk meningkatkan kualitas kader, juga untuk mensinergikan output alumni kaderisasi formal dengan penguatan basis di kampus-kampus, fakultas-fakultas dan jurusan-jurusan yang minim PMII nya. Tidak hanya itu, sistem sertifikasi juga kami buat untuk menjawab permasalahan minimnya instruktur pelatihan kader. Jadi, secara umum dari pembahasan di atas, ringkasnya skema sertifikasi kaderisasi kita, seperti yang tergambar dengan bagan di bawah ini.

6. MENGATUR FOLLOW UP KADERISASI FORMAL

Kita insaf dan sadar, bahwa PMII adalah organisasi kader, kita semua sepakat! Selama ini kita mengenal sistem kaderisasi yang terbagi dalam tiga pola, yaitu kaderisasi formal, kaderisasi non formal dan kaderisasi informal. Selama saya ber-PMII, ketiga pola itu tidak terlaksana secara sistematis dalam sistem kaderisasi yang komprehensif integral. Selama ini, semua pelaksanaan dari pola kaderisasi tersebut dijalankan oleh pelaksana (baik Rayon, Komisariat, Cabang, Koordinator Cabang bahkan Pengurus Besar) dengan menggunakan "kearifan local" dan "berbasis kreatifitas", bahkan dengan tafsirnya masing-masing.

Berbasis kearifan lokal yang saya maksud adalah, kebiasaan yang sudah berjalan dari masa ke masa. Biasanya cara ini sudah berjalan efektif di beberapa cabang yang massif kaderisasinya, terutama di cabang-cabang besar. Sedangkan berbasis kreatifitas yang saya maksud adalah, terpusat pada kreatifitas dan kinerja, ketua dan kepengurusan. Sehingga tidak jarang kita temui cerita tentang masa lalu dengan kalimat, "waktu saya jadi ketua/pengurus komisariat", "waktu saya jadi ketua/pengurus cabang", "waktu saya jadi ketua/pengurus korcab", bahkan "waktu saya jadi ketua/pengurus besar". Berbasis tafsir, ada Rayon yang selama ini meyakini tafsir kaderisasi bahwa Mapaba yang penting adalah memperkenalkan PMII dan tidak perlu ada pembaiatan.

Artinya, selama ini ketiga pola itu (kaderisasi formal, kaderisasi non formal dan kaderisasi informal) belum tersistematisir dengan aturan yang bisa menjadi rujukan bersama. Belum ada pemahaman bersama. Yang sudah diatur saja dengan legitimasi PO dan Tap

Pleno PB PMII masih belum dimaksimalkan, bahkan masih "digugat". Apalagi yang cuma sekedar anjuran. Bukan? Tidak memiliki standar yang baku, sekalipun sudah dibuatkan panduannya (lihat buku kaderisasi nasional hal 85-98). Ya, memang di buku itu masih sangat umum, misalnya dalam pelaksanaan agenda kaderisasi formal, harus dilakukan agenda pra mapaba, pra PKD dan pra PKL, juga follow up nya masing-masing tingkatan (non formal).

Tantu dalam rangka perbaikan sistem kaderisasi kita, hal tersebut menginsprasi kami (PB PMII) untuk membuat kebijakan yang mengatur semua itu. Tap Pleno yang kami tetapkan mengatur lebih spesifik, apa saja yang harus dilakukan untuk follow up kadersiasi formal oleh PR/PK/PC/PKC dalam setiap jenjang kaderisasi yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Ya, follow up nya, sesudahnya. Bagaimana agenda sebelumnya (pra)? Sejauh ini kami berpendapat bahwa hal itu sudah bisa dilakukan secara mandiri sesuai dengan kondisi di kampus masing-masing (Mapaba). Karena untuk PKD dan PKL, tentu agenda follow up Mapaba dan PKD dengan sendirinya menjadi bagian dari pola kaderisasi pra PKD dan pra PKL. Tersistematisir! Bukan?!

Dengan pola kaderisasi yang tersistematisir seperti ini, maka pelaksanaan agenda kaderisasi tidak asal terlaksana. Bahkan bisa menjadi standar capaian kinerja kaderisasi pada setiap masa khidmad periode kepengurusan disetiap level, bahkan bisa menjadi tolak ukur untuk menerima atau menolak LPJ secara rasional dan terukur. Karena selama ini kita berada pada ruang emosional yang mengesampingkan rasionalitas – "*politicking virus*". Ya, tidak jarang LPJ sahabat-sahabat di PR/PK/PC/PKC bahkan PB diterima atau di tolak hanya karena pendekatan emosional dan *deal*. Sebaik apapun kinerja kepengurusan, jika tidak memiliki kedekatan emosional dan tidak terjadi deal, tolak. Begitu juga sebaliknya. Sangat disayangkan sekali, semoga hal itu tidak lagi terjadi dimasa depan.

Terkait dengan hal itu, maka PB membuatkan system yang sudah panjang lebar saya jelaskan dan dapat dipahami dengan ringkas pada bagan dan gambar skema kaderisasi di atas. Terkait dengan agenda follow up, kami membuatkan menu kaderisasi non formal pasca kaderisasi formal yang harus dijalankan dan menjadi prioritas. Jika ada inovasi lain, silahkan laksanakan. Tetapi prioritaskan yang sudah menjadi ketetapan PO kita. Lalu seperti apa sistem yang harus dijalankan oleh siapapun dan kapanpun kader PMII yang menjadi ketua/pengurus PMII diberbagai level? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian penting untuk dijawab dengan skema sistem kaderisasi terprogram. Tawaran kongkrit PB PMII terkait dengan agenda follow up tiap jenjang kaderisasi adalah sebagai berikut (tawaran ini sudah menjadi PO yang ditetapkan di Muspimnas Ambon):

Kaderisasi Non Formal Pasca Mapaba

No	Kegiatan	Bentuk Pelaksanaan	Pelaksana
1	Kursus Agama I	Minimal Pertemuan 1x Seminggu	PR/PK (Wajib)
2	Kursus Bahasa Inggris	Minimal Pertemuan 1x Seminggu	PR/PK

3	Pelatihan Manajemen Organisasi dan Kepemimpinan	Pelatihan 1 Kali	PR/PK
4	Kursus Penulisan	Dilaksanakan dalam 2x Pertemuan	PR/PK
5	Kursus Teknologi Informasi	Dilaksanakan dalam 4x Pertemuan	PR/PK
6	Sekolah Islam dan Gender	Pelatihan 1 kali	PR/PK

Kaderisasi Non Formal Pasca PKD

No	Kegiatan	Bentuk Pelaksanaan	Pelaksana
1	Kursus Agama II	Pertemuan Rutin	PK (Wajib)
2	Pelatihan Manajemen Konflik dan Pemetaan Politik Kampus	Pelatihan	PK (Wajib)
3	Pelatihan Interpersonal & Relationship	Pelatihan	PK (Pilihan)/PC (Wajib)
4	Pelatihan Jurnalistik	Pelatihan	PK (Pilihan)/PC (wajib)
5	Pelatihan Community Organizer	Pelatihan	PC (Pilihan)
6	Pelatihan Bisnis Plan	Pelatihan	PK (Pilihan)/PC (Pilihan)
7	Pelatihan Monitoring Anggaran	Pelatihan	PC (Pilihan)
8	Pelatihan Keinstrukturan	Pelatihan	PC (Wajib)
9	Pelatihan Analisa Sosial, Manajemen Aksi, dan Advokasi	Pelatihan	PC (Pilihan)
10	Pelatihan Bantuan Hukum	Pelatihan	PKC (Wajib)
11	Pelatihan Management Pendidikan Dasar	Pelatihan	PC (Pilihan)/PKC (Pilihan)

Kaderisasi Non Formal Pasca PKL

No	Kegiatan	Bentuk Pelaksanaan	Pelaksana
1	Pelatihan Dakwah	Pelatihan	PKC (Wajib)
2	Pelatihan Instruktur Wilayah	Pelatihan	PKC (Wajib)
3	Sekolah Analisa Pasar Modal	Pelatihan	PKC (Wajib)
4	Sekolah Ketatanegaraan	Pelatihan	PKC (Wajib)
5	Pelatihan Legal Drafting	Pelatihan	PKC (Wajib)

Hal yang membuat saya sedikit prihatin adalah, rancangan PO terkait dengan follow up yang kami klasifikasi (wajib/pilihan) untuk dilakukan oleh PR/PK/PC/PKC, dihilangkan. Sehingga bisa saja menghilangkan "skala prioritas" follow up, semoga asumsi ini salah. Setidaknya, hari ini kita sudah memiliki PO yang mengatur skema kaderisasi yang sistemik, semoga kita dapat melakukan semua program-program kaderisasi dengan maksimal.

Dalam ketetapan PO lainnya, juga diatur tentang ruang lingkup kaderisasi, kita sudah punya aturan yang membatasi peserta untuk ikut Mapaba, PKD dan PKL sesuai dengan domisilinya. Pelaksanaan Mapaba dapat diikuti oleh calon anggota dari kampus lain di satu wilayah kerja PC, baik yang diselenggarakan oleh Rayon atau Komisariat. Pelaksanaan PKD maksimal diikuti oleh anggota di satu wilayah kerja PC, baik yang

diselenggarakan oleh Komisariat atau Cabang. Tetapi jika PK/PC sudah melaksanakan PKD 2x dalam satu periode kepengurusan, maka anggota di wilayahnya bisa mengikuti PKD diluar wilayah kerja PC yang terdekat. Begitu juga untuk PKL, Pelaksanaan PKL maksimal diikuti oleh kader di satu wilayah kerja PKC, baik yang diselenggarakan oleh PC atau PKC. Tetapi jika PC/PKC sudah melaksanakan PKL 2x dalam satu periode kepengurusan, maka kader di wilayahnya bisa mengikuti PKL diluar wilayah kerja PKC yang terdekat.

Melalui PO yang mengatur agenda follow up tersebut, kira-kira kita mau membuat "rekayasa sosial", "rekayasa intelektual", "rekayasa knowledge" kader. Apapun jurusannya di perkuliahan, jika mereka alumni PKL dan telah mengikuti follow up PKL secara utuh, maka mereka tidak hanya dapat menjadi instruktur di level PKD, juga paham bagaimana cara berdakwah, paham terkait dengan perkembangan pasar modal dan kondisi moneter nasional dan internasional, paham aturan ketatanegaraan dan paham bagaimana mengadvokasi permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan melihat aturan-aturan dan legal drafting yang ada. Bahkan, ketika nanti menduduki jabatan publik, kader PMII bisa membuat draf aturan yang tepat. Begitu seterusnya hingga level pelaksanaan follow up terendah. Setelah membaca tulisan ini, mungkin anda akan bilang, "ide gila ini tidak akan tercapai!". Terserah.

Setidaknya pada periode ini, kami ingin membangun kesadaran, bahwa kedepan kaderisasi kita tidak boleh lagi hanya menjadi seremonial kegiatan disetiap kepengurusan, karena kita sadar kita akan menghadapi dunia persaingan yang semakin ketat dan kompleks. Kita sadari bahwa hari ini input kaderisasi kita sebagian besar masih "homogen", tentu hal itu tidak boleh membatasi kita untuk membangun kompetensi kader dengan tuntutan zaman yang ada. Justru, skema kaderisasi kita sudah harus seiring sejalan dengan arah peningkatan kompetensi kader secara pribadi yang berkarakter ahlussunnah wal jamah dan profesional.

Profesional bisa diartikan memiliki kompetensi maksimal sesuai dengan keilmuan dan jenjang perkuliahan kader seperti yang sudah saya singgung di atas. Profesional juga bisa diartikan memiliki kompetensi maksimal sesuai dengan pilihan aktivitasnya. Misal, hari ini kita memiliki alumni yang pendidikiannya PAI, tetapi karena fokus dengan advokasi anggaran, maka beliau sangat kompeten dan menjadi rujukan untuk membahas politik anggaran, baik ditingkat lokal maupun nasional. Ada juga, alumni yang pendidikiannya Syariah, tetapi karena fokus dengan advokasi reformasi sektor keamanan, beliau sangat kompeten dan menjadi rujukan untuk membahas politik pertahanan dan keamanan.

Masih banyak "ruang kosong profesional" yang tidak musti terkait dengan keilmuan kita yang dapat diisi dengan kemampuan dan kompetensi hasil pelatihan di PMII, sekalipun disisi lain kita juga harus tetap bisa mempertanggung jawabkan tanggung jawab intelektual kita terkait dengan kompetensi kita sebagai sarjana dengan bidang keilmuan yang pernah kita pelajari di kampus.

Intinya, dengan skema kaderisasi non formal, dengan skema *follow up* kaderisasi yang sudah menjadi PO tersebut, output kaderisasi kita dapat terdorong dengan sistem. PMII memfasilitasi. Sehingga kedepan secara pribadi-pribadi, tidak ada lagi alumni yang profesional kemudian tidak mengakui bahwa kemampuannya, kompetensinya, tidak terkait dengan perjalanannya ber PMII. Dengan demikian tidak mustahil kedepan, kaderisasi PMII dapat menjawab tantangan zaman. Tidak hanya mewarnai dinamika lokal dan nasional, tetapi menjadi rujukan bersama terkait apapun dinamika yang terjadi di negeri ini. Baik masalah politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, energi, kebencanaan, teknologi, dst.

Tidak hanya itu, PB PMII juga merumuskan skema kaderisasi informal. Seperti apa rumusannya? Saya akan coba paparkan sedikit disini, untuk lebih jelasnya mungkin saya akan membangun komunikasi efektif kepada sahabat Karebet agar bisa juga menulis secara detail sehingga dapat dibaca dan dipahami sahabat semua. Karena memang pada dinamika yang berkembang sejak rakernas, beliau yang mendapatkan tugas mensistematisir pola kaderisasi informal yang kami sepakati berbasis hoby, minat dan bakat dan berbasis profesi. Pola kaderisasi informal adalah dengan mendorong komunitas-komunitas kecil yang memfasilitasi setiap anggota dan kader. Biasanya (sebut saja komunitas pencinta alam), dengan komunitas ini, kita bisa lebih mandiri dan militan. Misal, kader PMII yang suka hiking, memiliki jiwa petualang, akan lebih mudah urunan, patungan, kolekan, untuk bisa hiking dengan berbagai kebutuhannya, ketimbang untuk kebutuhan pelaksanaan mapaba. Mohon maaf, semoga tulisan ini salah. Yang benar adalah, tidak hanya untuk Mapaba, kader PMII juga bisa urunan untuk kebutuhan hoby bersama komuitas. Amiiinnn...

Rumusan pembinaan berbasis komunitas ini dilaksanakan dengan tujuan memperluas basis input rekruitmen kaderisasi dan memfasilitasi anggota baru dan kader dalam aktivitasnya diluar perkuliahan, sebagai media rekruitment calon anggota baru dan pengembangan potensi Kader berbasis Profesi, bakat dan hobby. Skema ini juga untuk memfasilitasi dan mengakomodasi kebutuhan kader dan penguatan kompetensi di dunia Profesi dan Keahlian yang diminatinya. Dan yang terpenting adalah, komunitas ini berfungsi sebagai organ taktis dalam memperkuat aktifitas kaderisasi PMII. Jangan kemudian justru kader PMII lebih asyik berkomunitas, dan lupa terhadap tugas utamanya, memperkuat PMII. Jangan sampai ketika ada perhelatan "politik kampus", kader PMII malah tidak didukung oleh komunitas penyokong yang harusnya memperkuat PMII dalam penguasaan kampus.

Rekomendasi komunitas berbasis hoby, minat dan bakat adalah sebagai berikut:

No	Komunitas	Level Lembaga	Anggota
1	Komunitas Olahraga	Rayon/ Komisariat	Seluruh Anggota dan Kader yang memiliki hoby dan bakat dibidang olahraga (Ex: Komunitas Sepak bola)

2	Komunitas Pecinta Alam dan lingkungan	Komisariat	Seluruh Anggota dan Kader yang berminat di isu Lingkungan dan *Hiking*
3	Kelompok Seni dan Budaya	Komisariat	Seluruh Anggota yang memiliki hobby didunia (Teater, Musik dan Film)
4	Komunitas Kesehatan&Kepanduan	Komisariat	Seluruh Anggota yang aktif di UKM Kepanduan (Menwa, KSR, Pramuka, dll)
5	Komunitas Otomotif	Komisariat	Seluruh anggota yang menyukai dunia otomotif

Rekomendasi komunitas berbasis profesi adalah sebagai berikut:

No	Komunitas	Level Lembaga	Anggota
1	Komunitas IT	Cabang	Seluruh Anggota & Kader PMII dari berbagai Komisariat yang memiliki Jurusan/Fakultas IT.
2	Komunitas Ekonom dan Kewirausahaan	Cabang	Seluruh Anggota & Kader PMII dari berbagai Komisariat yang memiliki Fakultas Ekonomi atau Kader yang memiliki minat di dunia Kewirausahaan.
3	Komunitas Mahasiswa Hukum	Cabang	Seluruh Anggota & Kader PMII dari berbagai Komisariat yang memiliki Fakultas Hukum.
4	Komunitas Jurnalistik, Fotografi dan Penyiaran	Cabang	Seluruh Anggota & Kader PMII dari berbagai Komisariat yang memiliki minat di dunia Jurnalistik, Fotografi dan Penyiaran.
5	Komunitas Dakwah	Cabang	Seluruh Anggota & Kader PMII dari berbagai rayon yang memilki minat dan kemampuan di dunia Dakwah.
6	Komunitas Bahasa dan Sastra	Komisariat	Seluruh Anggota & Kader PMII dari berbagai rayon yang memilki minat di dunia Bahasa dan Sastra (Ex: Bahasa Inggris, Mandarin).
7	Komunitas Riset dan Keilmuan	Cabang	Seluruh Anggota & Kader PMII dari berbagai rayon yang memilki minat di dunia Penelitian dan Kajian (Ex: Kajian Amdal, Kajian Statistik dll).

Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana komunitas ini bisa berdiri dan mandiri serta maksimal mencapai tujuannya, yaitu sebagai pelapis konsolidasi rekruitmen dan kaderisasi PMII? Ada beberapa prasyarat yang harus terpenuhi sebelum mendorong pembentukan komunitas. Pertama, melakukan pemetaan analisa kebutuhan berdasarkan data keanggotaan yang dimiliki untuk menentukan Komunitas yang dapat dibentuk. Misal, jika mayoritas anggota memiliki hoby futsal, baiknya fokus saja pada futsal. Tetapi jika ada keberagaman, dan memungkinkan untuk membentuk komunitas yang beragam

tersebut, maka manajemen organisasinya harus bisa dikondisikan, agar tidak tumpang tindih dengan agenda utama ber PMII. Jika sudah terpetakan potensi yang ada, bisa langsung diorganisir untuk membuat kegiatan. Komunitas futsal membuat turnamen khusus untuk mahasiswa baru. Komunitas pencinta alam membuat pendakian khusus untuk mahasiswa baru, dst. Kenapa di khususkan? Seperti yang telah saya singgung di atas, untuk memudahkan proses rekruitmen mapaba.

Kedua, menentukan pembagian tugas, siapa yang bertanggung jawab terhadap komunitas apa untuk kemudian menjadi Mentor yang akan menjadi Pembimbing Komunitas tersebut. Pertanyaannya, seperti apa mentor komunitas itu? Seorang Mentor Komunitas adalah orang yang melakukan pendampingan melekat kepada komunitas dengan beberapa ketentuan sebagaimana berikut; Mentor Komunitas minimal 3 orang atau lebih yang terdiri dari Unsur Akademisi dan Praktisi; Mentor Komunitas adalah Alumni PMII yang memiliki Kompetensi sesuai dengan bidang yang menjadi wilayah kajian/Aktivitas Komunitas.

Tugas Mentor Komunitas diantaranya adalah sebagai berikut:

- Mengawal dan memberikan rekomendasi kepada komunitas dalam rangka mengembangkan *Soft Skill* dan Pengetahuan terkait kosentrasi kajian/Aktivitas;
- Mentor bertugas menjadi Narasumber/Instruktur dalam aktivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas;
- Mentor juga bertugas menjadi pembimbing spiritual dan motivator bagi anggotanya baik dalam prestasi akademik dan kemampuan *soft skill* serta kompetensi khusus terkait dengan aktvitas komunitas anggotanya;
- Memfasilitasi distribusi kader via IKA PMII dan NU

Ketiga, terkait dengan optimalisasi sinergi antara komunitas dan struktur inti PMII, dalam setiap aktivitas komunitas yang terkoordinasikan, harus ada evaluasi perkembangan dan keberlangsungan Komunitas yang dilakukan bersama-sama oleh Pengurus Komisariat atau Pengurus Cabang bersama Kordinator Komunitas, beserta mentor komunitas.

BAB IV
MEMBANGUN MASA DEPAN KADERISASI

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Sudah saatnya membangun kesadaran kita bersama. Bahwa, semakin tinggi jabatan, posisi, struktur, maka dengan sendirinya, dan konsekuensi logisnya, adalah semakin tinggi pula tanggung jawab yang harus diemban. Iya gak??? Iya dong... Dalam memaknai tugas kaderisasi, dapat kita simpulkan bahwa selama ini telah terjadi penumpukan tangung jawab di bawah. Tugas PR, PK dan PC adalah melaksanakan Mapaba dan PKD, sekaligus pendampingan anggota dan kader (mentoring).

Di sisi lain, karena dinamika keorganisasi yang langsung bersentuhan dengan kampus, pun struktur ini berjibaku dengan dinamika kampus. Pemilihan BEM (Jurusan/Fakultas/Universitas), pelaksanaan ospek, dst. Selama ini, semua berjalan dan kita nikmati dengan penuh khidmad.

Lalu, apa tanggung jawab PKC dan PB dalam pelaksanaan kaderisasi? Hampir tidak ada. PKC "terpaksa" membuat PKL pada periode ini, pun menjadi bagian dari kebijakan PB untuk menunaikan tanggung jawab kaderisasi. Selama ini PKC hanya melakukan pendampingan kaderisasi saja, tidak ada tanggung jawab kaderisasi yang langsung dikelola, diemban dan ditunaikan. Begitu juga PB. Selama ini hanya melakukan pendampingan PKL yang dilaksanakan oleh PC dan sebagian PKC di daerah-daerah. Lalu apa tanggung jawab kaderisasi yang langsung diemban PB? Tidak ada.

Pada periode ini, kami mencoba memastikan PB mengelola Pelatihan Kader Nasional (PKN) yang langsung ditangani oleh Tim Kaderisasi Nasional, Pelatihan Kepemimpinan Pergerakan (PKP) yang ditangani langsung oleh Bidang Perguruan Tinggi dan Pelatihan Dakwah yang langsung ditangani oleh Bidang Agama. Tiga bidang ini memiliki prioritas melakukan kaderisasi. Setidaknya tiga bidang ini yang sudah berjalan. Sekalipun hasil Rakernas sebenarnya banyak program "kaderisasi" yang seharusnya dilaksanakan oleh bidang terkait di PB, tetapi karena satu dan lain hal masih belum terlaksana. Saya akan coba mengelaborasi hal ini lebih dalam.

1. **MEMPERTEGAS TANGGUNG JAWAB INSTITUSIONAL TERHADAP KADERISASI**

   Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Pada periode Ketua Umum Sahabat Rodli Kaelani, PB pernah membuat Sekolah Kader Nasional (SKN) yang langsung digawangi oleh Sahabat Naeni (ketua bidang kaderisasi nasional ketika itu), saat itu saya masih Ketua Cabang Jakarta Selatan dan menjadi salah satu pesertanya. SKN ketika itu adalah yang pertama dan terakhir. Ya, hanya satu angkatan saja. Selanjutnya, tidak ada lagi. Pada februari 2016, saya mendatangi sabahat Naeni terkait dengan catatan yang ada ditangan sahabat ini, sowan, minta masukan. Ketika itu kami sempat berdiskusi sedikit menyinggung SKN. Ada beberapa poin catatan yang beliau berikan, terkait dengan latarbelakang, tujuan, skema pelaksanaan SKN, dst.

   "Latar belakang utama diadakannya SKN ketika itu adalah adanya situasi hubungan yang renggang (patahan) antara *disiplin*, pengetahuan dan tujuan organisasi yang terjadi di tubuh organisasi PMII. Kadang-kadang kami melihat kerenggangan antara ketiga hal tersebut begitu fatal, hingga potensial menimbulkan suasana *chaotic* dalam organisasi. Akan tetapi, fakta bahwa PMII masih berjalan seumumnya organisasi yang lain dan tidak mengalami kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, adalah sesuatu yang sangat patut disyukuri".

   Pertama tentang *disiplin* yang dapat bermakna sangat luas dan luwes. Hampir secara umum kita mengakui tingkat *disiplin* di lingkungan kita sangat rendah. Namun harus

diakui pula bahwa sebuah definisi tunggal atas *disiplin* tidak dapat dipaksakan untuk menilai dan 'menghakimi' struktur perilaku tertentu. Ada hipotesis yang mengatakan bahwa definisi *disiplin* yang dikenal dalam khazanah modern tidak dapat digunakan untuk memahami struktur perilaku komunitas ini. Bukan berarti tidak berguna, melainkan struktur perilaku komunitas ini (*plus* nalar berorganisasinya) harus dimengerti juga dari khazanah makna yang ada di dalamnya. *Lalu*, modus disiplin semacam apa yang dapat mengukuhkan gerak organisasi kita?

Kedua tentang pengetahuan. Nyata sekali bahwa pengetahuan kita menumpuk dalam kepala dan biasanya hanya berakhir pada sikap spontan dan momentual. Pengetahuan belum sampai menjadi sebuah pandu untuk mengembangkan disiplin, apalagi sebagai pandu bertindak dalam kenyataan sehari-hari. Pengetahuan masih dikhayalkan hanya bersumber dari teks dan sebagian, berwarna teoritik. Kita masih harus belajar lebih banyak lagi untuk mendekatkan pengetahuan dengan gerakan. Sebaliknya, bersama dengan arus deras fundamentalisme pasar dan fundamentalisme agama, pengetahuan dan isu yang secara verbal sering dinisbatkan cocok dengan khazanah nilai dasar Aswaja (tasamuh, tawasuth, tawazun) sering kita kunyah mentah-mentah; tanpa melihat secara kritis, apakah dalam jangka panjang semua itu menguatkan kita atau memperlemah kita.

Ketiga tentang tujuan organisasi. Secara tekstual tujuan kita sudah sangat jelas tertera dalam Anggaran Dasar. Apa yang harus diperjelas selanjutnya adalah profil konkrit semacam apa yang mampu mewujudkan tujuan tersebut? Selanjutnya, model organisasi semacam apa yang mampu mengarah pada tujuan tersebut?

Disiplin dan pengetahuan semestinya menjadi penopang, selain tentu saja ketrampilan-ketrampilan khusus. Konon, kira-kira 54 tahun lampau kita masih kebingungan mencari profesional dari kalangan kita, dan ternyata saat ini kita masih belum beranjak jauh dari kebingungan yang sama. Maka, apa yang sesungguhnya terjadi? Ataukah tujuan kita yang belum jelas, ataukah kita yang belum mampu menurunkan tujuan menjadi tahapan-tahapan dan kapasitas orang serta organisasi yang harus dibentuk sebagai prasyarat mencapai tujuan?

Lebih jauh sahabat naeni menjelaskan bahwa, "Sekolah Kader Nasional (SKN) tidak mampu menjawab semua itu. SKN kira-kira baru berada di bibir permulaan yang dengan tingkat ketelitian dan kecermatan yang masih harus diasah, menemukan bahwa di tengah zaman yang begini rupa keadaannya, seluruh unsur kekuatan yang ada pada jama'ah dan diri kita harus dikelola sebaik mungkin. Tidak ada satu unsur positif pun dalam tradisi dan dalam diri kita yang tidak bermanfaat bagi gerakan".

Melihat kenyataan lapangan, kita membutuhkan energi yang sangat besar untuk mampu *survive* dan kemudian bergerak sesuai tujuan organisasi. Bukan saja kekuatan pikiran dan pengetahuan atau bekal ketrampilan profesional, kekuatan ruhanipun sesungguhnya kita butuhkan sebagai sumber energi gerakan. Dengan kombinasi itu pula, kami mencoba

mengemukakan kembali pentingnya akomodasi ruhani dalam setiap proses pelatihan di PMII. Mengapa? Karena, sekali lagi, individu dididik bukan saja untuk terampil dan bertambah tahu, melainkan juga agar memiliki ketahanan ruhani yang baik ketika menjumpai keberhasilan dan cobaan dalam medan gerakan yang *notabene* adalah kenyataan hidup sehari-hari.

Pada akhirnya, kami menyaksikan bahwa proses pendidikan yang baik mesti dilengkapi dengan *ketauladanan*. *Ketauladanan* dalam berbagai lini, mulai dari soal *akhlaq,* mentalitas, ketahanan diri di tengah kenyataan untuk setia dengan tujuan gerakan, dalam kondisi susah maupun senang. Selain itu juga *ketauladanan* dalam bersikap, dalam berpikir, dalam bertindak, dalam bersetia dengan kolektivitas-bangsa. Namun, apabila memang zaman *ketauladanan* sudah lewat, kami percaya, PMII akan menemukan jalannya sendiri.

Sahabat-sahabat yang militan dan progresif! Tentu sampai dititik ini kita bisa pahami bahwa semangat kaderisasi yang pernah didorong dengan skema SKN dan PKN yang hari ini kita jalani memiliki kesamaan, yaitu semangat mendorong kematangan ruhani kader. Yang saya bahasakan dalam catatan ini yang olah batin.

"SKN saat itu kami rencanakan dilangsungkan sebanyak 5 (lima) putaran. Sampeyan dan kita tahu, yang terlaksana hanya 1 (satu). Saat itu, saya menganggap bahwa itu adalah pelatihan paling ketat yang pernah dilaksanakan PMII -- setidaknya pelatihan dan forum kaderisasi yang saya ikuti sejak 1997. Saya pribadi tidak berani membandingkan ketatnya SKN dengan PKN saat ini, karena saya tidak pernah melihat langsung pelaksanaan PKN. Saat itu kami berharap, andai terlaksana 5 kali, metodologi SKN dapat ditularkan secara bertahap ke MAPABA, PKD, dan PKL – kami melihat, bertahap itu sangat penting dengan melihat kondisi objektif PMII saat itu. Apa metodologi yang saya maksud itu? Mengintegrasikan pengelolaan kognisi, ruhani, dan psikomotorik (yang sampeyan rumuskan sebagai olahraga-olahbatin-olahpikir) sebagai tiga instansi utama *self* individu > manusia > kader*",* paparnya.

Saat itu kami tidak berpikir sama sekali untuk memformalkan SKN sebagai tahap formal kaderisasi PMII. SKN, dalam pembicaraan saya bersama Mas Hery dan Mas Hasan (saat masa kepengurusan Mas Hery, kebetulan saya adalah koordinator biro kaderisasi), pelatihan itu adalah semacam Lemhanas-nya PMII namun tanpa *privilege* bagi peserta yang telah mengikutinya. SKN digagas saat itu tidak untuk menjadi syarat bagi kader yang ingin menjadi pengurus PB atau pengurus apapun. SKN, tepatnya, ditujukan untuk menempa kapasitas kepemimpinan kader PMII dalam artinya yang luas, dengan tujuan lanjutan menjadi model bagi penyelenggaraan kaderisasi formal PMII. Sejarah sudah berkata, tampaknya itu tidak terlaksana sampai masa khidmat kami usai, setidaknya di bagian tujuan lanjutan tadi.

Sesungguhnya banyak yang dapat saya sampaikan tentang SKN, apalagi bila melibatkan sahabat-sahabat lain yang terlibat langsung dalam acara tersebut. Saya mengingat-ingat, banyak yang mempunyai ekspektasi tinggi pada SKN dan menyayangkan kenapa kegiatan itu hanya sekali dilakukan. Mas Mun'im, Kyai Abbas Mun'im, Gus Iim adalah di antara yang hadir dan menyampaikan harapan itu. Juga Bang Muhyiddin yang beberapa kali kami kunjungi untuk konsultasi pada tahap perencanaan kegiatan dan menjadi pemateri pula. Demikian juga dengan Pak As'ad yang kami undang saat itu, namun sayang beliau tidak dapat hadir.

***

Kira-kira demikian sekelumit kisah SKN, jas merah. Begitu bung Karno menekankan. Jangan, sekali-kali melupakan sejarah! Ya, banyak sejarah yang mungkin sudah kita baca dan pelajari. Tetapi yang terpenting dari itu semua adalah, kita dapat belajar dari sejarah. Bukan hanya mempelajari sejarah. Pada periode ini, PKN sudah 2 angkatan terlaksana. Insya Allah di pertegahan Maret 2016 ini akan berjalan angkatan ke 3. Insyaallah kami akan berupaya maksimal agar terlaksana PKN minimal 5 angkatan dan Pelatihan Instruktur Nasional untuk menjawab masalah kaderisasi kita terkait dengan minimnya instruktur untuk mengawal PKL di daerah-daerah.

Sebelum saya lanjutkan pada pokok bahasan bab ini, saya ingin sedikit bercerita terkait dengan masukan mas Naeni tentang catatan ini. Catatan dan masukan beliau, "Catatan Sampeyan, menurut saya, merefleksikan kegelisahan yang dalam atas situasi kaderisasi PMII, hampir di seluruh segi. Kegelisahan tersebut telah mulai Sampeyan dan sahabat-sahabat PB pecahkan dengan mencoba **desain baru kaderisasi**, baik di tingkat paradigmatik, metodologi, serta infrastruktur. Pengalaman pribadi sangat banyak Sampeyan tulis dalam catatan tersebut, dan saya kira itu salah satu cara yang baik untuk mengetengahkan bacaan yang lugas dan mudah difahami. Soalnya mungkin terletak pada 'pesan' yang akan disampaikan justru dapat menjadi kabur, sebab boleh jadi pesan itu terselimuti oleh pendapat beberapa pembaca yang menganggapnya sebagai 'sebuah versi' -- khususnya mereka yang disebut namanya secara langsung di situ. Artinya, meskipun gaya penulisan ini memiliki kelebihan yang saya sebut tadi, tulisan ini mudah disebut sebagai subyektif. Menurut saya akan lebih baik, elegan, dan bermanfaat apabila tulisan itu dikonversi sedikit dengan **memfokuskan pada perspektif dasar kaderisasi, infrastruktur, metodologi, dan metode kaderisasi. Yakni sebagai narasi utuh tentang arah dan metodologi kaderisasi (baru) PMII.** Saya kira saatnya saat ini itu dituliskan. Dengan catatan yang telah Sampeyan tulis, perjalanan kaderisasi selama (masa khidmat ini), dan luasnya sumber masukan yang Sampeyan datangi, itu sangat mungkin. Lugasnya, menurut saya Sampeyan dapat mengendapkan catatan yang telah Sampeyan susun itu dan menggumpalkan nya sebagai naskah utuh tentang arah dan metodologi kaderisasi PMII'. Saya kira masih ada waktu untuk melakukan itu".

Sahabat-sahabat yang militan dan progresif! Tahukah anda, sebenarnya saya tidak pandai menulis. Terlebih menulis "buku kaderisasi" yang pasti isinya sangat serius. Malah kadang yang membaca pun ikut-ikutan serius dan *saking* seriusnya, harus mengulang beberapa kali agar bisa mengerti. Semoga saja nanti akan ada yang bisa menulis sesuai dengan masukan Sahabat Naeni, sehingga kita memiliki buku rujukan kaderisasi – "buku suci". Terimakasih sahabat Naeni atas saran dan masukannya, saya memang banyak bercerita tentang pengalaman pribadi untuk mengetengahkan permasalahan yang memang sama-sama kita rasakan, jika kemudian dianggap subyektif, memang iya. Sejak awal semangat catatan ini ditulis memang karena subyektifitas saya memahami masalah kaderisasi kita, tetapi sahabat-sahabat bisa memilahnya dengan bahasa kami (PB PMII) dalam upaya mencari solusi dari permasalahan kaderisasi kita.

Beberapa sahabat di tim kaderisasi juga ada yang menyarankan agar ada buku kaderisasi yang menjabarkan semua kebijakan PB PMII dan PO yang sudah kita tetapkan di Muspimnas lalu, dengan semangat yang sama seperti yang disarankan oleh Sahabat Naeni, saya mencoba membentuk tim khusus untuk itu, tetapi karena kesibukan masing-masing sampai catatan ini saya susun, belum ada progres. Mohon maaf atas ketidak sanggupan saya menyusun buku tersebut. Karena memang fokus kami dalam pembenahan masalah kaderisasi kita adalah mendorong Tap Pleno menjadi PO. Seperti yang telah saya singgung diawal, bahwa background saya adalah kebijakan publik, sehingga menurut saya (Alhamdulillah disepakati oleh banyak Pengurus Besar) dalam membangun sistem kaderisasi yang terpenting adalah bagaimana kebijakan kaderisasi dibuat - legal, ditetapkan dan dilaksanakan. Ada legalitas hukum organisasi. Pada periode selanjutnya, silahkan dievaluasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Pun dengan cara yang legal, baik melalui Pleno PB PMII, Muspimnas atau Kongres. Semoga saja catatan ini bisa menjadi rujukan sementara, bagaimana melaksanakan kebijakan kaderisasi yang sudah kita tetapkan bersama menjadi PO (baca dan pelajari PO kita) dan beberapa poin kaderisasi yang masih merujuk pada Tap Pleno (baca: Tap Pleno Sertifikasi tentang penugasan).

***

Baik, kembali pada pokok bahasan, Mempertegas Tanggung Jawab Institusional Terhadap Kaderisasi. Dengan Tap Pleno dan PO yang sudah kita miliki, tentunya sistem kaderisasi kita sudah legal. Secara pribadi, saya ingin program kaderisasi yang sudah berjalan ini menjadi sistem berkelanjutan. Bukan sekedar capaian PB hari ini. Mempertegas Tanggung Jawab Institusional Terhadap Kaderisasi, Bukan sekedar membagi tanggung jawab kaderisasi, tetapi mendorong penguatan kualitas kader yang "naik kelas". Ya, naik kelas. Ini arah dan tujuan dari kaderisasi kita yang berjenjang. Tentu jika Komisariat bisa melaksanakan PKD, maka PKD yang dilaksanakan oleh Cabang kualitasnya harus lebih baik. Begitu juga dengan PKL yang dilaksanakan oleh Cabang, maka PKL yang

dilaksanakan oleh Koorcab pun kualitasnya harus lebih baik, karena tanggun jawab struktur tersebut.

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Di awal periode ini, kami melaksanakan orientasi Pengurus Besar, mengundang banyak Mabinas bicara terkait dengan dinamika nasional dan juga pada saat Rakernas, kami mengundang beberapa senior untuk input pakar. Kami butuh masukan-masukan untuk pengembangan PMII kedepan, dst. Kenapa? Karena masih banyak diantara kami, yang belum naik kelas. Mohon maaf, tidak sedikit PB yang *mindset*nya masih PC. Bahkan masih PK/PR. Ini masalah. Untuk mengatasi itu, maka kami membuat orientasi. Untuk menyamakan frekuensi. Menyamakan sudut pandang – persepsi, menyamakan *angel*. Agar ketika menemui masalah yang harus di respon atas nama PB, kita sudah punya paradigma yang sama. Saya yakin, sahabat-sahabat di PKC/PC pun menemui masalah yang sama. Sudah menjadi PKC, tetapi logika berorganisasinya masih PK. Repot ini.

Melalui PKN yang dilaksanakan oleh PB, PKC/PC yang menjadi peserta setelah lulus pelatihan, sudah siap menjadi kader nasional. Siap menjadi PB jika mau dan ada kesempatan pada periode selanjutnya. Dengan pola yang kami bangun, alumni PKN sudah meningkat kualitasnya, baik secara intelektual, spiritual dan emosional. Bisa menjadi tauladan, disiplin tinggi dan profesional. Jadi, target minimum dari PKN adalah, alumni PKN yang nanti menjadi PB sudah memiliki perspektif yang sama, frekuensi yang sama. Sehingga bisa saja orientasi PB yang pernah kami lakukan diawal periode ini adalah orientasi yang pertama dan terakhir.

Di pembahasan sebelumnya, saya sudah singgung bahwa amanah kongres Jambi ada rekomendasi kepada PB PMII untuk merumuskan sistem kaderisasi nasional. Kami telah tawarkan PKN menjadi kaderisasi formal pasca PKL yang langsung di kelola oleh PB di Muspimnas 2015 lalu, tetapi karena keterbatasan pemahaman peserta Muspimnas, akhirnya PKN tidak disepakati. Karena peserta muspimnas berpikir hal itu harus disahkan di Kongres. Wajar, dan saya memaklumi itu. Karena memang logika yang masih melekat dikepala sahabat-sahabat PC, kongres sebagai permusyawaratan tertinggi. Padahal, membangun sistem kaderisasi nasional adalah amanah kongres yang harus dibuat oleh PB hari ini (kami sudah menetapkan beberapa Tap Pleno yang secara keseluruhan menjadi sistem kaderisasi nasional, juga sudah kami racik dalam tawaran rancangan draf PO untuk ditetapkan di Muspimnas), harusnya Muspimnas bisa menjadi sarana yang tepat. Setelah beberapa kali saya mengalami dinamika kongres yang sangat “politis” (kongres Batam dan Kongres Kalsel), semoga saja poin penting ini tidak luput dikongres selanjutnya. Jangan sampai, dari kongres ke kongres kita hanya menghasilkan rekomendasi dan rekomendasi.

Intinya, terkait dengan amanah kongres Jambi saya ingin menekankan bahwa kami telah menjalankan amanah itu. Tetapi belum berhasil. InsyaAllah, kami akan menawarkan draf perubahan ADRT yang menyebut tentang PKN sebagai bagian dari kaderisasi formal

setelah PKL. Bagi sahabat-sahabat PC yang membaca tulisan ini dan bersepakat, mohon keikhlasan nya untuk membantu meng-*goal*-kan rumusan ini. Ini penting! Jika ini berhasil, maka agenda kaderisasi yang dilaksanakan PB bukan sekedar capaian periodik. Seperti yang saya singgung di atas, "waktu saya jadi ketua/pengurus PB..." kita pastikan, siapapun ketua/pengurusnya, kaderisasi harus tetap berjalan dengan sistem.

Perlu saya sampaikan disini, bahwa dalam PO hasil keputusan Muspimnas di Ambon, nomor: 04/muspimnas/2015 tentang Strategi Rekruitment Kepemimpinan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, pasal 12 tentang syarat-syarat menjadi ketua umum dan pengurus besar poin (1) Ketua Umum dan BPH Pengurus Besar PMII minimal telah mengikuti kaderisasi formal pelatihan kader lanjut dibuktikan dengan sertifikat kelulusan PKL, serta kaderisasi non formal Pelatihan Kader Nasional (PKN).

Hari ini, sekalipun PKN non formal, kami berkomitmen untuk melaksanakannya, karena PKN menjadi prasyarat bagi susunan PB kedepan. Bayangkan jika (*amit-amit*) periode mendatang tidak melaksanakan PKN, bisa jadi nanti PMII tidak memiliki PB. Karena tidak ada yang memenuhi prasyarat. Karenanya, hemat kami, baiknya PKN kita kukuhkan menjadi jenjang kaderisasi tertinggi yang langsung dikelola oleh PB. Sehingga secara institusional, PB bertanggung jawab melaksanakan PKN dan tambahannya yaitu melaksanakan pelatihan instruktur nasional untuk meng-*cover* kebutuhan kaderisasi di bawah.

Jadi kedepan, jika pun aroma *politicking* organisasi tidak bisa disisihkan, dengan agenda kaderisasi ini, sahabat-sahabat bisa lebih objektif (sekalipun sulit). Sebagai ukuran "objektif" menolak/menerima LPJ PB PMII, barometer utamanya adalah dari agenda kaderisasi. Misal, jika rekomendasi kongres PB kedepan harus melaksanakan PKN Minimal 10 angkatan, kemudian yang berhasil dijalankan hanya 2 angkatan, sahabat bisa menilai capaian itu sebagai basis argumentasi untuk menyimpulkan sikap sahabat atas LPJ PB. Tetapi dalam perjalanannya, pun sahabat di PC dan PKC harus mendesak PB untuk melaksanakan PKN seperti anggota rayon atau komisariat mendesak PC melaksanakan PKD karena ada "kebijakan pembatasan" seperti yang saya sudah singgung sebelumnya.

Di kongres nanti, tolong siapapun yang diutus dari PC untuk membagi tugas masuk dalam sidang komisi-komisi, banyak baca. Belajar. Pengalaman Muspimnas kemarin, masih banyak peserta yang ketika berdiskusi masih menggunakan logika cabang. Itu tidak salah, karena memang mereka adalah utusan dari cabang, tetapi menjadi salah karena forumnya adalah forum nasional. Maka sebelum masuk dalam forum nasional, sahabat harus *up grade* kualitas diri. Pantaskan diri anda berada di forum nasional. Biasanya ketua PC/PKC lebih memahami masalah (sekalipun tidak semua), tetapi karena kongres adalah arena politis, maka mereka lebih sibuk diarena lain diforum lain, sudah sibuk suksesi kandidat.

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Dalam PO Strategi Rekruitmen Kepemimpinan, PKN menjadi syarat untuk menjadi Ketua Umum dan BPH PB PMII. Loh, kan PKN hanya menjadi kaderisasi non formal pasca PKL. Rancu? Tidak juga! Karena kaderisasi non formal pun tidak terlarang untuk menjadi prasyarat. Kedepan, dengan kaderisasi yang masif, bisa jadi akan ada peningkatan syarat untuk menjadi ketua PC/PKC, tidak hanya lulus PKL, tetapi juga sudah lulus pelatihan instruktur pasca PKL. Selanjutnya meningkat lagi syaratnya, sebagai instruktur yang banyak mendampingi kaderisasi, dst.

Kami ingin memastikan PKN menjadi kaderisasi formal, agar kewajiban PB selanjutnya untuk menjalankan PKN bisa lebih progresif lagi, dibanding yang telah kami lakukan hari ini. Menjadi fardu 'ain. Dalam skema mempertegas tanggung jawab institusional terhadap kaderisasi ini, pembagiannya sebagai berikut, PB bertanggung jawab atas PKN, PKC bertanggung jawab atas PKL, PC bertanggung jawab atas PKD dan PK bertanggung jawab atas Mapaba di wilayahnya masing-masing. Sedikit kami pertegas, bukan hanya bertanggung jawab atas pelaksanaannya, tetapi juga pada pengawalan follow up nya dan jaminan kualitas kontrolnya. Karena ada juga Rayon yang bertanggung jawab melaksanakan Mapaba, ada juga Komisariat yang melaksanakan PKD dan Cabang yang melaksanakan PKL. Mohon struktur diatasnya lebih dalam memahami agenda follow up. Dengan pembagian tanggung jawab atas pengawalan kaderisasi disetiap jenjang ini, tentu kedepan kualiltas kaderisasi kita akan menghasilkan kader-kader yang *high quality.* Outputnya, Tidak hanya memenangkan persaingan di kampus, tetapi juga di dunia profesional pasca lulus nanti.

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Sebelum masuk pada bahasan selanjutnya, saya ingin sedikit bercerita terkait dengan PKP. Saya tidak berpikir PKP menjadi formal, posisinya tetap non formal, tetapi bisa dilaksanakan oleh PKC. Dengan skema dan kurikulum yang telah dibuat PB tentunya. PKP ditujukan untuk kader (alumni PKD), maksimal semester 5 atau 6 dan IPK nya cocok untuk jadi ketua BEM. Ya, memang tujuan dari PKP ini adalah menyiapkan kader untuk merebut BEM di kampus. Khususnya kampus umum negeri. Dari PKP angkatan I yang lalu, ada 4 alumni PKP yang berhasil menjadi ketua BEM. Ini capaian yang luar biasa. Apresiasi saya kepada Sahabat Kaelani yang menggawangi langsung PKP ini.

2. **MERUMUSKAN BAB KADERISASI DI ADRT**

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Dalam setiap pembahasan terkait dengan sistem kaderisasi, saya selalu tegaskan bahwa PMII adalah organisasi kader. Kaderisasi adalah utama dari segalanya dalam aktivitas kita berPMII. Sepakat?! Pasti! Tapi, tahukah anda, ternyata dalam ADRT kita tidak ada satu pun pasal yang khusus menjelaskan hal itu. Tidak ada Pasal apalagi bab di ADRT yang menjelaskan tentang kaderisasi.

Pada kesempatan ini, izinkan saya menawarkan beberapa poin, yang insyaAllah nanti kita diskusikan lebih lanjut bersama sahabat-sahabat PC. Kami berencana membuat

workshop kaderisasi untuk serius mendiskusikan ini (tawaran draf bab kaderisasi di ADRT). Harapan kami, sahabat-sahabat yang hadir mau berjuang mengawal bab ini agar *goal* dan masuk dalam perubahan ADRT kita pasca kongres nanti. Tidak hanya itu, diskusi kami dengan Sahabat Mustafid (ketua tim perumus Paradigma PMII dari IKA PMII), kami juga ingin mengkonsolidasikan hasil rumusan paradigma diforum tersebut. Agar memudahkan pengawalannya saat kongres nanti. Strategi awal kami adalah memastikan, minimal 90% dari yang hadir adalah perwakilan PC yang akan ikut kongres, syukur-syukur bisa 100%, dengan mempertimbangkan SK kepengurusan PC dan PKC ketika mengundang untuk hadir.

Draf tawaran ini sengaja saya tulis disini, supaya semua kader bisa baca dan bisa sama-sama memikirkannya, mempertimbangkannya jauh-jauh hari, guna memberikan input. Kira-kira bagaimana semestinya rumusan redaksionalnya, bagaimana pembagian komposisinya di Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Karena pada umumnya, struktur pembagian komposisi hukum di organisasi; di AD lebih umum, di ART lebih khusus. Di PO lebih detail dan di Tap Pleno lebih detail lagi secara teknis. Kira-kira begitu pemahaman saya. Bagaimana dengan pemahaman anda? Mohon dipahami tawaran ini, mohon dikoreksi, mari sama-sama kita kawal perubahan ADRT menuju kaderisasi yang lebih baik lagi di PMII.

Kira-kira begini tawarannya:

1. Untuk di Anggaran Dasar

BAB (sekian)
SISTEM KADERISASI

Pasal (sekian)
Pola Kaderisasi PMII

Kaderisasi PMII terdiri dari tiga pola, yaitu:

1. Kaderisasi Formal;
2. Kaderisasi Non Formal; dan
3. Kaderisasi InFormal
4. Ketentuan lebih lanjut terkait ayat 1, 2 dan 3 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal (sekian)
SISTEM KADERISASI

Sistem Kaderisasi PMII Adalah Tertutup dan Terpimpin

Pasal (sekian)
SKEMA PENGEMBANGAN KADERISASI

Skema Pengembangan kaderisasi disesuaikan dengan kebutuhan, tuntutan dan perkembangan zaman

2. Untuk di Anggaran Rumah Tangga

BAB (sekian)
POLA KADERISASI
Pasal (sekian)
KADERISASI FORMAL

1. Kaderisasi formal adalah kaderisasi yang wajib dilaksanakan oleh setiap struktur kepengurusan
2. TahapanKaderisasi Formal:
   a. MAPABA (Masa Penerimaan Anggota Baru).
   b. PKD (Pelatiha Kader Dasar).
   c. PKL (Pelatihan Kader Lanjut).
   d. PKN (Pelatihan Kader Nasional).
3. MAPABA adalah kaderisasi formal tahap pertama yang diselenggarakan oleh Pengurus Rayon dan/atau Pengurus Komisariat.
4. PKD adalah kaderisasi formal tahap kedua yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang dan/atau Pengurus Komisariat
5. PKL adalah kaderisasi formal tahap ketiga yang diselenggarakan oleh Pengurus Koordinator Cabang dan/atau Pengurus Cabang.
6. PKN kaderisasi formal tahap akhir yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar
7. Ketentuan lebih lanjut terkait kaderisasi formal ini, diatur dalam PO, Tap Pleno dan/atau Peraturan PMII lainnya

Pasal (sekian)
KADERISASI NON FORMAL

1. Kaderisasi non formal adalah kaderisasi yang dilakukan sebagai kelanjutan kaderisasi formal guna mendorong mengembangkan potensi kader berbasis soft skill
2. Kaderisasi non formal dapat dilakukan oleh
   b. Pengurus Rayon;
   c. Pengurus Komisariat;
   d. Pengurus Cabang;
   e. Pengurus Kordinator Cabang; dan
   f. Pengurus Besar
3. Ketentuan lebih lanjut terkait kaderisasi Non Formal ini, diatur dalam PO, Tap Pleno dan/atau Peraturan PMII lainnya

Pasal (sekian)
KADERISASI INFORMAL

1. Kaderisasi Informal adalah kaderisasi yang dilakukan sebagai kelanjutan kaderisasi formal, bisa beriringan dengan kaderisasi non formal, bisa juga terpisah
2. Kaderisasi informal bersifat khusus, berbasis hobby, minat dan bakat dan profesi
3. Kaderisasi Informal dapat dilakukan oleh
   a. Pengurus Rayon;
   b. Pengurus Komisariat;
   c. Pengurus Cabang;
   d. Pengurus Kordinator Cabang; dan
   e. Pengurus Besar

4. Ketentuan lebih lanjut terkait kaderisasi Informal ini, diatur dalam PO, Tap Pleno dan/atau Peraturan PMII lainnya

Pasal (sekian)
SISTEM KADERISASI

Sistem Kaderisasi PMII Adalah satu kesatuan yang kait mengait (antara kaderisasi formal, non formal dan informal) dan berjenjang:

1. Mapaba
   a. Alumni Mapaba bersertifikat berhak mengikuti follow up Mapaba sebagai kaderisasi non formal dan pengembangan minat, bakat dan profesi sebagai kaderisasi informal. Baik yang dilaksanakan oleh Rayon atau Komisariat.
   b. Hanya alumni Mapaba yang telah mengikuti follow up yang berhak mengikuti PKD
2. PKD
   a. Alumni PKD bersertifikat berhak mengikuti follow up PKD sebagai kaderisasi non formal dan pengembangan minat, bakat dan profesi sebagai kaderisasi informal. Baik yang dilaksanakan oleh Komisariat atau Cabang.
   b. Hanya alumni PKD yang telah mengikuti follow up dan di sertifikasi sebagai instruktur di Mapaba yang berhak mengikuti PKL
3. PKL
   a. Alumni PKL bersertifikat berhak mengikuti follow up PKL sebagai kaderisasi non formal dan pengembangan minat, bakat dan profesi sebagai kaderisasi informal. Baik yang dilaksanakan oleh Cabang atau Koorcab.
   b. Hanya alumni PKL yang telah mengikuti follow up dan di sertifikasi sebagai instruktur di PKD yang berhak mengikuti PKN
4. PKN
   a. Alumni PKN bersertifikat berhak mengikuti follow up PKN sebagai kaderisasi non formal dan pengembangan minat, bakat dan profesi sebagai kaderisasi informal yang dilaksanakan oleh PB
   b. Hanya alumni PKN yang telah mengikuti follow up dan di sertifikasi sebagai instruktur di PKL yang berhak mengikuti agenda-agenda strategis dan tertutup yang dilaksanakan oleh PB
5. Ketentuan lebih lanjut terkait sistem kaderisasi ini, akan diatur dalam PO, Tap Pleno dan/atau Peraturan PMII lainnya

Pasal (sekian)
SKEMA PENGEMBANGAN KADERISASI

1. Skema Pengembangan kaderisasi berorientasi pada pengembangan PMII di kampus-kampus, fakultas-fakultas dan jurusan-jurusan yang minim PMII nya
2. Ketentuan lebih lanjut terkait pengembangan kaderisasi ini, diatur dalam PO, Tap Pleno dan/atau Peraturan PMII lainnya

Sahabat-sahabat yang militan dan progresif! Begitu kira-kira tawaran rumusan Bab Kaderisasi yang semoga bisa sama-sama kita perjuangkan menjadi ADRT. Sementara itu, mohon doanya, kami tim kaderisasi nasional pun akan berjuang melalui SC Kongres untuk bisa memasukannya dalam draf legal tawaran perubahan di ADRT.

Pastinya, tawaran ini akan berkembang bersama dialektikanya sendiri. Dua, tiga dan lebih banyak lagi "kepala" akan lebih baik dari pada hanya satu kepala. Pastinya tawaran ini masih jauh dari sempurna, tetapi setidaknya sudah tergambar, bagaimana mimpi kita untuk membangun skema dan sistem kaderisasi ke depan secara legal.

BAB V
REVOLUSI ORGANISASI

Sebelum saya masuk pada pokok bahasan di bab ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KH. Said Aqil Siradj (Ketua Umum PBNU) dan KH. As'ad Said Ali (Wakil Ketua Umum PBNU) yang pada periode 2010-2015 berhasil menghidupkan kembali kaderisasi di NU yang telah lama mati. Pendidikan Kader Penggerak NU! Luar biasa! Kebijakan beliau-beliau terkait dengan hal itu, pun menjawab permasalahan yang mewabah di NU. Semoga Allah meridhoi beliau-beliau, Alfatiha... Semoga Yai Said, diberikan kekuatan untuk terus melanjutkan hal-hal baik pada periode sebelumnya melalui struktur PBNU. Dan saya yakin Yai As'ad pun akan tetap konsisten mengawal kebaikan dan perbaikan NU sekalipun di luar struktur.

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Semua pembahasan yang telah saya elaborasi panjang lebar adalah buah dari kaderisasi Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama –

PKP NU. Ya, kami PB PMII ketika itu menjadi peserta di PKP NU angkatan ke VI bersama Sahabat Ketua Umum Addin Jauharudin, Sahabat Sekjen Jabidi Ritonga, Sahabat Ketua Kaderisasi Nasional Dwi Winarno beserta pengurus yang lain.

PKP NU yang kami ikuti ketika itu menjadi antitesa sekaligus sintesa dari beragam pola kaderisasi yang pernah kami ikuti dan kami lakukan di PMII. Di atas telah saya singgung, bahwa keberhasilan kaderisasi adalah ketika ideologi kader menguat – konsolidasi ideologi, cara berpikir dan bertindak lebih terarah dan pola hidup lebih disiplin. Bukan hanya ketika pelatihan, tetapi juga berbekas sesudahnya. Terkait dengan capaian ini, apresiasi setinggi-tingginya pun tidak lupa kami sampaikan kepada tim instruktur PKP NU, yaitu Mas Mun'im DZ, Mas Adnan Anwar, Mas Enceng Sobirin dan Mbak Lilis yang langsung dipimpin oleh KH. As'ad Said Ali. Ingat, sebaik apapun kebijakan, jika dalam implementasinya dilakukan oleh implementor yang tidak terampil, maka kebijakan itu hanya menjadi draf angan-angan.

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Tentu kami tidak ingin kebijakan kaderisasi PB PMII yang sudah berjalan dan tersistematis ini berhenti. Kaderisasi tidak boleh mati ketika saya mati, atau ketika periode kepengurusan ini selesai. Ya, kaderisasi tidak boleh tersentral pada figur atau regim, siapapun dia. Dan untuk menjamin hal itu, saya sangat berkeyakinan, langkah kongkritnya adalah buat sistemnya dengan kebijakan yang legal, bangun dan kawal pelaksanaan sistemnya, dan jaga konsistensi melaksanakannya dengan *quality standard oriented*. Tentu dalam implementasinya, saya dan PB PMII tidak bisa berjalan sendiri, dibutuhkan partisipasi aktif semua kader, pengurus dan alumni diseluruh tingkatan agar sistem ini berjalan. Pada periode ini alhamdulillah komunikasi baik kami dengan alumni ditingkat mabinas, mabinda dan mabincab cukup efektif, sebagian besar beliau-beliau mendukung sistem kaderisasi kita. Insyallah PB selanjutnya tinggal meneruskan.

Judul bab di atas mungkin terlalu wah. Padahal isinya biasa saja. Tetapi saya sangat berharap sahabat-sahabat memahami maksudnya. Seperti yang telah saya singgung di atas, Revolusi yang kami maksud bukan revolusi yang merubah sistem dengan berdarah-darah, tetapi mendorong progresifitas percepatan evolusi organisasi menuju organisasi yang kuat dan ideologis. Organisasi yang besar dan membasis. Organisasi yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan, dalam menunaikan tanggung jawab sejarah dan mengawal masa depan PMII, NU dan NKRI dengan khittoh UUD 1945. Bagaimana revolusi organisasi itu dicapai? Ada dua agenda besar untuk mendorong revolusi organisasi yang kami maksud, yaitu membangun sistem kaderisasi tertutup dan terpimpin dan membangun model kaderisasi.

1. **MEMBANGUN SISTEM KADERISASI TERTUTUP DAN TERPIMPIN**

   Untuk memaparkan hal ini, perlu saya singgung sedikit paparan di atas, tetapi bukan untuk mengulang-ngulang tentunya. Selama ini PMII terlalu terbuka (mungkin juga NU). Kita terbuka, membuka diri untuk menerima siapa saja yang ingin bersilaturahim, tentu

tidak apa-apa. Bukan masalah. Tapi "terbuka" yang terjadi selama ini adalah, mudah disusupi. Sistem kaderisasinya tidak ketat. Terlalu terbuka, *melompong.* Tidak ada tedeng aling-aling, tidak ada rahasia. Semua masalah organisasi diekspos ke media. Semua kader so eksis! Mudah dipengaruhi pihak luar, mudah terprovokasi, sistem ideologi dan pertahanan kita lemah. Realitas inilah yang perlu diselesaikan dengan solusi yang efektif – Jika sudah akut sedemikian rupa, lalu seperti apa solusinya? Sebagai organisasi kader, tentu pembenahan disektor kaderisasi menjadi utama. Bagaimana konkritnya? Saat ini, kami berkeyakinan bahwa kita harus kembali menggunakan sistem kaderisasi yang tertutup dan terpimpin.

Saya akan awali dengan memaparkan seperti apa sistem kaderisasi yang tertutup itu. Ada beberapa elemen penting dari kaderisasi, diantaranya adalah; pertama, SDM – sumberdaya manusia pemateri. Di atas telah saya singgung, hal ini bisa diatasi dengan pelatihan instruktur yang sistemik dalam skema kaderisasi yang telah kita bangun. Tetapi dalam waktu dekat kita belum bisa memetik hasilnya, mungkin periode PB selanjutnya hasil itu sudah bisa dirasakan. Pahit atau manis, semoga tetap menyehatkan organisasi yang kita cintai ini.

Lagi-lagi ingin saya menekankan, pentingnya kita semua meningkatkan kualitas dan kompetensi kita masing-masing diwilayah profesionalitas yang kita pilih (*up greading*). Sehingga kaderisasi PMII dimasa depan tidak lagi harus mengundang pemateri luar (karena alasan kompetensi). Ya, karena syarat mendorong kaderisasi tertutup adalah pemateri harus dari lingkungan internal. Sekalipun kemudian tidak didapati pemateri dari internal, maka hanya untuk materi pilihan kita mengundang pemateri luar. Materi-materi wajib dalam kaderisasi kita, wajib diisi oleh pemateri internal. Pemateri dari luar boleh kita undang, untuk serap informasi dan serap ilmu bahkan jaringannya, tetapi bukan dalam ruang kaderisasi. Kanalisasi kebutuhan itu melalui Diskusi Publik, Seminar, Dialog Terbatas, dst.

Kedua, SDM Instruktur dan peserta yang terseleksi ketat. Dalam tawaran draf untuk ADRT di atas, telah saya uraikan secara *pointers*, bagaimana anggota dan kader terseleksi untuk mengikuti tahapan kaderisasi dan tahapan menjadi instruktur. Bahkan dalam pembahasan sebelumnya, telah saya paparkan bagaimana pola screening kemudian menjadi bagian integral dari skema kaderisasi kita. Jauh sebelumnya juga saya sampaikan, kami tidak mentolelir PKL yang "tidak layak", sekalipun itu terjadi di wilayah yang dalam perspektif "manusiawi" harus di maklumi. Ya, pola ini harus terkondisikan dengan efektif dan harus berhasil. Marwah organisasi ini tergantung dari bagaimana kita menjaga marwah kaderisasi, dan marwah kaderisasi adalah bagaimana mendidik kader secara kolektif untuk mencapai tujuan organisasi. Baik tujuan (goal) perjenjang kaderisasi yang telah saya singgung di atas, maupun tujuan utama dari organisasi ini.

Ketiga, tentu yang paling substansial adalah materi. Ya, materi kaderisasi tidak boleh umum. Materi umum adalah materi perkuliahan dan diskusi lintas organisasi.

Pengalaman saya mendapatkan materi waktu mapaba dulu tidak boleh terulang. Utamanya kaderisasi adalah doktrinasi, dan untuk menguatkan hal itu, maka harus menggali referensi dan sumber-sumber materi dari kalangan sendiri, dari sumber sejarah tokoh-tokoh NU dan PMII, perjalanan sejarah dan dinamika NU dan PMII, Fikroh Nahdliyah serta pengalaman NU dan PMII dalam menghadapi tantangan dari luar organisasi. Baik tantangan ummat, tantangan nasional maupun tantangan dunia internasional.

Keempat, data rahasia. Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Semakin tinggi tingkat kaderisasi yang telah ditempuh, akan semakin banyak rahasia organisasi yang anda ketahui. Dan kader yang ideologis adalah kader yang mampu menjaga rahasia organisasi. Jangan sembarangan. Segala permasalahan dan dinamika berorganisasi sudah kita lewati, pasti ada rasa kesal, kecewa, suka dan senang. Rengkuh itu semua dalam diri dan berbagilah dengan kader dan alumni, jangan dengan sembarang orang, apalagi dengan sosial media. Jangan! Tidak ada untungnya anda curhat di media sosial. Dalam konteks kaderisasi ini, pemateri internal pasti membuka data, dokumen dan informasi. Semua itu tidak boleh sembarang dicopy dan ditransformasikan. Informasi dan dokumen serta sumber-sumber pendukung hanya diberikan kepada kader yang telah dibaiat, tidak boleh dilipat gandakan dan sebarluaskan. Dalam skema kami, materi kaderisasi, Informasi dan dokumen serta sumber-sumber pendukung hanya diberikan kepada kader yang lulus menjadi instruktur.

Terakhir, kelima. Tidak perlu publikasi besar-besaran atas agenda kaderisasi. Informasi kaderisasi hanya untuk *stakeholders* terkait, misal penyelengaraan PKN oleh PB, maka yang mendapatkan informasi hanya PKC atau PC, juga untuk pemateri dan instruktur yang di undang secara khusus. Semenjak menjadi ketua kaderisasi nasional, saya tidak pernah meng-update status bb dan media sosial lainnya terkait dengan agenda kaderisasi. Kenapa? Karena di sana saya berjejaring tidak hanya dengan sahabat-sahabat PMII, tetapi juga ada kawan-kawan GMNI, HMI, KAMMI, IMM, dll. Jika saya tidak tahu tentang agenda kaderisasi mereka, mengapa saya harus publikasi agenda kaderisasi PMII?! Sekalipun mereka mempublikasi, pun saya tetap akan menjaga informasi internal. Ini tantangan kaderisasi kita, terutama kader di bawah, masih senang so eksis!

Dalam beberapa kesempatan, hal ini juga terjadi pada peserta PKN. Untuk sementara mungkin masih wajar. Karena stigma yang melekat selama ini adalah, PB yang keren itu yang sering pergi kedaerah, dan PKC/PC yang top itu yang sering atau ada agenda ke Jakarta, dst. Parahnya lagi, update status setiap berganti pemateri dan materi kaderisasi, ampunnn. Sebagai langkah strategis, tentu hal ini harus sudah dikurangi bahkan dihentikan.

Di akhir tahun 2015 lalu, saya ke Sambas, Kutai Barat, Wajo dan Gorontalo. Ada sedikit pekerjaan monev, tentu pekerjaan seperti ini membantu saya secara pribadi untuk "sekalian" bersilaturahim dengan sahabat-sahabat di cabang. Dari keempat daerah itu,

hanya kutai barat, Kaltim yang tidak ada PMII nya. Di Sambas ada PC PMII yang masih berproses sebagai cabang persiapan, disana baru ada dua kampus: STAI dan Politeknik negeri Sambas. Seperti biasa, penyemaian kaderisasi PMII ada di STAI. Alhamdulillah ada beberapa BEM Fakultas yang sudah dikuasai oleh kader PMII di sana, tetapi kaderisasi kita masih belum bersemi di politeknik (di sana dominan HMI). Ketika di Sambas saya ditemani oleh Sahabat Uray, ketua PC Persiapan dan kawan Permadi.

Jelang semester genap yang biasanya dimulai pada februari (2016), sahabat-sahabat Sambas ingin melaksanakan Mapaba. Diakhir tahun itu ada cerita menarik terkait kaderisasi kita, ada seorang sahabat yang mempublish nama-nama calon peserta mapaba di FB, rinci (nama – jurusan – fakultas – angkatan – dan no hp) dari STAI dan Politeknik. Kami sedang berjalan di dalam mobil justru kawan Permadi yang mengkonfirmasi kepada Sahabat Uray tentang data yang dipublish tersebut. Ketika berbicara berdua, saya minta sahabat Uray untuk menghubungi ybs agar info terkait kepesertaan itu segera di-*dellate*. Karena dipublish dan diketahui oleh OKP lain, setiap nama-nama yang tercantum "digerpol" untuk tidak mengikuti Mapaba, propaganda kaderisasi dilancarkan. Singkat cerita, Mapaba itu berjalan dengan jumlah peserta yang berkurang dari data yang di publish.

Cerita ini menjadi bagian dari cerita negatif ketika kita "salah" sok eksist di media sosial. "Publikasi besar-besaran" jangan cuma diartikan mengundang media dan ada peliputan, yang pastinya hal itu harus kita hindari. Semoga kedepan kita bisa lebih bijak menahan dan mendorong kabar kaderisasi kita keluar. Terlebih lagi terkait dengan data, jangan *diumbar-umbar*.

Itulah kira-kira lima poin prasyarat mendorong pola kaderisasi tertutup. Hari ini sudah kita jalankan dengan mendorong pelaksanaan screening peserta yang ketat, menggali referensi internal, mengundang pemateri internal, dst. Tapi belum maksimal, kedepan kita akan maksimalkan semua.

***

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Pada bagian ini, saya akan coba mengelaborasi elemen-elemen penting dari pola kaderisasi terpimpin. Kaderisasi terpimpin adalah jawaban dari pola kaderisasi yang selama ini terdesentralisasi, *buttom up*. Jika Komisariat mau melaksanakan PKD, maka mengundang PC dan PKC (titik). Begitu juga jika PC/PKC ingin melaksanakan PKL, maka mengundang PB (titik). Walaupun hanya sekedar membuka acara dan memberi sambutan, atau menjadi pemateri. Undangan itu dianggap bagian dari koordinasi dan pemberitahuan ada kegiatan (laporan). Bagaimana standarisasi PKD/PKL nya? Tergantung pelaksana. Bagaimana sistem dan mekanisme PKD/PKL nya? Idem.

Pada pembahasan sebelumnya, telah banyak saya paparkan terkait dengan kelemahan-kelemahan pelaksanaan kaderisasi diberbagai level yang terjadi selama ini. Berjalan apa adanya, sesuai kemampuan pelaksana, tidak banyak kontrol dari struktur diatasnya, bahkan pelaksana terkesan sebagai struktur yang otonom, dst. Nah, dalam upaya mendorong kaderisasi terpimpin ini, dengan sistem yang sudah kami bangun dan jabarkan pula diatas, kami ingin mendorong kaderisasi yang akan terus berjalan ini, senergi dengan upaya Memperkuat kepemimpinan dalam organisasi serta disiplin organisasi. Seperti apa teknisnya untuk mengkondisikan hal itu? Pun pada pembahasan sebelumnya telah saya jabarkan. Untuk memudahkan pemahaman kita bersama terkait hal itu, kira-kira singkatnya begini.

Pertama terkait penjadwalan dan pendampingan. Dalam konteks PKL yang akan dilaksanakan baik oleh PC atau PKC, maka ybs harus melapor kepada PB (bukan sekedar pemberitahuan dan undangan). Laporan ini (tepatnya komunikasi awalan, bisa via phone tanpa surat) kemudian kami sesuaikan dengan agenda kaderisasi yang ada, misal jika pelaksanaannya bersamaan dengan PKL lain yang sudah terjadwal di dua tempat yang terpisah, biasanya kami (PB) akan mengkonfirmasi agar di-*reschedule,* bisa diundur atau dimajukan waktu pelaksanaannya. Kenapa? Karena SDM kami tidak cukup untuk mengawal tiga PKL sekaligus disaat bersamaan. Maksimal hanya 2 titik. Mengapa? Karena pada periode ini, PB yang hadir ke PKL tidak hanya membuka acara dan memberi materi lalu pergi/pulang, kami (tim kaderisasi nasional) akan mengkondisikan PB yang hadir harus mengawal pelaksanaan PKL hingga akhir materi dan prosesi pembaiatan. Semoga dalam konteks PKD dan Mapaba sahabat-sahabat di PKC dan PC bisa menurunkan pola ini.

Kedua, dengan mewajibkan penerbitan sertifikat kaderisasi diberbagai level, yang ditandatangani oleh institusi pelaksana dan ditandatangani (mengetahui) oleh struktur diatasnya, itu bagian dari sistem yang kami bangun untuk memperkuat kepemimpinan organisasi dan disiplin organisasi diberbagai level. Itu bagian dari sistem untuk mendorong sinergi kaderisasi dari bawah keatas dan sistem kontrol dari atas kebawah. Itu juga bagian dari sistem untuk memastikan tidak boleh ada lagi rasa "otonom" oleh struktur dibawah kepada struktur diatasnya. Begitu juga dengan mewajibkan lampiran database anggota dan kader sebagai syarat pengajuan SK kepengurusan, tentu hal ini menjadi bagian untuk meningkatkan kedisiplinan organisasi dalam mengelola data organisasi dan kadaerisasi.

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Kita harus memastikan, kaderisasi yang terus kita jalankan merupakan bagian utama dari konsolidasi menggerakkan organisasi. Ya, kaderisasi sebagai instrumen menggerakan organisasi. Tidak hanya itu, kaderisasi juga harus menjadi instrumen memperkuat struktur hirarki dan komando organisasi, serta mengefektifkan perintah dan kebijakan organisasi yang bersifat strategis. Poin-poin

penting untuk mendorong kaderisasi terpimpin ini, tentu harus menjadi orientasi pelaksanaan kaderisasi kita kedepan.

Lalu bagaimana konkritnya untuk mencapai dan mendorong orientasi tersebut? Dengan memahami kondisi PMII hari ini, pastinya kita masih butuh waktu untuk mengarah kesana. Ya. memang butuh waktu untk melakukan perubahan, tapi tidak harus lama. Jika harus menunggu waktu lama, lalu apa makna "revolusi organisasi" diatas? Kita harus mendorong progresifitas percepatan evolusi organisasi ini bersama-sama! Disemua level, disemua tingkatan. Mari kita bangun kesadaran dari tingkat yang paling bawah hingga menengah dan atas, bahwa Rayon harus patuh kepada Komisariat. Rayon dan Komisariat harus patuh kepada Cabang. Rayon, Komisariat dan Cabang harus patuh kepada Koorcab. Rayon, Komisariat, Cabang dan Koorcab harus patuh kepada Pengurus Besar. Kepatuhan terhadap institusi ini menjadi kunci mendorong PMII menjadi organisasi yang efektif, memperkuat struktur hirarki dan komando organisasi.

Jadi, ketika ada permasalahan di republik ini, A instruksi PB PMII sebagai sikap organisasi, maka A menjadi agenda yang harus dijalankan oleh seluruh komponen organisasi dan cepat tanggap dalam menjalankan instruksi. Ketepatan waktu menjadi kunci keberhasilan dan efektifitas gerakan. Siapapun pemimpinnya, sekalipun dalam ruang politik organisasi beda pilihan, jalankan! Setelah jalan, baru kita evaluasi. Jangan ada lagi instruksi dari pengurus besar malah ngajak diskusi. Apakah hal ini bisa terealisasi? Bisa! Sederhana, dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepada senior Rayon, Komisariat, dan Cabang agar tidak terlalu jauh terlibat dalam "politik" PMII. cukup dampingi saja kaderisasi dan bantu apa yang bisa dibantu. Mari kita dorong PMII berbasis pada sistem, bukan lagi pada *like or dislike*.

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Ketidak patuhan yang selama ini terjadi harus segera disudahi. Kenapa? Karena memang begitu seharusnya. Memang seperti itu desain organisasi ini, instruktif! Semua sesi kaderisasi ditutup dengan pembaiatan. Semua sesi awal kepengurusan dalam pelantikan pun diawali dengan pembaiatan. "...*senantiasa patuh dan taat kepada pimpinan organisasi; bahwa ketidaksetiaan kepada pimpinan organisasi, adalah suatu bentuk pengkhianatan kepada organisasi dan pasti akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT...".* senoga kita bisa menjadi kader yang khusnul khotimah.

Diparagraf terakhir pada pembahasan ini, saya ingin mengajak kita semua memaknai lebih dalam pembaiatan ini. Penempaan komitmen melalui baiat dan kesetiaan pada Islam Ahlussunnah wal jamaah, Pancasila dan NKRI harus menjadi kekuatan spiritual, kekuatan batin, kekuatan keyakinan, bahwa jihad kita ber PMII adalah memastikan semua agenda besar terwujud. Untuk mewujudkan agenda besar tersebut dibutuhkan keikhlasan untuk di pimpin dan memimpin. Tiba waktunya nanti, pun sahabat kader yang militan dan progresif yang hari ini dipimpin yang akan memimpin organisasi ini. Insyaallah, keikhlasan, kesiapan dan kepatuhan kita semua untuk dipimpin dan

memimpin PMII, pasti akan membuka jalan bagi kita untuk memimpin negeri ini dikemudian hari dengan semangat perjuangan PMII.

2. **MEMBANGUN MODEL KADERISASI TAWASSUTH**

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Dari banyak pembahasan di atas terkait dengan dinamika kita berorganisasi dengan berbagai macam permasalahannya, dinamika kami di PB PMII dengan membuat beberapa rumusan solusi atas permasalahan yang ada (sekalipun masih dianggap menambah masalah), dinamika pergulatan dan persaingan menabur benih kaderisasi di kampus-kampus dengan OKP lain, dinamika perkembangan zaman yang terus berputar menuju "modernisasi" yang lebih kental kearah "*westernisasi*", dinamika demokratisasi yang terus bergulir di negeri ini, dinamika dan perubahan iklim politik agama dan agama politik yang mewabah di Timur Tengah, Eropa, Asia, Afrika, bahkan Amerika yang juga berimbas sedikit bagi negeri ini – yang harus kita waspadai. Semua itu memastikan, bahwa konsepsi fukuyama yang menyatakan, *The end of ideology* - tidak akan ada lagi pertarungan ideologi di dunia ini, tidak sepenuhnya benar. Dalam konteks perang dingin dengan runtuhnya tembok Berlin, mungkin kapitalisme/liberalism sudah menang dan manganggap pertarungan ideologi sudah usai. Tapi faktanya, perang ideologi itu masih tetap ada. Hingga sekarang.

Bermunculannya kelompok-kelompok militan yang mengatasnamakan ideologi tertentu, baik yang dibungkus atas nama agama, sekte, bahkan nasionalisme, memastikan bahwa semua itu tidak lepas dari kekuatan ideologi yang masih terus "bertarung" mewarnai dinamika di dunia ini. Inilah tantangan kita? Ingat, kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah dengan kedzoliman yang terorganisir. Kita yakini, bahwa kebaikan-kebaikan meliputi dan menyeluruh ada dalam nilai islam ahlussunnah wal jamah yang menjadi haluan kita, ideologi kita. Apakah cukup nilai kebaikan-kebaikan itu untuk memenangkan pertarungan ideologi? Tidak! Kita harus mengorganisir kekuatan nilai ini disemua lini, bentengi keluarga kita, anggota dan kader kita dari pengaruh jahat faham lain, dan pastikan seluruh elemen PMII menjadi tauladan dari segala kebaikan dengan nilai ahlussunnah wal jamaah. Karenanya, konsolidasi ideologi dalam kaderisasi kita mutlak dan harus digerakan kesemua jenjang level kaderisasi.

Dalam konteks ini, sepertinya sudah tidak ada lagi perdebatan diinternal PMII. Sejauh saya berdiskusi dengan para senior dan pengurus dibawah, semua sudah memiliki kesadaran untuk memastikan segala permasalahan yang ada (baca: pemetaan masalah dan langkah solusi PB PMII) harus diselesaikan. Apakah dengan perangkat kaderisasi? Ya!

Bagaimana teknisnya? Merubah model kaderisasi yang selama hampir tiga dekade ini berkembang di PMII, dengan model yang dulu digunakan NU dalam konsolidasi. Model yang coba saya paparkan ini adalah model NU yang (ketika itu) masih menjadi organisasi tertutup yang efektif mengkonsolidasikan diri – ingat, NU keluar dari Masyumi tahun 1952, lalu menjadi Partai NU. Pada pemilu 1955, PNU ada di 3 besar. Setelah PNI dan

Masyumi, unggul dari PKI yang sudah melakukan konsolidasi sejak lama – bagaimana bisa? Nanti saya elaborasi lebih jauh, model kaderisasi ini bukan inovasi kami, PB PMII. Kami hanya mentrasformasikannya, oleh-oleh dari PKP NU dan diskusi intensif dengan para instruktur PKP NU yang dimotori langsung oleh KH. As'ad Said Ali (Waketum PBNU 2010-2015).

Secara singkat, gambaran model kaderisasi yang akan kita bangun adalah Model Tawassuth. Beberapa poin-poinnya secara parsial telah saya paparkan dalam pembahasan terdahulu, untuk menjawab berbagai permasalahan yang sudah menjangkit PMII. Catatan pentingnya adalah, kaderisasi kita selama beberapa dekade ini ada dalam model yang biasa digunakan oleh LSM. Model ini banyak berkembang di era 90an, sehingga tidak heran kalau sejauh ini, banyak senior kita yang aktif didunia LSM. Hasil evaluasi kami, model kaderisasi yang berkembang diera 90an tersebut masih relevan didunia LSM, tetapi sepertinya sudah tidak layak lagi digunakan untuk pelatihan kader di PMII.

Ada polemik. PMII memang bukan LSM, tetapi kegiatan advokasi dan pendampingan kepada mustad'afin (buruh, petani, nelayan dan kaum miskin desa dan kaum miskin kota) masih relevan dilakukan oleh PMII. Lalu bagaimana menjawab polemik ini? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, sepertinya penting juga kita pahami mengapa pola LSM pernah masuk dan menjangkit dalam pola kaderisasi kita. Dalam suatu kesempatan, saya pernah berdiskusi dengan mas Eman Hermawan, menurutnya, "diera 90an, doktrin aswaja tidak bisa dijadikan instrumen untuk meradikalisasi gerakan PMII yang harus melawan regim otoriter orba. Sehingga dibutuhkan instrumen lain". Dilain kesempatan, saya juga pernah berdiskusi dengan Bang Endi Soefihara, yang menyatakan bahwa "ada fase kaderisasi PMII terjangkit virus LSM yang waktu itu kita sebut dengan istilah regim LSM. Contoh sederhananya adalah, penggunaan istilah instruktur menjadi fasilitator dalam pelatihan kader". Bagaimana perbandingannya? Nanti akan saya coba elaborasi lebih jauh.

Hari ini kita pahami bersama bahwa PMII secara geneologi bukan LSM, sehingga orientasi pelatihan kader PMII adalah membentuk karakter kader yang sesuai dengan ideologi organisasi – kader ideologis, membentuk karakter kader yang komitmen mencapai tujuan organisasi, membentuk karakter kader yang memiliki jiwa korsa. Ingat, anatomi PMII sebagai organisasi kader pasti berbeda dengan anatomi LSM. Lalu bagaimana dengan advokasi dan pendampingan yang selama ini dilakukan PMII dan mengunakan pola LSM? Saya pikir disini konteksnya. Penggunaan model pelatihan "LSM" dikhususkan untuk kader PMII yang siap melakukan advokasi dan pendampingan, pelatihan khusus community organizer. Untuk pelatihan kader, kaderisasi formal menggunakan model Kaderisasi Tawassuth.

Kembali ke Model Kaderisasi Tawassuth

MODEL NU (TAWASSUTH)	MODEL LSM (LIBERAL-TRANSFORMATIF)
Kedisiplinan ketat berbasis perintah	Berbasis kesepakatan peserta
Keseragaman/Uniformitas	Pluralitas
Religiusitas	Sekularitas
Fikroh Nahdiyyah	Fikroh Ghorbiyah (Liberalisasi pemikiran)
Individu sebagai bagian dari jam'iyyah	Individu sebagai subyek otonom
Percaya Otoritas	Independensi
Terpusat/Sentralisme	Otonom/Desentralisasi
Hierarki dan efektifitas perintah	Demokrasi dan partisipasi
Tunduk pada otoritas keilmuan Ulama dan pemimpin	Egalitarianisme
Tertutup dan terpimpin	Independensi dan transparansi

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Saya ingin memaparkan poin per poin secara berurutan. **Pertama**, selama ini, model kaderisasi kita berbasis kesepakatan peserta. Saya masih ingat ketika ikut PKD yang dilaksanakan oleh PC Jakarta Timur, waktu itu ketua PC nya Sahabat Fachri (mungkin antara periode 2005-2006 atau 2006-2007). Setelah pembukaan, kami (peserta) dikumpulkan dan forum dipimpin oleh panitia OC dengan mekanisme persidangan. Ya, persidangan. Kami membahas tata tertib PKD. Membahas tata tertib PKD yang dalam roundown acara masuk klasifikasi kontrak belajar. Banyak pasal yang diperdebatkan ketika itu, yang paling saya ingat adalah pasal ketertiban forum yang salah satunya membahas rokok. Didalam forum boleh merokok atau tidak dan peserta boleh merokok atau tidak, kira-kira seperti itu poinnya.

Kenapa masih saya ingat? Karena itu pasal yang sederhana dan panjang perdebatannya. Tentu, perdebatan ini biasanya memicu perdebatan antara peserta laki-laki dan perempuan, karena biasanya peserta perempuan yang "merasa" paling dirugikan dengan asap rokok. Singkatnya, semua tata tertib PKD disepakati bersama. Perdebatannya pun luar biasa, memakan waktu dari kira-kira jam 7/8 malam hingga jam 10/11 malam. Lalu dilanjut dengan materi hingga dini hari. Jadwal selanjutnya yang disepakati mulai jam 9 pagi pun molor, karena sebagian panitia juga lelap tertidur. Acaranya dipuncak, dingin. Untuk yang begadang pasti enak untuk bangun siang.

Kira-kira seperti itu pengalaman pribadi yang pernah saya alami, mungkin juga masih di alami oleh banyak sahabat-sahabat hingga saat ini. Sejauh PKL yang PB dampingi, pola ini sudah tidak kami gunakan. Tidak ada lagi istilah kontrak belajar yang dibahas bersama, tetapi perintah belajar dengan penjabaran tatatertib pelatihan. Kedisiplinan ketat berbasis perintah. Jika tidak sepakat, silahkan pulang. Jika masih ingin menggunakan pola "LSM" silahkan buat LSM sendiri, terapkan disana. Jangan lagi diterapkan dipelatihan kader PMII.

Kedua, dalam hal berpakaian pun ketika itu tidak diatur, berbasis "pluralitas" katanya. Gak ada hubungannya isi kepala dengan pakaian! Kira-kira begitu penekanannya. Hari ini kami atur penggunaan simbol (menggunakan peci, jas PMII dan berkemeja) sebagai

bagian dari semangat Keseragaman/Uniformitas. Kita ini sipil, gak usah diseragamkan! Itu juga menjadi penekanan, bagi sahabat-sahabat yang menolak. Padahal kalau dikasih kaos PKD/PKL gratis dan harus dipakai selama pelatihan dengan senang hati dipakai, gratis. Saya hanya ingin menekankan, kalau bukan kita yang bangga dengan simbol kita, siapa lagi?! Kalau bukan kita yang merapihkan tampilan kita, siapa lagi?! Kaos seragam boleh saja diberikan dan dipakai selama pelatihan, tapi baiknya kaos digunakan untuk olahraga saja. Di forum harus tetap menggunakan kemeja dan jas PMII, karena dalam ruang kaderisasi, formalitas itu penting, harus ada.

Ketiga, sekularitas. Dalam konteks ini, pun saya bisa disalahkan atas kesalahan dahulu. Dengan insaf dan sadar, hari ini saya bertaubat (jika masih ada di NUonline – semoga sudah di hapus, saya pernah menulis surat terbuka untuk PBNU ditahun 2009 – kira-kira seperti itu perspektif saya dahulu, sekuler). Kenapa? Ketika saya menjadi pengurus PC Jaksel (2007-2009), mungkin sahabat terkaget mengetahui periode itu. Ya, 2 tahun kepengurusan PC Jaksel dibawah kepemimpinan Sahabat Anas dari komisariat STAI Alhikmah. Sebelumnya pun 2 tahun dibawah pimpinan Sahabat Firdaus dari kampus PTIQ – komisariat Kebayoran Lama. Ini masalah regenerasi yang selama ini terjadi. Akhirnya saya jadi ketua cabang 2009-2010, waktu itu saya katakan, "ketua cabang yang ikut Kongres dan ikut Muspimnas adalah ketua yang dzolim terhadap kaderisasi dan regenerasi kepengurusan". Jika rapih, tiap periode kepengurusan 1 tahun, harusnya 2008-2009 saya jadi ketua cabang. Namun ketika itu ada klausul masa tenggang 6 bulan setelah SK habis (1 tahun 6 bulan) untuk kemudian melakukan konfercab, prakteknya 2 tahun. Bahkan ada yang lebih. Dua kali kongres, ketuanya masih sama. Parah. Alhamdulillah pada periode PB kali ini sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Ketika Muspimnas 2015 lalu, cabang yang kadaluarsa pun tidak kami undang.

Kembali pada sekularitas. Ketika itu kami menerima anggota dari mahasiswa beragama kristen. Bahkan hingga tahun 2010, komisariat unas memiliki anggota yang dari beragam agama, agak komplit. Ada Kristen, Budha dan Katholik. Bahkan diantaranya ada yang jadi pemuda altar di gerejanya. Waktu itu saya merasa tidak ada yang salah, biarkan saja mereka masuk PMII, semoga dapat hidayah, nanti jadi muallaf. Seiring berjalan waktu, hingga mereka lulus dan bekerja, saya coba membatasi kaderisasi di kampus kami. Alhamdulilah, sejak 2011 sudah tidak ada lagi anggota baru yang dari agama lain di Komisariat UNAS. Hal yang sama bisa saja terjadi di tempat lain, bahkan hingga kini. Akhir 2015 lalu saya ada sedikit pekerjaan di Gorontalo, bertemu dengan sahabat-sahabat disana. Diantara mereka ada yang dikenalkan kepada saya sebagai anggota baru menggunakan kalung bersimbol salib. Pun dengan harapan yang sama (semoga dapat hidayah), menurut salah satu PC Gorontalo dia (anggota yang dari nasrani itu) setelah ikut PMII, suka merasakan "sesuatu" kalau mendengar suara Adzan, khususnya adzan subuh.

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Dengan model kaderisasi tawassuth tentu cerita ini harus di sudahi. Sekalipun ada yang tertarik karena alasan emosional, punya teman karib anggota PMII. Mereka boleh diajak ke PMII, tetapi hanya menjadi simpatisan dan tidak perlu diikutsertakan dalam Mapaba. Biarkan mereka belajar berorganisasi hanya diruang tamu, tapi mereka tidak boleh masuk ke ruang keluarga. Apalagi masuk ke dapur kaderisasi kita. Yang bisa ikut Mapaba hanya Mahasiswa yang beragama Islam. Di Mapaba inilah kita akan memulai proses kaderisasi yang menekankan pada aspek Religiusitas, sholat berjamaah setiap waktu, tahajud, mujahadah hingga subuh berjamaah dan olahraga serta dhuha sebelum materi pagi hari. Apa yang terjadi jika mereka ikut?

Itu satu hal. Di lain hal, sekularitas ini membuat PMII menjauh dari ciri khasnya, sebagai organisasi mahasiswa yang islami. Pola ini membuat kader berpikir bahwa semua agama itu sama. Urusan agama tidak perlu ditarik keruang publik, biarkan itu hidup dikamar-kamar pribadi. Akibatnya, kader PMII menjadi tidak berbeda dengan anggota LSM yang tidak berlandaskan pada nilai-nilai agama, hanya berbasis isu. Kader PMII fokus pada konstruksi keyakinan, bahwa ibadah sosial lebih utama ketimbang ibadah pribadi (memang ada dalilnya, shoheh. Tetapi jangan lupa, Rasul dan Para Sahabat tidak pernah meninggalkan sholat). Akibatnya, ketika sedang diskusi atau rapat dan terdengar suara adzan, hingga adzan berikutnya tidak beranjak untuk sholat. Hal-hal seperti inilah yang ingin kita hilangkan melalui kaderisasi yang kita rancang dengan menguatkan aspek religiusitas.

Keempat, Fikroh Ghorbiyah (Liberalisasi pemikiran). Di atas telah sedikit saya paparkan mewabahnya liberasi pemikiran yang langsung berdampak pada perilaku kader. Parahnya, hari ini tidak lagi terjadi liberasi pemikiran, tetapi langsung mewabah pada liberasi perilaku. Bagaimana bisa? Ya. perilakunya "seolah-olah", tetapi wacananya tidak ada. Jarang baca buku dan diskusi – cuma bergaya bunuh diri kelas. Akibat dari gaya-gayaan yang seperti ini, kader merasa dirinya sebagai individu yang merdeka, sebagai yang subyek otonom. Tidak merasa ada keterikatan batin, tidak ada keterikatan institusional kepada korps. Seolah berada dalam ruang "ideal", seolah-olah paling "objektif". Akbatnya, ketika ada sesuatu yang dianggap salah dilingkungan internal, sekalipun itu adalah terkait dengan kepentingan korps, hajar! Bahkan lebih keras dari yang bukan PMII. Ingin mendapatkan "karakter" kader obyektif. Ini salah sahabat! Jika posisi anda hanya sebatas anggota, mungkin masih bisa di maklumi. Tetapi sebagai kader harus punya sikap "memihak".

Saya sering tanyakan kepada peserta PKD/PKL yang saya dampingi. Jika ada rektor di kampus Muhammadiyah bilang, selain IMM, haram hukumnya ada organisasi ekstra kampus. Pernyataan rektor ini benar atau salah? Kebanyakan bilang salah. Lalu bagaimana sebaliknya, Jika ada rektor di kampus NU bilang, selain PMII, haram hukumnya ada organisasi ekstra kampus. Pernyataan rektor ini benar atau salah? Pun kebanyakan bilang salah. Sekalipun agak sedikit ragu untuk bilang salah. Lalu saya tanya

kembali, kenapa salah? Karena kebanyakan kader PMII biasanya sangat uforia terhadap kebebasan berorganisasi, jawabnya karena larangan itu melanggar UUD ‘45. UUD menjamin kebebasan warga negara untuk berorganisasi dan berserikat. Yap! Jawaban cerdas. Minimal, tergambar bahwa kader kita tidak buta konstitusi.

Lalu saya sampaikan kepada mereka, ini adalah pelatihan kader. Selepas ini, anda akan menjadi seorang kader. Ingat! Seorang kader tidak berdiri diruang hampa tanpa nilai. Dia harus memiliki keberpihakan nilai. Minimal berpihak kepada korps. Ciri utama cara pikir, cara pandang dan cara bersikap seorang kader adalah memiliki standard ganda. Nah dalam menjalankan standars ganda ini dosisnya berbeda-beda, silahkan anda pilih dosis yang sesuai. Minimal diam dan tidak menambah masalah ketika ada kesalahan institusional oleh pengurus yang khilaf.

Kembali pada pertanyaan di atas, jawaban yang tepat sebagai seorang kader adalah, rektor kampus NU benar dan rektor kampus Muhammadiyah salah! Kenapa? Kita punya kewajiban menjaga kampus-kampus NU sebagai basis kaderisasi PMII, basis penyemaian kader-kader ahlussunnah wal jamaah. Maka kampus NU harus menjadi basis PMII. Karena kita juga punya tanggung jawab institusi untuk mengembangkan PMII di seluruh kampus, maka di kampus muhammadiyah pun harus ada komisariat PMII.

Ini yang dalam model kaderisasi Tawassuth kita kenal dengan Fikroh Nahdiyyah. Memiliki pandangan dan pemikiran yang “memihak” kepentingan korps. Sadar sebagai Individu (kader) adalah bagian dari jam’iyyah yang tidak bisa terpisahkan. Karenanya, tindak tanduk kader harus mengarah pada nilai-nilai organisasi dan berorientasi pada tujuan organisasi. Harus ada pendekatan yang baik dalam melakukan “kritik” kepada presiden BEM kader PMII, jangan menggunakan cara seperti oposisi. Nanti kompetitor akan menertawakan kita. Kedepan, perlahan tapi pasti, kita akan merebut semua kepemimpinan BEM di kampus-kampus. Kaderisasi dengan model ini akan mematangkan kita, bagaimana mengelola kekuasaan dan menjadi pemenang, tidak hanya terus menerus menjadi oposisi. Mengkritik tak berarah.

Saya ingin sedikit memberikan contoh, sebagai renungan. Jelang pemilu 2014 lalu, PKS “hancur” karena presidennya “dibuikan” oleh KPK. Selama ini media massa menggembar-gemborkan bahwa PKS adalah partai yang bersih, partai dakwah. Ketika itu terjadi, tidak hanya pimpinan dipartai itu, sampai ke massa pendukungnya menjalankan propaganda bahwa PKS didzolimi. Bagaimana jika hal yang sama terjadi pada pemimpin partai dari alumni kader kita?

Cerita yang lain, penting untuk kita renungi bersama terkait menumbuhkan jiwa korsa kita sebagai kader. Aktualisasi diri mencintai korps. Ketika sidang tipikor akan dibuka, untuk mengadili AU (mantan ketum PD dan juga mantan ketum HMI), puluhan kader HMI yang sejak awal ada di ruang sidang berdiri dan serentak menyanyikan mars HMI. Dengan *gersture* yang agak terkejut, sambil menoleh kebelakang dan berdiri (ikut bernyanyi), AU

terlihat menengadahkan kepalanya, seraya menahan haru dan menahan tetesan air mata yang mulai berkaca. Hari itu adalah hari dia akan menerima putusan dakwah atas tindak korupsi dari majelis hakim, putusan yang akan mengganjarnya, menghukumnya secara pribadi dan menghukum komunitasnya (HMI), karena pengadilan media sosial atau media massa, selalu mengait-ngaitkan predikatnya dimasa lalu sesuai CV. Bagaimana jika hal yang sama terjadi pada pemimpin partai, mantan menteri atau pejabat lainnya dari alumni kita?

Kesadaran diri sebagai Individu (kader) adalah bagian dari jam'iyyah, harus terpola secara kolektif yang mengikat jiwa-jiwa kita. Inilah kami wahai Indonesia, Satu barisan dan satu cita! Satu angkatan dan satu jiwa! Kalaupun ada permasalahan hukum yang menjerat senior kita, bukan kapasitas kita untuk melawan hukum, bukan langkah kita juga untuk membela "kesalahan", tetapi memberikan dukungan moral kepada siapapun kader dan alumni kita yang terjerat kasus hukum adalah bagian dari semangat kolektifitas kita sebagai satu korp. Sebelum ada putusan, asas praduga tak bersalah harus dikedepankan. Sekalipun kemudian terbukti, pun tidak kemudian menghilangkan rasa kemanusiaan dan jiwa korsa kita sebagai kader. Datangi, jenguk.

Kelima, independensi. Sepintas kata ini mengingatkan kita pada penggalan sejarah PMII (1973) yang sangat fenomenal dan masih terasa "rasanya" bahkan hingga hari ini. Penggalan sejarah sesudahnya yang mengusung interdependensi pun tidak mampu menghalau "rasa" itu. Ya, itu sejarah PMII – NU dalam ruang struktural. Namun, independensi yang dimaksud disini adalah independensi kader dan struktur di PMII yang tidak patuh kepada pimpinan. Kenapa? Karena nalar berpikirnya tidak mau memahami anatomi PMII sebagai organisasi kader yang memiliki pola instruktif. Jika menjadi PC, seolah-olah urusannya hanya terkait dengan program kerja cabang. Tanpa harus pusing dengan urusan Komisariat, apalagi urusan Rayon. Tidak perduli dengan instruktsi Koorcab, apalagi instruksi PB. Dengan model kaderisasi tawassuth, hal seperti ini akan kita benahi. Struktur di bawah harus Percaya terhadap Otoritas kepemimpinan dan institusi di atasnya.

Di awal periode PB 2014-2016, dengan beragam kebijakan yang telah kami buat dan perlahan kami terapkan, banyak PKC dan PC yang ragu untuk mematuhi. Bahkan tidak sedikit yang mengkritik dan melawan – PB telah inkonstitusional. Terlepas dari hal itu, PB PMII melakukan agenda konsolidasi nasional dan sosialisasi kebijakan per region. Semua struktur yang ragu, kita yakinkan bahwa tidak ada pelanggaran konstitusi, tidak ada pelanggaran ADRT. Apalagi pelanggaran PO. Justru kebijakan ini semua kami rumuskan berdasarkan ADRT dan PO yang masih sangat umum, kita buat kebijakannya yang lebih detail.

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Saya ingin juga menjelaskan disini dengan gamblang, bahwa selama kami membuat, meracik, merumuskan dan menetapkan segala kebijakan PB, selalu kami "*membongkar-bongkar*" ADRT dan PO. Bukan hanya untuk

menghindari pelanggaran konstitusional organisasi yang selama ini dituduhkan, tetapi juga untuk mencari "*cantelan*" kebijakan tersebut. Juga untuk sahabat-sahabat pahami, semua itu melalui perdebatan yang panjang dan panas dingin. Sesuatu yang dahulu mungkin sulit, tetapi ternyata bisa. Bagaimana bisa? Karena diawal kami telah melakukan orientasi PB. Semua BPH sudah menyamakan frekuensi sebagai PB, sudah menyamakan cara pandang, cara pikir dan cara bersikap terhadap permasalahan yang ada, *solution oriented!*

Keenam, otonom/desentralisasi. Pada pembahasan terdahulu, sudah saya paparkan terkait dengan masalah pemaknaan pengurus dilevel Rayon, Komisariat, Cabang merasa otonom dalam menjalankan roda keorganisasian (baca: pemetaan masalah dan langkah solusi PB PMII). Hal ini menjadi fatal, ketika pengurus tersebut memaknai posisinya dengan maraknya uforia otonomi daerah yang langsung mereka rasakan. Parahnya lagi, jika di daerahnya ternyata bupati/walikotanya tidak "nyambung" dengan gubernur karena berbeda partai, dll. Mereka menganalogikan pula dengan ketidak nyambungan PC dengan PKC karena perbedaan dukungan politik, bahkan mengkonsolidir PC yang lain (yang searah) agar bareng-bareng untuk tidak nyambung dengan PKC. Ini keliru.

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Gambaran di atas bisa dimaknai sebagai analogi, tetapi bisa juga bener-benar terjadi. Terlepas dari hal itu, dalam konteks kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan PMII, jika didaerah sahabat sudah ada pola kaderisasi yang sistemik. Yang sudah berjalan turun temurun, sudah membudaya, dan itu baik untuk penguatan kaderisasi, lanjutkan! Tetapi, jangan mengacuhkan skema, pola dan model yang menjadi ketetapan PB. Sekali lagi saya pertegas, saat ini jenjang kaderisasi formal kita ada Mapaba, PKD dan PKL. Dalam konteks kaderisasi formal, pengesahan untuk menjadi anggota Mu'takid, menjadi kader Mujahid dan kader Mujtahid selalu dengan mekanisme pembaiatan. Tahapan ini sudah paten, dan menjadi bagian utuh dari sistem kaderisasi dan kepemimpinan organisasi yang Terpusat. Jika tidak ada pembaiatan, kaderisasi itu tidak sah.

Ketujuh, Demokrasi dan partisipasi. Tidak ada yang salah dengan kedua hal ini, jika penempatannya tepat. Yaitu dalam konteks berbangsa dan bernegara. Ya, kita (PMII dan NU) menjadi aktor utama dalam mendorong demokratisasi di negeri ini (reformasi 1998). Tengok sejarah, bagaimana NU dibawah kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) mendorong kekuatan *civil society* bersatu melawan rezim orde baru yang sudah sangat korup, otoriter dan subversif terhadap rakyat. Dalam konteks ini, kita harus terus mengawal demokratisasi yang sudah berjalan dengan perbaikan-perbaikan, hingga mencapai demokrasi yang substantif.

Tetapi, demokrasi dan partisipasi dalam konteks berPMII tentu berbeda. Sudut pandang, keberpihakan dan *organization interest* harus menjadi titik tolak, menjadi pijakan untuk memastikan langkah-langkah strategis organisasi ini tidak rusak justru karena demokrasi dan partisipasi. Tengok contoh bagaimana pelajaran dari PD dan PKS dalam

menyelesaikan masalah yang sama. Dalam waktu yang tidak berjauhan, kedua partai ini mengalami masalah yang sama. Pemimpinnya di ciduk KPK, menjadi tersangka korupsi. Menghadapi hal tersebut, PD harus menyelenggarakan Kongres Luar biasa, persiapannya lama, biayanya mahal. Dan, karena terjadi dinamika politik yang luar biasa diinternal partai, atas nama untuk "menyelamatkan" partai, ketua dewan pembina harus turun gunung menjadi ketua umum. PKS, dalam waktu singkat dan tanpa "ribut-ribut" sudah punya pengganti (Sekjen Anis Matta didaulat menjadi presiden partai). Efektif. Mereka memiliki sistem demokrasinya sendiri.

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Sistem hierarki dan efektifitas perintah yang dipakai PKS hari ini adalah sistem yang pernah dipakai NU dahulu. Contoh diatas bukan seolah kita mau mencontek PKS, tetapi kita harus kembali menggunakan sistem tertutup. Sistem yang tepat diruang demokratisasi yang sudah terbuka lebar. Kok menggunakan contoh partai? Memang PMII sejajar dengan partai? Bukan partainya, tapi sistemnya! Besar kecilnya partai toh mereka juga organisasi. Dan PMII adalah organisasi yang besar, anak kandung NU.

Ketika demokrasi ditutup oleh rezim otoriter orde baru, Gusdur membukanya dengan perlawanan *civil society* – mendorong demokratisasi. Tetapi, ketika demokrasi sudah terbuka lebar, maka pola organisasi kita harus tertutup. Pada poin ini, saya berharap sahabat-sahabat bisa bekerjasama memastikan bahwa agenda demokratisasi dan partisipasi harus kita dorong terus diruang publik. Tetapi diruang internal organisasi, untuk mengefektifkan PMII, patuhi sistem hierarki dan efektifitas perintah dari struktur di atas.

Pada awal periode kami, PB mengawal Konkorcab PKC Kaltim, Banten dan Papua. Ketiganya bisa selesai dengan mufakat. Selama ini biasanya ribut. Bahkan banyak senior yang bilang, itu sejarah baru. Karena selama ini, Konkorcab tidak pernah ada agenda penutupan. Apalagi serah terima inventaris organisasi dari ketua demisioner ke ketua terpilih. Kenapa bisa? Karena kita sudah punya aturan baru terkait dengan strategi rekruitmen kepemimpinan, kandidat yang mencalonkan harus sesuai aturan (syarat dan prasyaratnya). Lebih jauh akan saya bahas pada bab selanjutnya. Masalahnya ketika itu adalah, kandidat yang muncul tidak sesuai dengan aturan. Kami tegaskan, jika terpilih ketua yang tidak sesuai aturan, tidak akan ada SK kepengurusan dari PB. Semua PC kami "paksa" mencari alternatif kandidat yang sesuai aturan dengan mufakat. Alhamdulillah, bisa.

Dalam satu kesempatan, kami (saya, Ketum, Sekjen dan Sahabat kaka) berbincang dengan Sahabat Heri Haryanto Azzumi (Ketum PB 2005-2007) dan menyampaikan hal tersebut. Ada pernyataan yang menarik dari beliau, "Mufakat dalam mengambil keputusan, adalah bukti kedewasaan berorganisasi". Ya. saya ingin mengajak kita semua untuk menginternalisasi PMII. Sebagai kader, dengan berjalannya waktu, mungkin sahabat baru beberapa tahun ber PMII, tapi sahabat harus sudah mendalami PMII

sebagai organisasi yang sudah 56 tahun. Sebagai kader, sahabat harus memiliki pandangan selayaknya telah berorganisasi selama 56 tahun itu. Ini tantangan kita. Mari kita jawab! Banyak baca, diskusi, pelajari dan pahami sejarah kita.

Kedelapan, Egalitarianisme. Ketika dahulu saya ikut Mapaba, senior-senior dengan tegas menyatakan bahwa di PMII, tidak ada istilah senior-junior, tidak ada istilah kanda-dinda. Disini kita semua sama. Karenanya, kita menggunakan istilah “sahabat”. PMII – egaliter. Dalam kesempatan yang berbeda, dalam ruang kaderisasi pula, ketika saya mengawal Mapaba dengan pemateri yang berbeda dengan yang sebelumnya, dikatakan bahwa istilah sahabat kita gunakan untuk memastikan bahwa kita adalah generasi muda pewaris ajaran Rasulullah. Secara tidak langsung, sekalipun kita hidup dizaman yang berbeda dengan Rasul dan para sahabat rasul, istilah sahabat bagi PMII menjadi spirit dari faham ahlussunnah wal jamaah yang kita anut sebagai bagian dari “ketersambungan” kita dengan Rasul SAW. Itu semangatnya.

Pemaknaan yang lain, terkait dengan pola egalitarianisme yang pernah sahabat-sahabat temui diruang kaderisasi bisa saja berbeda dengan yang saya dapati. Tetapi intinya, egalitarianisme selama ini menjadi bagian tidak terpisahkan dalam doktrin kaderisasi kita dimaknai sebagai kesetaraan.

Ada yang salah dengan egalitarianisme? Tidak juga. Lagi-lagi, saya ingin mengajak kita semua memaknai semua doktrin yang pernah kita dapat, diposisikan dalam ruang yang tepat. Bukan dengan serta merta menggesernya, menghilangkannya. Ketika duduk bersama nelayan, petani dan buruh, bicara pendampingan dan advokasi, tentu kita harus duduk dan berdiri sejajar dengan mereka, bukan sok pintar dan sok tinggi. Bahkan harusnya lebih rendah, untuk memahami permasalahan yang ada, kita belajar dengan mereka untuk membangun sinergi. Bagaimana mensinergikan potensi yang kita miliki untuk sama-sama berjuang.

Dalam ruang yang berbeda, tidak hanya duduk bersama dengan OKP-OKP lain, dengan KNPI sekalipun, kita harus bangun kesejajaran. Kenapa? Karena PMII adalah pendiri KNPI. Dibeberapa tempat seolah KNPI menjadi struktur di atas PMII, ini salah. Sekalipun dalam perkembangannya, untuk memilih ketua KNPI suara PMII disamakan dengan suara OKP lainnya. Bahkan OKP – OTB (organisasi tanpa bentuk – punya perlengkapan administrasi organisasi, tapi tidak ada kaderisasi. Aktivitasnya hanya dari musda ke musda). Parah! KNPI tidak menjadi bagian dari skema dan design kaderisasi kita, tetapi karena akhir-akhir ini gandrung otonomi daerah dan senior di PMII juga iseng terlibat didalamnya, saya akan singgung sedikit. Ya, dibeberapa daerah, karena bupatinya masih muda, bupati juga merangkap sebagai ketua KNPI. Ada juga yang ketua DPRD, anak bupati, anak walikota, anak gubernur, ada juga pengusaha lokal yang sukses, dst. Aneh. Hal ini pula yang akhirnya membangun stigma bahwa KNPI itu bergengsi, apalagi masih kental stigma warisan orde baru terkait dengan KNPI.

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Terkait dengan hal ini, saya ingin mengajak kita semua yang masih suka ber KNPI setelah ber PMII (jangan doeble job). Pertama, pastikan tidak mengganggu konsolidasi PMII hanya untuk kepentingan KNPI. Jangan terlalu serius ber KNPI, karena ruang ideologis kita adalah di PMII. Kedua, pastikan posisi PMII berbeda dengan OPK lain, apalagi dengan OKP – OTB. Ya, karena kita punya sejarah. Jika mau memiliki agenda ideologis di KNPI, ini agendanya.

Kembali pada pembahasan egalitarianisme. Lagi-lagi, dalam konteks berPMII, kita harus tunduk pada otoritas keilmuan Ulama dan pemimpin (tidak ada kesejajaran antara PMII dengan Nahdlatul Ulama). Ketika ada permasalahan yang harus di sikapi, PB PMII selalu menungu signal dari PBNU. Jika belum ada signal, kami bertanya. Izin menghadap. Jangan mentang-mentang! Merasa PMII hari ini independen dan tidak dibawah struktur NU, ketika dikumpulkan oleh bupati/walikota/gubernur terkait dengan urusan keormasan di daerah, PC PMII bertemu dengan PCNU di forum yang sama, merasa sejajar. Suul adab. Ya, secara tidak langsung, urusan-urusan eksternal juga mempengaruhi kita. Pihak luar mengkondisikan PMII seolah sejajar dengan NU. Ini tantangan kita, jika terlena dan tidak sadar diri, bisa celaka kita. Selanjutnya, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, PMII harus tunduk pada otoritas pemimpin dan kepemimpinan.

Kesembilan, pola Independensi dan transparansi kita tarik menjadi pola tertutup dan terpimpin. Bagian ini sudah panjang lebar saya singgung, dalam membangun sistem kaderisasi tertutup dan terpimpin, tentu tidak perlu saya ulas kembali. Intinya, dalam membangun Model kaderisasi tawassuth, dari table di atas, kita akan kembali tarik model kaderisasi kita yang selama ini berada di table sebelah kanan ke sebelah kiri. Dengan uraian yang sudah saya paparkan sejak awal catatan ini, kemudian masuk pada tawaran revolusi organisasi, pasti akan banyak muncul pertanyaan, perdebatan, bahkan penentangan. Ada yang setuju, atau lebih banyak yang tidak setuju, tentu itu adalah hal yang sangat wajar. Lalu, apa urgensinya dalam membangun sistem dan model kaderisasi tersebut untuk mendorong revolusi organisasi ini?

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin berputar-putar dulu. Kita pasti ingin PMII menjadi organisasi yang kuat dan besar, organisasi yang efektif mencapai tujuan. Iya gak??? Ya iya lah... Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana syarat menjadi organisasi yang kuat dan besar? Bagaimana syarat menjadi organisasi yang efektif mencapai tujuan? Apakah ada organisasi yang kuat dan besar, apakah ada contoh konkrit organisasi yang efektif mencapai tujuannya? Bukan sekedar dongeng belaka?! Kalau ada, lalu organisasi seperti apa itu?

Tentu dengan mudah dapat kita katakan contoh kongkrit dari organisasi yang besar, kuat, efektif mencapai tujuannya yaitu di Eropa ada Vatikan, di Asia ada partai komunis china dan disetiap negara ada militer. Ya, militer. Mereka memiliki prasyarat untuk itu semua. Sederhananya, jika ada fatwa (instruksi) dari vatikan untuk satu hal tertentu, maka semua

umat katholik se dunia akan patuh. Begitu juga di Partai Komunis China, jika sudah ada ketentuan dari Sekjen Partai, maka itu akan menjadi pedoman bagi seluruh kader. Di China, hanya ada 1 juta kader inti, tetapi mereka bisa menggerakan 1 Milyar penduduk, bahkan yang tersebar diseluruh dunia, tidak hanya yang tinggal di daratan china. Semakin tinggi kompetensi kader, semakin luas jangkauan pengaruhnya. Dimiliter, tentu tidak perlu penjelasan panjang lebar, karena garis komandonya clear. Kepatuhan terhadap pemimpin menjadi kunci utama. A kata jendral, maka A bagi seluruh prajurit. Jadi, revolusi organisasi dengan mendorong model kaderisasi tawassuth, langkah strategisnya adalah upaya untuk menjadikan PMII menjadi organisasi yang besar, yang kuat dan efektif mencapai tujuan organisasi. Sehingga pelaksanaan kaderisasinya harus tertutup dan terpimpin.

Jika selama ini kita merusak PMII dengan pikiran bodoh, bahwa kita tidak disiplin karena kita bukan militer, kita tidak tertib dan militan karena kita bukan komunis/ekstrimis, bahkan kita tidak taat kepada pimpinan agama karena kita bukan katholik, semua itu adalah statemen bodoh. Harus kita balik! Justru karena kita PMII, maka kita harus lebih disiplin dari militer! Justru karena kita PMII, maka kita harus lebih tertib, lebih militan dari kader komunis apalagi ekstrimis! Justru karena kita PMII, generasi NU, maka kita harus lebih taat dari umat katholik/Vatikan! Fakta menarik dari pemetaan umat Islam dan nasrani di negeri ini adalah, missionaris Katholik lebih mampu bertahan dan menjalankan tugasnya hingga ke pelosok daerah-daerah pedalaman, pegunungan. Sedangkan persebaran umat Islam lemah dipelosok, hanya berkembang di daerah pesisir. Kedepan, kita butuh kader-kader militan yang siap mensyiarkan Islam ahlussunnah wal jamaah hingga kepelosok tanah air, dan kader-kader militan itu akan lahir dari model kaderisasi tawassuth ini. Semoga Allah meridhoi kita, Al-fatihaa... Aminnn...

3. MEMBANGUN SISTEM REKRUITMEN KEPEMIMPINAN PMII

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Bicara Kaderisasi tentu tidak lepas dengan agenda regenerasi kepemimpinan. Di atas telah kita bahas panjang lebar bagaimana target taktis dari jenjang kaderisasi formal PMII adalah untuk memfilter regenerasi kepemimpinan disetiap jenjang kepengurusan. Saya juga sudah sedikit singgung bagaimana polemik terjadi ketika PB PMII mendorong kebijakan terkait dengan strategi rekruitmen kepemimpinan dengan berbagai macam syarat dan prasyaratnya. Lalu untuk apa poin ini ditulis? Untuk mengulang-ulang? Tentu tidak!

Pada bahasan ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat untuk memahami strategi rekruitmen kepemimpinan di PB PMII terutama dalam konteks Memilih Ketua Umum PB PMII. Selama ini, pola yang ada adalah memilih bakal calon menjadi calon (putaran pertama) dengan syarat yang ditentukan oleh forum kongres, 20-30 suara. Kandidat yang lolos pada putaran kedua telah sah menjadi calon. Untuk membuktikan komitmennya, setiap pemilik suara diharuskan memberikan pasword atas komitmen dukungannya

terhadap salah satu kandidat. Sebelumnya, bakal calon harus dipastikan mendapatkan rekomendasi dari cabang asal. Syarat administrasi selanjutnya adalah menyerahkan sertifikat PKL, sebagai bukti kader Mujtahid. Semuanya dilakukan dalam forum kongres. *Crowded*. Jika dikemudian hari terjadi “masalah” karena ketidakpuasan, gugat. Itu yang terjadi selama ini.

Lalu revolusi organisasi macam apa terkait dengan pemilihan ketua umum PB PMII pada kongres mendatang dengan berbagai kebijakan PB hari ini? Sebelum masuk dalam pembahasan menjawab pertanyaan tersebut, saya akan banyak mengulas PO yang sudah kita sepakati terkait dengan Badan Pekerja Kongres dan pemilihan ketua umum.

Pada minggu kedua bulan Ramadhan 2016 ini, Pleno PB PMII telah membentuk Badan Pekerja Kongres, ada lima orang badan pekerja kongres yang kemudian dipilih dan ditetapkan. Mewakili zona Sumatera ada Sahabat Syarif Susanto, Zona Kalimantan ada Sahabat Ahmad Miftahul Karomah, Zona Jawa-Bali ada Sahabat Bambang Tri Anggono, Zona Nusa Tenggara-Sulawesi ada Sahabat Mumunk dan Zona Maluku-Papua ada Sahabat Nina. Hal ini sudah sesuai dengan Bab II ketentuan Badan Pekerja Kongres.

Di dalam Keputusan Muspimnas Nomor : 18/MUSPIMNAS/2015 menetapkan Peraturan Organisasi Tentang Badan Pekerja Kongres (BPK). PO ini mengatur tugas badan pekerja kongres secara detail. Selama ini tugas BPK hanya terkait dengan tempat pelaksanaan kongres, yaitu Memverifikasi Tempat Kongres berdasarkan rekomendasi MUSPIMNAS dan melaporkannya kepada Pleno BPH PMII. Berdasarkan PO terbaru ini, tugas BPK lebih banyak dan terkait dengan strategi rekruitmen ketua umum PB PMII dan KOPRI PB PMII kedepan. Yaitu mempersiapkan tahapan-tahapan dalam proses rekruitmen Calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII, diantaranya adalah:

1. Menetapkan tata cara dan proses *recruitment* Calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII.
2. Menetapkan Bakal Calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII.
3. Menetapkan Calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII.
4. Menetapkan nomor urut Calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII.

Dalam PO ini, proses kandidat ketua umum dari bakal calon dan menjadi calon hingga ada penetapan nomor urut ditetapkan oleh BPK. Sebuah sumbangsih perubahan sistem yang luar biasa dari periode kami. Mungkinkah ini bisa terlaksana? Dengan semangat menjalankan roda organisasi ini sesuai peraturan yang ada, dan dukungan semua pihak (PC, PKC maupun para alumni, insyaallah semua akan berjalan dengan baik dan lancar). Bagaimana teknisnya?

Sahabat-sahabat yang militant dan progresif! Dalam implementasi sebuah kebijakan tentu dengan tuntas tentu diperlukan penjelasan tentang tahapan-tahapan (juklak/juknis). PO ini juga mengatur tahapan-tahapan tersebut dengan detail. Pertama,

dalam menetapkan bakal calon ketua umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII, BPK membuka stand pendaftaran di sekretariat PB PMII. Selanjutnya, BPK melakukan verifikasi berkas para bakal calon, diantaranya adalah:

1. Form pendaftaran.
2. Surat pernyataan bermaterai untuk mengikuti tahapan-tahapan jelang kongres (debat kandidat) diberbagai kampus.
3. Jika tidak dapat mengikuti debat kandidat, Badan Pekerja Kongres berhak untuk menggugurkan pencalonannya.
4. Mendapatkan Rekomendasi 3 Pengurus Cabang yang dibagi secara proporsional berdasarkan Zona yang terdiri dari:
   a. Zona I adalah Wilayah Sumatera dan Kalimantan
   b. Zona II adalah Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara
   c. Zona III adalah Sulawesi, Maluku dan Papua.
5. Membuat artikel/makalah terkait dengan visi dan misi calon ketua umum.

Aturan ini adalah refleksi kita terkait dengan pola yang ada selama ini. Mohon maaf, selama ini ada kandidat yang "iseng" tidak serius. Kita pahami politicking PMII memang lebih mamanas di tingkat cabang, kenapa sering kali konfercab "ribut" jika pelaksaannya jelang kongres, jika ketua cabang terpilih nanti akan mengikuti kongres? Karena selama ini untuk bisa menjadi kandidat hanya perlu rekomendasi dari cabang asal. Jadi tidak heran dalam arena kongres ada kandidat iseng yang hanya memiliki 1 suara dukungan bisa berdinamika di kongres PMII yang memiliki 228 cabang (data kongres Jambi 2014 lalu). Ini lucu.

Dengan PO terbaru, kandidat harus mendapatkan rekomendasi dari 3 cabang yang tersebar di 3 zona, dengan atau tanpa rekomendasi cabang asal. Kenapa? Sudah panjang lebar saya paparkan didepan bahwa semua agenda PMII harus menjadi bagian konsolidasi organisasi, jangan malah membuka peluang perpecahan. Rekomendasi cabang asal secara emosional *conflic of interest* antar "kandidat" lebih tinggi ketimbang rekomendasi cabang di 3 zona. Selain itu, ini juga untuk membedakan kongres sebagai agenda kongres dengan agenda konkorcab. Bahwa yang akan terpilih dalam kongres adalah pemimpin dilevel nasional, PB. Maka jangkauan kandidat harus sudah lintas pulau, sehingga ketika terpilih nanti sudah tidak canggung, bingung. Sungguh menjadi tidak adil bagi kader yang kompeten, memiliki jaringan silaturahim lintas cabang, lintas pulau, tetapi tidak bisa menjadi kandidat karena tidak ada rekomendasi cabang asal.

Selama ini kita tegas berkata bahwa PMII adalah organisasi kaum intelektual. Tentu kita wajib mempertanggung jawabkan hal itu. Apa wujud pertanggung jawaban sebagai kaum intelektual? Menulis! Ya, hanya di kampus kita bisa lulus jika sudah menulis Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi. Menulis adalah bagian dari tanggungjawab intelektual. Sejak berPMII, saya telah mengikuti 3 kali agenda kongres, di Batam, Kalsel dan Jambi. Ada kandidat yang membuat buku yang disebar di kongres, isinya terkait dengan profil

pribadi, visi misi, dll. Tetapi ada juga yang tidak membuat. Kenapa? Karena memang tidak ada aturan untuk itu. Sehinga secara nalar intelektual, kita kesulitan untuk menakar setinggi apa kualitas intelektual kandidat ketua umum kita. Dalam PO ini kakndidat diwajibkan membuat artikel/makalah terkait dengan visi dan misi calon ketua umum. Setidaknya, ada aturan untuk mempertanggung jawabkan identitas intelektual tersebut.

Lalu, yang tidak kalah penting semangat dalam PO tersebut adalah membumikan PMII dan kandidat ketua umum kekampus. Selama ini kongres PMII yang berbasis mahasiswa cenderung sangat elitis. Jauh dari kampus. Mengapa? Karena memang pemilik suara sudah bukan lagi struktur yang secara langsung bersentuhan dengan kampus, bukan pengurus komisariat. Dalam PO ini kita mengatur adanya debat kandidat yang dilaksanakan di kampus, sehingga kongres PMII kedepan akan juga menjadi bagian dari kampanye PMII dikampus-kampus, membumikan PMII di kampus, menyemarakkan agenda PMII dikampus. Merebut kembali otoritas organisasi kemahasiswaan di kampus. Untuk memastikan hal itu, ada klausul bahwa kandidat harus membuat Surat pernyataan bermaterai untuk mengikuti tahapan-tahapan jelang kongres (debat kandidat) diberbagai kampus yang ditetapkan oleh BPK, tentunya dengan mempertimbangkan pembagian zona yang ada. Jika tidak dapat mengikuti debat kandidat, BPK berhak untuk menggugurkan pencalonannya. Insyaallah kedepan tidak ada lagi kandidat iseng-iseng bisa berdinamika di kongres.

Selanjutnya, dalam menetapkan nomor urut Calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII, BPK mengundang seluruh kandidat yang memenuhi persyaratan untuk bersama-sama mengundi nomor urut, yang selanjutnya akan menjadi atribut kampanye masing-masing kandidat. Kemudian secara teknis BPK Membuat forum debat kandidat calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII, minimal di 3 tempat yang dibagi secara proporsional berdasarkan Zona Rekomendasi. Tempat debat kandidat yang dimaksud adalah Universitas atau Perguruan Tinggi. BPK wajib melaporkan segala perkembangan atas tugas dan tanggung jawabnya di hadapan Pleno BPH PB PMII, 2 minggu sekali sejak dibentuk.
Tugas BPK berakhir setelah menetapkan nomor urut calon ketua umum PB PMII dan Ketua Kopri PB PMII. Penetapan nomor urut calon paling lambat 1 bulan sebelum kongres.

Setelah mengulas PO tentang BPK, kita kita masuk pada ulasan utama yaitu tentang PO Strategi Rekruitment Kepemimpinan yang ditetapkan dalam keputusan muspimnas Nomor : 04/MUSPIMNAS/2015. Pada PO ini dijelaskan bahwa Rekruitmen kepemimpinan pada level PB dilakukan oleh Badan Pekerja Kongres (BPK). BPK menjaring setiap Bakal Calon dan menetapkannya sebagai Calon Ketua Umum PB dan Calon Ketua KOPRI PB PMII. Penetapan Calon Ketua Umum PB PMII dan Calon Ketua KOPRI PB PMII oleh Badan Pekerja Kongres bersifat final dan mengikat. Calon ketua Umum PB dan ketua Kopri PB

dipilih dalam Kongres untuk kemudian ditetapkan sebagai Ketua Umum PB dan Ketua KOPRI PB PMII.

Lalu apa saja persyaratannya selain Form pendaftaran dan Surat pernyataan bermaterai seperti telah diatur dalam PO tentang BPK? Lebih detail dalam PO Strategi Rekruitment Kepemimpinan aturan itu dijabarkan, tidak hanya terkait dengan kandidat ketua umum dan ketua KOPRI PB saja, tetapi juga mengatur tentang BPH PB. Mengapa? Karena sebagai kader, kita pahami tentu ketua umum membutuhkan tim kerja untuk mencapai sukses capaian kepengurusan yang ada dalam kepemimpinannya, jadi sangat logis aturan ini ada. Kita akan pastikan bahwa kekuatan PB PMII selain dari personal kepemimpinannya, juga ada pada tim kerja yang solid. Seperti apa aturannya? Syarat-Syarat Menjadi Ketua Umum Dan Pengurus Besar:

1. Ketua Umum dan Badan Pengurus Harian Pengurus Besar (BPH PB) PMII minimal telah mengikuti kaderisasi formal Pelatihan Kader Lanjut dibuktikan dengan sertifikat kelulusan PKL, serta kaderisasi non formal Pelatihan Kader Nasional (PKN).
2. Pengurus Besar PMII selain unsur Ketua Umum dan BPH minimal telah mengikuti Pelatihan Kader Lanjut dan dibuktikan dengan sertifikat kelulusan PKL.
3. Ketua Umum dan BPH PB PMII maksimal berumur 30 tahun pada saat terpilih atau dibentuk.
4. Ketua Umum dan BPH PB PMII minimal sedang menjadi mahasiswa Pasca Sarjana (S2).
5. Selain BPH PB PMII, minimal telah menyelesaikan S1 dan belum mencapai 3 tahun terhitung semenjak dinyatakan lulus.
6. Ketua Umum dan seluruh Pengurus Besar minimal memiliki IPK 2.50 bagi fakultas eksakta
   (Kedokteran, Teknik, MIPA, Ilmu Komputer, Peternakan, Pertanian, Teknologi Pertanian,
   Kelautan dan Perikanan,) dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta pada saat S1.

Kira-kira, dengan aturan tersebut akan ada berkas yang harus dipersiapkan oleh kandidat ketika mendaftar ke BPK adalah copy sertifikat PKN, copy KTP, copy KRS dan transkrip nilai terbaru, sebagai bukti sedang S2 dengan IPK minimum sesuai dalam aturan.

Ribet?! Jelimet?! Ya! biasa, aturan baru yang akan diterapkan pasti akan dikatakan seperti itu. Bahkan akan dikritik bahkan di tolak, bukan karena suatu hal yang prinsipil, tetapi karena kandidat yang mau dicalonkan, mau diusung tidak memenuhi persyaratan. Taktis, pragmatis! Kita semua sepakat bahwa PMII adalah organisasi kemahasiswaan terbesar, kita juga pernah berjibaku suksesi kader pada pemilihan BEM dikampus. Mana yang lebih besar, BEM atau PMII? pasti jawaban kita adalah PMII, karena PMII bukan hanya menyatukan mahasiswa lintas jurusan, lintas fakultas dan lintas kampus, bahkan lintas wilayah. Kita memiliki pengurus cabang dari Merauke sampai Aceh. Lalu, jika PMII lebih besar, lebih keren, lebih bonafit dari BEM yang Cuma lintas jurusan dan lintas

fakultas, mengapa syarat IPK lebih kecil? Jika kita pahami bahwa aturan ini terlalu rendah, tolong nanti perbaiki. Sesuaikan. Artinya, sungguh tidak logis jika ada kader yang mengkritisi bahkan menolak aturan ini. Untuk PKN, sudah saya singgung sebelumnya. Pasti PB kedepan akan lebih baik, karena memiliki BPH yang sudah sama frekuensinya, sudah kuat ideologinya, sudah disiplin dan professional cara kerja dan berorganisasinya. Insyaallah...

PENUTUP

Sahabat-sahabat yang Militan dan progresif! Kaderisasi yang kita jalani hari ini bukan hanya sekedar menjadi prasyarat untuk menjadi pengurus di PMII yang berjenjang dengan berbagai level struktur diorganisasi kita, untuk menjadi Pengurus Rayon (PR), menjadi Pengurus Komisariat (PK), menjadi Pengurus Cabang (PC), menjadi Pengurus Koordinator Cabang (PKC) dan untuk menjadi Pengurus Besar (PB). Bukan sekedar untuk itu, Itu semua hanyalah capaian antara. Rencana kaderisasi jangka sangat pendek sekali. Taktis!

Kaderisasi PMII, juga bukan hanya untuk jamaah dan jamiyyah NU (mempersiapkan kader pemimpin di GP Ansor, Fatayat, NU, Muslimat dan pos-pos kepemimpinan nasional di negeri ini), tidak hanya untuk itu. Kaderisasi di PMII tidak juga hanya untuk kepentingan yang sangat strategis, yaitu untuk mempersiapkan kepemimpinan bangsa dan dunia. Rencana kaderisasi jangka sangat menegah sekali.

Tetapi kaderisasi di PMII juga untuk mencapai hal yang sangat strategi, yaitu untuk memastikan tahun 2026 nanti, ketika NU mencapai 100 tahun Islam ahlussunnah wal jamaah masih terus eksis di bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Kita mengawalnya dari kampus, dari kelas menengah yang tumbuh dan besar di kampus.

Untuk memastikan pada tahun 2045, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai 100 tahun Pancasila tetap kokoh sebagai perekat negeri ini dari Merauke sampai Sabang. Dimana ketika itu Kesejahteraan rakyat negeri ini sudah mencapai kemakmuran yang merata. Keadilan di tegakan. Seadil-adilnya! Semua rakyat cerdas dengan kemudahan akses terhadap pendidikan. Semua rakyat sehat dengan kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan. Negeri ini menjadi negeri yang *baldatun, toyibatun warobbun ghofur.* Dimana ketika itu pemimpin diberbagai sektor di negeri ini adalah kader PMII.

Dan juga untuk memastikan tahun 2060, ketika 100 tahun PMII kepemimpinan nasional dan dunia akan diwarnai dengan kepemimpinan PMII, dengan berbagai kebijakan yang bernapaskan Islam ahlussunnah wal jamaah. Islam yang rahmatan lil alamin.

Capaian-capaian taktis dan strategis itu pun akan mengilhami kader-kader kita selanjutnya, untuk terus menggelorakan kaderisasi PMII hingga 3060 dan hingga akhir zaman hingga kearah ini Rencana kaderisasi jangka panjang kita. Hngga kita terkumpul dihari akhir dalam

kelompok orang-orang yang beriman yang dinaungi oleh para alim ulama, para wali, para imam, para tabi'in-tabi'in, para tabi'in dan para sahabat yang di ridhoi Allah SWT, yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Sangat terang wasiat Hadrotussyaikh KH. Hasyim Asy'ari bagi kita semua. "Barangsiapa yang mengurusi NU maka dia aku anggap sebagai santriku. Dan barang siapa menjadi santriku maka aku do'akan khusnul khotimah sampai anak cucunya".

Kesana arah kaderisasi kita! Karenanya, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk terus mempertahankan ketololan yang selama ini menjangkit dan menjadi masalah bagi PMII kita. Rumusan solusi dari berbagai masalah yang telah kami upayakan menjawab berbagai masalah yang ada selama periode ini, mungkin belum maksimal menyelesaikan masalah yang sudah berurat dan berakar, dengan tempo yang terbatas. Besar harapan kami, PB periode selanjutnya dapat menindak lanjuti hal-hal yang masih tertinggal, bahkan mungkin belum tersentuh dengan beragam kebijakan kami pada periode ini.

Di muka kata pengantar, saya telah sampaikan,, pada buku yang di terbitkan Bidang Kaderisasi PKC Jawa Tengah 2010 silam, merekam beberapa permasalahan, dan hingga 2015 permasalahan itu masih ada. Melalui tulisan ini, dalam konteks penyelesaian masalah yang sangat singkat, secara pribadi saya sangat berharap dan optimis (semoga), paling lambat ditahun 2020 nanti, sudah tidak ada lagi permasalahan yang tertulis di buku itu, juga berbagai permasalahan yang telah kami sampaikan ditulisan ini. Semua sudah teratasi dengan sistem yang telah kita bangun hari ini. Apakah bisa? Tentu bisa! Pastinya, untuk mencapai semua itu dibutuhkan komitmen dan konsistensi semua pihak, baik kader, pengurus, alumni, dst.

Semoga catatan yang cuma catatan ini, CUMA CATATAN KADERISASI PMII Periode 2014-2016 dapat bermanfaat bagi semua pihak di PMII. Terima kasih.